

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas antara lain menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) dan untuk kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat.

WALIKOTA PADANG PANJANG



ADLY AMRAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang, yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**WALIKOTA PADANG PANJANG**
FADLY AMRAN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
LAPORAN KEUANGAN	
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
III. NERACA.....	4
IV. LAPORAN OPERASIONAL.....	7
V. LAPORAN ARUS KAS.....	9
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	12
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	13
A. Pendahuluan	13
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	13
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15
B. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	16
1. Ekonomi Makro.....	16
2. Kebijakan Keuangan Daerah.....	19
3. Pencapaian Target Kinerja APBD.....	29
C. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	33
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah	33
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	34
D. Kebijakan Akuntansi	35
1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	35
2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	37
3. Asumsi Dasar	37
4. Dasar Pengukuran dan Pengakuan Yang Mendasari Penyusunan Kesesuaian Kebijakan Akuntansi dengan PSAP	37
E. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan.....	45
1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran	45
2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	65
3. Penjelasan Akun-Akun Neraca.....	66
4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional.....	136
5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas.....	173
6. Penjelasan Akun-akun Perubahan Ekuitas.....	177
F. Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan.....	180
G. Penutup.....	182

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku (2015 – 2019)..... 17
Tabel 2	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi (2015 – 2019) 17
Tabel 3	Perbandingan antara Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) 2019 - 2020... 18
Tabel 4	Perubahan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang TA 2020 20
Tabel 5	Perubahan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga TA 2020 .. 23
Tabel 6	Perubahan Pembiayaan Daerah TA 2020 24
Tabel 7	Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA 2020..... 24
Tabel 8	Rincian Perubahan Refocusing dan Pergeseran Anggaran TA 2020..... 28
Tabel 9	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang 29
Tabel 10	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan TA 2020 30
Tabel 11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2020..... 32
Tabel 12	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2020..... 32
Tabel 13	Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2020 33
Tabel 14	Rincian dan Realisasi Pendapatan–LRA per SKPD TA 2020..... 33
Tabel 15	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja-LRA per OPD TA 2020 34
Tabel 16	Daftar Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020..... 46
Tabel 17	Target dan Realisasi Retribusi per Objek Tahun 2020 46
Tabel 18	Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2020 47
Tabel 19	Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2020..... 47
Tabel 20	Target dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2020..... 47
Tabel 21	Target dan Realisasi Laba dari Penyertaan Modal TA 2020 dan 2019..... 48
Tabel 22	Daftar Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020..... 48
Tabel 23	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2020 dan 2019 50
Tabel 24	Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya TA 2020 dan 2019..... 51
Tabel 25	Daftar Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS TA 2020 51
Tabel 26	Target dan Realisasi Belanja Operasi TA 2020 53
Tabel 27	Target dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020..... 53
Tabel 28	Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 54
Tabel 29	Target dan Realisasi Belanja Hibah TA 2020..... 57
Tabel 30	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 57
Tabel 31	Target dan Realisasi Belanja Modal TA 2020 58
Tabel 32	Target dan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 58
Tabel 33	Daftar Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 59
Tabel 34	Daftar Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 60
Tabel 35	Daftar Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 60
Tabel 36	Daftar Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020..... 61
Tabel 37	Daftar Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2020 .. 63
Tabel 38	Kas di Kas JKN per 31 Desember 2020 dan 2019..... 67
Tabel 39	Daftar Deposito Tahun Anggaran 2020-BPD..... 73
Tabel 40	Daftar Deposito Tahun Anggaran 2020-Bank Nagari Syariah 73
Tabel 41	Daftar Deposito Tahun Anggaran 2020-BRI..... 74
Tabel 42	Daftar Piutang Pajak TA 2020 dan 2019 74
Tabel 43	Rincian Piutang Pajak TA 2020..... 74

Tabel 44	Rincian Piutang Restoran.....	75
Tabel 45	Saldo Piutang Pajak Air Tanah TA 2020.....	77
Tabel 46	Rincian Saldo Pajak Bumi dan Bangunan	78
Tabel 47	Rincian Kualitas Piutang Pajak TA 2020	78
Tabel 48	Rincian Piutang Retribusi TA 2020.....	80
Tabel 49	Rincian Kualitas Piutang Retribusi TA 2020.....	82
Tabel 50	Rincian Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah	86
Tabel 51	Rincian Kualitas Piutang Lain-lain PAD yang sah.....	87
Tabel 52	Daftar Persediaan TA 2020.....	88
Tabel 53	Daftar Persediaan Vaksin pada Dinas Kesehatan TA 2020.....	92
Tabel 54	Penyertaan Modal pada PDAM TA 2020.....	97
Tabel 55	Penyertaan Modal pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar.....	99
Tabel 56	Perhitungan <i>Net Realizable Value</i> dari Piutang Usaha.....	100
Tabel 57	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2020.....	118
Tabel 58	TGR TA 2020 yang Sudah Dikeluarkan SK TJM.....	121
Tabel 59	Tanah yang Dipinjampakaikan TA 2020.....	129
Tabel 60	Peralatan dan Mesin yang Dipinjampakaikan TA 2020.....	130
Tabel 61	Bangunan yang Dipinjampakaikan TA 2020.....	131
Tabel 62	Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2020 dan 2019.....	137
Tabel 63	Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan LRA TA 2020.....	138
Tabel 64	Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2020 dan 2019.....	140
Tabel 65	Pendapatan Retribusi Daerah – LO dan LRA TA 2020.....	140
Tabel 66	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO TA 2020 dan 2019.....	143
Tabel 67	Lain-lain PAD yang Sah – LO dan LRA TA 2020.....	143
Tabel 68	Pendapatan Transfer – LO TA 2020 dan 2019.....	144
Tabel 69	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO TA 2020 dan 2019.....	146
Tabel 70	Dana Alokasi Khusus – LO TA 2020 dan 2019.....	148
Tabel 71	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO TA 2020 dan 2019.....	149
Tabel 72	Realisasi Beban – LO TA 2020 dan 2019.....	154
Tabel 73	Belanja Pegawai – LO TA 2020 dan 2019.....	155
Tabel 74	Belanja Pegawai – LO dan LRA TA 2020.....	155
Tabel 75	Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan 2019.....	156
Tabel 76	Rincian Beban Jasa Kantor TA 2020.....	157
Tabel 77	Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan 2019.....	163
Tabel 78	Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019.....	164
Tabel 79	Rincian Beban Hibah TA 2020 dan 2019.....	166
Tabel 80	Rincian Belanja – LRA dan Beban Hibah – LO TA 2020.....	166
Tabel 81	Beban Bantuan Sosial – LO TA 2020 dan 2019.....	169
Tabel 82	Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2020.....	170
Tabel 83	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2020 dan 2019.....	171
Tabel 84	Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2020.....	173
Tabel 85	Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2020.....	174
Tabel 86	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2020.....	175
Tabel 87	Penerimaan dan Pengeluaran PFK TA 2020.....	175
Tabel 88	Kenaikan Kas TA 2020.....	175

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rincian Realisasi Retribusi Daerah TA 2020
- Lampiran 2 Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2020
- Lampiran 3 Daftar Realisasi Belanja Pegawai Daerah TA 2020
- Lampiran 4 Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020
- Lampiran 5 Belanja Hibah
- Lampiran 6 Rincian Sisa Piutang Pajak Restoran Tahun Anggaran 2014 dan 2015
- Lampiran 7 Rincian Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – Dinas Pertanian
 - Lampiran 7.1 Rincian Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – Dinas Pertanian Tahun 2016
 - Lampiran 7.2 Rincian Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – Dinas Pertanian Tahun 2017
 - Lampiran 7.3 Rincian Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – Dinas Pertanian Tahun 2018
 - Lampiran 7.4 Rincian Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – Dinas Pertanian Tahun 2019
 - Lampiran 7.5 Rincian Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – Dinas Pertanian Tahun 2020
- Lampiran 8 Rincian Persediaan
 - Lampiran 8.1 Persediaan Alat Tulis Kantor
 - Lampiran 8.2 Persediaan Barang Cetak
 - Lampiran 8.3 Persediaan Peralatan Kebersihan
 - Lampiran 8.4 Persediaan Alat Listrik dan Elektronik
 - Lampiran 8.5 Persediaan Peralatan Perbenihan
 - Lampiran 8.6 Persediaan Bahan Bibit Ternak
 - Lampiran 8.7 Persediaan Bahan Bibit Tanaman
 - Lampiran 8.8 Persediaan Obat-obatan
 - Lampiran 8.9 Persediaan Alat Percontohan
 - Lampiran 8.10 Persediaan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
 - Lampiran 8.11 Persediaan Benda Pos (Perangko/Materai)
 - Lampiran 8.12 Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
 - Lampiran 8.13 Persediaan Logistik Bencana
- Lampiran 9 Tabel Masa Manfaat
- Lampiran 10 Pendapatan Pajak Reklame Diterima Dimuka

LAPORAN KEUANGAN POKOK

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
I	PENDAPATAN - LRA	E.1.a.				
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	E.1.a.1)				
	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	E.1.a.1).(a)	7.067.350.000,00	7.826.867.948,00	110,75	9.048.892.175,00
	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	E.1.a.1).(b)	4.389.233.520,00	4.656.919.048,15	106,10	4.624.073.616,67
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	E.1.a.1).(c)	6.313.227.292,00	6.313.227.292,00	100,00	6.058.783.025,00
	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	E.1.a.1).(d)	49.411.210.286,66	60.631.788.407,91	122,71	57.591.401.639,82
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		67.181.021.098,66	79.428.802.696,06	118,23	77.323.150.456,49
B	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	E.1.a.2)				
	1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dann Perimbangan - LRA	E.1.a.2).(a)				
	Dana bagi hasil pajak	E.1.a.2).(a)(1)	9.873.261.550,00	8.033.525.138,00	81,37	6.534.490.997,00
	Dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam	E.1.a.2).(a)(2)	2.816.684.569,00	1.948.433.875,00	69,17	1.824.173.950,00
	Dana Alokasi Umum	E.1.a.2).(a)(3)	354.367.009.000,00	352.753.271.000,00	99,54	390.319.648.000,00
	Dana Alokasi Khusus	E.1.a.2).(a)(4)	55.791.027.768,00	49.972.658.041,00	89,57	54.407.609.651,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA		422.847.982.887,00	412.707.888.054,00	97,60	453.085.922.598,00
	2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	E.1.a.2).(b)				
	Dana Penyesuaian		27.961.238.000,00	27.961.238.000,00	100,00	17.241.091.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA		27.961.238.000,00	27.961.238.000,00	100,00	17.241.091.000,00
	3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	E.1.a.2).(c)				
	Dana bagi hasil pajak		20.400.193.471,00	19.924.523.946,00	97,67	22.524.774.893,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		20.400.193.471,00	19.924.523.946,00	97,67	22.524.774.893,00
	4. Bantuan keuangan					
	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah propinsi lainnya		-	-	-	-
	Jumlah Bantuan keuangan					
	Jumlah Pendapatan Transfer		471.209.414.358,00	460.593.650.000,00	97,75	492.851.788.491,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA	E.1.a.3)				
	1. Pendapatan Hibah-LRA	E.1.a.3)(a)				
	Pendapatan hibah Dana BOS		7.955.200.000,00	7.752.450.000,00	97,45	8.162.200.000,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		7.955.200.000,00	7.752.450.000,00	97,45	8.162.200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN		546.345.635.456,66	547.774.902.696,06	100,26	578.337.138.947,49
II	BELANJA	E.1.b.				
A	BELANJA OPERASI	E.1.b.1)				
	Belanja Pegawai	E.1.b.1).(a)	260.447.447.190,71	243.421.203.426,00	93,46	256.801.711.815,00
	Belanja Barang dan Jasa	E.1.b.1).(b)	233.248.586.435,65	216.466.466.427,97	92,81	237.099.834.485,35
	Belanja Hibah	E.1.b.1).(c)	3.255.520.000,00	2.887.795.179,00	88,70	5.253.694.572,00
	Belanja Bantuan Sosial	E.1.b.1).(d)	961.464.000,00	434.421.800,00	45,18	2.294.310.919,00
	Jumlah Belanja Operasi		497.913.017.626,36	463.209.886.832,97	93,03	501.449.551.791,35
B	BELANJA MODAL	E.1.b.2)				
	Belanja Modal Tanah	E.1.b.2).(a)	17.811.014.260,00	17.466.718.833,00	98,07	24.610.900,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	E.1.b.2).(b)	20.305.519.399,00	16.850.495.356,30	82,98	24.831.522.321,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	E.1.b.2).(c)	8.395.817.788,07	7.663.481.704,67	91,28	30.067.237.581,88
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	E.1.b.2).(d)	10.209.606.775,00	8.201.107.926,89	80,33	38.797.005.337,34
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	E.1.b.2).(e)	4.894.042.406,00	4.211.260.463,01	86,05	4.468.405.407,75
	Belanja Modal Aset Lainnya	E.1.b.2).(f)	216.700.000,00	210.525.500,00	97,15	-
	Jumlah Belanja Modal		61.832.700.628,07	54.603.589.783,87	88,31	98.188.781.547,97

(Dalam Rupiah)

No	Uralan	Ref	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
C	BELANJA TAK TERDUGA	E.1.b.3)				
	Belanja Tak Terduga		32.988.622.442,00	25.539.205.763,00	77,42	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga		32.988.622.442,00	25.539.205.763,00	77,42	-
	JUMLAH BELANJA		592.734.340.696,43	543.352.682.379,84	91,67	599.638.333.339,32
III	TRANSFER	E.1.e				
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		653.852.380,00	653.852.380,00	100,00	565.929.412,00
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		653.852.380,00	653.852.380,00	100,00	565.929.412,00
	JUMLAH TRANSFER		653.852.380,00	653.852.380,00	100,00	565.929.412,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		593.388.193.076,43	544.006.534.759,84	91,68	600.204.262.751,32
	SURPLUS/(DEFISIT)		(47.042.557.619,77)	3.768.367.936,22	(8,01)	(21.867.123.803,83)
IV A	PEMBIAYAAN	E.1.d				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	E.1.d.1)				
	Penggunaan SILPA		47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	68.909.681.423,60
	Jumlah Penerimaan		47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	68.909.681.423,60
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	E.1.d.2)				
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	E.1.d.3)	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	68.909.681.423,60
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	E.1.d.4)	-	50.810.925.555,99	-	47.042.557.619,77

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Padang Panjang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	2020	2019
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	E.2.a	47.042.557.619,77	68.909.681.423,60
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	E.2.b	47.042.557.619,77	68.909.681.423,60
3	Sub Total (1 - 2)		-	-
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	E.2.c	50.810.925.555,99	47.042.557.619,77
5	Sub Total (3 + 4)		50.810.925.555,99	47.042.557.619,77
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	E.2.d	-	-
7	Lain-Lain		-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	E.2.e	50.810.925.555,99	47.042.557.619,77

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



III. NERACA

Neraca Pemerintah Kota Padang Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
NERACA KOMPARATIF
PER 31 DESEMBER 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2020	2019
A S E T			
ASET LANCAR	E.3.a		
Kas Di Kas Daerah	E.3.a.1)	48.145.668.056,34	45.067.870.486,12
Kas di Bendahara Pengeluaran	E.3.a.2)	40.745.306,00	9.349.164,00
Kas di Bendahara Penerimaan	E.3.a.3)	41.721.000,00	-
Kas di Bendahara BLUD	E.3.a.4)	660.143.121,65	350.210.605,65
Kas Lainnya (dana BOS)	E.3.a.5)	1.927.393.378,00	1.615.368.776,00
Setara Kas	E.3.a.6)	-	-
Piutang Pajak Daerah	E.3.a.7)	2.562.697.494,00	2.042.053.529,00
Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih	E.3.a.8)	(1.157.177.519,72)	(653.688.259,38)
Piutang Retribusi Daerah	E.3.a.9)	1.411.170.392,00	1.148.859.832,00
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih	E.3.a.10)	(1.338.365.454,50)	(1.036.214.155,00)
Piutang Dana Bagi Hasil	E.3.a.11)	5.665.409.576,00	4.054.826.495,00
Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	E.3.a.12)	183.550.103,70	183.550.103,70
Penyisihan Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tak Tertagih	E.3.a.13)	(183.550.103,70)	-
Piutang lain-lain PAD yang sah	E.3.a.14)	13.785.110.546,00	16.938.030.062,00
Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang sah Tak Tertagih	E.3.a.15)	(4.562.270.289,04)	(2.364.716.951,00)
Piutang Lain Lain	E.3.a.16)	0,00	0,00
Penyisihan Piutang lain-lain Tak Tertagih	E.3.a.17)	0,00	0,00
Persediaan	E.3.a.18)	11.517.341.857,41	10.202.842.904,27
Biaya Dibayar Dimuka	E.3.a.19)	1.533.861.988,08	1.172.233.306,29
Jumlah Aset Lancar		80.233.449.452,22	78.730.575.898,65

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2020	2019
INVESTASI JANGKA PANJANG	E.3.b		
Investasi Permanen	E.3.b.1)		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		52.441.565.862,88	52.377.762.860,16
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen		52.441.565.862,88	52.377.762.860,16
Investasi Non Permanen	E.3.b.2)		
Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Dalam Surat Utang Negara		0,00	0,00
Investasi Dalam Proyek Pembanguan		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir)		4.478.120.739,00	4.478.120.739,00
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih		(2.914.891.565,00)	(2.871.088.083,00)
Jumlah Investasi Non Permanen		1.563.229.174,00	1.607.032.656,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		54.004.795.036,88	53.984.795.516,16
ASET TETAP	E.3.c		
Tanah	E.3.c.1)	276.919.525.275,00	262.858.281.442,00
Peralatan dan Mesin	E.3.c.2)	280.006.272.731,05	259.072.182.195,51
Gedung dan Bangunan	E.3.c.3)	603.681.525.666,60	593.394.297.965,92
Jalan, Irigasi dan Jaringan	E.3.c.4)	500.574.409.636,31	498.246.859.589,30
Aset Tetap Lainnya	E.3.c.5)	7.906.932.706,99	7.395.346.908,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	E.3.c.6)	13.885.447.384,88	13.040.071.465,07
Akumulasi Penyusutan	E.3.c.7)	(610.932.454.202,00)	(561.269.552.341,67)
Jumlah Aset Tetap		1.072.041.659.198,83	1.072.737.487.224,13
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
ASET LAINNYA	E.3.d		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	E.3.d.1)	22.449.000,00	22.449.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	E.3.d.2)	23.428.912.000,00	24.067.537.000,00
Aset Tak Berwujud	E.3.d.3)	4.246.954.840,00	2.340.631.763,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	E.3.d.4)	(1.771.847.153,00)	
Aset Lain Lain	E.3.d.5)	73.524.199.757,31	78.278.541.647,31
Akumulasi Penyusutan aset lainnya	E.3.d.6)	(56.075.383.834,81)	(56.804.725.392,82)
Jumlah Aset Lainnya		43.375.284.609,50	47.904.434.017,49
JUMLAH ASET		1.249.655.188.297,43	1.253.357.292.656,43

KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	E.3.e		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	E.3.e.1)	4.745.306,00	241.412,00
Utang Jangka Pendek	E.3.e.2)	11.645.317.736,20	16.081.999.029,00
Utang Belanja	E.3.e.3)	764.610.117,50	1.540.827.617,57
Pendapatan diterima dimuka	E.3.e.4)	217.688.483,00	283.764.307,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		12.632.361.642,70	17.906.832.365,57
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang dalam negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		12.632.361.642,70	17.906.832.365,57
EKUITAS	E.3.f		
Ekuitas		1.237.022.826.654,73	1.235.450.460.290,86
Jumlah Ekuitas		1.237.022.826.654,73	1.235.450.460.290,86
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.249.655.188.297,43	1.253.357.292.656,43

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

IV. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional Pemerintah Kota Padang Panjang untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref	TAHUN 2020	TAHUN 2019	KENAIKAN /PENURUNAN	%
	KEGIATAN OPERASIONAL					
I	PENDAPATAN	E.4.a	546.590.002.245,06	586.341.719.818,49	(39.751.717.573,43)	(6,78)
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	E.4.a.1)	73.714.244.066,06	82.459.511.719,49	(8.745.267.653,43)	(10,61)
	Pendapatan Pajak Daerah	E.4.a.1.a)	8.360.587.737,00	9.394.056.571,00	(1.033.468.834,00)	(11,00)
	Pendapatan Retribusi Daerah	E.4.a.1.b)	4.735.979.608,15	4.523.581.210,67	212.398.397,48	4,70
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	E.4.a.1.c)	6.313.227.292,00	6.058.783.025,00	254.444.267,00	4,20
	Lain-lain PAD yang Sah	E.4.a.1.d)	54.304.449.428,91	62.483.090.912,82	(8.178.641.483,91)	(13,09)
B	PENDAPATAN TRANSFER	E.4.a.2)	461.580.162.050,00	495.064.335.661,00	(33.484.173.611,00)	(6,76)
	1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	E.4.a.2.a)	411.003.354.560,00	455.676.876.662,00	(44.673.522.102,00)	(9,80)
	Dana Bagi Hasil Pajak	E.4.a.2.a)(1)	6.829.257.206,00	8.639.985.765,00	(1.810.728.559,00)	(20,96)
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	E.4.a.2.a)(2)	1.448.168.313,00	2.309.633.246,00	(861.464.933,00)	(37,30)
	Dana Alokasi Umum	E.4.a.2.a)(3)	352.753.271.000,00	390.319.648.000,00	(37.566.377.000,00)	(9,62)
	Dana Alokasi Khusus	E.4.a.2.a)(4)	49.972.658.041,00	54.407.609.651,00	(4.434.951.610,00)	(8,15)
	2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	E.4.a.2.b)	27.961.238.000,00	17.241.091.000,00	10.720.147.000,00	62,18
	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
	Dana Penyesuaian		27.961.238.000,00	17.241.091.000,00	10.720.147.000,00	62,18
	3. TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	E.4.a.2.c)	22.615.569.490,00	22.146.367.999,00	469.201.491,00	2,12
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		22.615.569.490,00	22.146.367.999,00	469.201.491,00	2,12
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-	-	-
	4. BANTUAN KEUANGAN		-	-	-	-
	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah propinsi lainnya		-	-	-	-
C	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	E.4.a.3)	11.295.596.129,00	8.817.872.438,00	2.477.723.691,00	28,10
	Pendapatan Hibah		11.295.596.129,00	8.817.872.438,00	2.477.723.691,00	28,10
	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
II	BEBAN	E.4.b				
	BEBAN OPERASI	E.4.b.1)	555.205.652.979,54	572.245.740.542,92	(17.040.087.563,38)	(2,98)
	Beban Pegawai	E.4.b.1.a)	243.419.797.693,00	256.745.237.263,00	(13.325.439.570,00)	(5,19)
	Beban Persediaan	E.4.b.1.b)	39.789.035.276,39	36.490.033.539,22	3.299.001.737,17	9,04
	Beban Jasa	E.4.b.1.c)	148.638.159.330,65	162.178.482.258,63	(13.540.322.927,98)	(8,35)
	Beban Pemeliharaan	E.4.b.1.d)	5.325.645.947,00	4.278.236.970,01	1.047.408.976,99	24,48
	Beban Perjalanan dinas	E.4.b.1.e)	23.350.719.059,00	35.075.011.896,00	(11.724.292.837,00)	(33,43)
	Beban Bunga	E.4.b.1.f)	-	-	-	-
	Beban Subsidi	E.4.b.1.g)	-	-	-	-
	Beban Hibah	E.4.b.1.h)	14.680.772.753,20	9.824.293.082,72	4.856.479.670,48	49,43
	Beban Bantuan Sosial	E.4.b.1.i)	17.163.021.800,00	2.294.310.919,00	14.868.710.881,00	648,07
	Beban Penyusutan Aset Tetap	E.4.b.1.j)	55.924.252.561,00	62.615.021.782,57	(6.690.769.221,57)	(10,69)
	Beban Penyusutan Aset Lainnya	E.4.b.1.k)	485.708.879,00	51.860.000,00	433.848.879,00	836,58
	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.4.b.1.l)	4.487.390.932,53	1.424.405.509,43	3.062.985.423,10	215,04
	Beban Transfer	E.4.b.1.m)	653.852.380,00	565.929.412,00	87.922.968,00	15,54
	Beban Lain Lain	E.4.b.1.n)	1.287.296.367,77	702.917.910,34	584.378.457,43	83,14
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL		(8.615.650.734,48)	14.095.979.275,57	(22.711.630.010,05)	(161,12)

III	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.4.d.				
	SURPLUS NON OPERASIONAL	E.4.d.1	-	-	-	-
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
	DEFISIT NON OPERASIONAL	E.4.d.2	50.062.860,00	3.218.633.438,02	(3.168.570.578,02)	-
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		50.062.860,00	3.218.633.438,02	(3.168.570.578,02)	-
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(50.062.860,00)	(3.218.633.438,02)	3.168.570.578,02	-
SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	E.4.e.	(8.665.713.594,48)	10.877.345.837,55	(19.543.059.432,03)	(179,67)	
IV	POS LUAR BIASA	E.4.f.				-
	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
	JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT - LO	E.4.g.	(8.665.713.594,48)	10.877.345.837,55	(19.543.059.432,03)	(179,67)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



V. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Padang Panjang untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

	URAIAN	Ref	2020	2019
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	E.5.a		
2	Arus Masuk Kas	E.5.a		
3	Penerimaan Pajak Daerah	E.5.a	7.826.867.948,00	9.048.892.175,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	E.5.a	4.656.919.048,15	4.624.073.616,67
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	E.5.a	6.313.227.292,00	6.058.783.025,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	E.5.a	60.580.608.907,91	57.252.471.639,82
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	E.5.a	8.033.525.138,00	6.534.490.997,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	E.5.a	1.948.433.875,00	1.824.173.950,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	E.5.a	352.753.271.000,00	390.319.648.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	E.5.a	49.972.658.041,00	54.407.609.651,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	E.5.a	0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	E.5.a	27.961.238.000,00	17.241.091.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	E.5.a	19.924.523.946,00	22.524.774.893,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	E.5.a	0,00	0,00
15	Penerimaan Hibah	E.5.a	0,00	0,00
16	Penerimaan Dana Darurat	E.5.a	0,00	0,00
17	Penerimaan Lainnya	E.5.a	0,00	0,00
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	E.5.a	0,00	0,00
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)		539.971.273.196,06	569.836.008.947,49
20	Arus Keluar Kas	E.5.a		
21	Pembayaran Pegawai	E.5.a	243.421.203.426,00	256.801.711.815,00
22	Pembayaran Barang	E.5.a	210.791.294.024,97	230.952.362.474,35
23	Pembayaran Bunga	E.5.a	0,00	0,00
24	Pembayaran Subsidi	E.5.a	0,00	0,00
25	Pembayaran Hibah	E.5.a	2.887.795.179,00	5.253.694.572,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial	E.5.a	434.421.800,00	2.294.310.919,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan	E.5.a	653.852.380,00	565.929.412,00
28	Pembayaran Tak Terduga	E.5.a	25.539.205.763,00	0,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	E.5.a	0,00	0,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	E.5.a	0,00	0,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	E.5.a	0,00	0,00
32	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	E.5.a	0,00	0,00
33	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 32)		483.727.772.572,97	495.868.009.192,35
34	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-33)		56.243.500.623,09	73.967.999.755,14
35	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	E.5.b		
36	Arus Masuk Kas	E.5.b		
37	Pencairan Dana Cadangan	E.5.b	0,00	0,00
38	Penjualan atas Tanah	E.5.b	0,00	0,00
39	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	E.5.b	51.179.500,00	292.700.000,00
40	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	E.5.b	0,00	46.230.000,00
41	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	E.5.b	0,00	0,00
42	Penjualan Aset Tetap	E.5.b	0,00	0,00
43	Penjualan Aset Lainnya	E.5.b	0,00	0,00
44	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	E.5.b	0,00	0,00
45	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	E.5.b	0,00	0,00
46	Jumlah Arus Masuk Kas (37 s/d 45)		51.179.500,00	338.930.000,00

(Dalam Rupiah)

URAIAN		Ref	2020	2019
47	Arus Keluar Kas	E.5.b		
48	Pembentukan Dana Cadangan	E.5.b	0,00	0,00
49	Perolehan Tanah	E.5.b	17.466.718.833,00	24.610.900,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin	E.5.b	16.850.495.356,30	24.831.522.321,00
51	Perolehan Gedung dan Bangunan	E.5.b	7.663.481.704,67	30.067.237.581,88
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	E.5.b	8.201.107.926,89	38.797.005.337,34
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya	E.5.b	2.446.007.468,01	3.561.187.462,75
54	Perolehan Aset Lainnya	E.5.b	210.525.500,00	0,00
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	E.5.b	0,00	0,00
56	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Non Permanen	E.5.b	0,00	0,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 56)		52.838.336.788,87	97.281.563.602,97
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (46-57)		(52.787.157.288,87)	(96.942.633.602,97)
59	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	E.5.c		
60	Arus Masuk Kas	E.5.c		
61	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	E.5.c	0,00	0,00
62	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	E.5.c	0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	E.5.c	0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	E.5.c	0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	E.5.c	0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	E.5.c	0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	E.5.c	0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	E.5.c	0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	E.5.c	0,00	0,00
70	Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 69)		-	-
71	Arus Keluar Kas	E.5.c		
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	E.5.c	0,00	0,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	E.5.c	0,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	E.5.c	0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	E.5.c	0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	E.5.c	0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	E.5.c	0,00	0,00
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	E.5.c	0,00	0,00
79	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	E.5.c	0,00	0,00
80	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	E.5.c	0,00	0,00
81	Jumlah Arus Keluar Kas (72 s/d 80)		-	-
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (70-81)		-	-
83	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	E.5.d		
84	Arus Masuk Kas	E.5.d		
85	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	E.5.d	9.356.504.787,00	9.616.257.856,00
86	Penerimaan setoran UYHD dari Bendahara Pengeluaran	E.5.d	9.107.752,00	15.000.000,00
87	Pendapatan BLUD	E.5.d	0,00	0,00
88	Jumlah Arus Masuk Kas (85 s/d 87)		9.365.612.539,00	9.631.257.856,00

URAIAN		Ref	2020	2019
89	Arus Keluar Kas	E.5.d		
90	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	E.5.d	9.356.504.787,00	9.616.257.856,00
91	Belanja Pegawai BLUD	E.5.d	0,00	0,00
92	Belanja Barang dan Jasa BLUD	E.5.d	0,00	0,00
93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	E.5.d	0,00	0,00
94	Pengeluaran UP Tahun 2020 Masih Berada Di Bend. Pengeluaran	E.5.d	36.000.000,00	9.107.752,00
95	Jumlah Arus Keluar Kas (90 s/d 94)		9.392.504.787,00	9.625.365.608,00
96	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (88-95)		(26.892.248,00)	5.892.248,00
97	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	E.5.e	3.429.451.086,22	(22.968.741.599,83)
98	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas Daerah	E.5.f	45.418.081.091,77	68.386.822.691,60
99	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas Daerah (97+98)		48.847.532.177,99	45.418.081.091,77
100	Kas di Bendahara BLUD		0,00	0,00
101	Saldo Akhir kas Di Bendahara Pengeluaran		40.745.306,00	9.349.164,00
102	Saldo Akhir kas Di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
103	Saldo Akhir (Kas Lainnya) dana BOS		1.927.393.378,00	1.615.368.776,00
104	Saldo Akhir Kas	E.5.g	50.815.670.861,99	47.042.799.031,77

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Padang Panjang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	Ref	TAHUN 2020	TAHUN 2019
EKUITAS AWAL	E.6.a	1.235.450.460.290,86	1.211.421.359.991,54
SURPLUS / DEFISIT - LO	E.6.b	(8.665.713.594,48)	10.877.345.837,55
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.6.c	10.238.079.958,35	13.151.754.461,77
A. DAMPAK KEBIJAKAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	E.6.c.1)	6.357.403.274,67	18.906.885.571,27
B. DAMPAK KEBIJAKAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	E.6.c.2)	19.704.844,01	(3.234.495.373,56)
C. DAMPAK KEBIJAKAN AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	E.6.c.3)	(1.286.138.274,00)	
D. DAMPAK KEBIJAKAN KAPITALISIR	E.6.c.4)	(11.975.000,00)	(450.273.557,50)
E. DAMPAK KEBIJAKAN DITERIMA DIMUKA		-	-
F. DAMPAK KEBIJAKAN PENYISIHAN PIUTANG	E.6.c.5)	1.300.646.930,95	114.038.351,13
G. KOREKSI ASET TETAP	E.6.c.6)	68.050.000,00	(2.331.029.001,00)
H. KOREKSI ASET LAINNYA		-	(822.000,00)
I. KOREKSI KAS LAINNYA			
J. KOREKSI SETARA KAS			
K. KOREKSI PIUTANG	E.6.c.7)	3.802.755.900,00	(3.554.227,00)
L. KOREKSI HUTANG	E.6.c.8)	(58.988.698,00)	4.137.420,00
M. KOREKSI KAS DI BEND PENERIMAAN		-	-
N. KOREKSI KAS DI BEND PENGELUARAN		-	-
O. KOREKSI PERSEDIAAN	E.6.c.9)	(17.182.022,00)	113.364.495,00
P. KOREKSI ASET EKSTRAKOMPATABEL			
Q. KOREKSI INVESTASI	E.6.c.10)	63.803.002,72	33.502.783,43
R. KOREKSI KESALAHAN TAHUN SEBELUMNYA			
EKUITAS AKHIR	E.6.d	1.237.022.826.654,73	1.235.450.460.290,86

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALIKOTA PADANG PANJANG

EADLY AMRAN

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP Basis Akrua.

Pada dasarnya LKPD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain, masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang selama TA 2020 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Padang Panjang serta hasil yang dicapai;
- d. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Padang Panjang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pemungutan pajak dan tunjangan; dan
- f. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 ini dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

- n. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang;
- p. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;
- q. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;
- r. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2016;
- s. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;
- t. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020; dan
- u. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang TA 2020 disajikan dengan urutan sebagai berikut :

- A. Pendahuluan
 - 1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
 - 2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan; dan
 - 3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- B. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 1. Ekonomi makro;
 - 2. Kebijakan keuangan; dan
 - 3. Pencapaian target kinerja APBD.
- C. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 1. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan entitas; dan
 - 2. Ikhtisar capaian kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan.

D. Kebijakan Akuntansi

1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah;
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
3. Asumsi dasar;
4. Basis pengukuran dan pengakuan yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan; dan
5. Kesesuaian kebijakan akuntansi dengan PSAP.

E. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

1. Penjelasan akun-akun Laporan Realisasi Anggaran;
2. Penjelasan akun-akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Penjelasan akun-akun Neraca;
4. Penjelasan akun-akun Laporan Operasional;
5. Penjelasan akun-akun Laporan Arus Kas; dan
6. Penjelasan akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas.

F. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

G. Penutup

B. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Secara umum untuk melihat perkembangan ekonomi makro suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada Tahun 2019, PDRB Kota Padang Panjang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2015 mencapai Rp2,07 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan dengan kondisi Tahun 2017 sebesar Rp2,31 triliun. Artinya terjadi peningkatan nilai tambah produksi sebesar Rp0,51 triliun. Kondisi ini menggambarkan adanya peningkatan nilai produksi masyarakat yang cukup signifikan pada berbagai sektor lapangan usaha di Kota Padang Panjang, yang berujung kepada peningkatan pendapatan masyarakat.

Dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang pada Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,59%. Kondisi ini dipercepat oleh adanya investasi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 yang tercatat sebesar 5,74%, serta lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan nasional yang tumbuh masing-masing sebesar 5,14% pada tahun 2018 dan 5,29% pada tahun 2017. Sementara itu struktur perekonomian Kota Padang Panjang Tahun 2019 masih sama dengan struktur perekonomian tahun-tahun sebelumnya yaitu masih didominasi oleh lapangan usaha yang masuk pada kategori: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan serta industri pengolahan konstruksi.

Selanjutnya, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Tahun 2019 juga mengalami kenaikan menjadi Rp3,48 triliun dibandingkan Tahun 2018 yang mencapai Rp3,20 triliun. Data ini mencerminkan bahwa pada dasarnya PDRB Kota Padang Panjang

mengalami pertumbuhan yang cukup baik, walaupun kondisi regional dan internasional masih terjadi perlambatan ekonomi. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 yang cukup baik ini, didorong oleh pergerakan ekonomi disamping adanya investasi dari sektor pemerintah, juga didorong oleh adanya investasi masyarakat dan dunia usaha.

Indikator lain yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat atau sebagai tolak ukur kekuatan ekonomi suatu daerah adalah nilai PDRB Per kapita. PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jika pertumbuhan PDRB lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk pada tahun yang sama, dapat dipastikan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa PDRB per kapita hanya merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil.

Pada Tahun 2019, angka PDRB per kapita Kota Padang Panjang berdasarkan harga berlaku mencapai Rp64,75 juta naik sebesar Rp4,39 juta atau 6,78% dibanding Tahun 2018 yang mencapai Rp60,36 juta. Gambaran perkembangan PDRB per kapita Kota Padang Panjang Tahun 2015 - 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1-PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (2015-2019)

TAHUN	PDRB(RpMilyar)		Jumlah Penduduk	PDRB Per Kapita (Rp juta)	
	ADH Berlaku	ADH Konstan		ADH Berlaku	ADH Konstan
2015	2.533,04	2.066,25	50.883	49,78	40,61
2016	2.774,05	2.186,01	51.712	53,64	42,28
2017	3.027,96	2.313,08	52.422	57,78	44,12
2018	3.269,38	2.445,90	52.994	61,69	44,12
2019	3.476,56	2.581,91	53.693	64,75	48,09

Sumber: Data diolah berdasarkan angka BPS

Dari aspek kemiskinan, pada Tahun 2019 adalah pada angka 5,60% atau turun 0,28% dari tahun 2018. Banyaknya program yang diluncurkan oleh pemerintah, serta investasi yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, telah ikut menekan tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang. Begitu pun halnya dengan tingkat pengangguran yang mana untuk Tahun 2019 angka pengangguran diperkirakan berkisar pada 4,35%, turun dibandingkan Tahun 2018 yang tercatat sebesar 5,28%. Berikut tabel perkembangan makro ekonomi Kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 2- Perkembangan Indikator Makro Ekonomi (2015-2019)

No	Indikator Makro Ekonomi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	PDRB ADHB (Rp triliun)	2,53	2,77	2,97	3,20	3,48
2.	PDRB ADHK (Rp triliun)	2,07	2,19	2,31	2,45	2,58
3.	Tingkat pertumbuhan ekonomi(PDRB ADHK tahun 2010) (%)	5,91	5,79	5,81	5,74	5,59
4.	Angka Kemiskinan (%)	6,74	6,75	6,17	5,88	5,60
5.	Tingkat Pengangguran (%)	6,33	5,95*	5,43	5,28	4,35
6.	PDRB per kapita (Rp juta)	49,78	53,64	56,74	60,36	64,75

*Proyeksi

Sumber: BPS Kota Padang Panjang

Catatan : - : data belum tersedia

Selain indikator kesejahteraan masyarakat sebagai tolak ukur kekuatan ekonomi daerah masih ada Indikator lain yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dapat dilihat dari lapangan usaha pada daerah tersebut. Selama tahun 2020 dimana Pandemi COVID-19 mewabah maka terjadi beberapa penurunan pada Pendapatan masyarakat. .

Pada Tahun 2020, angka PDRB Kota Padang Panjang berdasarkan harga Kontan menurut lapangan usaha mencapai Rp2.543.404,39 juta turun sebesar Rp. 37.201,25 jika dibandingkan Tahun 2019 yang mencapai Rp2.580.605,64 atau 1,46%. Demikian juga untuk PDRB atas Dasar Harga Berlaku, mencapai Rp3.473.238,65 juta turun sebesar Rp. 1.527,03 jika dibandingkan Tahun 2019 yang mencapai Rp3.474.765,68 atau 0,04%. Gambaran perkembangan PDRB per kapita Kota Padang Panjang menurut lapangan usaha Tahun 2019-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3- Perbandingan antara Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) (2019-2020) Menurut Lapangan Usaha

No.	Kategori/Lapangan Usaha	2019		2020		Kenaikan / Penurunan	
		Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku
1.	Pertanian,kehutanan,dan perikanan	122.269,19	175.338,77	123.842,32	178.828,57	1.573,13	3.489,80
2.	Pertambangan dan penggalian	6.127,73	9.552,53	5.966,07	9.366,15	(161,66)	(186,38)
3.	Industri pengolahan	241.455,54	292.170,69	235.644,28	292.908,16	(5.811,26)	737,47
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.621,24	2.392,41	1.510,37	2.251,76	(110,87)	(140,65)
5.	Pengadaan Air,Pengelolaan sampah,Limbah, dan Daur Ulang	6.476,61	8.576,21	6.564,68	8.720,48	88,07	144,27
6.	Konstruksi	244.007,93	345.839,27	236.081,92	341.498,76	(7.926,01)	(4.340,51)
7.	Perdagangan Besar dan Eceran;Regarasi Mobil dan Sepeda Motor	472.369,41	640.496,45	467.602,56	623.936,93	(4.766,85)	(16.559,52)
8.	Transportasi dan Perdagangan	363.050,28	446.895,35	322.675,93	408.831,04	(40.374,35)	(38.064,31)
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	59.772,28	102.443,59	52.578,26	91.705,56	(7.194,02)	(10.738,03)
10.	Informasi dan Komunikasi	281.564,11	305.263,87	305.022,81	330.560,01	23.458,70	25.296,14
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	96.863,71	140.514,61	97.800,68	144.200,15	936,97	3.685,54
12.	Real Estate	88.534,67	123.254,65	88.634,80	124.518,18	100,13	1.263,53
13.	Jasa perusahaan	2.061,95	2.887,21	1.970,27	2.810,74	(91,68)	(76,47)
14.	Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	230.124,84	329.845,65	228.457,41	350.509,03	(1.667,43)	20.663,38
15.	Jasa Pendidikan	218.108,93	331.778,09	230.999,86	352.191,16	12.890,93	20.413,07
16.	Jassa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	35.557,72	48.388,84	38.096,20	53.632,62	2.538,48	5.243,78
17.	Jasa Lainnya	110.639,50	169.127,49	99.955,97	156.769,35	(10.683,53)	(12.358,14)
	Total PDRB	2.580.605,64	3.474.765,68	2.543.404,39	3.473.238,65	(37.201,25)	(1.527,03)

2. Kebijakan Keuangan Daerah

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 bahwa Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Secara umum komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan, Dana Transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan pendapatan daerah tentunya tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan termasuk regulasi kebijakan. Disamping itu peningkatan pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang dan upaya-upaya melakukan terobosan peluang investasi dunia usaha.

Untuk lebih mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pajak adalah:

- 1) Menerapkan teknologi informasi pada pelayanan BPHTB melalui aplikasi BPHTB yang terintegrasi secara *Host To Host* dengan Badan Pertanahan Negara, Bank Nagari dan ;
- 2) Melakukan updating Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam rangka memperbaharui ketentuan NJOP dan NPOP sebagai dasar pengenaan SPPT-PBB dan transaksi BPHTB ;
- 3) Meningkatkan pelayanan kepada PBB melalui aplikasi SIPBB yang dapat memudahkan masyarakat dan *stockholder* lain untuk mendapatkan informasi mengenai status PBB dan informasi lainnya;
- 4) Membuka kanal pembayaran pajak seluas-luasnya dengan bekerjasama dengan Bank Nagari melalui *Mobile Banking* dan *Internet Banking*, BNI melalui *Mobile Banking* serta Gojek melalui Gobills;
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menetapkan standar prosedur pelayanan sehingga memiliki kepastian atas pelayanan yang diterima;
- 6) Melakukan pemutakhiran data objek pajak daerah dan wajib pajak daerah melalui pemantauan ke lapangan secara berkala dengan updating peta dan dokumen lain bagi objek pajak baru dan menerbitkan NPWPD bagi wajib pajak baru yang ditetapkan;
- 7) Meningkatkan pengawasan secara berkala melalui uji petik ke lapangan sehingga didapat data yang akurat mengenai sumber potensi yang ada;

- 8) Menyempurnakan pemanfaatan aplikasi pajak daerah dalam melaksanakan proses pendataan, penetapan dan penagihan dalam satu rangkaian kegiatan yang saling terkait sehingga dapat meng-eliminir kesalhan-kesalahan baik prosedur maupun nilai ketetapan dan dapat dengan mudah melakukan control;
- 9) Pelaksanaan uji petik secara berkala atas objek pajak/retribusi baru dan objek pajak lainnya yang laporan transaksinya masih diragukan;
- 10) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait di kota Padang Panjang seperti KP2KP, BPD dan BPN, sebagai bagian upaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari kelompok Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal pemenuhan penyampaian data-data keuangan secara rutin secara tepat waktu sebagai salah satu prasyarat pencairan dana perimbangan; dan
- 2) Meningkatkan akurasi data sebagai dasar perhitungan alokasi dana perimbangan.

Dalam hal peningkatan pendapatan dari kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan upaya sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan data pendukung perhitungan potensi bagi hasil propinsi; dan
- 2) Pengawasan secara komprehensif terhadap perizinan pendapatan daerah.

Adapun gambaran umum perubahan pendapatan daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 seperti terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4- Perubahan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020

Rek.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	bertambah/ berkurang	%
4.	PENDAPATAN	595.419.550.986,00	546.345.635.456,66	(49.073.915.529,34)	(8,24)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	97.543.849.569,00	67.181.021.098,66	(30.362.828.470,34)	(31,13)
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	9.384.658.000,00	7.067.350.000,00	(2.317.308.000,00)	(24,69)
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.785.400.000,00	4.389.233.520,00	(1.396.166.480,00)	(24,13)
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.389.656.536,00	6.313.227.292,00	(76.429.244,00)	(1,20)
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	75.984.135.033,00	49.411.210.286,66	(26.572.924.746,34)	(34,97)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	469.901.641.367,00	450.809.220.887,00	(19.092.420.480,00)	(4,06)
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	9.431.493.367,00	12.689.946.119,00	3.258.452.752,00	34,55
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	391.398.830.000,00	354.367.009.000,00	(37.031.821.000,00)	(9,46)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	56.847.041.000,00	55.791.027.768,00	(1.056.013.232,00)	(1,86)
4.2.3.	Dana Insentif Daerah (DID)	12.224.277.000,00	27.961.238.000,00	15.736.961.000,00	128,74

Rek.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	bertambah/ berkurang	%
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.974.060.050,00	28.355.393.471,00	381.333.421,00	1,36
4.3.3.	Pendapatan Hibah	7.480.000.000,00	7.955.200.000,00	475.200.000,00	6,35
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.494.060.050,00	20.400.193.471,00	(93.866.579,00)	(0,46)

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, ditegaskan bahwa Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh daerah.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Memperhatikan serta mempertimbangkan terhadap perubahan pendapatan daerah, maka dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk rencana perubahan Belanja Tidak Langsung dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan riil secara maksimal yang dialokasikan selama satu tahun anggaran dengan memperhitungkan realisasi gaji, tunjangan-tunjangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- 2) Penyesuaian pada sejumlah belanja Hibah dan Bantuan Sosial dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu untuk pelaksanaannya.
- 3) Perubahan Belanja Langsung dibatasi pada kegiatan yang bersifat mendesak, tidak bisa ditunda dan dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD Kota Padang Panjang serta pemenuhan kebutuhan OPD akibat pergeseran anggaran hasil *refocusing* APBD 2020. Pada belanja ini juga ditambahkan penganggaran untuk penanganan dampak pandemi COVID-19.
- 4) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan penyesuaian untuk penanganan dampak pandemi COVID-19.

Secara keseluruhan perubahan Belanja Daerah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.51.131.357.909,57 atau turun sebesar 7,93 persen dari Rp.644.519.550.986,00 sebelum perubahan menjadi Rp.593.388.193.076,43 setelah perubahan.

Pada kelompok Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar Rp.11.547.285.169,61 atau 4,03 persen yakni dari Rp.286.759.620.843,00 sebelum perubahan menjadi Rp.298.306.906.012,71 setelah perubahan.

Sedangkan kelompok Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar Rp.62.678.643.079,28 atau turun 17,52 persen dari Rp.357.759.930.143,00 sebelum perubahan menjadi Rp.295.081.287.063,72. Dengan terjadinya penurunan anggaran pada kelompok Belanja Langsung ini, maka pelaksanaan kegiatan diprioritaskan untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan terkait erat dengan pencapaian target RPJMD serta penanganan pandemi COVID-19.

1) Perubahan Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

Alokasi belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Secara umum perubahan belanja pegawai pada belanja tidak langsung Tahun 2020 disesuaikan dengan kebutuhan riil dimana terjadi pengurangan sebesar Rp.16.361.657.272,29 atau sebesar 5,91 persen yakni dari Rp.276.809.104.463,00 sebelum perubahan menjadi Rp.260.447.447.190,71 setelah perubahan. Penurunan ini dalam rangka untuk menyesuaikan dengan realisasi gaji pada Semester I. Disamping itu juga dilakukan penyesuaian terhadap perhitungan belanja sertifikasi Guru PNS dan tambahan penghasilan guru PNS yang merupakan lunturnya dari sisa dana tahun anggaran sebelumnya yang ditambahkan pada tahun anggaran ini.

Pada jenis Belanja Hibah terjadi penurunan sebesar Rp.4.079.680.000,00 atau turun 55,62 persen dari Rp.7.335.200.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp.3.255.520.000,00 setelah perubahan. Penurunan belanja hibah terjadi karena adanya *refocusing* kegiatan dalam rangka penanganan dampak Pandemi COVID-19.

Pada jenis belanja bantuan sosial juga tidak mengalami perubahan dari sebelumnya Rp.961.464.000,00 tetap menjadi Rp. 961.464.000,00 (0,00 persen). Sedangkan untuk jenis belanja bantuan keuangan kepada partai politik juga tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp.653.852.380,00 dari anggaran semula tetap sebesar Rp. 653.852.380,00 (0,00 persen).

Pada belanja tidak terduga terjadi kenaikan sebesar Rp.31.988.622.442,00 atau 3.198 persen yaitu dari anggaran sebelumnya Rp.1.000.000.000,00 menjadi Rp.32.988.622.442,00, Penambahan pada Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 31.988.622.442,00 dialokasikan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Kota Padang Panjang yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- Penanganan kesehatan, melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan, sarana fasilitas kesehatan, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga relawan serta pengadaan alat dan bahan evakuasi;
- Penanganan dampak ekonomi, melalui pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok bagi masyarakat terkena dampak pandemi COVID-19;
- Penyediaan jaringan pengamanan sosial.

Untuk lebih jelasnya uraian pada perubahan belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 5 - Perubahan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020

Rek.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	286.759.620.843,00	298.306.906.012,71	11.547.285.169,71	4,03
5.1.1.	Belanja Pegawai	276.809.104.463,00	260.447.447.190,71	(16.361.657.272,29)	(5,91)
5.1.4.	Belanja Hibah	7.335.200.000,00	3.255.520.000,00	(4.079.680.000,00)	(55,62)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	961.464.000,00	961.464.000,00	00,00	0,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintahan Desa dan Partai Politik	653.852.380,00	653.852.380,00	00,00	0,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	32.988.622.442,00	31.988.622.442,00	3.198,86

2) Perubahan Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan OPD

Pada dasarnya pengalokasian anggaran belanja daerah adalah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik untuk urusan wajib maupun untuk urusan pilihan yang secara operasional dilaksanakan oleh OPD. Pengalokasian belanja daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu penganggaran dilaksanakan juga dalam rangka memenuhi kewajiban daerah dalam peningkatan pelayanan dasar. Dengan demikian maka penyusunan belanja daerah diutamakan untuk efektifitas pelaksanaan dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan sehingga peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus diikuti pula dengan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk dan atau berfungsi menutupi defisit dan untuk memanfaatkan surplus Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Gambaran Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1) Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan mengalami penurunan yakni pada penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.2.057.442.380,23 atau turun 4,19 persen dari Rp.49.100.000.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp.47.042.557.619,77 setelah perubahan.

2) Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari penyertaan modal (investasi daerah) dan pembiayaan netto. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada kebijakan umum anggaran perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2020 sama dengan sebelum perubahan APBD yaitu nol.

Adapun gambaran perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan pada tabel 6:

Tabel 6 - Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020

Rek.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
6.	PEMBIAYAAN	49.100.000.000,00	47.042.557.619,77	(2.057.442.380,23)	(4,19)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49.100.000.000,00	47.042.557.619,77	(2.057.442.380,23)	(4,19)
6.1.1.	Penggunaan SiLPA	49.100.000.000,00	47.042.557.619,77	(2.057.442.380,23)	(4,19)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49.100.000.000,00	47.042.557.619,77	(2.057.442.380,23)	(4,19)
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	49.100.000.000,00	47.042.557.619,77	(2.057.442.380,23)	(4,19)

Gambaran secara keseluruhan dari Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 - Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2020

Rek.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
4.	PENDAPATAN	595.419.550.986,00	546.345.635.456,66	(49.073.915.529,34)	(8,24)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	97.543.849.569,00	67.181.021.098,66	(30.362.828.470,34)	(31,13)
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	9.384.658.000,00	7.067.350.000,00	(2.317.308.000,00)	(24,69)
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.785.400.000,00	4.389.233.520,00	(1.396.166.480,00)	(24,13)
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.389.656.536,00	6.313.227.292,00	(76.429.244,00)	(1,20)
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	75.984.135.033,00	49.411.210.286,66	(26.572.924.746,34)	(34,97)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	469.901.641.367,00	450.809.220.887,00	(19.092.420.480,00)	(4,06)
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	9.431.493.367,00	12.689.946.119,00	3.258.452.752,00	34,55
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	391.398.830.000,00	354.367.009.000,00	(37.031.821.000,00)	(9,46)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	56.847.041.000,00	55.791.027.768,00	(1.056.013.232,00)	(1,86)
4.2.4.	Dana Insentif Daerah (DID)	12.224.277.000,00	27.961.238.000,00	15.736.961.000,00	128,74
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.974.060.050,00	28.355.393.471,00	381.333.421,00	1,36
4.3.1.	Pendapatan Hibah	7.480.000.000,00	7.955.200.000,00	475.200.000,00	6,35

Rek.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	%
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.494.060.050,00	20.400.193.471,00	(93.866.579,00)	(0,46)
	JUMLAH PENDAPATAN	595.419.550.986,00	546.345.635.456,66	(49.073.915.529,34)	(8,24)
5.	BELANJA	644.519.550.986,00	593.388.193.076,43	(51.131.357.909,57)	(7,93)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	286.759.620.843,00	298.306.906.012,71	11.547.285.169,71	4,03
5.1.1.	Belanja Pegawai	276.809.104.463,00	260.447.447.190,71	(16.361.657.272,29)	(5,91)
5.1.4.	Belanja Hibah	7.335.200.000,00	3.255.520.000,00	(4.079.680.000,00)	(55,62)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	961.464.000,00	961.464.000,00	00,00	0,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	653.852.380,00	653.852.380,00	00,00	0,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	32.988.622.442,00	31.988.622.442,00	3.198,86
5.2.	BELANJA LANGSUNG	357.759.930.143,00	295.081.287.063,72	(62.678.643.079,28)	(17,52)
5.2.1.	Belanja Pegawai	4.562.188.088,00	3.623.801.476,00	(938.386.612,00)	(20,57)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	266.220.818.318,00	229.624.784.959,65	(36.596.033.358,35)	(13,75)
5.2.3.	BELANJA MODAL	86.976.923.737,00	61.832.700.628,07	(25.144.223.108,93)	(28,91)
	JUMLAH BELANJA	644.519.550.986,00	593.388.193.076,43	(51.131.357.909,57)	(7,93)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(49.100.000.000,00)	(47.042.557.619,77)	(2.057.442.380,23)	(4,19)
6.	PEMBIAYAAN	49.100.000.000,00	47.042.557.619,77	(2.057.442.380,23)	(4,19)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49.100.000.000,00	47.042.557.619,77	(2.057.442.380,23)	(4,19)
6.1.1.	Penggunaan SILPA	49.100.000.000,00	47.042.557.619,77	(2.057.442.380,23)	(4,19)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49.100.000.000,00	47.042.557.619,77	(2.057.442.380,23)	(4,19)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	49.100.000.000,00	47.042.557.619,77	(2.057.442.380,23)	(4,19)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Perubahan Kebijakan *Refocusing Anggaran*

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa* dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka Pemerintah Kota Padang Panjang mengalami beberapa kali *Refocusing dan Realokasi Anggaran* selama 2020, dari APBD Murni ada 6 (enam) kali pergeseran anggaran guna memenuhi tuntutan dari ketiga aturan diatas.

- Pergeseran I (pertama) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 dari Anggaran Pendapatan sebesar Rp595.419.550.986,00 menjadi Rp595.419.550.986,00

(tidak ada perubahan) sementara Total Belanja Daerah juga tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp644.519.550.986,00 hanya ada pergeseran di Belanja Tidak Langsung dari Rp286.759.620.843,00 turun sebesar Rp10.450.000,00 atau sebesar 0,004% sementara untuk Belanja Langsung meningkat sebesar Rp.10.450.000,00 atau 0,003% dari anggaran sebesar Rp357.759.930.143,00 menjadi Rp.357.770.380.143,00. Hal ini dilakukan karena adanya perubahan Petunjuk Teknis pada Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pangan dan Pertanian serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- Pergeseran ke II (kedua) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 9 April 2020, pergeseran terjadi pada Belanja Tidak langsung menjadi Rp301.499.170.843,00 naik sebesar Rp14.750.000,00 dari anggaran sebesar Rp286.749.170.843,00 atau 5,14% sementara untuk Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar Rp14.750.000.000,00 atau 4,12% dari Rp.357.770.380.143,00 menjadi Rp.343.020.380.143,00. Sementara untuk Pendapatan dan Pembiayaan tidak mengalami pergeseran. Hal ini dilakukan karena adanya instruksi untuk melakukan *Refocusing* anggaran untuk *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Pergeseran ke III (ketiga) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 23 April 2020, pergeseran terjadi pada Pendapatan dari Rp595.419.550.986,00 menjadi Rp522.376.858.086,00 atau turun sebesar Rp73.042.692.900,00 atau 12,27%. Sementara itu Belanja juga mengalami penurunan sebesar Rp73.042.692.900,00 atau 11,33 % dari Rp644.519.550.986,00 menjadi Rp571.476.858.086,00, untuk pembiayaan tidak mengalami pergeseran. Hal Ini dilakukan karena adanya instruksi untuk melakukan *Refocusing* anggaran untuk *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Pergeseran ke IV (keempat) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 Tanggal 28 Mei 2020, pergeseran terjadi pada Pendapatan Daerah dari Rp.522.376.858.086,00 menjadi Rp509.376.858.086,00 atau turun sebesar Rp13.000.000.000,00 atau 2,49%. Sementara itu Belanja Daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp13.000.000.000,00 atau 2,27 % dari Rp571.476.858.086,00 menjadi Rp.558.476.858.086,00. Ini dilakukan karena adanya instruksi untuk melakukan *Refocusing* anggaran untuk *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Pergeseran ke V (kelima) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 Tanggal 6 Juli 2020, pergeseran terjadi pada Pendapatan Daerah dari Rp509.376.858.086,00 menjadi Rp518.570.568.086,00 atau naik sebesar Rp9.3193.710.000,00 atau 1,80%. Sementara itu Belanja Daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp9.3193.710.000,00 atau 1,65 % dari Rp.558.476.858.086,00 menjadi Rp.567.670.568.086,00. Hal ini dilakukan karena adanya pergeseran untuk anggaran cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;

- Pergeseran ke VI (keenam) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tanggal 27 Juli 2020, pergeseran terjadi pada Pendapatan Daerah dari Rp518.570.568.086,00 menjadi Rp518.870.568.086,00 atau naik sebesar Rp300.000.000,00 atau 0,006%. Sementara itu Belanja Daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp300.000.000,00 atau 0,005 % dari Rp567.670.568.086,00 menjadi Rp.567.970.568.086,00, hal ini terjadi karena adanya pergeseran anggaran cadangan Bantuan Operasional Kesehatan;
- Setelah Pergeseran ke VI (keenam) dilakukan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020, perubahan terjadi pada pendapatan dari Rp518.870.568.086,00 menjadi Rp540.497.720.688,66 atau naik sebesar Rp21.627.152.602,00 atau 4,17%. Sementara itu Belanja Daerah juga mengalami kenaikan Sebesar Rp19.569.710.222,43 atau 3,45% dari Rp567.670.568.086,00 menjadi Rp587.540.278.308,43. Dengan adanya perubahan ini maka Pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp2.057.442.380,23 atau 4,37% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp49.100.000.000,00 menjadi Rp47.042.557.019,77 setelah perubahan. Setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah juga dilakukan 2 kali pergeseran;
- Pergeseran ke VII (ketujuh) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2020 Tanggal 26 November 2020, pergeseran terjadi pada Pendapatan Daerah dari Rp540.497.720.688,66 menjadi Rp541.993.175.328,66 atau naik sebesar Rp1.495.454.640,00 atau 0,28%. Sementara itu Belanja Daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.495.454.640,00 atau 0,25 % dari Rp587.540.278.308,43 menjadi Rp.589.035.732.948,43, ini merupakan perubahan pada anggaran cadangan Bantuan Operasional Kesehatan; dan
- Pergeseran ke VII (kedelapan) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 Tanggal 28 Desember 2020, pergeseran terjadi pada Pendapatan Daerah dari Rp541.993.175.328,66 menjadi Rp546.345.635.456,66 atau naik sebesar Rp4.352.460.128,00 atau 0,80%. Sementara itu Belanja Daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp4.352.460.128,000 atau 0,74 % dari Rp.589.035.732.948,43 menjadi Rp.593.388.193.076,43, hal ini terjadi karena ada perubahan anggaran pada Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan.

Rincian pergeseran anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 8 Rincian Perubahan Refocussing dan Pergeseran Anggaran
Tahun Anggaran 2020**

Uraian	APBD Murni 2020	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	Pergeseran V	Pergeseran VI	APBD Perubahan 2020	Pergeseran VII	Pergeseran VIII
	Perda No. 12 Tahun 2019	Perwako No. 8 Tahun 2020	Perwako No. 11 Tahun 2020	Perwako No. 17 Tahun 2020	Perwako No. 24 Tahun 2020	Perwako No. 31 Tahun 2020	Perwako No. 36 Tahun 2020	Perda No. 2 Tahun 2020	Perwako No. 64 Tahun 2020	Perwako No. 70 Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendapatan	595.419.550.986,00	595.419.550.986,00	595.419.550.986,00	522.376.858.086,00	509.376.858.086,00	518.570.568.086,00	518.870.568.086,00	540.497.720.688,66	541.993.175.328,66	546.345.635.456,66
Pendapatan Asli Daerah	97.543.849.569,00	97.543.849.569,00	97.543.849.569,00	76.911.999.036,00	63.911.999.036,00	63.911.999.036,00	63.911.999.036,00	67.181.021.098,66	67.181.021.098,66	67.181.021.098,66
Dana Perimbangan	469.901.641.367,00	469.901.641.367,00	469.901.641.367,00	417.015.599.000,00	417.015.599.000,00	426.209.309.000,00	426.509.309.000,00	444.961.306.119,00	446.456.760.759,00	450.809.220.887,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	27.974.060.050,00	27.974.060.050,00	27.974.060.050,00	28.449.260.050,00	28.449.260.050,00	28.449.260.050,00	28.449.260.050,00	28.355.393.471,00	28.355.393.471,00	28.355.393.471,00
Belanja	644.519.550.986,00	644.519.550.986,00	644.519.550.986,00	571.476.858.086,00	558.476.858.086,00	567.670.568.086,00	567.970.568.086,00	587.540.278.308,43	589.035.732.948,43	593.388.193.076,43
Belanja Tidak Langsung	286.759.620.843,00	286.749.170.843,00	301.499.170.843,00	293.229.986.448,00	325.184.198.152,00	324.916.389.152,00	324.916.389.152,00	298.306.906.012,71	298.306.906.012,71	298.306.906.012,71
Belanja Langsung	357.759.930.143,00	357.770.380.143,00	343.020.380.143,00	278.246.871.638,00	233.292.659.934,00	242.754.178.934,00	243.054.178.934,00	289.233.372.295,72	290.728.826.935,72	295.081.287.063,72
Surplus/(Defisit)	(49.100.000.000,00)	(49.100.000.000,00)	(49.100.000.000,00)	(49.100.000.000,00)	(49.100.000.000,00)	(49.100.000.000,00)	(49.100.000.000,00)	(47.042.557.619,77)	(47.042.557.619,77)	(47.042.557.619,77)
Pembiayaan	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77
Penerimaan Pembiayaan	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	47.042.559.619,77	47.042.559.619,77	47.042.559.619,77
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILPA Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Pencapaian Target Kinerja APBD

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2020 adalah merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2018. Seiring dengan perkembangan serta dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua tahun 2020, maka Pemerintah Kota Padang Panjang memandang perlu melakukan perubahan RKPD tahun 2020 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2020 dituangkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 44 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020.

Dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah, maka dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Padang Panjang, yaitu :

Tabel 9 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang

No	Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas Pembangunan RKPD
1	Peningkatan daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat
2	Peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan	Peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup
3	Menurunkan angka kemiskinan	Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran
4	Peningkatan pemerataan kualitas daya saing pendidikan dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang cerdas dan sehat
5	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih
6	Peningkatan aktivitas keagamaan di masyarakat	Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, maka dirumuskan serta ditetapkan program serta kegiatan yang merupakan rencana aksi yang lebih konkrit yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tanggal 31 Desember 2019 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020.

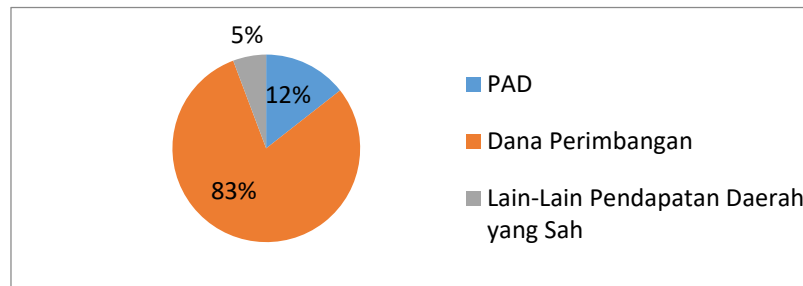
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 adalah : target pendapatan sebesar Rp 546.345.635.456,66; Belanja sebesar Rp 593.388.193.076,43 dan Pembiayaan sebesar Rp 47.042.557.619,77. Secara ringkas realisasi target kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10- Target dan Realisasi Kinerja Keuangan TA 2020

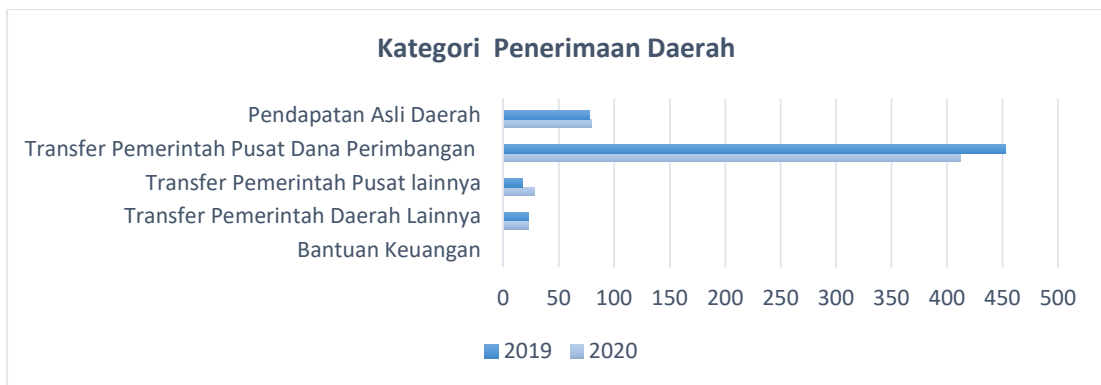
Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	% Realisasi	Selisih
Pendapatan	546.345.635.456,66	547.774.902.696,06	100,26	(1.429.267.239,40)
Pendapatan Asli Daerah	67.181.021.098,66	79.428.802.696,06	118,23	(12.247.781.597,40)
Dana Perimbangan	450.809.220.887,00	440.669.126.054,00	97,75	10.140.094.833,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	28.355.393.471,00	27.676.973.946,00	97,61	678.419.525,00
Belanja	593.388.193.076,43	544.006.534.759,84	91,68	49.381.658.316,59
Belanja Tidak Langsung	298.306.906.012,71	272.936.478.548,00	91,51	25.370.427.464,71
Belanja Langsung	295.081.287.063,72	271.070.056.211,84	91,86	24.011.230.851,88
Surplus/(Defisit)	(47.042.557.619,77)	3.768.367.936,22	(8,01)	(50.810.925.555,99)
Pembiayaan Daerah	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	(0,00)
Penerimaan Pembiayaan	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	(0,00)
Pengeluaran Pembiayaan	-	-		
SiLPA Tahun Berjalan	-	50.810.925.555,99	0,00	(50.810.925.555,99)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp547.774.902.696,66 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp546.345.635.456,66 atau 100,26% dari anggaran. Pencapaian pendapatan tersebut meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp79.428.802.696,06 dari target yang ditetapkan sebesar Rp67.181.021.098,66 atau 118,23% dari anggaran yang ditetapkan.
- 2) Dana perimbangan dengan realisasi mencapai sebesar Rp440.669.126.054,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp450.809.220.887,00 atau 97,75% dari anggaran yang telah ditetapkan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan realisasi sebesar Rp27.676.973.946,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp28.355.393.471,00 atau 97,61% dari anggaran yang telah ditetapkan.



Gambar 1 menggambarkan bahwa sumber pendapatan Pemerintah Kota Padang Panjang yang terbesar adalah Dana Perimbangan, yakni 83% dari total penerimaan APBD. Sementara sumbangan PAD terhadap total penerimaan APBD adalah 12%. Sedangkan sumbangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap penerimaan APBD adalah 5%. Selanjutnya Gambar 2 menunjukkan perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2020 dan 2019.



Gambar 2 Perbandingan Penerimaan Daerah Tahun 2020 dan 2019

Seperti dapat dilihat pada Gambar di atas, untuk kelompok PAD, penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp79,43 milyar meningkat jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2019 sebesar Rp77,32 milyar. Perbedaan cukup signifikan terdapat pada kelompok Dana Perimbangan dimana penerimaan tahun 2020 mencapai Rp412,71 milyar sementara penerimaan Tahun 2019 adalah Rp453,01 milyar. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan Dana Penyesuaian, dimana Kota Padang Panjang menerima dana ini di tahun 2020 sebesar Rp27,96 milyar sementara pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp17,24 milyar. Selanjutnya untuk jenis penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Tahun 2020 Pemerintah Kota Padang Panjang menerima sebesar Rp19,92 milyar sementara penerimaan Tahun 2019 lebih tinggi, yakni Rp22,53 milyar. Terakhir, untuk penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan, pada Tahun 2020, Kota Padang Panjang menerima sebesar Rp0,0 milyar sama dengan penerimaan Tahun 2019.

Pendapatan daerah tersebut digunakan untuk membiayai belanja daerah yang ada pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp593.388.193.076,43 dengan realisasi sebesar Rp544.006.534.759,84 atau 91,68%. Dari jumlah anggaran belanja daerah tersebut dialokasikan sebesar Rp298.306.906.012,71 atau 50,27% untuk belanja tidak langsung dengan realisasi sebesar Rp272.936.478.548,00 atau 91,50%. Secara ringkas penyerapan anggaran belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11 - Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2020

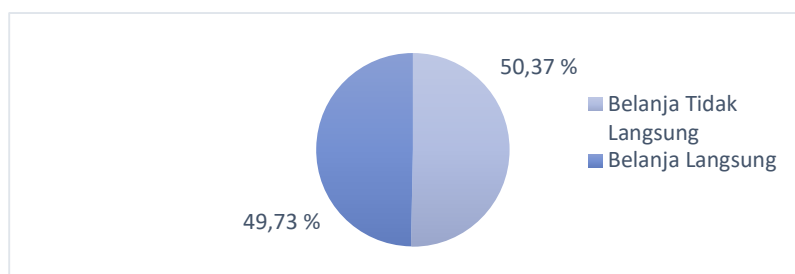
No.	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
1	Belanja Pegawai	260.447.447.190,71	243.421.203.426,00	17.026.243.764,71	93,46
2	Belanja Hibah	3.255.520.000,00	2.887.795.179,00	367.724.821,00	88,70
3	Belanja Bantuan Sosial	961.464.000,00	434.421.800,00	527.042.200,00	45,18
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kab./kota, pemerintahan desa dan partai politik	653.852.380,00	653.852.380,00	0,00	100,00
5	Belanja Tak Terduga	32.988.622.442,00	25.539.205.763,00	7.449.416.679,00	77,42
Jumlah		298.306.906.012,71	272.936.478.548,00	25.370.427.464,71	91,50

Sementara sisanya yakni 49,73% dari belanja daerah digunakan untuk belanja langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp295.081.287.063,72 dan realisasi anggaran sebesar Rp271.070.056.211,84 atau 91,86%. Berikut ini adalah rincian dari anggaran belanja langsung:

Tabel 12 - Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2020

No.	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
1	Belanja Pegawai	3.623.801.476,00	3.192.522.210,00	431.279.266,00	88,10
2	Belanja Barang dan Jasa	229.624.784.959,65	213.273.944.217,97	16.350.840.741,68	92,88
3	Belanja Modal	61.832.700.628,07	54.603.589.783,87	7.229.110.844,20	88,31
Jumlah		295.081.287.063,72	271.070.056.211,84	24.011.230.851,88	91,86

Perbandingan komposisi antara anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini:

*Gambar 3 Perbandingan Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung TA 2020*

Seperti terlihat pada Gambar di atas, 50,27% dari APBD Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan sisanya 49,73% digunakan sebagai belanja langsung.

Dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan di atas diperoleh defisit sebesar Rp47.042.557.619,77 yang ditutupi dengan pembiayaan daerah. Dari target pembiayaan tersebut dapat direalisasikan sesuai anggaran dan defisit sebesar Rp3.768.367.936,22. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp47.042.557.619,77 dengan realisasi sebesar Rp47.042.557.619,77 atau sebesar 100%. Realisasi penerimaan ini sepenuhnya berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Berikut ini adalah rincian dari pembiayaan daerah:

Tabel 13-Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2020

Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Surplus/(Defisit)	(47.042.557.619,77)	3.768.367.936,22
Penerimaan Pembiayaan	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77
SiLPA tahun Sebelumnya	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
Jumlah Pembiayaan Daerah	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77
SILPA	0,00	50.810.925.555,99

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja daerah, defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp47.042.557.619,77 dalam realisasinya terjadi surplus sebesar Rp3.768.367.936,22 Dengan jumlah realisasi pembiayaan netto sebesar Rp47.042.557.619,77, APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp50.810.925.555,99.

C. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah

Secara umum kegiatan yang sudah diprogram dan disusun pada tahun 2020 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Capaian realisasi kinerja Pendapatan untuk tahun 2020 sebesar Rp547.774.902.696,06 dari jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp546.345.635.456,66 atau 100,26%. Adapun rincian realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2020 pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut:

Tabel 14 - Rincian dan Realisasi Pendapatan-LRA Per OPD TA 2020

NO	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.600.000,00	3.150.000,00	56,25
2	Dinas Kesehatan	3.438.000.000,00	3.334.969.925,00	97,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	41.000.000.000,00	51.207.613.365,00	124,90
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	315.000.000,00	375.468.238,15	119,20
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	310.118.000,00	346.038.000,00	111,58
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	5.565.000,00	111,30
7	Dinas Pangan dan Pertanian	355.620.600,00	298.106.500,00	83,83
8	Dinas Perhubungan	1.841.998.180,00	2.038.963.740,00	110,69
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	34.500.000,00	19.150.000,00	55,51
10	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	248.984.000,00	239.729.000,00	96,28
11	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.738.081.205,00	1.895.657.575,00	109,07
12	PPKD	489.291.981.575,66	479.594.025.317,91	98,02
13	BPKD	7.374.458.856,00	8.039.391.115,00	109,02
14	Setdako	386.293.040,00	377.074.920,00	97,61
Total		546.345.635.456,66	547.774.902.696,06	100,26

Realisasi belanja Pemerintah Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 544.006.534.759,84 dari jumlah anggaran sebesar Rp593.388.193.076,43 atau 91,68%. Adapun rincian realisasi belanja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 15-Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja-LRA Per OPD TA 2020

NO	SKPD	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	105.867.739.671,71	97.884.199.832,00	92,46
2	Dinas Kesehatan	56.990.820.030,00	48.194.892.958,00	84,57
3	Rumah Sakit Umum Daerah	81.192.692.987,65	86.955.359.661,00	107,10
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.873.148.855,00	20.613.285.065,42	86,35
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	15.054.675.575,00	14.072.054.388,00	93,47
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.366.911.300,00	11.005.297.936,00	96,82
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.688.364.178,00	10.646.630.990,00	91,09
8	Dinas Pangan dan Pertanian	10.231.782.500,00	9.815.066.591,00	95,93
9	Dinas Kependudukan dan Capil	3.898.950.780,00	3.657.921.021,30	93,82
10	Dinas Perhubungan	8.251.505.000,00	7.901.269.448,00	95,76
11	Dinas Komunikasi dan Informasi	8.583.169.820,00	8.182.500.648,00	95,33
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.634.882.600,00	3.421.923.707,00	94,14
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.044.626.580,00	4.702.952.390,00	93,23
14	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	29.762.755.782,00	27.030.390.608,51	90,82
15	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	18.922.440.097,00	16.352.744.378,10	86,42
16	Inspektorat Daerah	5.721.159.800,00	5.293.422.298,00	92,52
17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.565.344.423,00	5.133.545.281,00	92,24
18	PPKD	37.859.458.822,00	29.515.275.122,00	77,966
19	Badan Pengelola Keuangan Daerah	21.739.446.576,00	18.022.050.263,24	82,90
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.755.323.247,00	5.634.937.343,00	64,36
21	Sekretariat Daerah	32.589.875.787,00	30.333.786.642,00	93,08
22	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	570.000.000,00	540.964.308,00	94,91
23	Sekretariat DPRD	27.861.048.138,07	24.814.039.728,07	89,06
24	DPRD	7.156.140.494,00	6.659.225.772,00	93,06
25	Kec. Padang Panjang Timur	21.601.304.650,00	20.102.055.804,20	93,06
26	Kec. Padang Panjang Barat	21.885.461.200,00	20.660.626.618,00	94,40
27	BPBD dan Kesbangpol	7.719.164.183,00	6.860.115.958,00	88,87
	Total	593.388.193.076,43	544.006.534.759,84	91,68

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan TA 2020 antara lain :

- a. Terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga berdampak kepada penurunan yang cukup signifikan dalam pencapaian pendapatan asli daerah karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam meringankan beban masyarakat terutama dunia usaha melalui kebijakan pemberian insentif berupa pembebasan pajak hotel, restoran, pajak parkir serta memberikan keringanan sewa pasar kepada pedagang dipasar;
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak kepada kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi daerah;
- c. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber dana yang tersedia.

Disamping faktor penghambat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, juga terdapat faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja, diantaranya adalah:

- a. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;

- b. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
- c. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/badan/kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal lainnya; dan
- e. Meningkatnya penyebarluasan informasi seperti himbauan mengenai pentingnya membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Menerapkan Sistem Informasi yang terhubung secara *host to host* dengan instansi terkait dalam pemungutan BPHTB, juga Sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah disusun dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan dasar atau acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Demikian juga pada pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah diubah sebanyak tiga (3) kali, yaitu dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2017, serta Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran/Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya dan ditujukan kepada entitas pelaporan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran di masing-masing OPD.

Dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga serta urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada tahun 2020 entitas akuntansi pengelola anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang terdiri dari 27 Entitas yaitu:

NO.	OPD
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Rumah Sakit Umum Daerah
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
8.	Dinas Pangan dan Pertanian
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.	Dinas Perhubungan
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
15.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16.	Inspektorat Daerah
17.	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
18.	PPKD
19.	Badan Pengelola Keuangan Daerah
20.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21.	Sekretariat Daerah
22.	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
23.	Sekretariat DPRD
24.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25.	Kecamatan Padang Panjang Timur
26.	Kecamatan Padang Panjang Barat
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Politik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD.

PPKD juga berfungsi sebagai entitas pelaporan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai wujud Pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode pelaporan (satu tahun anggaran).

2. *Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.*

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO dan Beban, maupun Pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Basis Kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan.

3. *Asumsi Dasar*

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan, agar standar dan kebijakan akuntansi dapat diterapkan. Demikian juga halnya dengan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang. Adapun asumsi tersebut terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit organisasi yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas juga bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya entitas serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi kesinambungan entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya, dengan artian bahwa pemerintah daerah tidak akan melikuidasi entitas pelaporan dalam jangka waktu pendek.

c. Asumsi keterukuran dalam mata uang (monetary measurement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Sedangkan pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan adalah berdasarkan kepada: Pertimbangan Sehat; Substansi Mengungguli Bentuk Formal; dan Materialitas.

4. *Dasar Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.*

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos (akun) dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos (akun) dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur dalam laporan keuangan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria :

- 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
- 2) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi

Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kota Padang Panjang dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa terlebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

- a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar.

- b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya

diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima di muka.

Pengukuran Pendapatan-LO diukur dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan pengeluaran.

c. Kebijakan Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja melalui SP2D-LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 4) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban diakui dengan kriteria:

- 1) Saat timbulnya kewajiban
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Pemerintah Kota Padang Panjang menerapkan pengakuan beban yang dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas untuk periode berjalan dan dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan. Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

e. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan atau ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas. Piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) karena piutang mempunyai kemungkinan tidak tertagih.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (net realizable value) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/umur piutang dan upaya penagihan. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban penyisihan piutang. Penyisihan terhadap piutang pajak yang tidak tertagih dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur piutang kurang dari 1 Tahun.
- b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- c) Wajib pajak kooperatif
- d) Wajib pajak likuid
- e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding

Penyisihan piutang tidak tertagih 0,5 %

2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun
- b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan
- c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan
- d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding

Penyisihan piutang tidak tertagih 10%

3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur Piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun.
- b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- c) Wajib pajak tidak kooperatif
- d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas

Penyisihan piutang tidak tertagih 50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur piutang lebih dari 5 tahun.
- b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.
- c) Wajib Pajak diketahui keberadaannya.
- d) Wajib Pajak bangkrut/ meninggal dunia.
- e) Wajib Pajak mengalami musibah.

Penyisihan piutang tidak tertagih 100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- 1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.Penyisihan piutang tidak tertagih 0,5 %
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.Penyisihan piutang tidak tertagih 10 %
 - 3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.Penyisihan piutang tidak tertagih 50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
 - 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani piutang Negara.Penyisihan piutang tidak tertagih 100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
- Penyisihan terhadap piutang selain pajak dan retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
- Kualitas lancar:
- Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- Penyisihan piutang tidak tertagih 0,5 %
- Kualitas Kurang Lancar:
- Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- Penyisihan piutang tidak tertagih 10 %
- Kualitas diragukan:
- Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- Penyisihan piutang tidak tertagih 50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Kualitas Macet:

Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara.

Penyisihan piutang tidak tertagih 100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

f. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Pertama, persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

Kemudian, pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik. Dengan metode ini pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan dan jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) pada akhir periode.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- 3) Nilai wajar

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*) dan Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

g. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Memenuhi nilai satuan minimal kapitalisasi.
- 7) Kapitalisasi aset tetap untuk Tahun Anggaran 2020 mengacu kepada Lampiran XX tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Padang Panjang No. 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sebagai berikut :
 - Alat Angkutan dan Alat Besar sebesar Rp10.000.000,00.
 - Peralatan dan Mesin Lainnya selain Alat Angkutan dan Alat Besar sebesar Rp750.000,00.

- Gedung dan Bangunan dengan nilai perolehan Rp10.000.000,00.
- Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp300.000,00.
- Aset Tetap Lainnya berupa Buku Perpustakaan sebesar Rp50.000,00.
- Ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak berlaku untuk tanah dan jalan, irigasi dan jaringan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

h. Kebijakan Akuntansi Penyusutan

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

- 1) Gedung dan Bangunan;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
- 4) Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap Renovasi.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset menganggur disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- 1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan dan :
- 2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud angka 3 tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.

Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap tahun dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan. Akumulasi Penyusutan merupakan pengurang pos Aset Tetap dan merupakan penambah Beban Penyusutan Aset Tetap.

i. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lain-lain, merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga maupun Aset Tak Berwujud. Aset Lain-lain dapat berupa Aset Tetap Pemerintah Kota Padang Panjang yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Padang Panjang.

j. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi jangka panjang, adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi Non Permanen:

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen meliputi investasi non permanen lainnya yaitu Dana Bergulir.

Investasi Permanen:

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara, serta investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Syarat pengakuan investasi, yaitu apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tingkat kepastian yang cukup akan manfaat ekonomi dan manfaat sosial, atau jasa potensial yang diperoleh di masa depan; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau andal.

k. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi dengan SAP

Kebijakan umum dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang merupakan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang digunakan;
- 2) Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan fungsi ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
- 3) Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan (satu tahun).

Komponen laporan keuangan yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 01) terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- f. Laporan Arus Kas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang ini disusun dengan mempedomani Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, sehingga diharapkan dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PSAP. Dan terhadap pos-pos (akun) yang belum biasa memenuhi ketentuan sesuai PSAP, dapat dilakukan koreksi sebagaimana mestinya dikemudian hari.

E. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019. Perwako Penjabaran APBD Tahun 2020 telah beberapa kali mengalami pergeseran untuk *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tanggal 28 Oktober 2020. Perwako perubahan APBD ini juga telah beberapa kali mengalami pergeseran sehingga mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 adalah : target pendapatan sebesar Rp540.497.720.688,66; Belanja sebesar Rp587.540.278.308,43; Transfer sebesar Rp653.852.380,00 dan Defisit sebesar Rp47.042.557.619,77. Defisit anggaran tahun 2020 ini ditutup dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp47.042.557.619,77.

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. PENDAPATAN-LRA

Tahun Anggaran 2020, target Pendapatan-LRA Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar Rp546.345.635.456,66 dan telah direalisasikan sebesar Rp547.774.902.696,06 atau sebesar 100,26%. Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2020 berupa :

- 1) Pendapatan Asli Daerah-LRA dan
- 2) Pendapatan Transfer-LRA
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
 - b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
 - c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Penjelasan terhadap pendapatan dan realisasi Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp67.181.021.098,66 dengan realisasi sebesar Rp79.428.802.696,06 atau 118,23%. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2019 sebesar Rp77.323.150.456,49 maka realisasi Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.105.652.239,57 atau 2,72%. Perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah-LRA adalah sebagai berikut:

(a) Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Untuk Tahun Anggaran 2020, Penerimaan Pajak Daerah-LRA ditargetkan sebesar Rp7.067.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.826.867.948,00 atau 110,75%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 sebesar Rp9.048.892.175,00 maka realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.222.024.227,00 atau 13,50%. Penurunan ini terjadi sebagai akibat langsung dari pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional. Beberapa kebijakan terkait relaksasi pajak terhadap pengusaha yang terimbas dengan menurunnya jumlah transaksi akibat diterapkannya PSBB dan juga menurunnya kondisi perekonomian secara makro membuat penerimaan pajak khususnya yang terkait secara langsung dengan akomodasi kepariwisataan, menurun secara drastis. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 16-Daftar Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020		REALISASI 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Pajak Hotel	180.000.000,00	213.873.074,00	118,82	534.083.145,00
2	Pajak Restoran	470.000.000,00	636.405.843,00	135,41	1.049.773.152,00
3	Pajak Hiburan	200.000.000,00	209.092.708,00	104,55	805.273.667,00
4	Pajak Reklame	160.000.000,00	169.508.950,00	105,94	195.468.450,00
5	Pajak Penerangan Jalan	2.725.850.000,00	2.752.773.406,00	100,99	2.795.247.514,00
6	Pajak Parkir	3.500.000,00	3.635.200,00	103,86	10.913.400,00
7	Pajak Air Tanah	8.000.000,00	8.683.000,00	108,54	99.084.593,00
8	PBB Pedesaan dan Perkotaan	775.000.000,00	827.893.892,00	106,83	983.772.004,00
9	Pajak BPHTB	2.545.000.000,00	3.005.001.875,00	118,07	2.575.276.250,00
J U M L A H		7.067.350.000,00	7.826.867.948,00	110,75	9.048.892.175,00

(b) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Target Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp4.389.233.520,00 dengan realisasi sebesar Rp4.656.919.048,15 atau 106,10%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2019 sebesar Rp4.624.073.616,67, maka realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp32.845.431,48 atau 0,71%. Anggaran dan realisasi retribusi daerah dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 17 - Target dan Realisasi Retribusi per Objek Retribusi Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	1.617.900.000,00	1.795.289.650,00	110,96	1.715.753.726,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.451.933.520,00	2.479.511.160,00	101,13	2.533.445.950,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	319.400.000,00	382.118.238,15	119,64	374.873.940,67
J U M L A H		4.389.233.520,00	4.656.919.048,15	106,10	4.624.073.616,67

Tabel 18 - Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	%	REALISASI 2019 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	224.000.000,00	184.338.400,00	82,29	264.666.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	454.054.000,00	541.760.000,00	119,32	622.051.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	513.752.000,00	591.086.000,00	115,05	350.162.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	202.224.000,00	201.745.250,00	99,76	243.194.726,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	185.870.000,00	241.995.000,00	130,20	199.680.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	5.565.000,00	111,30	5.050.000,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	33.000.000,00	28.800.000,00	87,27	30.950.000,00
J U M L A H		1.617.900.000,00	1.795.289.650,00	110,96	1.715.753.726,00

Tabel 19 - Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	%	REALISASI 2019 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	690.345.920,00	641.139.460,00	92,87	984.108.750,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	75.676.000,00	114.587.200,00	151,42	145.847.400,00
3	Retribusi Terminal	1.111.108.000,00	1.172.135.000,00	105,49	718.153.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	58.780.000,00	70.294.000,00	119,59	9.308.000,00
5	Retribusi Tempat Penginapan /Pesangrahan/Villa	14.000.000,00	7.000.000,00	50,00	12.200.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	143.100.000,00	143.730.000,00	100,44	171.000.000,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	173.388.000,00	194.724.000,00	112,31	310.516.000,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	185.535.600,00	135.901.500,00	73,25	182.312.800,00
J U M L A H		2.451.933.520,00	2.479.511.160,00	101,13	2.533.445.950,00

Tabel 20 - Target dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	%	REALISASI 2019 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	315.000.000,00	375.468.238,15	119,20	363.398.940,67
2	Retribusi Izin Trayek	4.400.000,00	6.650.000,00	151,14	11.500.000,00
J U M L A H		319.400.000,00	382.118.238,15	119,64	374.898.940,67

Selanjutnya rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

(c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp6.313.227.292,00 dan terealisasi sebesar Rp6.313.227.292,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2019 yang mencapai Rp6.058.783.025,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp254.444.267,00 atau 4,20%.

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pemerintah Kota Padang Panjang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari). Sedangkan dari PDAM tidak terealisasi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.690/477 tanggal 18 Februari 2009 supaya PDAM dibebaskan bila cakupan pelayanan belum mencapai 80%. Demikian juga dengan dan PT. Balairung juga tidak terealisasi

Tabel 21 - Daftar Realisasi Laba Dari Penyertaan Modal TA 2020 dan 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020		REALISASI 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Pendapatan Deviden PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Deviden PT. Bank Nagari	6.313.227.292,00	6.313.227.292,00	100,00	6.045.005.213,00
3	Pendapatan Deviden PT. Balairung	0,00	0,00	0,00	13.777.812,00
J U M L A H		6.313.227.292,00	6.313.227.292,00	100,00	6.058.783.025,00

(d) Lain-lain PAD yang Sah-LRA

Lain-lain PAD yang sah pada Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp49.411.210.286,66 dengan realisasi Rp60.631.788.407,91 atau 122,71%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp57.591.401.639,82 maka terjadi peningkatan sebesar Rp3.040.386.768,09 atau 5,28%. Rincian realisasi lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

2) Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp471.209.414.358,00 dan terealisasi Rp460.593.650.000,00 atau 97,75%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp492.851.788.491,00, pendapatan transfer tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp32.258.138.491,00 atau 6,55%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22 - Daftar Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	422.847.982.887,00	412.707.888.054,00	97,60	453.085.922.598,00
2	Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya	27.961.238.000,00	27.961.238.000,00	100,00	17.241.091.000,00
3	Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	20.400.193.471,00	19.924.523.946,00	97,67	22.524.774.893,00
J U M L A H		471.209.414.358,00	460.593.650.000,00	97,75	492.851.788.491,00

(a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2020 direncanakan sebesar Rp422.847.982.887,00 dengan realisasi sebesar Rp412.707.888.054,00 atau 97,60%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp453.085.922.598,00, realisasi pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp40.378.034.544,00 atau 8,91%.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan adalah sebagai berikut :

(1) Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak untuk Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp9.873.261.550,00 dengan realisasi Rp8.033.525.138,00 atau sebesar 81,37%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan bagi hasil pajak tahun 2019 sebesar Rp6.534.490.997,00 maka realisasi tahun 2020 naik sebesar Rp1.499.034.141,00 atau 22,94%.

(2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam untuk Tahun 2020, dianggarkan sebesar Rp2.816.684.569,00 dengan realisasi sebesar Rp1.948.433.875,00 atau 69,17%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam tahun 2019 sebesar Rp1.824.173.950,00 maka realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp124.259.925,00 atau 6,81%.

(3) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Tahun 2020 dianggarkan Rp354.367.009.000,00 dengan realisasi Rp352.753.271.000,00 atau 99,54%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum tahun 2019 sebesar Rp390.319.648.000,00, maka realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp37.566.377.000 atau 9,62%. Terdapat perbedaan antara jumlah penerimaan DAU di LRA dengan alokasi yang ditetapkan pada PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi *corona virus disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional :

DAU sesuai PMK 35/PMK.07/2020	Rp	354.367.009.000,00
DAU di LRA	Rp	352.753.271.000,00
Selisih	Rp	<u>1.613.738.000,00</u>

Selisih sebesar Rp1.613.738.000,00 merupakan bantuan pendanaan penggajian PPPK yang tidak diterima oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, karena pada tahun 2020 Pemerintah Kota Padang Panjang tidak memiliki PPPK.

(4) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Tahun 2020 dianggarkan Rp55.791.027.768,00 dengan realisasi Rp49.972.658.041,00 atau 89,57%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus tahun 2019 sebesar Rp54.407.609.651,00, maka

realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.434.951.610,00 atau 8,15%. DAK terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. DAK Fisik tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp26.108.765.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.662.282.442,00 atau 82,97%. Selanjutnya Pemerintah Kota Padang Panjang menganggarkan penerimaan DAK-Non Fisik tahun 2020 sebesar Rp29.682.262.768,00 yang terealisasi sebesar Rp28.310.375.599,00 atau 95,38%.

Tabel berikut memuat ringkasan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan :

Tabel 23 - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Bagi Hasil Pajak	9.873.261.550,00	8.033.525.138,00	81,37	6.534.490.997,00
	1. PBB Sektor Pertambangan	4.422.672.135,00	3.178.428.919,00	71,87	4.250.702.132,00
	2. PPh ps1 25 dan ps1 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh ps1 21	5.363.945.932,00	4.778.927.875,00	89,09	2.073.576.254,00
	3. Pajak Cukai Hasil Tembakau	86.643.483,00	76.168.344,00	87,91	210.212.611,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.816.684.569,00	1.948.433.875,00	69,17	1.824.173.950,00
	1. Pungutan Hasil Perikanan	1.647.661.150,00	788.276.289,00	47,84	689.340.471,00
	2. Pertambangan Panas Bumi	509.542.833,00	392.434.650,00	77,02	50.620.360,00
	3. SDA Kehutanan	188.572.586,00	112.375.400,00	59,59	174.585.901,00
	4. SDA Mineral dan Batubara	456.382.000,00	641.853.536,00	140,64	909.627.218,00
	5. SDA Minyak dan Gas Bumi	14.526.000,00	13.494.000,00	92,90	0,00
3	Dana Alokasi Umum	354.367.009.000,00	352.753.271.000,00	99,54	390.319.648.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	55.791.027.768,00	49.972.658.041,00	89,57	54.407.609.651,00
	1.DAK Fisik	26.108.765.000,00	21.662.282.442,00	82,97	32.848.378.130,00
	2.DAK Non Fisik	29.682.262.768,00	28.310.375.599,00	95,38	21.559.231.521,00
	Jumlah	422.847.982.887,00	412.707.888.054,00	97,60	453.085.922.598,00

(b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LRA berupa Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020 direncanakan sebesar Rp27.961.238.000,00 dengan realisasi sebesar Rp27.961.238.000,00 atau 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi DID tahun 2019 sebesar Rp17.241.091.000,00, maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp10.720.147.000,00 atau 62,18%.

(c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA

Untuk tahun anggaran 2020, Pemerintah Kota Padang Panjang merencanakan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp20.400.193.471,00 dengan realisasi sebesar Rp19.924.523.946,00 atau 97,67% yang keseluruhannya berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 24 - Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Bagi Hasil Pajak	20.400.193.471,00	19.924.523.946,00	97,67	22.524.774.893,00
	1. Bagi hasil pajak kendaraan bermotor	4.578.771.052,00	3.738.395.229,00	81,65	5.375.099.810,00
	2. Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	2.342.427.744,00	1.994.727.433,00	85,16	3.059.245.666,00
	3. Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	6.219.943.315,00	5.300.287.903,00	85,21	6.373.580.333,00
	4. Bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan	74.704.378,00	84.316.427,00	112,87	88.345.630,00
	5. Bagi hasil dari pajak rokok	7.184.346.982,00	8.806.796.954,00	122,58	7.628.503.454,00
	Jumlah	20.400.193.471,00	19.924.523.946,00	97,67	22.524.774.893,00

Dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2019 yang mencapai Rp22.524.774.893,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.600.250.947,00 atau 11,54%.

3) Lain –Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

(a) Pendapatan Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp7.955.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.752.450.000,00 atau 97,45%. Jika dibandingkan dengan pendapatan hibah dana BOS tahun 2019 sebesar Rp8.162.200.000,00, maka pendapatan hibah Dana BOS tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp409.750.000,00 atau 5,02%. Realisasi pendapatan hibah dana BOS tahun 2020 mencakup Dana BOS reguler.

Berikut pendapatan hibah Dana BOS 2020 :

Tabel 25 - Daftar Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri	4.722.300.000,00	4.610.730.000,00	97,64	4.677.800.000,00
2	Pendapatan Hibah Dana BOS SMP Negeri	3.232.900.000,00	3.141.720.000,00	97,18	3.484.400.000,00
	J U M L A H	7.955.200.000,00	7.752.450.000,00	97,45	8.162.200.000,00

Terdapat perbedaan antara dana BOS yang disalurkan berdasarkan NPHD Dana BOS antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang dan data Dapodik Tahun Anggaran 2020 dengan realisasi yang tercantum pada LRA.

Dana BOS berdasarkan NPHD dan Dapodik	Rp	7.910.050.000,00
Dana BOS di LRA	Rp	7.752.450.000,00
Selisih	Rp	157.600.000,00

Adapun selisih sebesar Rp157.600.000,00 tersebut merupakan pengembalian kelebihan salur dana BOS tahun 2019 ke RKUD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat No.900/305/Bagoen-2020 tanggal 12 Februari 2020.

Merujuk pada PSAP Nomor 10 (Revisi 2020) koreksi kesalahan, Pengembalian kelebihan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai koreksi kesalahan, namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.

b. BELANJA-LRA

Pada Tahun Anggaran 2020 belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar Rp592.734.340.696,43 dan sampai dengan 31 Desember 2020 telah direalisasikan sebesar Rp543.352.682.379,84 atau 91,67%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp599.638.333.339,32 maka realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp56.285.650.959,48 atau 9,39%.

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja tahun 2020 dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- 1) Belanja Operasi, terdiri dari:
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang;
 - c) Belanja Hibah;
 - d) Belanja Bantuan Sosial;
- 2) Belanja Modal, terdiri dari:
 - a) Belanja Tanah;
 - b) Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c) Belanja Gedung dan Bangunan;
 - d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
 - e) Belanja Aset Tetap Lainnya.
- 3) Belanja Tak Terduga

Rencana dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin pemerintah daerah yang memberi manfaat atau akan terpakai habis dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan selama tahun berjalan. Belanja operasi tahun 2020 direncanakan sebesar Rp497.913.017.626,36 dan terealisasi sebesar Rp463.209.886.832,97 atau 93,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp501.449.551.791,35, belanja operasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp38.239.664.958,38 atau 7,63%.

Realisasi belanja operasi tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26 -Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Belanja Operasi	497.913.017.626,36	463.209.886.832,97	93,03	501.449.551.791,35
	1. Belanja Pegawai	260.447.447.190,71	243.421.203.426,00	93,46	256.801.711.815,00
	2. Belanja Barang dan Jasa	233.248.586.435,65	216.466.466.427,97	92,81	237.099.834.485,35
	3. Belanja Hibah	3.255.520.000,00	2.887.795.179,00	88,70	5.253.694.572,00
	4. Belanja Bantuan Sosial	961.464.000,00	434.421.800,00	45,18	2.294.310.919,00
	Jumlah	497.913.017.626,36	463.209.886.832,97	93,03	501.449.551.791,35

Rencana dan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2020 terdiri dari :

(a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp260.447.447.190,71 dan terealisasi sebesar Rp243.421.203.426,00 atau 93,46%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yang mencapai Rp256.801.711.815,00, belanja pegawai Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.380.508.389,00 atau 5,21%.

Belanja pegawai meliputi Belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

Tabel 27 -Target dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Belanja gaji dan tunjangan	164.621.031.790,71	153.423.923.348,00	93,20	152.646.968.365,00
2	Belanja tambahan penghasilan PNS	93.596.772.500,00	87.818.825.561,00	93,83	100.474.265.316,00
3	Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.022.880.000,00	2.022.763.996,00	99,99	3.110.819.996,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	141.915.900,00	109.580.773,00	77,22	380.996.589,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	64.847.000,00	46.109.748,00	71,11	188.661.549,00
	Jumlah	260.447.447.190,71	243.421.203.426,00	93,46	256.801.711.815,00

Rincian dari komponen belanja pegawai diatas dapat dilihat pada **Lampiran 3.**

(b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa meliputi belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja sewa, belanja makanan dan minuman, belanja cetak dan penggandaan, belanja pakaian dinas, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya yang merupakan belanja untuk kegiatan operasional dan habis pakai. Di dalam komponen belanja barang dan jasa 2020 juga telah termasuk belanja barang dan jasa BLUD serta belanja dari dana BOS SD dan SMP Negeri.

Belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp233.248.586.435,65 dan telah terealisasi sebesar Rp216.466.466.427,97 atau 92,81%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp237.099.834.485,35, belanja barang dan jasa Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp20.633.368.057,38 atau 8,70%.

Tabel 28-Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Belanja Bahan Pakai Habis	11.222.193.568,00	10.030.582.246,00	89,38	6.402.615.507,00
2	Belanja Bahan/Material	12.789.808.462,00	8.242.333.498,53	64,44	8.825.519.476,72
3	Belanja Jasa Kantor	16.301.230.231,00	13.429.622.123,00	82,38	61.358.386.622,72
4	Belanja Premi Asuransi	10.043.947.000,00	8.659.568.819,24	86,22	7.767.748.168,43
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.847.886.202,00	2.252.253.754,00	79,09	6.580.559.472,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa	3.748.458.990,00	3.104.048.350,00	82,81	4.511.681.398,00
7	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.396.925.000,00	1.181.239.323,00	84,56	2.529.729.778,00
8	Belanja Sewa Alat Berat Belanja Sewa Perlengkapan dan	100.650.000,00	49.582.000,00	49,26	285.685.000,00
9	Peralatan Kantor	21.850.000,00	7.800.000,00	35,70	66.350.000,00
10	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan	808.971.000,00	432.093.000,00	53,41	1.052.882.500,00
11	Atributnya	10.660.037.889,00	8.481.946.033,00	79,57	11.993.157.193,00
12	Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Khusus dan	383.000.000,00	367.183.568,00	95,87	787.643.422,00
13	Hari-hari Tertentu	156.350.000,00	153.158.750,00	97,96	516.307.300,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	1.076.030.000,00	1.028.480.672,00	95,58	2.690.995.000,00
15	Belanja Pemeliharaan	25.898.550.001,00	22.847.752.121,00	88,22	34.065.445.344,00
16	Belanja Jasa Konsultasi	4.456.696.876,00	3.901.640.419,00	87,55	3.236.764.532,99
17	Belanja Beasiswa Pendidikan	1.545.527.500,00	1.371.908.550,00	88,77	3.644.990.748,00
18	PNS	0,00	0,00	0,00	34.560.000,00
19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Honorarium PNS	730.154.000,00	575.335.290,00	78,80	1.608.245.300,00
20	Honorarium Non PNS	10.067.481.906,00	8.572.685.492,00	85,15	3.968.633.326,00
21	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.343.327.054,00	65.580.129.927,00	93,23	18.737.984.612,77
22	Belanja Barang dan Jasa Dana	38.030.057.987,65	48.088.209.786,00	126,45	43.044.821.022,00
23	BOS	7.559.479.619,00	5.675.172.403,00	75,07	6.147.472.011,00
24	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	1.976.323.150,00	1.822.940.303,20	92,24	5.116.356.750,72
25	Belanja uang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	1.083.650.000,00	610.800.000,00	56,37	2.125.300.000,00
Jumlah		233.248.586.435,65	216.466.466.427,97	92,81	237.099.834.485,35

Uraian sampai dengan rincian objek dari belanja barang dan jasa di atas dapat dilihat pada Lampiran 4.

Realisasi Belanja barang dan jasa BLUD tahun 2020 melebihi anggaran yang ditetapkan karena demi kelancaran pelaksanaan pelayanan, BLUD RSUD telah menggunakan Dana Ambang Batas BLUD yang dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban terhadap belanja barang dan jasa. Merujuk pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 74 menyatakan bahwa

Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas tersebut merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitive. Ambang batas yang dimaksud merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.

Belanja BLUD 2020 yang melampaui ambang batas telah mendapat persetujuan dari Walikota Padang Panjang. Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Padang Panjang pasal 25 menyatakan bahwa BLUD dapat melakukan pengeluaran biaya atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan. Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA. Adapun besaran ambang batas RSUD ditetapkan paling banyak 10% dari target pendapatan selama setahun.

Untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat /pihak ketiga dan belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/ pihak ketiga dapat dirinci per OPD sebagai berikut :

1. Barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga		
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	951.501.900,00
- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	33.120.000,00
- Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Rp	155.200.000,00
- Kecamatan Padang Panjang Timur	Rp	374.975.403,20
- Kecamatan Padang Panjang Barat	Rp	59.509.000,00
- BPBD Kesbangpol	Rp	248.634.000,00
		Rp 1.822.940.303,20
2. Uang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga		
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	15.000.000,00
- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	124.100.000,00
- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Rp	131.300.000,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	55.500.000,00
- Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Rp	58.500.000,00
- Sekretariat Daerah	Rp	116.000.000,00
- Kecamatan Padang Panjang Timur	Rp	51.850.000,00
- Kecamatan Padang Panjang Barat	Rp	58.550.000,00
		Rp 610.800.000,00

Barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan jumlah Rp951.501.900,00 merupakan pengadaan alat peraga dan sarana pendidikan yang diserahkan ke beberapa SD dan SMP swasta di Kota Padang Panjang dengan sumber dana dari DAK Bidang Pendidikan SD dan DAK Bidang Pendidikan SMP.

Barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan jumlah Rp33.120.000,00 merupakan belanja hadiah berupa piala untuk Lomba Gerakan PKK, Jambore PKK Tingkat Kota, Posyandu dan Dasawisma pada kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebesar Rp155.200.000,00 terdiri dari bantuan isi gerobak sebanyak 22 paket kepada pelaku usaha mikro sebesar Rp65.600.000,00 dan bantuan untuk isi warung kepada 30 UMKM sebesar Rp89.600.000,00 pada kegiatan fasilitasi pengembangan UMKM (smart UMKM).

Barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan jumlah Rp374.975.403,20 terdiri dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebesar Rp359.975.403,20 dan belanja komputer dan buku untuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di kelurahan Koto Panjang pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp15.000.000,00.

Barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Kecamatan Padang Panjang Barat dengan jumlah Rp59.509.000,00 merupakan belanja untuk perbaikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) atau Pojok Baca RT VII Kelurahan Silaing Bawah dan penyediaan kran umum RT XI Gang SMPN 2 Kota Padang Panjang pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan.

Barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada BPBD Kesbangpol dengan jumlah Rp248.634.000,00 merupakan belanja bahan bangunan untuk rehab bangunan Secata dan Koramil pada kegiatan pelaksanaan forum koordinasi dan diskusi stabilitas daerah.

Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dengan jumlah total sebesar Rp610.800.000,00 merupakan hadiah lomba/reward kepada masyarakat/pihak ketiga.

(c) Hibah

Belanja hibah tahun 2020 direncanakan sebesar Rp3.255.520.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.887.795.179,00 atau 88,70%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 29-Target dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	200.000.000,00	199.200.000,00	99,60	0,00
2	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	546.170.241,00
3	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	1.467.000.000,00	1.222.575.000,00	83,34	1.233.419.350,00
4	Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Non Profesi	911.620.000,00	829.870.679,00	91,03	2.406.217.981,00
5	Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Bidang Keagamaan	387.400.000,00	346.649.500,00	89,48	653.887.000,00
6	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
7	BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	289.500.000,00	289.500.000,00	100,00	234.000.000,00
Jumlah		3.255.520.000,00	2.887.795.179,00	88,70	5.253.694.572,00

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp5.253.694.572,00, realisasi belanja hibah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.365.899.393,00 atau 45,03%. Adapun rincian dari komponen Belanja hibah tahun anggaran 2019 diatas dapat dilihat pada **Lampiran 5.**

(d) Bantuan Sosial

Untuk Tahun 2020, Belanja Bantuan Sosial, direncanakan sebesar Rp961.464.000,00. Dan telah terealisasi sebesar Rp434.421.800,00 atau 45,18%. Belanja Bantuan Sosial terdiri dari :

Tabel 30-Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Belanja Bantuan Sosial	961.464.000,00	434.421.800,00	45,18	2.294.310.919,00
1.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	925.204.000,00	434.421.800,00	46,95	544.310.919,00
2.	Belanja Bantuan Sosial Individu dan/atau Keluarga Berkekaan	0,00	0,00	0,00	1.750.000.000,00
3.	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana	36.260.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		961.464.000,00	434.421.800,00	45,18	2.294.310.919,00

Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat dengan realisasi sebesar Rp434.421.800,00 merupakan bantuan pendidikan kepada masyarakat kurang mampu.

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.294.310.919,00, maka realisasi belanja bantuan sosial tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.859.889.119,00 atau 81,07%. Penyebab penurunan ini adalah tidak terealisasinya bantuan pangan non tunai karena penerima manfaat juga telah menerima bantuan tersebut dari dana Bantuan Tidak Terduga. Selain itu pada tahun 2020 Pemerintah Kota Padang Panjang juga tidak menerima anggaran untuk bantuan rehab rumah tidak layak huni dari Pemerintah Pusat.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp61.832.700.628,07 dan direalisasikan sebesar Rp54.603.589.783,87 atau 88,31%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp98.188.781.547,97 maka belanja modal Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp43.585.191.764,10 atau 44,39%. Belanja Modal terdiri atas lima kelompok utama seperti Tabel berikut ini :

Tabel 31 – Target dan Realisasi Belanja Modal TA 2020

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Belanja Tanah	17.811.014.260,00	17.466.718.833,00	98,07	24.610.900,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	20.305.519.399,00	16.850.495.356,30	82,98	24.831.522.321,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	8.395.817.788,07	7.663.481.704,67	91,28	30.067.237.581,88
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.209.606.775,00	8.201.107.926,89	80,33	38.797.005.337,34
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.894.042.406,00	4.211.260.463,01	86,05	4.468.405.407,75
6	Belanja Aset Lainnya	216.700.000,00	210.525.500,00	97,15	0,00
J U M L A H		61.832.700.628,07	54.603.589.783,87	88,31	98.188.781.547,97

Berikut adalah penjelasan masing-masing kelompok belanja modal.

(a) Belanja Modal Tanah

Untuk Tahun Anggaran 2020, Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp17.811.014.260,00 dengan realisasi sebesar Rp17.466.718.833,00 atau sebesar 98,07%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp24.610.000,00, maka realisasi belanja modal tanah pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp17.442.107.933,00 atau 70.871,48%. Kenaikan ini disebabkan karena pengadaan tanah untuk pembangunan Sport Center pada tahun 2020. Berikut realisasi belanja modal pengadaan tanah:

Tabel 32 – Target dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	17.811.014.260,00	17.466.718.833,00	98,07	24.610.000,00
Belanja Modal Tanah		17.811.014.260,00	17.466.718.833,00	98,07	24.610.000,00

(b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin di Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp20.305.519.399,00 dengan realisasi sebesar Rp16.850.495.356,30 atau 82,98%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yang mencapai Rp24.831.522.321,00, maka realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.981.026.964,70 atau 32,14%. Berikut realisasi belanja modal peralatan dan mesin per objek belanja:

Tabel 33 - Daftar Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Pengadaan Alat-alat Besar Darat	122.850.000,00	74.350.000,00	60,52	0,00
2	Pengadaan Alat-alat Bantu	606.543.000,00	504.642.100,00	83,20	1.209.938.000,00
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.376.150.000,00	3.196.198.000,00	94,67	973.830.375,00
4	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	26.792.200,00	25.714.000,00	95,98	45.750.000,00
5	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	6.950.000,00	6.888.000,00	99,11	3.088.305,00
6	Pengadaan Alat Ukur	210.933.000,00	199.728.740,00	94,69	14.500.000,00
7	Pengadaan Alat Kantor	1.991.834.200,00	1.555.590.300,00	78,10	92.993.075,00
8	Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.228.499.600,00	1.872.375.732,00	84,02	2.070.660.530,00
9	Pengadaan Komputer	2.074.570.000,00	1.572.637.800,30	75,81	3.046.717.190,00
10	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	101.210.000,00	95.984.700,00	94,84	90.335.600,00
11	Pengadaan Alat Studio	403.200.000,00	350.108.700,00	86,83	2.196.194.970,00
12	Pengadaan Alat Komunikasi	44.177.976,00	42.654.000,00	96,55	101.245.000,00
13	Pengadaan Alat Kedokteran	438.850.000,00	288.018.028,00	65,63	234.244.194,50
14	Pengadaan Alat Kesehatan	2.641.655.000,00	2.110.005.142,00	79,87	10.133.456.014,50
15	Pengadaan Unit-unit Laboratorium	294.000.000,00	293.948.400,00	99,98	217.530.000,00
16	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.441.200.000,00	1.545.068.809,00	63,29	686.692.400,00
17	Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	39.338.423,00	32.871.300,00	83,56	0,00
18	Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	938.540.000,00
19	Belanja Modal BLUD	3.179.716.000,00	3.007.371.605,00	94,58	2.775.806.667,00
20	Peralatan Komunikasi Navigasi	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	0,00
21	Alat Pengeboran Mesin	3.200.000,00	3.140.000,00	98,13	0,00
22	Alat Pelindung	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50	0,00
23	Alat SAR	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
24	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	30.000.000,00	29.850.000,00	99,50	0,00
J U M L A H		20.305.519.399,00	16.850.495.356,30	82,98	24.831.522.321,00

(c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan di tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp8.395.817.788,07 dengan realisasi Rp7.663.481.704,67 atau 91,28%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yang mencapai Rp30.067.237.581,88, realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp22.403.755.877,21 atau 74,51%.

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk pengadaan/konstruksi/pembelian bangunan/gedung pemerintah termasuk rehabilitasi bangunan/gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas maupun bangunan lainnya yang dikuasai oleh pemerintah. Berikut realisasi belanja modal gedung dan bangunan per objek belanja:

Tabel 34 - Daftar Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.776.087.788,07	6.240.083.317,17	92,09	25.897.546.220,08
2	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	890.770.000,00	714.553.530,00	80,22	1.657.560.857,66
3	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	7.830.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Candi	50.000.000,00	42.557.000,00	85,11	0,00
5	Belanja modal Pengadaan Rambu-rambu	678.960.000,00	666.287.857,50	98,13	261.849.937,00
6	Belanja Modal Bangunan Wisata	0,00	0,00	0,00	2.242.450.567,14
J U M L A H		8.395.817.788,07	7.663.481.704,67	91,28	30.067.237.581,88

(d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp10.209.606.775,00 dengan realisasi sebesar Rp8.201.107.926,89 atau 80,33%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp38.797.005.337,34, maka realisasi belanja modal Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp30.595.897.410,45 atau 78,86%.

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk pengadaan ataupun kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan, jaringan air, saluran drainase/gorong-gorong/riol, instalasi listrik dan jaringan listrik. Berikut realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan:

Tabel 35 - Daftar Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Pengadaan Jalan	6.492.946.975,00	5.181.417.521,88	79,80	26.448.182.992,64
2	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.614.825.000,00	1.138.267.282,01	70,49	1.624.031.645,99
3	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	200.863.800,00	191.649.720,00	95,41	3.468.389.186,71
4	Pengadaan bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	150.000.000,00	149.327.650,00	99,55	48.400.000,00
5	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	800.000.000,00	639.639.000,00	79,95	0,00
6	Pengadaan Bangunan Air Kotor	77.167.200,00	77.167.200,00	100,00	6.029.267.100,00
7	Pengadaan bangunan air	0,00	0,00	0,00	288.177.937,00
8	Pengadaan Instalasi Air Kotor	633.887.000,00	619.130.353,00	97,67	0,00
9	Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	0,00	0,00	0,00	49.136.475,00
10	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	7.301.000,00	5.704.000,00	78,13	275.664.000,00
11	Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	11.997.000,00
12	Pengadaan Jaringan Listrik	232.615.800,00	198.805.200,00	85,47	553.759.000,00
J U M L A H		10.209.606.775,00	8.201.107.926,89	80,33	38.797.005.337,34

(e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp4.894.042.406,00 dengan realisasi sebesar Rp4.211.260.463,01 atau 86,05%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp4.468.405.407,75 maka realisasi belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp257.144.944,74 atau 5,75%. Belanja modal aset tetap lainnya mencakup pengadaan buku perpustakaan dan pengadaan barang bercorak kebudayaan. Berikut daftar realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020:

Tabel 36-Daftar Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Belanja modal Pengadaan Buku	761.200.000,00	749.895.576,00	98,51	237.082.400,00
2	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perrustakaan	1.973.841.000,00	1.572.393.892,01	79,66	0,00
3	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	198.000.000,00
4	Belanja modal Pengadaan Alat Olahraga Lainnya	148.500.000,00	123.718.000,00	83,31	57.645.000,00
5	Belanja modal Dana BOS	2.010.501.406,00	1.765.252.995,00	87,80	907.217.945,00
6	Belanja modal Pengadaan Lampu/Lighting	0,00	0,00	0,00	1.829.666.200,00
7	Belanja modal Pengadaan Software	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
8	Belanja modal reklame	0,00	0,00	0,00	133.350.000,00
9	Belanja modal sarana dan prasarana taman	0,00	0,00	0,00	1.080.443.862,75
J U M L A H		4.894.042.406,00	4.211.260.463,01	86,05	4.468.405.407,75

(f) Belanja Modal Aset Lainnya.

Belanja modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp216.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp210.525.500,00 atau 97,15%. Belanja modal aset lainnya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2019 tidak terdapat realisasi belanja modal pengadaan aset lainnya. Belanja modal aset lainnya tahun 2020 berupa pengadaan software.

c. Belanja Tak Terduga

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang. Anggaran Belanja Tak Terduga pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp32.988.622.442,00 dan terealisasi sebesar Rp25.539.205.763,00 atau 77,42%. Belanja tak terduga tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena pada tahun 2019 tidak terdapat realisasi belanja tak terduga. Pos belanja tak terduga tahun 2020 digunakan untuk melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Adapun rincian realisasi dana BTT dari OPD yang menerima penyaluran Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1.	Dinas Sosial		Rp 13.136.860.600,00
	-Belanja distribusi bantuan beras	27.280.000,00	
	-Belanja bantuan langsung tunai (BLT)	12.725.553.100,00	
	-Belanja makan minum	63.050.500,00	
	-Insentif	320.977.000,00	
2.	RSUD		Rp 4.018.114.403,00
	-Belanja Alat Pelindung Diri (APD)	2.219.906.380,00	
	-Belanja alat kesehatan rawatan	421.589.818,00	
	-Belanja insentif petugas	1.179.320.455,00	
	-Belanja obat PDP positive COVID-19	1.300.000,00	
	-Makan minum petugas yang diisolasi	13.897.750,00	
	-Belanja Sewa tempat/penginapan isolasi	70.700.000,00	
	-Insentif non nakes	111.400.000,00	
3.	Dinas Kesehatan		Rp 753.998.250,00
	-Belanja APD (Alat Pelindung Diri)	358.038.250,00	
	-Insentif Petugas	395.960.000,00	
4.	Dinas Perkim LH		Rp 92.574.800,00
	-Belanja APD Petugas Sampah Harian (sampah covid)	38.901.300,00	
	-Belanja APD petugas pengantar ke tempat pemusnahan	15.061.000,00	
	-Peralatan persampahan	2.662.500,00	
	-Biaya perjalanan pengangkutan sampah covid	35.950.000,00	
5.	BPBD Kesbangpol		Rp 3.162.139.410,00
	-Belanja kebutuhan barang	938.523.560,00	
	-Belanja makan minum	810.715.850,00	
	-Insentif petugas	1.402.400.000,00	
	-Honorarium PPK	10.500.000,00	
6.	Dinas Pangan dan Pertanian		Rp 319.849.300,00
	-Belanja pembelian susu untuk petugas COVID-19	82.626.800,00	
	-Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang terdampak covid di bidang peternakan(peternak sapi)	72.752.000,00	
	-Belanja pembelian bibit, pakan dan sarana budidaya perikanan	35.390.500,00	
	-Bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	129.080.000,00	
7.	Dinas Koperindag		Rp 4.055.669.000,00
	-Bantuan modal bagi pelaku usaha mikro yang terdampak COVID-19 sebanyak 2.010 UMKM @Rp2.000.000,00	4.020.000.000,00	
	-Honor tim	21.000.000,00	
	-Makan minum tim	8.221.500,00	
	-Belanja cetak, ATK dan fotokopi kegiatan penyaluran bantuan modal	6.447.500,00	
	JUMLAH		Rp 25.539.205.763,00

c. TRANSFER

Untuk Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Padang Panjang menganggarkan transfer sebesar Rp653.852.380,00 dan terealisasi sebesar Rp653.852.380,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang realisasinya mencapai Rp565.929.412,00, maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp87.922.968,00 atau 15,54%. Rincian realisasi transfer bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 - Daftar Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2020

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Bantuan Keuangan kepada Partai Bulan Bintang	79.308.303,00	79.308.303,00	100,00	65.392.295,00
2	Bantuan Keuangan kepada Partai NasDem	98.905.995,00	98.905.995,00	100,00	69.882.895,00
3	Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	75.167.615,00	75.167.615,00	100,00	64.284.000,00
4	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	61.310.424,00	61.310.424,00	100,00	49.425.383,00
5	Bantuan Keuangan kepada Partai Golkar	86.413.349,00	86.413.349,00	100,00	100.192.142,00
6	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0,00	0,00	0,00	17.978.274,00
7	Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	110.081.149,00	110.081.149,00	100,00	95.588.738,00
8	Bantuan Keuangan kepada Partai Gerindra	103.634.849,00	103.634.849,00	100,00	86.932.895,00
9	Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	39.030.696,00	39.030.696,00	100,00	16.252.790,00
J U M L A H		653.852.380,00	653.852.380,00	100,00	565.929.412,00

d. PEMBIAYAAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 direncanakan defisit sebesar Rp47.042.557.619,77 dengan realisasi surplus sebesar Rp3.768.367.936,22. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan Pemerintah Kota Padang Panjang lebih besar dari belanja yang dibayarkan pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dimana realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Padang Panjang mengalami defisit sebesar Rp21.867.123.803,83, maka pada tahun 2020 terjadi penurunan defisit sebesar Rp18.098.755.867,61. Rencana dan realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp47.042.557.619,77 dengan realisasi sebesar Rp47.042.557.619,77 atau 100%. Jika dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan tahun 2019 sebesar Rp68.909.681.423,60, maka realisasi pembiayaan di tahun 2020 mengalami penurunan Rp21.867.123.803,83 atau 31,73%.

Realisasi pembiayaan Tahun 2020 sepenuhnya berasal dari penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Saldo Kas Daerah	Rp	42.487.887.202,12
2.	Kas di Rekening BLUD RSUD	Rp	9.773.987,65
3.	Kas di Rekening BLUD Dana Bergulir	Rp	340.436.618,00
4.	Kas di Rekening JKN	Rp	2.579.983.284,00
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran OPD	Rp	9.107.752,00
6.	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	Rp	0,00
7.	Kas BOS	Rp	1.615.368.776,00
	JUMLAH	Rp	47.042.557.619,77

2) Pengeluaran pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Padang Panjang tidak merencanakan Pengeluaran Pembiayaan. Jika dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp0,00, maka realisasi tahun 2020 bersifat tetap.

3) Pembiayaan Netto

Selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto. Pembiayaan netto Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp47.042.557.619,77 dan telah terealisasi sebesar Rp47.042.557.619,77 atau 100%.

4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan netto ditambah dengan surplus/(defisit) merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Jumlah SiLPA per 31 Desember 2020 sebesar Rp50.810.925.555,99. Dibandingkan dengan SiLPA tahun 2019 dimana SiLPA tercatat berjumlah Rp47.042.557.619,77 maka SiLPA tahun 2020 naik sebesar Rp3.768.367.936,22 atau 8,01%. Rincian SiLPA tahun 2020 terdiri dari:

1.	Saldo Kas Daerah (Bank Nagari rek 0900.0101.00203.3)	Rp	45.402.569.252,34
2.	Kas di Bendahara BLUD	Rp	660.143.121,65
	- Kas di rekening BLUD RSUD	Rp	279.024.366,65
	- Kas di bendahara BLUD RSUD	Rp	6.883.063,00
	- Kas BLUD Dana Bergulir	Rp	374.235.692,00
3.	Kas di Rekening JKN	Rp	2.743.098.804,00
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran OPD	Rp	36.000.000,00
5.	Kas di Bendahara Penerimaan OPD	Rp	41.721.000,00
6.	Kas BOS	Rp	1.927.393.378,00
7.	Jumlah Kas	Rp	50.810.925.555,99
8.	SiLPA	Rp	50.810.925.555,99
9.	Selisih Kas dan SiLPA	Rp	0,00

2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Rincian atas masing-masing akun pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo anggaran lebih awal untuk Tahun 2020 sebesar Rp47.042.557.619,77 adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019.

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 yang menjadi penerimaan pembiayaan pada Tahun 2020. Dan seluruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp47.042.557.619,77 menjadi penerimaan pembiayaan dan digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada Tahun 2020.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp50.810.925.555,99 berasal dari surplus sebesar Rp3.768.367.936,22 ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp47.042.557.619,77.

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan bisa berpengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan tersebut tidak bisa diandalkan lagi. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan Saldo Anggaran Lebih dan saldo ekuitas. Pada Tahun 2020 tidak ditemui adanya kesalahan yang mengharuskan dilakukannya koreksi terhadap laporan-laporan periode sebelumnya.

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Nilai saldo anggaran lebih akhir merupakan nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran dikurangi Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya. Pada Tahun 2020 nilai saldo anggaran lebih akhir adalah sebesar Rp50.810.925.555,99 yang terdiri dari SiLPA Tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)
1	Realisasi pendapatan	547.774.902.696,06
2	Realisasi belanja dan transfer	544.006.534.759,84
3	Surplus/defisit (1-2)	3.768.367.936,22
4	Pembiayaan netto	47.042.557.619,77
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 3+4	50.810.925.555,99

Saldo anggaran lebih Tahun 2020 sebesar Rp50.810.925.555,99 terdiri dari:

1.	Saldo Kas Daerah (Bank Nagari rek 0900.0101.00203.3)	Rp	45.402.569.252,34
2.	Kas di Bendahara BLUD	Rp	660.143.121,65
	- Kas di rekening BLUD RSUD	Rp	279.024.366,65
	- Kas di bendahara BLUD RSUD	Rp	6.883.063,00
	- Kas BLUD Dana Bergulir	Rp	374.235.692,00
3.	Kas di Rekening JKN	Rp	2.743.098.804,00
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran OPD	Rp	36.000.000,00
5.	Kas di Bendahara Penerimaan OPD	Rp	41.721.000,00
6.	Kas BOS	Rp	1.927.393.378,00
7.	Jumlah	Rp	50.810.925.555,99

3. Penjelasan Akun-Akun Neraca

Neraca Pemerintah Kota Padang Panjang menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2020 dengan nilai Aset sebesar Rp1.249.655.188.297,43 dan Rp1.253.357.292.656,43 untuk nilai aset Tahun 2019. Kewajiban Tahun 2020 sebesar Rp12.632.361.642,70 dan Tahun 2019 sebesar Rp17.906.832.365,57 serta Ekuitas sebesar Rp1.237.022.826.654,73 dan Rp1.235.450.460.290,86 Tahun 2019. Rincian atas masing-masing akun di Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

a. Aset Lancar	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	80.233.449.452,22	78.730.575.898,65

Aset Lancar adalah Kas dan Setara Kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar Pemerintah Kota Padang Panjang per 31 Desember 2020 berjumlah Rp80.233.449.452,22. Jika dibandingkan dengan jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp78.730.575.898,65 maka jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.502.873.553,57 atau 1,91%. Aset Lancar per 31 Desember 2020 terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	48.145.668.056,34	45.067.870.486,12

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 disajikan sebesar Rp48.145.668.056,34. Jika dibandingkan dengan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp45.067.870.486,12 maka saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp3.077.797.570,22 atau 6,83%.

Saldo Kas di Kas Daerah Tahun 2020 sebesar Rp48.145.668.056,34 terdiri atas saldo kas di Kas Umum Daerah (Rek No.0900.0101.00203.3-Bank Nagari) sebesar Rp45.402.569.252,34 dan Kas pada rekening JKN sebesar Rp2.743.098.804,00.

Sedangkan rincian Kas pada rekening JKN sebesar Rp2.743.098.804,00 sebagai berikut:

Tabel 38 - Kas di Kas JKN Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama Bank	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	BPD 0900.0101.00174.5 (JKN Puskesmas Busur)	1.048.384.559,00	918.089.369,00
2	BPD 0900.0101.00166.4 (JKN Puskesmas Koto Katiak)	331.231.114,00	377.428.322,00
3	BPD 0900.0101.00168.8 (JKN Puskesmas Kebun Sikolos)	789.315.362,00	695.975.010,00
4	BPD 0900.0101.00171.1 (JKN Puskesmas Gunung)	574.167.769,00	588.490.583,00
Jumlah		2.743.098.804,00	2.579.983.284,00

Terhadap saldo kas di Kas Umum Daerah Tahun 2020 sebesar Rp45.402.569.252,34 tersebut juga mengandung sisa dana peruntukan tertentu sebesar Rp7.665.347.777,00 dengan rincian sebagai berikut :

1	Sisa dana DAK fisik Tahun 2020	742.632.210,00
2	Sisa dana DAK Non Fisik Tahun 2020	1.551.587.424,00
3	Sisa dana DID	5.371.128.143,00
Jumlah		7.665.347.777,00

Dalam hal manajemen kas Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan *single treasury account*, menetapkan rekening BPD 0900.0101.00203.3 sebagai rekening kas umum daerah. Rekening ini berfungsi sebagai penerima transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Propinsi dan rekening penerimaan PAD. Disamping itu, Pemerintah Kota Padang Panjang juga menetapkan satu buah rekening BPD (Rekening Nomor 0900.0101.00204.6) sebagai penampung seluruh penerimaan potongan pihak ketiga (PFK) dan membayar seluruh pengeluaran terhadap pihak ketiga dengan saldo per 31 Desember 2020 adalah Rp0,00.

Penetapan rekening Pemerintah Kota Padang Panjang adalah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 900/5/WAKO-PP/2015 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan rekening kas umum daerah Pemerintah Kota Padang Panjang pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) cabang Padang Panjang.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	40.745.306,00	9.349.164,00

Akun ini merupakan saldo Kas per 31 Desember 2020 yang masih berada pada Pemegang Kas di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk saldo Uang Persediaan (UP) dan Utang Pajak.

Jika dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.349.164,00 maka saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp31.396.142,00 atau 335,82%.

a) Saldo Uang Persediaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	36.000.000,00	9.107.752,00

Saldo Uang Persediaan yang masih ada di Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.000.000,00. Saldo ini merupakan uang yang diserahkan kepada pelaku usaha mikro untuk bantuan modal dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat *corona virus disease 2019* (COVID-19) yang berasal dari dana belanja tak terduga, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 masih berada di rekening penerima bantuan yang tidak bisa dicairkan karena yang bersangkutan menerima bantuan lain (BST) atau penerima ganda dalam 1 (satu) KK, sehingga rekeningnya diblokir oleh Bank Nagari. Saldo sebesar Rp36.000.000,00 tersebut terdiri dari 18 UMKM @Rp2.000.000,00 dan telah disetor ke Kasda pada tanggal 10 Februari 2021.

Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp9.107.752,00, maka saldo uang persediaan yang masih berada di bendahara pengeluaran Tahun 2020 mengalami kenaikan Rp26.892.248,00 atau 295,27%.

b) Saldo kas lainnya	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	4.745.306,00	241.412,00

Saldo kas lainnya pada bendahara pengeluaran merupakan pajak yang sudah dipungut oleh bendahara pengeluaran OPD tetapi belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2020 yang terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan	Rp	1.679.590,00
2. RSUD	Rp	1.655.716,00
3. BPBD Kesbangpol	Rp	<u>1.410.000,00</u>
	Jumlah	Rp <u>4.745.306,00</u>

Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp241.412,00, maka saldo kas lainnya tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp4.503.894,00 atau 1.865,65%.

Terhadap saldo kas di bendahara pengeluaran berupa saldo kas lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Kas lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.679.590,00 merupakan pemungutan PPh pasal 21 sebesar Rp118.500,00, PPh pasal 22 sebesar Rp75.180,00, PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp545.455,00 dan PPN sebesar Rp940.455,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum disetorkan ke kas negara. Terhadap utang pajak sebesar Rp Rp1.679.590,00 tersebut telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 13 dan 14 Januari 2021;
- (b) Kas lainnya pada RSUD sebesar Rp1.655.716,00 merupakan pemungutan PPh pasal 21 sebesar Rp1.000.000,00, PPh pasal 22 sebesar Rp85.528,00 dan PPN sebesar Rp570.188,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum disetorkan ke kas negara. Terhadap utang pajak tersebut telah disetorkan pada tanggal 10 Januari 2021; dan
- (c) Kas lainnya pada BPBD Kesbangpol sebesar Rp1.410.000,00 merupakan pemungutan PPh 21 yang belum disetorkan per 31 Desember 2020 dan telah disetor ke kas negara pada tanggal 15 Januari 2021.

3) Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2019	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	41.721.000,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp41.721.000,00 terdiri dari :

1. Dinas Perhubungan	Rp	9.415.000,00
2. Dinas Perkim LH	Rp	27.533.000,00
3. BLUD RSUD	Rp	<u>4.773.000,00</u>
Jumlah	Rp	<u>41.721.000,00</u>

Terhadap saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp41.721.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Saldo kas pada Dinas Perhubungan sebesar Rp9.415.000,00 merupakan penerimaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum disetorkan ke kas daerah karena pada tanggal tersebut adalah hari libur cuti bersama. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum	Rp	3.287.000,00
2. Retribusi terminal	Rp	<u>6.128.000,00</u>
Jumlah	Rp	<u>9.415.000,00</u>

Kas sebesar Rp9.415.000,00 tersebut diatas telah disetor ke kas daerah pada tanggal 4 Januari 2021.

- Saldo kas pada Dinas Perkim LH sebesar Rp27.533.000,00 merupakan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang pemungutannya bekerja sama dengan PDAM Kota Padang Panjang, yang diambil dan disetorkan setiap awal bulan berikutnya. Penerimaan ini telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 6 Januari 2021.
- Saldo kas pada BLUD RSUD sebesar Rp4.773.000,00 merupakan pendapatan jasa layanan umum BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum disetorkan ke kas BLUD RSUD. Penerimaan ini telah disetor pada tanggal 4 Januari 2021.

4) Kas pada Bendahara BLUD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	660.143.121,65	350.210.605,65

Saldo kas pada bendahara BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp660.143.121,65. Saldo ini merupakan saldo kas pada BLUD RSUD dan BLUD Dana Bergulir yang mencakup kas di rekening bank BLUD dan saldo kas di bendahara BLUD. Rincian kas pada bendahara BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kas di BLUD RSUD	Rp	285.907.429,65
2. Kas di BLUD Dana Bergulir	Rp	<u>374.235.692,00</u>
Saldo kas pada Bendahara BLUD per 31 Desember 2020	Rp	<u>660.143.121,65</u>

a) **BLUD RSUD**

BLUD RSUD dibentuk pada tanggal 17 Desember 2012 yang dikelola langsung oleh Direktur RSUD. BLUD RSUD merupakan salah satu program dari APBD dan menjadi bagian dari OPD RSUD. Pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD ini berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Kota Padang Panjang. Kas pada bendahara BLUD RSUD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saldo awal kas BLUD RSUD	Rp	9.773.987,65
2. Penerimaan BLUD RSUD Tahun 2020	Rp	51.207.613.365,00
3. Belanja BLUD RSUD Tahun 2020	Rp	50.926.706.923,00
Saldo kas BLUD per 31 Desember 2020	Rp	290.680.429,65

Terdapat perbedaan antara perhitungan saldo kas BLUD per 31 Desember 2020 dengan saldo Kas di BLUD RSUD :

1. Saldo kas menurut perhitungan	Rp	290.680.429,65
2. Saldo kas BLUD RSUD	Rp	285.907.429,65
Selisih	Rp	4.773.000,00

Selisih sebesar Rp4.773.000,00 tersebut merupakan kas di bendahara penerimaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum disetorkan ke rekening BLUD RSUD.

Adapun saldo Kas BLUD RSUD sebesar Rp285.907.429,65 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kas di rekening koran	Rp	279.024.366,65
2. Keterlanjuran transfer ke Toko Fajar Harapan	Rp	8.524.727,00
3. Lebih setor pajak	Rp	14.052,00
4. Pajak yang belum disetor	Rp	(1.655.716,00)
Jumlah Kas BLUD RSUD per 31 Desember 2020	Rp	285.907.429,65

Keterlanjuran transfer ke Toko Fajar Harapan sebesar Rp8.524.727,00 terjadi karena pada saat mentransfer, rekening terdebit dua kali disebabkan jaringan bank nagari mengalami masalah. Pihak Toko Fajar Harapan telah mentransfer kembali ke kas BLUD RSUD pada tanggal 5 Januari 2021.

Lebih setor pajak sebesar Rp14.052,00 merupakan kelebihan setor billing PPN di Toko Segara. Kelebihan setor ini telah diterima kembali pada Kas BLUD RSUD pada tanggal 21 Januari 2021.

Pajak yang belum disetor sebesar Rp1.655.716,00, per 31 Desember 2020 masih berada di rekening koran BLUD, sehingga nilai tersebut merupakan selisih kurang atas saldo di rekening BLUD RSUD.

Saldo kas pada bendahara BLUD RSUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp285.907.429,65 mengalami kenaikan sebesar Rp276.133.442,00 atau 2.825,19% jika dibandingkan dengan saldo kas Tahun 2019 sebesar Rp9.773.987,65. Salah satu penyebab dari kenaikan ini karena telah diterimanya piutang atas klaim BPJS tahun 2019.

b) BLUD Dana Bergulir

BLUD Dana Bergulir berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 188/184/Wako-PP/2016 tentang Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan tanggal 21 November 2016. Sejak Tahun 2018 pendapatan dan belanja dari BLUD Dana Bergulir merupakan salah satu program/kegiatan APBD dan merupakan bagian pendapatan dan belanja dari OPD Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan.

Kas BLUD Dana Bergulir sebesar Rp374.235.692,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal kas BLUD Dana Bergulir		Rp	340.436.618,00
Pendapatan 2020	Rp	202.673.542,00	
Belanja Barang dan Jasa 2020	Rp	(110.260.970,00)	
Belanja Modal 2020	Rp	(58.613.498,00)	
Jumlah Pendapatan bersih 2020		Rp	33.799.074,00
Saldo per 31 Desember 2020		Rp	374.235.692,00

Atas saldo BLUD Dana Bergulir per 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Saldo di rek	Rp	353.514.903,00
2. Pendapatan bulan Desember 2020 yang belum dipindahbukukan ke rekening 09000101005195	Rp	20.720.789,00
Kas pada Bendahara BLUD Dana Bergulir per 31 Desember 2020	Rp	374.235.692,00

Terhadap pendapatan bulan Desember 2020 sebesar Rp20.720.789,00 telah dipindahbukukan dari rekening 09000101003871 ke rekening 09000101005195 pada tanggal 7 Januari 2021. Adapun rincian pendapatan bulan Desember 2020 sebesar Rp20.720.789,00 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jasa pinjaman	Rp	16.452.500,00
2. Bunga bank rek 09000101003871	Rp	1.068.789,00
3. Denda	Rp	3.199.500
Kas pada Bendahara BLUD Dana Bergulir per 31 Desember 2020 yang berada pada rek penampungan no 09000101003871	Rp	20.720.789,00

Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp340.436.618,00, maka saldo kas BLUD Dana Bergulir Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp33.799.074,00 atau 9,93%.

5) Kas Lainnya	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	1.927.393.378,00	1.615.368.776,00

Saldo kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.927.393.378,00 berupa sisa dana BOS SD Negeri sebesar Rp1.019.401.120,00 dan SMP Negeri sebesar Rp907.992.258,00 pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp1.615.368.776,00, maka saldo kas lainnya Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp312.024.602,00 atau 19,32%.

Saldo Dana BOS Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal		Rp.	1.615.368.776,00
Penerimaan tahun 2020	Rp	7.910.050.000,00	
Belanja tahun 2020	Rp	<u>(7.440.425.398,00)</u>	
Kenaikan saldo kas 2020		Rp.	<u>469.624.602,00</u>
Saldo sebelum koreksi		Rp	2.084.993.378,00
Koreksi kas karena penyetoran kembali ke RKUD Provinsi Sumatera Barat		Rp.	(157.600.000,00)
Saldo per 31 Desember 2020		Rp.	<u>1.927.393.378,00</u>

Koreksi kas Dana BOS sebesar Rp157.600.000,00 merupakan penyetoran kembali dana BOS yang lebih salur tahun 2019 ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor 900/305/Bagoen-2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Kurang Lebih Salur BOS Reguler Triwulan III dan IV Tahun 2019.

Penyetoran kembali dana lebih salur ini telah dilaksanakan oleh Sekolah pada rentang waktu Februari dan Maret 2020 dengan rincian sebagai berikut:

SD Negeri	Rp	81.600.000,00
SMP Negeri	Rp	<u>76.000.000,00</u>
Jumlah	Rp	<u>157.600.000,00</u>

Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.927.393.378,00 terdiri dari saldo yang berada di rekening koran sebesar Rp1.903.824.558,00 dan kas ditangan bendahara Dana BOS sebesar Rp23.568.820,00. Saldo kas di bendahara Dana BOS sebesar Rp23.568.820,00 tersebut adalah saldo kas pada SDN 14 Koto Panjang, dan telah disetor kembali ke rekening koran Dana BOS yang bersangkutan pada rentang waktu Januari sampai dengan Maret 2021.

6) Setara Kas	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2020 adalah Rp0,00. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Lampiran XVI KPAD 2 tentang Akuntansi Kas dan Setara Kas disebutkan bahwa Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/Obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Dibanding dengan tahun 2019, setara kas berupa deposito di Tahun 2020 adalah tetap. Adapun penjelasan dari deposito tersebut adalah:

a) Deposito pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Padang Panjang Nomor: 900/03/BPKD-PP/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Investasi Jangka Pendek dalam bentuk Deposito. Adapun Deposito Pemerintah Kota Padang Panjang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 39 - Daftar Deposito TA 2020-BPD

Tgl	No Rekening	No Bilyet	Deposito	Jumlah (Rp)
Saldo 31 Des 2019				0,00
Penambahan				43.000.000.000,00
31 Januari 2020	0900 0303.00393-0	SB 130644	10.000.000.000,00	
31 Januari 2020	0900 0303.00394-1	SB 13064	8.000.000.000,00	
12 Februari 2020	0900 0301.02404-6	SB 130703	5.000.000.000,00	
12 Februari 2020	0900 0301.02402-4	SB 130704	5.000.000.000,00	
12 Februari 2020	0900 0301.02406-1	SB 130705	5.000.000.000,00	
26 Juni 2020	0900 0301.02438-5	SB 130659	10.000.000.000,00	
Pencairan				(43.000.000.000,00)
14 Des 2020	0900 0303.00394-1	SB 13064	(8.000.000.000,00)	
14 Des 2020	0900 0303.00393-0	SB 130644	(10.000.000.000,00)	
14 Des 2020	0900 0301.02438-5	SB 130659	(10.000.000.000,00)	
14 Des 2020	0900 0301.02404-6	SB 130703	(5.000.000.000,00)	
14 Des 2020	0900 0301.02402-4	SB 130704	(5.000.000.000,00)	
14 Des 2020	0900 0301.02406-1	SB 130705	(5.000.000.000,00)	
Saldo 31 Desember 2020				0,00

b) Deposito pada Bank Nagari Syariah

Deposito pada PT Bank Nagari Syariah, dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Syariah Payakumbuh-Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang Nomor: 900/05/BPKD-PP/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang tentang Investasi Jangka Pendek dalam bentuk Deposito. Adapun Deposito Pemerintah Kota Padang Panjang pada Bank Nagari Syariah sebagai berikut:

Tabel 40 - Daftar Deposito TA 2020-Bank Nagari Syariah

	No Rekening	No Bilyet	Deposito	Jumlah (Rp)
Saldo 31 Des 2019				0,00
Penambahan				2.000.000.000,00
31 Jan 2020	0202040300142-2	SB 047312	2.000.000.000,00	
Pencairan				(2.000.000.000,00)
14 Des 2020	0202040300142-2	SB 047312	(2.000.000.000,00)	
Saldo 31 Desember 2020				0,00

c) Deposito pada Bank Negara Indonesia (Bank BRI)

Deposito pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Pemerintah Kota Padang Panjang Nomor: 900/09/BPKD-PP/IX/2020 tanggal 31 Juli 2020 tentang Deposito. Adapun Deposito Pemerintah Kota Padang Panjang pada BRI sebagai berikut:

Tabel 41 - Daftar Deposito TA 2020-BRI

No Rekening	No Bilyet	Deposito	Jumlah (Rp)
Saldo 31 Des 2019			0,00
Penambahan			2.000.000.000,00
31 Januari 2020	023101003591403	DC6001431	2.000.000.000,00
Pencairan			(2.000.000.000,00)
14 Des 2020	023101003591403	DC6001431	(2.000.000.000,00)
Jumlah			0,00

Idealnya jumlah total kas kondisi 31 Desember 2020 pada Neraca Daerah adalah sama dengan jumlah SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran. Pada Laporan Realisasi Anggaran terdapat SiLPA sebesar Rp50.932.525.555,99. Sementara jumlah kas di neraca sebesar Rp50.774.925.555,99 sehingga selisih sebesar Rp157.600.000,00. Selisih tersebut merupakan koreksi kas Dana BOS karena penyetoran kembali kelebihan salur Triwulan III dan IV ke RKUD Provinsi Sumatera Barat.

7) Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	2.562.697.494,00	2.042.053.529,00

Saldo Piutang Pajak Daerah Kota Padang Panjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.562.697.494,00. Jika dibandingkan dengan saldo piutang pajak daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp2.042.053.529,00, maka saldo piutang pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp520.643.965,00 atau 25,50%. Piutang Pajak Tahun 2020 sebesar Rp2.562.697.494,00 terdiri atas:

Tabel 42 - Daftar Piutang Pajak TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1.	Piutang Pajak Restoran	20.111.200,00	20.111.200,00
2.	Piutang Pajak Reklame	10.143.800,00	7.590.400,00
3.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	229.539.034,00	243.595.375,00
4.	Piutang Pajak Air Tanah	3.915.000,00	3.745.000,00
5.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.298.988.460,00	1.767.011.554,00
Jumlah		2.562.697.494,00	2.042.053.529,00

Saldo piutang pajak tahun 2020 sebesar Rp2.562.697.494,00 dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 43 - Rincian Piutang Pajak TA 2020

No.	Uraian	Piutang 2019 (Audited)	Koreksi	Jumlah Setelah Koreksi	Penerimaan Piutang <2019 di Tahun 2020	Sisa Piutang <2019	Piutang 2020	Total Piutang s/d 31 Desember 2020
1.	Pajak Restoran	20.111.200,00	0,00	0,00	0,00	20.111.200,00	0,00	20.111.200,00
2.	Pajak Reklame	7.590.400,00	0,00	0,00	476.400,00	7.114.000,00	3.029.800,00	10.143.800,00
3.	Pajak Penerangan Jalan	243.595.375,00	0,00	0,00	243.595.375,00	0,00	229.539.034,00	229.539.034,00
4.	Pajak Air Tanah	3.745.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.705.000,00	210.000,00	3.915.000,00
5.	Pajak Bumi dan Bangunan	1.767.011.554,00	0,00	0,00	82.688.924,00	1.684.322.630,00	614.665.830,00	2.298.988.460,00
Total		2.042.053.529,00	0,00	0,00	326.800.699,00	1.715.252.830,00	847.444.664,00	2.562.697.494,00

Masing-masing jenis piutang pajak akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

a) Piutang Pajak Restoran	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	20.111.200,00	20.111.200,00

Saldo Piutang Pajak Restoran Tahun 2020 adalah sebesar Rp20.111.200,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp20.111.200,00, maka saldo Tahun 2020 tetap.

Tabel 44 - Rincian Piutang Restoran

Tahun	Saldo Piutang	Penerimaan Piutang 2020	Saldo Piutang per 31 Desember 2020
2014	9.576.200,00	-	9.576.200,00
2015	10.535.000,00	-	10.535.000,00
Total	20.111.200,00	-	20.111.200,00

Tidak adanya pengakuan piutang pajak restoran yang berasal dari tahun 2020 karena pendapatan pajak restoran diakui saat kas diterima di kas daerah (ini terkait dengan metode *self-assessment* yang diterapkan untuk penghitungan pajak restoran). Piutang bisa muncul pada pajak yang memakai metode *self-assessment* ketika diterbitkan Surat Keputusan Kurang Bayar. Namun, hal ini belum dilaksanakan pada Tahun 2020. Saldo piutang pajak restoran yang berasal dari Tahun 2014 sebesar Rp9.576.200,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp10.535.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Tahun 2014 dan Tahun 2015, dikeluarkan ketetapan pajak untuk 12 bulan. Namun, penarikan pajak restoran yang dilakukan hanya untuk 11 bulan. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, selama Bulan Ramadhan, tidak dilakukan pemungutan pajak restoran. Pada pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 dan Tahun 2016, BPK meminta supaya ketetapan pajak restoran yang jatuhnya pada bulan Ramadhan Tahun 2014 dan 2015 (Juni-Juli 2014 serta Juni-Juli 2015) tetap dijadikan piutang. Namun, belum ada upaya penagihan yang dilakukan terhadap sisa piutang Tahun 2014 dan Tahun 2015 ini selama Tahun 2020.

Rincian sisa piutang pajak restoran yang berasal dari tahun 2014 sebesar Rp9.576.200,00 dan tahun 2015 sebesar Rp10.535.000,00 dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

b) Piutang Pajak Reklame	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	10.143.800,00	7.590.400,00

Saldo piutang pajak reklame Tahun 2020 sebesar Rp10.143.800,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp7.590.400,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.553.400,00 atau 33,64%. Rincian piutang pajak reklame Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo awal		Rp	7.590.400,00
- Tahun 2017	872.400,00		
- Tahun 2018	4.801.400,00		
- Tahun 2019	<u>1.916.600,00</u>		
Pengurangan piutang dari penerimaan		Rp	(476.400,00)
- Tahun 2017	0,00		
- Tahun 2018	0,00		
- Tahun 2019	<u>476.400,00</u>		
Piutang awal yang masih bersisa		Rp	7.114.000,00
Penetapan tahun 2020		Rp	224.199.450,00
Penerimaan dari penetapan tahun 2020		Rp	(169.032.550,00)
Reklame yang dibongkar tahun 2020		Rp	(52.137.100,00)
Jumlah		Rp	10.143.800,00

Reklame yang dibongkar tahun 2020 sebesar Rp52.137.100,00 merupakan pajak reklame yang sudah habis jangka waktunya.

Sedangkan rincian piutang reklame tahun 2020 sebesar Rp10.143.800,00 *by name by address* adalah sebagai berikut:

1.	Reklame RM Lesehan Serva Menanti	Rp	50.400,00
2.	Reklame RM. Kelok Salayang	Rp	120.000,00
3.	Reklame Masri M	Rp	252.000,00
4.	Reklame PT. Pos	Rp	450.000,00
5.	Spanduk Super hemat CFC (2018)	Rp	105.000,00
6.	Billboard Non produk Bofet Saiyo (2018)	Rp	176.400,00
7.	Billboard Non Produk Viragif (2018)	Rp	230.400,00
8.	Billboard Non Produk RM Pondok Indah Raya (2018)	Rp	1.668.000,00
9.	Pajak Reklame Non produk Wisma Alia serambi (2018)	Rp	140.000,00
10.	Billboard Produk Donat Madu (2018)	Rp	330.000,00
11.	Billboard Non Produk knalpot (2018)	Rp	88.200,00
12.	Billboard non Produk RM Silaing Glass (2018)	Rp	168.000,00
13.	Billboard Non Produk Soto paru Uni Tina (2018)	Rp	593.600,00
14.	Billboard Non Produk Vila Widya (2018)	Rp	587.800,00
15.	Billboard Non Produk Digital printing (2018)	Rp	714.000,00
16.	Pajak Reklame Billboard Non Produk Soto Mak Kayo	Rp	109.200,00
17.	Pajak Reklame Billboard Non Produk Miso Mas Amin	Rp	91.000,00
18.	Pajak Reklame Non Produk Katering Zahara	Rp	160.000,00
19.	Pajak Reklame Billboard Produk Jotun	Rp	1.080.000,00
20.	Pajak Reklame Billboard Non Produk Bian Laundry	Rp	140.000,00
21.	Pajak Reklame Billboard Non Produk Digital Printing	Rp	714.000,00
22.	Pajak Reklame Billboard Non Produk Rumah Penginapan Keluarga Villa Widya	Rp	387.800,00
23.	Pajak Reklame Billboard Rahmat Bangunan	Rp	168.000,00
24.	Pajak Reklame Billboard Produk GT Radial Pacifik Motor	Rp	1.620.000,00
	Jumlah	Rp	10.143.800,00

c)	Piutang Pajak Penerangan Jalan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
		229.539.034,00	243.595.375,00

Saldo piutang pajak penerangan jalan Tahun 2020 adalah sebesar Rp229.539.034,00. Jika dibandingkan dengan saldo piutang pajak penerangan jalan tahun 2019 sebesar Rp243.595.375,00, maka saldo piutang pajak penerangan jalan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp14.056.341,00 atau 5,77%. Piutang pajak Tahun 2020 sebesar Rp229.539.034,00 telah diterima di kas daerah Kota Padang Panjang pada tanggal 15 Januari 2021.

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PT.PLN (Persero), dimana berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 0030.Pj/HKM.02.01/B09010000/2020 dan Nomor 11/PJJ-PP/2020 tanggal 18 November 2020 antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT.PLN (persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat UP3 Bukittinggi, Pihak PT.PLN melakukan penyetoran hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan ke rekening kas daerah Kota Padang Panjang setiap bulannya paling lambat tanggal 15 pada bulan N+1.

d)	Piutang Pajak Air Tanah	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
		3.915.000,00	3.745.000,00

Saldo piutang pajak Air Tanah Tahun 2020 sebesar Rp3.915.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp3.745.000,00, saldo piutang pajak air tanah Tahun 2020 naik sebesar Rp170.000,00 atau sebesar 4,54%. Saldo pajak air tanah sebesar Rp3.915.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 45-Saldo Piutang Pajak Air Tanah TA 2020

Tahun	Saldo Piutang	Koreksi Piutang	Piutang Seharusnya	Penerimaan Piutang pada Tahun 2020	Saldo Akhir Piutang per 31 Desember 2019
2014	1.350.000,00	-	-	-	1.350.000,00
2015	800.000,00	-	-	-	800.000,00
2017	-	-	-	-	-
2018	1.555.000,00	-	-	-	1.555.000,00
2019	40.000,00	-	-	40.000,00	0,00
2020	-	-	-	-	210.000,00
Total	3.745.000,00	-	-	40.000,00	3.915.000,00

Terhadap saldo piutang pajak air tanah yang berasal dari Tahun 2020 dapat di rinci sebagai berikut :

Penetapan tahun 2020	Rp	8.853.000,00
Penerimaan dari penetapan tahun 2020	Rp	(8.643.000,00)
Jumlah	Rp	210.000,00

e)	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
		2.298.988.460,00	1.767.011.554,00

Saldo piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.298.988.460,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp1.767.011.554,00 maka saldo piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 naik sebesar Rp531.976.906,00 atau sebesar 30,11%.

Tabel 46 - Rincian Saldo Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Saldo Piutang	Koreksi	Saldo setelah Koreksi	Penerimaan Piutang pada Tahun 2020	Saldo Akhir Piutang per 31 Desember 2020
<2018	1.321.632.774,00	0,00	0,00	50.076.688,00	1.271.556.086,00
2019	445.378.780,00	0,00	0,00	32.612.236,00	412.766.544,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	614.665.830,00
Total	1.767.011.554,00	0,00	0,00	82.688.924,00	2.298.988.460,00

Saldo akhir piutang yang berasal dari Tahun 2020 sebesar Rp614.665.830,00 dapat dirinci sebagai berikut :

	Penetapan Tahun 2020	Rp	1.359.870.798,00
	Penerimaan dari penetapan Tahun 2020	Rp	(745.204.968,00)
	Jumlah	Rp	614.665.830,00
8)	Penyisihan Piutang Pajak	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
		(1.157.177.519,72)	(653.688.259,38)

Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai piutang berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

1.	Total nilai piutang pajak	Rp	2.562.697.494,00
2.	Penyisihan piutang pajak tak tertagih	Rp	(1.157.177.519,72)
3.	Nilai piutang pajak neto per 31 Desember 2020	Rp	1.405.519.974,28

Tabel berikut menunjukkan kategori piutang berdasarkan tingkat likuiditasnya dan persentase serta nilai penyisihan piutang tak tertagih pada masing-masing kategori piutang (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet).

Tabel 47 - Rincian Kualitas Piutang Pajak TA 2020

No.	Jenis Piutang Pajak	Kualitas Piutang				Jumlah
		Lancar (<1 Th)	Kurang Lancar (1-2 Th)	Diragukan (>2-5 Th)	Macet (>5 Th)	
1.	Pajak Hotel	-	-	-	-	-
2.	Pajak Reklame	3.029.800,00	1.440.200,00	4.801.400,00	872.400,00	10.143.800,00
3.	Pajak Restoran	-	-	-	20.111.200,00	20.111.200,00
4.	Pajak Air Tanah	210.000,00	0,00	1.555.000,00	2.150.000,00	3.915.000,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	229.539.034,00	-	-	-	229.539.034,00
6.	PBB P2	614.665.830,00	412.766.544,00	372.696.528,00	898.859.558,00	2.298.988.460,00
	Jumlah Piutang	847.444.664,00	414.206.744,00	379.052.928,00	921.993.158,00	2.562.697.494,00

Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih						
		0.50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang	4.237.223,32	41.420.674,40	189.526.464,00	921.993.158,00	1.157.177.519,72
	Piutang Netto	843.207.440,68	372.786.069,60	189.526.464,00	-	1.405.519.974,28

Seperti terlihat pada Tabel di atas, kualitas piutang pajak dengan perhitungan penyisihan piutang tak tertagih sebagaimana kebijakan akuntansi digolongkan menjadi empat kategori:

- Lancar (untuk piutang yang diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun atau 12 bulan), dengan penyisihan 0.5%;
- Kurang lancar (untuk piutang yang diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu 1-2 tahun) dengan penyisihan 10%;
- Diragukan (untuk piutang yang diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu 2-5 tahun) dengan penyisihan 50%; dan
- Macet (untuk piutang yang masih belum dapat ditagih setelah lebih dari 5 tahun dengan penyisihan 100%.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa proporsi piutang pajak yang paling tinggi adalah pada kategori macet, yakni sebesar Rp921.993.158,00 atau 35,97% dari keseluruhan nilai piutang pajak.

Selanjutnya juga dapat dilihat nilai penyisihan piutang tak tertagih untuk masing-masing kategori piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih keseluruhan adalah sebesar Rp1.157.177.519,72.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 penyisihan piutang pajak sebesar Rp653.688.259,38, maka penyisihan piutang pajak tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp503.489.260,34 atau 77,02%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya koreksi penyisihan piutang pajak akibat penghapusan piutang.

Saldo awal	Rp	653.688.259,38
Beban Penyisihan Piutang pajak tahun 2020	Rp	<u>503.489.260,34</u>
Saldo Penyisihan Piutang pajak tahun 2020	Rp	1.157.177.519,72

9) Piutang Retribusi	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	1.411.170.392,00	1.148.859.832,00

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.411.170.392,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp1.148.859.832,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp263.310.560,00 atau 22,83%. Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 48- Rincian Piutang Retribusi TA 2020

No.	Uraian	SKPD	Nilai
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	Perindag	547.680.000,00
2.	Piutang retribusi Pelayanan Pasar	Perindag	285.249.672,00
3.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Perindag	320.043.720,00
4.	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Perindag	119.877.000,00
5.	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	137.850.000,00
6.	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dishub	470.000,00
Total			1.411.170.392,00

a)	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
		547.680.000,00	317.772.000,00

Saldo piutang retribusi pelayanan persampahan Tahun 2020 adalah sebesar Rp547.680.000,00. Jika dibanding dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp317.772.000,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp229.908.000,00 atau 72,35%. Rincian piutang retribusi pelayanan persampahan ini dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo Piutang 2019 (Audited)	317.772.000,00
Piutang 2019 yang dibayar pada tahun 2020	<u>(14.592.000)</u>
Sisa piutang 2019	303.180.000,00
Piutang yang timbul pada tahun 2020	57.750.000,00
Koreksi piutang pasar pusat	<u>186.750.000,00</u>
Total saldo piutang per 31 Desember 2020	<u>547.680.000,00</u>

Sumber: Dinas Perindag (2020)

Piutang yang timbul tahun 2020 sebesar Rp57.750.000,00 terdiri dari piutang pasar inpres sebesar Rp25.260.000,00 dan piutang pasar pusat Kota Padang Panjang sebesar Rp32.490.000,00. Sedangkan koreksi piutang pasar pusat sebesar Rp186.750.000,00 merupakan koreksi kurang catat piutang tahun 2019.

b)	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
		285.249.672,00	282.309.672,00

Saldo piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2020 adalah sebesar Rp285.249.672,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2019 sebesar Rp282.309.672,00, maka saldo tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.940.000,00 atau 1,04%. Rincian piutang tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo Piutang 2019 (Audited)	282.309.672,00
Piutang 2019 yang dibayar pada tahun 2020	<u>(900.000,00)</u>
Sisa piutang 2019	281.409.672,00
Sisa piutang 2020	<u>3.840.000,00</u>
Total saldo piutang per 31 Desember 2020	<u>285.249.672,00</u>

Sumber: Perindag (2020)

c) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	320.043.720,00	299.028.760,00

Saldo piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp320.043.720,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2019 sebesar Rp299.028.760,00, maka saldo tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp21.014.960,00 atau 7,03%. Rincian dari piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah ini dapat dilihat di bawah ini:

Perindag:

Saldo Piutang 2019 (Audited)	299.028.760,00
Piutang 2019 yang dibayar pada tahun 2020	<u>(48.812.160,00)</u>
Sisa piutang 2019	250.216.600,00
Sisa piutang 2020	<u>69.827.120,00</u>
Total Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020	<u>320.043.720,00</u>

Sumber: Perindag(2020)

d) Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	119.877.000,00	104.349.400,00

Saldo piutang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan Tahun 2020 adalah sebesar Rp119.877.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp104.349.400,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp15.527.600,00 atau 14,88%. Rincian piutang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo Piutang 2019 (Audited)	104.349.400,00
Piutang 2019 yang diterima pada tahun 2020	<u>(39.569.600,00)</u>
Sisa piutang 2019	64.779.800,00
Sisa piutang 2020	<u>55.097.200,00</u>
Total saldo piutang per 31 Desember 2020	<u>119.877.000,00</u>

e) Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	137.850.000,00	145.400.000,00

Saldo piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp137.850.000,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp145.400.000,00, maka piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah tahun 2020 menurun sebesar Rp7.550.000,00 atau 5,19%. Piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp137.850.000,00 ini berasal dari Dinas Pangan dan Pertanian (berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

dengan Peternak Pemelihara Sapi Perah. Menurut perjanjian kerja sama ini, Dinas Pangan dan Pertanian dalam hal ini Bidang Peternakan bertindak sebagai pihak yang memelihara sapi perah milik peternak sapi. Atas jasa pemeliharaan sapi-sapi perah milik peternak tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian berhak mendapat pembayaran dari peternak sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerja sama. Adapun rincian piutang sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

f) Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	31 Desember 2020 (Rp) 470.000,00	31 Desember 2019 (Rp) 0,00
--	---	---

Saldo piutang retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2020 adalah sebesar Rp470.000,00. Saldo piutang tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019 karena saldo piutang retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2019 adalah Rp0,00. Piutang retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2020 terdapat pada Dinas Perhubungan.

10) Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih	31 Desember 2020 (Rp) (1.338.365.454,50)	31 Desember 2019 (Rp) (1.036.214.155,00)
--	---	---

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.338.365.454,50. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.036.214.155,00, maka penyisihan piutang retribusi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp302.151.299,50 atau 29,16%.

Nilai Piutang Retribusi	Rp	1.411.170.392,00
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih	Rp	(1.338.365.454,50)
Piutang Retribusi Netto	Rp	<u>72.804.937,50</u>

Tabel 49 - Rincian Kualitas Piutang Retribusi TA 2020

NO	Jenis Piutang Retribusi	Kualitas Piutang				JUMLAH
		LANCAR 0-1 BULAN	KURANG LANCAR 1-3 BULAN	DIRAGUKAN 3-12 BULAN	MACET > 12 BULAN	
1.	Piutang retribusi penjualan produksi Usaha daerah	0,00	0,00	24.000.000,00	113.850.000,00	137.850.000,00
2.	Piutang Retribusi pemakaian daerah	1.676.000,00	2.658.420,00	17.783.100,00	297.926.200,00	320.043.720,00
3.	Piutang Retribusi pelayanan persampahan	900.000,00	2.940.000,00	52.710.000,00	491.130.000,00	547.680.000,00
4.	Piutang Retribusi pelayanan pasar	29.000,00	301.500,00	13.291.229,00	271.627.943,00	285.249.672,00
5.	Piutang Retribusi pertokoan grosir	1.556.000,00	2.880.000,00	12.806.000,00	102.635.000,00	119.877.000,00
6.	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
Jumlah Piutang		4.631.000,00	8.779.920,00	120.590.329,00	1.277.169.143,00	1.411.170.392,00
% Penyisihan Piutang Tak Tertagih						
		0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Penyisihan Piutang		23.155,00	877.992,00	60.295.164,50	1.277.169.143,00	1.338.365.454,50
Piutang Netto		4.607.845,00	7.901.928,00	60.295.164,50	0,00	72.804.937,50

11) Piutang Dana Bagi Hasil	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	5.665.409.576,00	4.054.826.495,00

Saldo piutang Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp5.665.409.576,00. Jika dibandingkan dengan saldo piutang DBH tahun 2019 sebesar Rp4.054.826.495,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp1.610.583.081,00 atau 39,72%. Adapun saldo piutang Dana Bagi Hasil Tahun 2020 sebesar Rp5.665.409.576,00 tersebut terdiri dari :

Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Rp	1.510.491.601,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	4.154.917.975,00
Jumlah Piutang Dana Bagi Hasil 2020	Rp	5.665.409.576,00

a) Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Merupakan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.510.491.601,00, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020.

Saldo awal piutang transfer Pemerintah Pusat	Rp	2.590.954.064,00
Penerimaan tahun 2020	Rp	<u>255.069.786,00</u>
Saldo awal piutang berdasarkan PMK Lama	Rp	2.335.884.278,00
Koreksi tambah karena perubahan PMK	Rp	<u>379.151.841,00</u>
Saldo awal piutang setelah koreksi	Rp	2.715.036.119,00
Penerimaan piutang tahun 2020	Rp	<u>1.204.544.518,00</u>
Saldo piutang transfer pemerintah pusat per 31 Desember 2020	Rp	1.510.491.601,00

Saldo awal piutang transfer pemerintah pusat sebesar Rp2.590.954.064,00 ditetapkan berdasarkan PMK No.20/PMK.07/2020 sebesar Rp1.181.742.718,00 dan PMK Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebesar Rp1.409.211.346,00, dengan rincian penyaluran kurang bayar tersebut adalah sebagai berikut:

I. Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.07/2020		
1. DBH PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 25/29 Th 2018	292.460.502,00	
2. DBH Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018	626.939.919,00	
3. DBH Cukai Hasil Tembakau Tahun 2018	3.595.222,00	
4. DBH SDA Mineral dan Batubara Tahun 2018	255.069.786,00	
5. DBH SDA Perikanan Tahun 2018	<u>3.677.289,00</u>	
Jumlah		1.181.742.718,00
II. Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK.07/2020		
1. DBH PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 25/29 Th 2019	890.393.047,00	
2. DBH Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019	292.106.078,00	
3. DBH SDA Kehutanan Tahun 2019	50.827.901,00	
4. DBH SDA Perikanan Tahun 2019	170.627.903,00	
5. DBH SDA Panas Bumi Tahun 2019	<u>5.256.417,00</u>	
Jumlah		1.409.211.346,00
Total Piutang Transfer Pemerintah Pusat		2.590.954.064,00

Dari piutang transfer tersebut diatas, piutang DBH SDA Mineral dan Batubara tahun 2018 sebesar Rp255.069.786,00 telah diterima di kasda pada tanggal 27 Juli 2020.

Pada tanggal 25 Agustus 2020, Pemerintah Pusat mencabut kedua PMK tersebut diatas melalui PMK No.113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dengan rincian alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil untuk Kota Padang Panjang sebagai berikut :

DBH SDA Kehutanan	Rp	276.586,00
DBH PPh pasal 21 dan pasal 25/29	Rp	1.204.267.932,00
DBH PBB	Rp	1.262.905.135,00
DBH Cukai Hasil Tembakau	Rp	7.773.483,00
DBH SDA Panas Bumi	Rp	10.512.833,00
DBH SDA Perikanan	Rp	<u>229.300.150,00</u>
Jumlah kurang bayar	Rp	<u>2.715.036.119,00</u>

DBH SDA Kehutanan sebesar Rp276.586,00 dan DBH PPh pasal 21 dan pasal 25/29 sebesar Rp1.204.267.932,00 telah diterima di kas daerah pada tanggal 10 Oktober 2020. Sedangkan sisanya sebesar Rp1.510.491.601,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum diterima penyalurannya sehingga menjadi saldo piutang tahun 2020.

b) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Merupakan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Provinsi, dimana saldo piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Propinsi untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp4.154.917.975,00 sesuai Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/04/Pjk- B.Keuda/2021 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 29 Januari 2021, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagi hasil pajak kendaraan bermotor	Rp	2.371.173.984,00
2. Bagi hasil pajak bea balik nama kendaraan bermotor	Rp	481.033.606,00
3. Bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor	Rp	1.273.573.899,00
4. Bagi hasil pajak air permukaan	Rp	29.136.486,00
Jumlah kurang salur TA 2020	Rp	<u>4.154.917.975,00</u>

Untuk piutang dana bagi hasil provinsi Tahun 2020 sebesar Rp1.463.872.431,00 telah diterima di kasda pada tanggal 10 Desember 2020.

12) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	183.550.103,70	183.550.103,70

Saldo piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2020 sebesar Rp183.550.103,70. Bila dibandingkan dengan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2019 sebesar Rp183.550.103,70, maka saldo ini tetap. Piutang sebesar Rp183.550.103,70 ini berasal dari sisa laba PDAM dari Tahun 2007 s/d 2013 yang belum disetorkan ke kas daerah.

13) Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2020 (Rp) (183.550.103,70)	31 Desember 2019 (Rp) 0,00
---	---	---

Saldo penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2020 sebesar Rp183.550.103,70. Bila dibandingkan dengan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2019 sebesar Rp0,00, maka saldo tahun 2020 naik 100%.

Rincian Kualitas Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

TA 2020					
Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	(0-1 Bulan)	(1-3 Bulan)	(3-12 Bulan)	(Macet > 12 Bulan)	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	183.550.103,70	183.550.103,70
Jumlah Piutang	0,00	0,00	0,00	183.550.103,70	183.550.103,70

	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
	0.50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	183.550.103,70	183.550.103,70
Piutang Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2020 (Rp) 13.785.110.546,00	31 Desember 2019 (Rp) 16.938.030.062,00
---	--	--

Saldo piutang Lain-lain PAD yang sah untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp13.785.110.546,00. Bila dibandingkan dengan piutang Lain-lain PAD yang sah Tahun 2019 sebesar Rp16.938.030.062,00 maka piutang lain-lain PAD yang sah Tahun 2020 menurun sebesar Rp3.152.919.516,00 atau 18,61%. Piutang Lain-lain PAD yang sah ini berasal dari BLUD-RSUD sebesar Rp10.137.039.221,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp509.510,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp35.500,00 dan Dinas Perdagkop sebesar Rp3.593.422.137,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50- Rincian Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Piutang (Rp)
I. Piutang RSUD	
1. Piutang jasa pelayanan kesehatan	10.085.514.221,00
2. Piutang Usaha	23.450.000,00
3. Piutang Pasien Umum	20.000.000,00
4. Piutang Pasien Pada RS Lain	8.075.000,00
Jumlah	10.137.039.221,00
II. Sekretariat Daerah	
Keterlanjuran pemby. Tunj. Keluarga	509.510,00
III. Dinas Perhubungan	
Piutang denda retribusi	35.500,00
IV. Dinas Perdagkop	
Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa	3.593.422.137,00
Piutang denda retribusi	26.786.160,00
Piutang denda hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa	27.318.018,00
Jumlah	3.647.526.315,00
Total Piutang	13.785.110.546,00

Piutang jasa pelayanan kesehatan pada RSUD terkait dengan klaim BPJS dan asuransi Inhealth susulan April 2018 sampai dengan Desember 2020. Piutang BPJS timbul pada saat RSUD memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS. Selanjutnya, piutang RSUD pada PT. Inhealth timbul dari pemberian pelayanan kesehatan kepada para peserta asuransi Inhealth Mandiri.

Piutang usaha pada RSUD merupakan tunggakan sewa lahan parkir dan cafetaria yang dipungut setiap bulannya.

Sementara, piutang RSUD pada Pasien Umum, berasal dari pasien umum yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan seperti pelayanan rawat inap dan rawat jalan, belum melakukan pembayaran pada saat pasien meninggalkan rumah sakit.

Piutang pasien pada rumah sakit lainnya, timbul karena rujukan pasien dari rumah sakit lain (rumah sakit Ibnu Sina Padang Panjang) untuk melakukan pemeriksaan laboratorium patologi anatomi

Untuk piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa sebesar Rp3.593.422.137,00 merupakan piutang atas sewa toko pada Pasar Pusat Kota Padang Panjang.

15) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tak Tertagih	31 Desember 2020 (Rp) (4.562.270.289,04)	31 Desember 2019 (Rp) (2.364.716.951,00)
---	---	---

Saldo penyisihan piutang Lain-Lain PAD yang sah Tahun 2020 adalah sebesar Rp4.562.270.289,04. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp2.364.716.951,00, maka penyisihan piutang Lain-Lain PAD yang sah tak tertagih Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.197.553.338,04 atau 92,93%.

Tabel 51- Rincian Kualitas Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah TA 2020

Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	(0-1 Bulan)	(1-3 Bulan)	(3-12 Bulan)	(Macet > 12 Bulan)	
Piutang BLUD	6.447.624.658,00	2.917.052.520,00	-	772.362.043,00	10.137.039.221,00
Piutang dari pengembalian	509.510,00	0,00	0,00	0,00	509.510,00
Piutang denda retribusi (Dishub)	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Piutang denda retribusi (Perdagkop)	45.160,00	437.880,00	2.226.340,00	24.076.780,00	26.786.160,00
Piutang denda hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa (Perdagkop)	33.120,00	101.818,00	2.049.620,00	25.133.460,00	27.318.018,00
Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah	2.639.300,00	6.142.700,00	341.416.078,00	3.243.224.059,00	3.593.422.137,00
Jumlah Piutang	6.450.887.248,00	2.923.734.918,00	345.692.038,00	4.064.796.342,00	13.785.110.546,00
Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih					
	0.50%	10%	50%	100%	
<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah</i>	32.254.436,24	292.373.491,80	172.846.019,00	4.064.796.342,00	4.562.270.289,04
Piutang Netto	6.418.632.811,76	2.631.361.426,20	172.846.019,00	0,00	9.222.840.256,96

16) Piutang Lain-Lain	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Tidak terdapat saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019.

17) Penyisihan Piutang Lain-Lain Tidak Tertagih	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

18) Persediaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	11.517.341.857,41	10.202.842.904,27

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pencatatan yang dipakai untuk perhitungan persediaan adalah Metode Periodik dimana jumlah persediaan akhir diperoleh dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir. *Stock opname* persediaan Tahun 2020 telah dilakukan sendiri oleh OPD pada akhir Tahun 2020. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.517.341.857,41. Jika dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.202.842.904,27, maka saldo persediaan per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.314.498.953,14 atau 12,88%. Rincian persediaan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut (lihat Tabel 50).

Tabel 52 -Daftar Persediaan TA 2020

No.	OPD	Nilai Persediaan
1	Dinas pendidikan	418.412.008,00
2	Dinas Kesehatan	2.909.194.071,41
3	RSUD	4.256.732.567,00
4	Dinas PUPR	1.307.421.340,00
5	Dinas Perkim LH	65.605.600,00
6	Satpol PP dan Damkar	85.343.500,00
7	Dinas Sosial	633.650.992,00
8	Dinas Pangan dan Pertanian	625.196.486,00
9	Disduk Capil	83.953.400,00
10	Dinas Perhubungan	33.946.000,00
11	Dinas Kominfo	1.820.350,00
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	19.670.850,00
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3.267.400,00
14	Dinas Pariwisata	9.134.050,00
15	Dinas Perdagkop dan UKM	15.783.750,00
16	Inspektorat Daerah	18.561.900,00
17	BAPPEDA	15.977.500,00
18	BPKD	69.898.288,00
19	BKPSDM	29.388.900,00
20	Sekretariat Daerah	52.498.450,00
21	Sekretariat DPRD	22.673.880,00
22	Kec. PP Timur	8.090.375,00
23	Kec. PP Barat	5.697.430,00
24	BPBD Kesbang Pol	825.422.770,00
Total		11.517.341.857,41

Nilai persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan ini hanya mencakup persediaan yang berasal dari rutin dan tidak memperhitungkan persediaan yang berasal dari kegiatan. Khusus untuk persediaan obat-obatan yang dimiliki oleh RSUD, Dinas Kesehatan Kota, kebijakan akuntansi menyatakan bahwa pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual. Berikut penjelasan lebih lanjut dari masing-masing jenis persediaan Tahun 2020 adalah:

a) Persediaan Alat Tulis Kantor

Persediaan Alat Tulis Kantor merupakan barang pakai habis dan atau alat-alat yang digunakan dalam kegiatan operasional harian pada setiap OPD seperti kertas, pena, tinta printer, dll. Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2020 sebesar Rp339.163.699,85. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp311.343.534,56, maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp27.820.165,29 atau 8,94%. Rincian persediaan alat tulis kantor dapat dilihat pada **Lampiran 8.1**.

b) Persediaan Barang Cetak.

Saldo Persediaan Barang Cetak Tahun 2020 adalah sebesar Rp317.527.768,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp207.195.817,00 berarti terjadi kenaikan di Tahun 2020 sebesar Rp110.331.951,00 atau 53,25%. Rincian persediaan barang cetakan dapat dilihat pada **Lampiran 8.2**.

c) Persediaan Peralatan Kebersihan

Saldo Persediaan Peralatan Kebersihan Tahun 2020 adalah sebesar Rp243.486.336,18. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp92.475.049,96, maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp151.011.286,22 atau 163,30%. Rincian persediaan peralatan kebersihan dapat dilihat pada **Lampiran 8.3**.

d) Persediaan Alat Listrik dan Elektronik

Saldo Persediaan Alat Listrik dan Elektronik Tahun 2020 sebesar Rp418.149.895,40. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp135.867.784,52, maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp282.282.110,88 atau 207,76%. Rincian persediaan alat elektronik dapat dilihat pada **Lampiran 8.4**.

e) Persediaan Bahan Makanan Dapur/Makanan Pokok

Saldo Persediaan Bahan Makanan Dapur/Makanan Pokok Tahun 2020 adalah sebesar Rp106.127.030,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp264.105.324,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp157.978.294,00 atau 59,82%.

f) Persediaan Peralatan Perbenihan

Saldo Peralatan Perbenihan Tahun 2020 adalah sebesar Rp5.648.200,00. Jika dibandingkan dengan saldo persediaan Tahun 2019 sebesar Rp6.235.900,00, maka saldo tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp587.700,00 atau 9,42%. Saldo persediaan peralatan perbenihan Tahun 2020 sebesar Rp5.648.200,00 merupakan sarana dan prasarana perbenihan ikan hias yang terdapat pada Dinas Pangan dan Pertanian. Rincian persediaan perbenihan dapat dilihat pada **Lampiran 8.5**.

g) Persediaan Bibit Ternak

Saldo persediaan bibit ternak Tahun 2020 adalah sebesar Rp90.805.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp111.736.000,00, maka saldo pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp20.931.000,00 atau 18,73%. Persediaan bibit ternak Tahun 2020 ini adalah persediaan yang terdapat pada UPTD Balai Benih Ikan. Rincian persediaan bibit ternak dapat dilihat pada **Lampiran 8.6**.

h) Persediaan Bibit Tanaman

Saldo Persediaan Bahan Bibit Tanaman Tahun 2020 adalah sebesar Rp98.563.500,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp58.342.475,00, maka saldo persediaan bibit tanaman tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp40.221.025,00 atau 68,94%. Saldo persediaan bibit tanaman tahun 2020 sebesar Rp98.563.500,00 merupakan persediaan yang terdapat pada Dinas PUPR serta Dinas Pangan dan Pertanian. Rincian persediaan bibit tanaman dapat dilihat pada **Lampiran 8.7**.

i) Persediaan Obat-Obatan

Saldo persediaan obat-obatan Tahun 2020 adalah sebesar Rp3.108.151.054,44. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp4.245.358.410,42, maka saldo Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.137.207.355,98 atau 26,79%. Rincian persediaan obat-obatan dapat dilihat pada **Lampiran 8.8**.

j) Persediaan Bahan Kimia

Saldo persediaan bahan kimia Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.108.230.093,54. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp605.433.112,81, maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp502.796.980,73 atau 83,05%. Saldo persediaan bahan kimia Tahun 2020 berasal dari:

- Dinas Pangan dan Pertanian	Rp	68.553.286,00
- Dinas Kesehatan	Rp	1.035.114.307,54
- PUPR	Rp	4.562.500,00
Jumlah	Rp	1.108.230.093,54

k) Persediaan gas medis

Saldo Persediaan gas medis tahun 2020 adalah sebesar Rp15.562.000,00. Saldo persediaan gas medis tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan saldo tahun 2019 karena saldo tahun 2019 adalah Rp0,00. Saldo persediaan gas medis tahun 2020 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah

l) Persediaan Alat Percontohan

Saldo persediaan alat percontohan Tahun 2020 adalah sebesar Rp122.520.350,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp187.682.550,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp65.162.200,00 atau 34,72%. Persediaan alat percontohan ini merupakan persediaan yang ada pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.816.800,00, Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp104.995.950,00 dan pada Dinas Perkim LH Rp10.707.600,00. Rincian persediaan alat percontohan dapat dilihat pada **Lampiran 8.9**.

m) Persediaan Barang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Saldo persediaan barang untuk diserahkan pada masyarakat Tahun 2020 adalah Rp894.459.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp2.544.684.000,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.650.225.000,00 atau 64,85%. Saldo persediaan barang untuk diserahkan pada masyarakat sebesar Rp894.459.000,00 terdiri dari Rp21.600,00 yang terdapat pada Dinas Pangan dan Pertanian, sebesar Rp872.859.000,00 pada Dinas PUPR. Adapun persediaan barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Dinas PUPR merupakan pengembangan jaringan air minum kawasan perkotaan pada tahun 2019. Sampai dengan 31 Desember 2020 belum diserahkan ke PDAM karena menunggu masa pemeliharaan atau garansi barang dari penyedia selama 1 tahun.

Terhadap persediaan tahun 2019 yang terdapat pada Dinas PUPR yang terdiri dari :

- Pembangunan IPAL Batu Tagak Kel. Ekor Lubuk, telah diserahkan pada tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan BAST No.01/BAST-IPAL-EL-BT/PUPR-CK/II-2020.
- Pembangunan IPAL RT 04 Kel. Bukit Surungan, telah diserahkan pada tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan BAST No.01/BAST-IPAL-GUMALA/PUPR-CK/II-2020.
- Pembangunan IPAL Kombinasi MCK Kubu Gadang Kel. Ekor Lubuk, telah diserahkan pada tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan BAST No.01/BAST-IPAL-EL-BT/PUPR-CK/II-2020.

Selanjutnya Rincian Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 8.10**.

n) Persediaan Benda Pos (Perangko/Materai)

Saldo persediaan benda pos (perangko/materai) Tahun 2020 adalah sebesar Rp11.019.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp12.323.500,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.304.500,00 atau 10,59%. Rincian persediaan benda pos Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 8.11**.

o) Persediaan BBM/Gas dan Pelumas

Saldo persediaan BBM/Gas dan Pelumas Tahun 2020 adalah sebesar Rp224.305.550,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp239.448.700,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp15.143.150,00 atau 6,32%. Rincian persediaan BBM/Gas dan Pelumas Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 8.12**.

p) Persediaan Logistik Bencana

Persediaan Logistik Bencana pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.301.515.350,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp645.011.137,00, maka persediaan logistik bencana tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp656.504.213,00 atau 101,78%. Persediaan ini berasal dari hibah provinsi yang terdapat pada Dinas Sosial dan BPBD Kesbangpol. Rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 8.13**.

q) Persediaan alat praktek dan perlengkapan sekolah

Saldo persediaan alat praktek dan perlengkapan sekolah Tahun 2020 adalah sebesar Rp28.055.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp5.182.000,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp22.873.000,00 atau 441,39%. Persediaan ini terdapat pada Dinas Dinas Pendidikan.

r) Persediaan alat pemadam kebakaran

Saldo persediaan alat pemadam kebakaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp36.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp48.550.000,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp12.550.000,00 atau 25,85%. Persediaan ini terdapat pada Dinas Satpol PP dan Damkar.

s) Persediaan bahan/peralatan kamar mess/barak

Saldo persediaan bahan/peralatan kamar mess/barak Tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp7.050.000,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.050.000,00 atau 100,00%. Saldo persediaan Tahun 2019 terdapat pada Dinas Satpol PP dan Damkar.

t) Persediaan vaksin

Saldo persediaan vaksin Tahun 2020 adalah sebesar Rp122.427.890,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp266.939.739,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp144.511.849,00 atau 54,14%. Persediaan ini terdapat pada Dinas Kesehatan yang berasal dari hibah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan terdapat pada UPTD IFK serta 4 (empat) puskesmas di Kota Padang Panjang. Rincian persediaan vaksin adalah sebagai berikut:

Tabel 53- Daftar Persediaan Vaksin Pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020

(dalam rupiah)

No.	Vaksin	Puskesmas					Jumlah
		Puskesmas Kb.Sikolos	Puskesmas Gunung	Puskesmas Bukit Surungan	Puskesmas Koto Katik	Instalasi Farmasi	
1.	BCG/Ampul	0,00	710.919,00	359.700,00	1.658.811,00	10.663.785,00	13.393.215,00
2.	DPT /HIB/Vial	1.350.112,00	1.434.494,00	991.705,00	1.181.348,00	16.454.490,00	21.412.149,00
3.	HB Unijek	0,00	0,00	83.600,00	0,00	9.726.860,00	9.810.460,00
4.	Campak/Vial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	HB PID/Pouch	0,00	0,00	0,00	1.151.865,00	0,00	1.151.865,00
6.	HB 0	1.126.268,00	2.994.849,00	0,00	0,00	0,00	4.121.117,00
7.	Vaksin MR	2.960.447,00	0,00	1.402.317,00	2.648.821,00	22.281.259,00	29.292.844,00
8.	MR+Pelarut	0,00	3.116.260,00	0,00	0,00	0,00	3.116.260,00
9.	DT/Vial	71.984,00	53.988,00	395.516,00	629.860,00	1.763.608,00	2.914.956,00
10.	TD	84.975,00	271.920,00	280.500,00	186.945,00	713.790,00	1.538.130,00
11.	IPV/Vial	1.430.946,00	2.861.892,00	0,00	2.543.904,00	21.464.190,00	28.300.932,00
12.	POLIO IVP	0,00	0,00	1.748.934,00	0,00	0,00	1.748.934,00
13.	POLIO BOPV/Vial	419.034,00	399.080,00	119.724,00	99.770,00	4.589.420,00	5.627.028,00
JUMLAH		7.443.766,00	11.843.402,00	5.381.996,00	10.101.324,00	87.657.402,00	122.427.890,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

u) Persediaan Buku Informasi Kesehatan

Saldo persediaan buku informasi kesehatan Tahun 2020 adalah sebesar Rp333.880,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2019 sebesar Rp6.781.520,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.447.640,00 atau 95,08%. Persediaan buku informasi kesehatan terdapat pada Dinas Kesehatan dan merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan.

v) Persediaan Makanan Tambahan

Saldo persediaan makanan tambahan tahun 2020 adalah sebesar Rp134.474.004,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2019 sebesar Rp79.348.500,00, maka saldo tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 55.125.504,00 atau 69,47%. Persediaan makanan tambahan terdapat pada Dinas Kesehatan dan merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan yang terdiri dari makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita.

w) Persediaan Alat Kontrasepsi

Saldo persediaan alat kontrasepsi Tahun 2020 adalah sebesar Rp127.167.162,00. Jika dibandingkan dengan persediaan alat kontrasepsi Tahun 2019 sebesar Rp121.747.850,00, maka persediaan alat kontrasepsi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp5.419.312,00 atau 4,45%. Persediaan alat kontrasepsi terdapat pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak dan merupakan hibah dari BKKBN Propinsi Sumatera Barat.

x) Persediaan Pancang/Patok Tanah

Saldo persediaan pancang/patok tanah Tahun 2020 adalah sebesar Rp520.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2019 sebesar Rp0,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp520.000,00 atau 100,00%.

y) Persediaan alat kesehatan habis pakai

Saldo persediaan alat kesehatan habis pakai Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.003.996.036,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2019 sebesar Rp0,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.003.996.036,00 atau 100,00%.

z) Persediaan buku siswa

Saldo persediaan buku siswa Tahun 2020 adalah sebesar Rp13.119.400,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2019 sebesar Rp0,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp13.119.400,00 atau 100,00%.

aa) Persediaan barang perlengkapan logistik COVID-19

Saldo persediaan barang perlengkapan logistik COVID-19 Tahun 2020 adalah sebesar Rp646.014.658,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2019 sebesar Rp0,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp646.014.658,00 atau 100,00%. Persediaan ini berasal dari penggunaan dana belanja tak terduga tahun 2020.

19) Biaya Dibayar di Muka	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	1.533.861.988,08	1.172.233.306,29

Saldo Biaya Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.533.861.988,08. Bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp1.172.233.306,29, maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp361.628.681,79 atau 30,85%.

Adapun saldo biaya dibayar di muka Tahun 2020 sebesar Rp1.533.861.988,08 terdiri dari:

- Premi asuransi BMD	Rp	236.237.960,08
- Sewa tanah	Rp	22.825.000,00
- Premi asuransi kesehatan masyarakat	Rp	1.236.805.800,00
- Premi asuransi ketenagakerjaan	Rp	37.993.228,00
Jumlah	Rp	1.533.861.988,08

(1) Premi Asuransi BMD : Sebesar Rp236.237.960,08

Merupakan biaya dibayar di muka atas premi asuransi barang milik daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 jangka waktu 29 September 2020 sampai dengan 16 Februari 2021 (masa pertanggung jawaban 141 hari kalender) dengan jumlah kontrak sebesar Rp708.713.880,24, tersisa 47 hari. Premi asuransi BMD terdapat di BPKD.

(2) Sewa Tanah : Sebesar Rp22.825.000,00

Merupakan biaya sewa tanah PT. KAI yang digunakan untuk halaman parkir dan perkantoran Pemerintah Kota Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut :

- Lokasi KM.077+256.5/278 antara PP-PSB Lintas PP-PY Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur dengan kontrak sebesar Rp2.700.000,00 selama 1 tahun dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021. Sehingga biaya dibayar di muka sebesar Rp1.575.000,00 atau tersisa 7 bulan.
- Lokasi sebelah kanan jalan KA antara PP-PSB lintas PP-PY Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat dengan kontrak sebesar Rp9.000.000,00 selama 1 tahun dari tanggal 1 Juli 2020 s/d 30 Juni 2021. Sehingga biaya dibayar di muka sebesar Rp4.500.000,00 atau tersisa 6 bulan.
- Lokasi KM.075+807/822 antara PP-PSB lintas PP-PY Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat dengan kontrak sebesar Rp3.000.000,00 selama 1 tahun dari tanggal 1 Agustus 2020 s/d 31 Juli 2021. Sehingga biaya dibayar di muka sebesar Rp1.750.000,00 atau tersisa 7 bulan.
- Lokasi antara KDP-PP lintas TBY-SWL Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat dengan kontrak sebesar Rp6.000.000,00 selama 1 tahun dari tanggal 1 Juli 2020 s/d 30 Juni 2021. Sehingga biaya dibayar di muka sebesar Rp3.000.000,00 atau tersisa 6 bulan.
- Lokasi KM.075+554/629,5 antara PP-PSB lintas PP-PY Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat dengan kontrak sebesar Rp24.000.000,00 selama 1 tahun dari tanggal 1 Juli 2020 s/d 30 Juni 2021. Sehingga biaya dibayar di muka sebesar Rp12.000.000,00 atau tersisa 6 bulan.

Sewa tanah PT KAI terdapat di BPKD

(3) Premi asuransi kesehatan masyarakat : sebesar Rp1.236.805.800,00

Merupakan kelebihan pembayaran atas premi Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKM PP) dan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) yang terjadi karena penurunan besaran iuran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang mulai berlaku tanggal 5 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kelebihan pembayaran iuran sebesar Rp1.236.805.800,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Pembayaran 2020	Tagihan 2020	Sisa 2021
JKSS	2.843.568.000,00	2.397.163.200,00	446.404.800,00
JKMPP	5.053.692.000,00	4.263.291.000,00	790.401.000,00
Jumlah	7.897.260.000,00	6.660.454.200,00	1.236.805.800,00

Terhadap kelebihan iuran yang telah dibayarkan akan dikompensasikan ke iuran tahun 2021.

Adapun kelebihan pembayaran Pemerintah Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan surat dari BPJS Kesehatan Nomor 612/II.05/0221, tanggal 25 Februari 2021 perihal penjelasan saldo kelebihan pembayaran JKMPP Padang Panjang sampai dengan tahun 2020 dinyatakan bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Data dan Iuran JKMPP No. 449/003/DKK-PP/IV/2020 pada hari Rabu tanggal 01 April 2020, masih terdapat kewajiban iuran register susulan Desember 2019 sebesar Rp3.612.000,00.

Kemudian juga terdapat kelebihan pembayaran JKMPP sebesar Rp794.013.000,00 sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Data dan Iuran JKMPP No. 449/026/DKK-PP/XII/2020 pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, sehingga total kelebihan pembayaran yang diperhitungkan sebagai pembayaran pada tahun 2021 atas JKMPP adalah sebesar Rp790.401.000,00.

Selanjutnya untuk Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) sesuai dengan surat dari BPJS Kesehatan tanggal 08 Februari 2021 Nomor 400/II-05/0221 perihal Penagihan Iuran Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Kota Padang Panjang Tahap I Tahun 2021 dinyatakan bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: 449/018/DKK-PP/XII/2020, Nomor: 3456/BA/II-05/1220 dan nomor: 460/95/DSPPKBP3A-PP/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 disepakati terdapat kelebihan iuran JKSS Kota Padang Panjang yang sudah dibayarkan sebesar Rp446.404.800,00.

(4) Premi asuransi ketenagakerjaan : sebesar Rp37.993.228,00

Pada tahun 2020 Pemerintah menerbitkan kebijakan baru yaitu relaksasi iuran BP Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) untuk memberikan relaksasi dan penyesuaian iuran bagi Pemberi Kerja, Peserta Penerima Upah dan Peserta Bukan Penerima Upah (mandiri) yang terdampak selama pandemi COVID-19. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19). Pemberlakuan relaksasi ini berlangsung mulai bulan Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. Program BP Jamsostek yang diberikan keringanan potongan iuran sebesar 99% atau hanya membayar 1% yaitu untuk pembayaran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Biaya dibayar dimuka atas premi asuransi ketenagakerjaan sebesar Rp37.993.228,00 tersebut merupakan premi asuransi untuk tenaga harian lepas/pegawai honorer yang terlanjur dibayarkan berdasarkan tarif lama sehingga kelebihan iuran yang telah dibayarkan akan dikompensasikan pada bulan berikutnya.

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5.148.953,00
2	Dinas Kesehatan	3.369.589,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.230.075,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	722.613,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH	10.750.839,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	3.488.108,00
7	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	657.315,00
8	Dinas Pangan dan Pertanian	74,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00
10	Dinas Perhubungan	576.616,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.254,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	850.591,00
14	Dinas Pariwisata	1.265.746,00
15	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	1.046.477,00
16	Inspektorat Daerah	80.806,00
17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	476.085,00
18	Badan Pengelola Keuangan Daerah	470.831,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	191.751,00
20	Sekretariat Daerah	817.878,00
21	Sekretariat DPRD	560.565,00
22	Kecamatan Padang Panjang Timur	2.371.915,00
23	Kecamatan Padang Panjang Barat	2.079.894,00
24	Badan Kesbangpol	812.253,00
Jumlah		37.993.228,00

b. Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	54.004.795.036,88	53.984.795.516,16

Saldo investasi jangka panjang Tahun 2020 adalah sebesar Rp54.004.795.036,88. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp53.984.795.516,16, maka saldo Tahun 2020 naik sebesar Rp19.999.520,72 atau 0,04%. Rincian Investasi Jangka Panjang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Investasi Permanen	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	52.441.565.862,88	52.377.762.860,16

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Jumlah investasi permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2020 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan.

Saldo investasi permanen Tahun 2020 adalah sebesar Rp52.441.565.862,88. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp52.377.762.860,16, maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp63.803.002,72 atau 0,12%.

Saldo awal	52.377.762.860,16
Kenaikan penyertaan modal pada PDAM 85,21% x Rp74.877.365,00	63.803.002,72
Saldo akhir	52.441.565.862,88

Rincian investasi permanen Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a)	Penyertaan Modal pada PDAM	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
		10.218.064.116,49	10.154.261.113,77

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang Panjang pada PDAM Tahun 2020 adalah sebesar Rp10.218.064.116,49. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp10.154.261.113,77, saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp63.803.002,72 atau 0,63%.

Pencatatan dan pelaporan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada PDAM Kota Padang Panjang menggunakan Metode Ekuitas. Dengan menggunakan Metode Ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Komposisi investasi/penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada PDAM berdasarkan metode ekuitas adalah sebesar 85,21% dan 14,79%. Rincian penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada PDAM Kota Padang Panjang Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 54-Penyertaan Modal pada PDAM TA 2020 dan 2019

No.	Penyertaan Modal	Tahun 2020	Tahun 2019
1.	Penyertaan Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan statusnya	16.932.575.216,00	16.932.575.216,00
2.	Modal Hibah	3.697.200,00	3.697.200,00
3.	Cadangan Umum	153.784.766,98	153.784.766,98
4.	Laba (Rugi) Tahun Lalu	(6.935.796.069,21)	(6.969.298.852,64)
5.	Koreksi laba (rugi) tahun lalu	0,00	(0,86)
6.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	63.803.002,72	33.502.784,29
J U M L A H		10.218.064.116,49	10.154.261.113,77

b)	Penyertaan Modal pada PD. Buah Saiyo	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
		0,00	0,00

Pada tanggal 6 Juni 2012 Pemerintah Kota Padang Panjang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Tingkat II Padang Panjang. PD Buah Saiyo telah dilikuidasi pada Tahun 2013 sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Padang Panjang pada PD. Buah Saiyo telah di hapus.

c)	Penyertaan Modal pada PT. Bank Nagari	31 Desember 2020 (Rp) 39.398.602.746,39	31 Desember 2019 (Rp) 39.398.602.746,39
----	--	--	--

Nilai investasi jangka panjang yang ditempatkan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada PT. Bank Nagari dalam bentuk penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp39.398.602.746,39. Adapun persentase kepemilikan berdasarkan RUPS Tahun 2019 adalah sebesar 2,33%. Jumlah penyertaan modal sebesar Rp39.398.602.746,39 terdiri dari penyertaan modal sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp23.598.602.746,39 ditambah dengan penyertaan modal Tahun 2015 sebesar Rp15.800.000.000,00.

Metode pencatatan yang digunakan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Nagari adalah metode biaya (*cost method*), dimana investasi dicatat sebagai biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Penyertaan modal pada PT. Bank Nagari telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang dalam bentuk setoran laba/deviden tunai pada Tahun 2014 sebesar Rp4.453.824.848,00, Tahun 2015 sebesar Rp5.738.330.525,00, Tahun 2016 sebesar Rp5.054.152.377,00, Tahun 2017 sebesar Rp7.693.432.872,00, Tahun 2018 sebesar Rp5.795.081.205,00, Tahun 2019 sebesar Rp6.045.005.213,00 dan pada tahun 2020 sebesar Rp6.313.227.292,00

Investasi pada Bank Nagari terdiri dari kepemilikan saham seri A dengan uraian sebagai berikut:

-	Sertifikat nomor A.000182 sejumlah 15.800 lembar @1.000.000,00 nomor seri 1.163.264 s.d 1.179.063 tanggal 2 Februari 2016	15.800.000.000,00
-	Sertifikat nomor A.000108 sejumlah 4.200 lembar @1.000.000,00 nomor seri 616.216 s.d 620.415 tanggal 10 Januari 2013	4.200.000.000,00
-	Sertifikat nomor A.000136 sejumlah 10.007 lembar @1.000.000,00 nomor seri 776.812 s.d 786.818 tanggal 22 Januari 2014	10.007.000.000,00
-	Sertifikat nomor A.000067 sejumlah 1.500 lembar @1.000.000,00 nomor seri 439.842 s.d 441.341 tanggal 18 April 2011	1.500.000.000,00
-	Sertifikat nomor A.000058 sejumlah 870 lembar @1.000.000,00 nomor seri 425.144 s.d 426.013 tanggal 6 September 2010	870.000.000,00
-	Sertifikat nomor A.000039 sejumlah 629 lembar @1.000.000,00 nomor seri 366.857 s.d 367.487 tanggal 3 September 2009	629.000.000,00
-	Sertifikat nomor A.000019 sejumlah 6.392 lembar @1.000.000,00 nomor seri 318.311 s.d 324.702 tanggal 20 September 2007	6.392.000.000,00
	Jumlah	39.398.000.000,00

Terdapat perbedaan antara kepemilikan saham dengan penyertaan modal sebesar Rp602.746,39 karena belum cukupnya setoran modal untuk menjadi 1(satu) lembar saham seri A dimana per lembar sahamnya adalah sebesar Rp1.000.000,00. Atas penyertaan modal sejumlah Rp602.746,39 masih berada di rekening antara Bank Nagari.

d)	Penyertaan Modal pada PT. Balairung Citra Jaya	31 Desember 2020 (Rp) 2.824.899.000,00	31 Desember 2019 (Rp) 2.824.899.000,00
----	---	---	---

Nilai investasi jangka panjang yang ditempatkan pada PT. Balairung Citra Jaya per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2.824.899.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar. Penyertaan modal tersebut telah memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 sebesar Rp21.808.588,00, Tahun 2016 sebesar Rp13.830.503,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp13.777.812,00. Adapun rincian penyertaan modal pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar sebagai berikut:

Tabel 55 -Penyertaan Modal pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar

NO	Penyertaan Modal	Jumlah (Rp)
1.	Setoran modal tahun 2010	1.000.000.000,00
2.	Tambahan setoran modal tahun 2011	824.899.000,00
3.	Tambahan setoran modal tahun 2012	1.000.000.000,00
J U M L A H		2.824.899.000,00

Kepemilikan Pemerintah Kota Padang Panjang pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar terdiri dari saham dengan rincian sebagai berikut :

Saham seri A (1.694 lembar @Rp1.000.000,00)	1.694.000.000,00
Saham seri B (1.130.899 lembar @Rp1.000,00)	1.130.899.000,00
J U M L A H	2.824.899.000,00

Atas penyertaan modal pada PT. Balairung, berdasarkan Annual Report PT. Balairung Citrajaya Sumbar Tahun 2020, Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki kepemilikan sebesar 1,72%. Jika dibandingkan dengan penyertaan modal Tahun 2019 sebesar Rp2.824.899.000,00, maka penyertaan modal pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun 2020 tidak mengalami perubahan.

e)	Penyertaan Modal pada PT. Serambi Investasi Padang Panjang	31 Desember 2019 (Rp) 0,00	31 Desember 2018 (Rp) 0,00
----	---	---	---

Nilai investasi jangka panjang yang ditempatkan pada PT. Serambi Investasi Padang Panjang per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp0,00, maka penyertaan modal pada PT. Serambi Investasi adalah tetap. Penyertaan modal pada PT Serambi Investasi telah disetorkan kembali ke kas daerah pada tanggal 28 Juli 2017 STS Nomor 002255 sebesar Rp3.400.000.000,00 sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 38.B/LHP/XVIII.PDG/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 bahwa mekanisme perencanaan penyertaan modal tersebut belum memenuhi persyaratan investasi.

2)	Investasi Non-Permanen	31 Desember 2020 (Rp) 1.563.229.174,00	31 Desember 2019 (Rp) 1.607.032.656,00
----	-------------------------------	---	---

Pemerintah Kota Padang Panjang hanya memiliki satu jenis Investasi Non-Permanen, yakni Investasi Non-Permanen Lainnya dalam bentuk Dana Bergulir. Pengelolaan dana bergulir di Kota Padang Panjang telah dilaksanakan sejak tahun 2002 berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun

2002 tanggal 26 Oktober 2002 tentang Pembentukan Badan Pengelola Dana *Revolving* Padang Panjang, dan terakhir direvisi melalui Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 23 April 2013. Pembentukan dana bergulir ditujukan untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman modal kerja dengan suku bunga yang rendah.

Sejak Tahun 2017 pengelolaan dana bergulir telah menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor:188/184/Wako-PP/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.

Nilai investasi non permanen Kota Padang Panjang pada UPTD BLUD Pengelola Dana Bergulir dari Tahun 2002-2018 adalah sebesar Rp4.478.120.739,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Dipda Tahun 2001 Eks. Dinas Perindagkop : Rp 824.105.739,00
- Sapi Tahun 2001 Eks. Dinas Pertanian : Rp 104.015.000,00
- Pemda Padang Panjang Tahun 2003 : Rp 550.000.000,00
- Pemda Padang Panjang Tahun 2005 (PKL) : Rp 500.000.000,00
- Pemda Padang Panjang Tahun 2005 (Sapi) : Rp 500.000.000,00
- Pemda Padang Panjang Tahun 2006 : Rp1.000.000.000,00
- Pemda Padang Panjang Tahun 2008 : Rp1.000.000.000,00

Buletin Teknis 07 SAP menjelaskan bahwa pada saat perolehan, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

UPTD BLUD Dana Bergulir telah melakukan penatausahaan piutang usaha dana bergulir dengan *aging schedule* sesuai dengan jatuh temponya. Nilai saldo piutang usaha tahun 2020 adalah sebesar Rp4.310.114.100,00. Sedangkan nilai penyisihan piutang usaha tahun 2020 sebesar Rp2.914.891.565,00. Perhitungan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan mengurangi nilai piutang usaha dengan penyisihan piutang diperoleh nilai NRV sebesar Rp1.395.222.535,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56-Perhitungan *Net Realizable Value* dari Piutang Usaha UPTD BLUD Dana Bergulir Tahun 2020

No	Uraian	Piutang	Penyisihan	Nilai Bersih	Piutang 2019
		2020	Piutang 2020	Piutang Rp	
1	Piutang BLUD UPTD PDB	3.402.016.450,00	2.006.793.915,00	1.395.222.535,00	4.393.581.950,00
2	Piutang Sapi Potong Bapedar	36.450.000,00	36.450.000,00	0,00	36.450.000,00
3	Piutang PKL	147.823.500,00	147.823.500,00	0,00	147.823.500,00
4	Piutang PKL Serambi	249.418.000,00	249.418.000,00	0,00	249.418.000,00
5	Piutang Sapi Potong dan Perah Pertanian	384.250.000,00	384.250.000,00	0,00	384.250.000,00
6	Piutang Eks. Dinas Perindagkop	90.156.150,00	90.156.150,00	0,00	90.156.150,00
Jumlah		4.310.114.100,00	2.914.891.565,00	1.395.222.535,00	5.301.679.600,00

Selain nilai investasi non permanen yang disalurkan dari Pemerintah Daerah, UPTD BLU Dana Bergulir juga mengelola beberapa sumber dana antara lain: (1) Sisa Dana Bapedar Tahun 2001 sebesar Rp27.540.000,00; (2) Cadangan Modal; dan (3) Dana Resiko. Atas dana tersebut telah dimanfaatkan langsung untuk perguliran, namun belum dapat diakui sebagai penambahan nilai investasi.

c. Aset Tetap	31 Desember 2020 (Rp) 1.072.041.659.198,83	31 Desember 2019 (Rp) 1.072.737.487.224,13
----------------------	---	---

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan penyesuaian nomor rekening aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah sehingga menyebabkan ada koreksi kelompok aset tetap di neraca dan sekaligus terdapat nilai koreksi akumulasi penyusutannya yang disebabkan adanya perubahan kebijakan akuntansi.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2020 sebelum penyusutan adalah sebesar Rp1.682.974.113.400,83 sedangkan nilai bersih aset tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp1.072.041.659.198,83. Nilai aset tetap tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.072.737.487.224,13 mengalami penurunan sebesar Rp695.828.025,30 atau sebesar 0,06%

Adapun rincian dari aset tetap sebesar Rp1.072.041.659.198,83 tersebut adalah sebagai berikut :

Jenis Aset	Saldo Awal 2019	Migrasi Ke PMDN 108	Nilai Aset Tetap			Saldo Akhir 2020
			Mutasi			
			BM Dikapitalisir 2020	KOREKSI (+)	KOREKSI (-)	
Tanah	262.858.281.442,00	0,00	17.466.718.833,00	15.867.625.000,00	19.273.100.000,00	276.919.525.275,00
Peralatan Mesin	259.072.182.195,51	2.506.325.103,01	17.221.166.730,53	3.162.916.402,00	1.956.317.700,00	280.006.272.731,05
Gedung dan Bangunan	593.394.297.965,92	(2.056.633.402,00)	8.930.799.782,68	11.519.312.987,07	8.106.251.667,07	603.681.525.666,60
Jalan, Irigasi dan Jaringan	498.246.859.589,30	0,00	2.119.250.097,01	208.299.950,00	-	500.574.409.636,31
Aset Tetap Lainnya	7.395.346.908,00	(449.691.701,01)	902.702.500,00	68.050.000,00	9.475.000,00	7.906.932.706,99
Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.040.071.465,07	0,00	4.813.135.877,88	-	3.967.759.958,07	13.885.447.384,88
Akumulasi Penyusutan	(561.269.552.341,67)	0,00	-	(49.662.901.860,33)	-	(610.932.454.202,00)
Jumlah	1.072.737.487.224,13	0,00	51.453.773.821,10	(18.836.697.521,26)	33.312.904.325,14	1.072.041.659.198,83

Penjelasan terkait masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah	31 Desember 2020 (Rp) 276.919.525.275,00	31 Desember 2019 (Rp) 262.858.281.442,00
-----------------	---	---

Saldo aset tetap tanah Tahun 2020 adalah sebesar Rp276.919.525.275,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp262.858.281.442,00 maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan atau penambahan sebesar Rp14.061.243.833,00 atau 5,35%. dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penambahan dari Belanja Modal tahun 2020 senilai Rp17.466.718.833,00 merupakan pengadaan tanah pada Dinas Pariwisata untuk pembangunan gedung sarana olahraga.

2. Penyesuaian penambahan mutasi dari OPD senilai Rp15.867.625.000,00 dengan rincian :
 - a. Mutasi tambah pada Dinas Pariwisata sebesar Rp15.278.500.000,00 dari Dinas Pendidikan dengan Berita Acara Nomor : 900/66/DISDIKBUD/PP/I-2020;
 - b. Mutasi tambah pada Dinas Pariwisata sebesar Rp278.625.000,00 dari BPKD dengan Berita Acara Nomor : 900/20/BA-ASET/PP/IX-2020; dan
 - c. Mutasi tambah pada Kecamatan Padang Panjang Barat sebesar Rp310.500.000,00 dari BKPSDM dengan Berita Acara Nomor : 900/10/BA-ASET/PP/IV-2020.

3. Penyesuaian pengurangan sebesar Rp19.273.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mutasi kurang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp15.278.500.000,00 ke Dinas Pariwisata dengan Berita Acara Nomor : 900/66/DISDIKBUD/PP/I-2020;
 - b. Mutasi kurang pada BKPSDM sebesar Rp310.500.000,00 ke Kecamatan Padang Panjang Barat dengan Berita Acara Nomor : 900/10/BA-ASET/PP/IV-2020;
 - c. Penghapusan tanah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp3.288.600.000,00 yang merupakan hibah Pemerintah Kota Padang Panjang ke Kejaksaan Negeri Padang Panjang seluas 3.132 m² tahun perolehan 2015 dengan SK nomor 228 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020;
 - d. Penghapusan tanah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp395.500.000,00 yang merupakan hibah Pemerintah Kota Padang Panjang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) seluas 1.303 m² dengan SK hibah Nomor 74 tahun 2020.

2) Peralatan dan Mesin	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	280.006.272.731,05	259.072.182.195,51

Saldo peralatan dan mesin Tahun 2020 adalah sebesar Rp280.006.272.731,05. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp259.072.182.195,51. maka saldo tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp20.934.090.535,54 atau 8,08%. Perubahan nilai aset tetap peralatan mesin berasal dari :

- Realisasi belanja modal yang dikapitalisir	Rp17.221.166.730,53
- Koreksi mutasi tambah sebesar	Rp 3.162.916.402,00
- Koreksi tambah migrasi ke Permendagri 108	Rp 2.506.325.103,01
- Koreksi kurang sebesar	<u>(Rp 1.956.317.700,00)</u>
	Rp 20.934.090.535,54

Adapun rincian peralatan mesin sebagai berikut :

- a. Penambahan dari Belanja Modal Peralatan Mesin tahun anggaran 2020 senilai Rp17.221.166.730,53 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja modal peralatan mesin terdiri dari :

Peralatan Mesin		BM 2020	Yang Tidak dikapitalisir	Di Kapitalisir
Alat Besar	Rp.	673.818.800,00	-	673.818.800,00
Alat Angkutan	Rp.	3.226.130.998,00	-	3.226.130.998,00
Alat Bengkel dan Ukur	Rp.	270.231.240,00	750.000,00	269.481.240,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.	4.927.788.190,07	161.826.739,40	4.765.961.450,67
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp.	624.145.000,00	-	624.145.000,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp.	3.246.118.745,93	7.198.636,37	3.238.920.109,56
Alat Laboratorium	Rp.	584.165.130,00	281.395.534,00	302.769.596,00
Komputer	Rp.	3.558.661.057,30	10.884.000,00	3.547.777.057,30
Alat Keselamatan Kerja	Rp.	40.350.000,00	-	40.350.000,00
Rambu – Rambu		408.954.479,00	750.000,00	408.204.479,00
Peralatan Olahraga	Rp.	123.608.000,00	-	123.608.000,00
Total	Rp.	17.683.971.640,30	462.804.909,77	17.221.166.730,53

Rincian belanja modal alat-alat besar sebesar Rp673.818.800,00 sebagai berikut :

Nama OPD		BM 2020	Yang Tidak dikapitalisir	Di Kapitalisir
1. Set. DPRD	Rp.	2.969.100,00	-	2.969.100,00
2. Kecamatan Padang Panjang Barat	Rp.	1.200.000,00	-	1.200.000,00
3. Koperindag	Rp.	330.950.000,00	-	330.950.000,00
4. Setdako	Rp.	4.451.900,00	-	4.451.900,00
5. Dinas PUPR	Rp.	113.730.000,00	-	113.730.000,00
6. Dinas Pariwisata	Rp.	6.000.000,00	-	6.000.000,00
7. Dinas Pendidikan	Rp.	10.800.000,00	-	10.800.000,00
8. Kesehatan	Rp.	203.717.800,00	-	203.717.800,00
Total	Rp.	673.818.800,00	-	673.818.800,00

Rincian belanja modal alat-alat angkutan sebesar Rp3.226.130.998,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nama OPD		BM 2020	Yang Tidak dikapitalisir	Di Kapitalisir
1. Set. DPRD	Rp.	1.021.550.000,00	-	1.021.550.000,00
2. Kecamatan Padang Panjang Timur	Rp.	571.700.000,00	-	571.700.000,00
3. Kecamatan Padang Panjang Barat	Rp.	345.170.000,00	-	345.170.000,00
4. Koperindag	Rp.	29.932.998,00	-	29.932.998,00
5. Perkim LH	Rp.	160.000.000,00	-	160.000.000,00
6. RSUD	Rp.	459.789.000,00	-	459.789.000,00
7. Kesehatan	Rp.	637.989.000,00	-	637.989.000,00
Total	Rp.	3.226.130.998,00	-	3.226.130.998,00

Rincian belanja modal alat-alat bengkel dan ukur sebesar Rp269.481.240,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nama OPD		BM 2020	Yang Tidak dikapitalisir	Di Kapitalisir
1. Kecamatan Padang Panjang Barat	Rp.	21.400.000,00	-	21.400.000,00
2. Koperindag	Rp.	151.122.740,00	-	151.122.740,00
3. BPBD	Rp.	8.245.000,00	-	8.245.000,00
4. Setdako	Rp.	3.423.000,00	-	3.423.000,00
5. Inspektorat	Rp.	5.456.000,00	-	5.456.000,00
6. Dinas Capil	Rp.	1.500.000,00	-	1.500.000,00
7. Dinas PUPR	Rp.	18.480.000,00	-	18.480.000,00
8. RSUD	Rp.	28.765.000,00	-	28.765.000,00
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	3.589.500,00	750.000,00	2.839.500,00
10. Kecamatan Padang Panjang Timur	Rp.	28.250.000,00	-	28.250.000,00
Total	Rp.	270.231.240,00	750.000,00	269.481.240,00

Rincian belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp4.765.961.451,47 dengan rincian sebagai berikut :

Nama OPD		BM 2020	Yang Tidak dikapitalisir	Di Kapitalisir
1. BKPSDM	Rp.	141.959.916,00	-	141.959.916,00
2. Set. DPRD	Rp.	124.481.200,00	3.760.000,00	120.721.200,00
3. Dinas Pangan dan Pertanian	Rp.	16.708.600,00	-	16.708.600,00
4. Kecamatan Padang Panjang Barat	Rp.	19.700.000,00	-	19.700.000,00
5. Koperindag	Rp.	1.642.296.000,00	2.500.000,00	1.639.796.000,00
6. Setdako	Rp.	1.209.977.895,00	12.604.300,00	1.197.373.595,00
7. Inspektorat	Rp.	153.267.950,00	-	153.267.950,00
8. Dinas Kominfo	Rp.	6.204.000,00	-	6.204.000,00
9. Dinas Perhubungan	Rp.	1.386.000,00	-	1.386.000,00
10. Dinas Sosial	Rp.	150.040.000,00	2.975.000,00	147.065.000,00
11. Dinas PUPR	Rp.	11.704.000,00	-	11.704.000,00
12. RSUD	Rp.	740.139.350,00	-	740.139.350,00
13. Dinas Kesehatan	Rp.	145.113.607,07	22.917.939,40	122.195.667,67
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	342.930.672,00	112.569.500,00	230.361.172,00
15. Kecamatan Padang Panjang Timur	Rp.	93.229.000,00	-	93.229.000,00
16. Dinas Pariwisata	Rp.	57.200.000,00	-	57.200.000,00
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp.	71.450.000,00	4.500.000,00	66.950.000,00
Total	Rp.	4.927.788.190,07	161.826.739,40	4.765.961.450,67

Rincian belanja modal alat studio dan komunikasi sebesar Rp624.145.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nama OPD		BM 2020	Yang Tidak dikapitalisir	Di Kapitalisir
1. Koperindag	Rp.	47.620.000,00	-	47.620.000,00
2. BPBD	Rp.	16.000.000,00	-	16.000.000,00
3. Setdako	Rp.	129.863.000,00	-	129.863.000,00
4. BPKD	Rp.	18.710.000,00	-	18.710.000,00
5. Inspektorat	Rp.	17.650.000,00	-	17.650.000,00
6. Dinas Kominfo	Rp.	99.667.500,00	-	99.667.500,00
7. RSUD	Rp.	22.624.000,00	-	22.624.000,00
8. Dinas Kesehatan	Rp.	9.408.000,00	-	9.408.000,00
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	256.602.500,00	-	256.602.500,00
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp.	6.000.000,00	-	6.000.000,00
Total	Rp.	624.145.000,00	-	624.145.000,00

Rincian belanja modal alat kedokteran sebesar Rp3.238.920.109,56 dengan rincian sebagai berikut :

Nama OPD		BM 2020	Yang Tidak dikapitalisir	Di Kapitalisir
1. RSUD	Rp.	2.928.094.524,00	1.650.000,00	2.926.444.524,00
2. Dinas Kesehatan	Rp.	317.424.221,93	4.948.636,37	312.475.585,56
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	600.000,00	600.000,00	-
Total	Rp.	3.246.118.745,93	7.198.636,37	3.238.920.109,56

Rincian belanja modal alat laboratorium sebesar Rp302.769.596,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nama OPD		BM 2020	Yang Tidak dikapitalisir	Di Kapitalisir
1. RSUD	Rp.	110.977.596,00		110.977.596,00
2. Dinas Kesehatan	Rp.	9.900.000,00		9.900.000,00
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	463.287.534,00	281.395.534,00	181.892.000,00
Total	Rp.	584.165.130,00	281.395.534,00	302.769.596,00

Rincian belanja modal komputer sebesar Rp3.547.777.057,30 dengan rincian sebagai berikut :

Nama OPD		BM 2020	Yang Tidak Dikapitalisir	Di Kapitalisir
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	1.656.256.998,00	10.884.000,00	1.645.372.998,00
2. RSUD	Rp.	263.978.259,00	-	263.978.259,00
3. Dinas Kesehatan	Rp.	190.912.000,00	-	190.912.000,00
4. Kecamatan Padang Panjang Timur	Rp.	41.200.000,00	-	41.200.000,00
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp.	106.400.000,00	-	106.400.000,00
6. Dinas Capil	Rp.	198.209.000,30	-	198.209.000,30

Nama OPD		BM 2020	Yang Tidak Dikapitalisir	Di Kapitalisir
7. Dinas Perhubungan	Rp.	51.014.000,00	-	51.014.000,00
8. Dinas Kominfo	Rp.	407.569.000,00	-	407.569.000,00
9. Inspektorat	Rp.	53.490.300,00	-	53.490.300,00
10. BPKD	Rp.	54.730.000,00	-	54.730.000,00
11. Setdako	Rp.	158.860.000,00	-	158.860.000,00
12. Koperindag	Rp.	104.137.000,00	-	104.137.000,00
13. Set. DPRD	Rp.	101.114.500,00	-	101.114.500,00
14. Bappeda	Rp.	23.000.000,00	-	23.000.000,00
15. BKPSDM	Rp.	53.472.000,00	-	53.472.000,00
16. Dinas Sosial	Rp.	94.318.000,00	-	94.318.000,00
Total	Rp.	3.558.661.057,30	10.884.000,00	3.547.777.057,30

Rincian belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp40.350.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nama OPD		BM 2020	Yang Tidak dikapitalisir	Di Kapitalisir
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	850.000,00	-	850.000,00
2. BPBD	Rp.	39.500.000,00	-	39.500.000,00
Total	Rp.	40.350.000,00	-	40.350.000,00

Rincian belanja modal rambu-rambu sebesar Rp408.204.479,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nama OPD		BM 2020	Yang Tidak Dikapitalisir	Di Kapitalisir
1. Dinas Pariwisata	Rp.	241.231.479,00	-	241.231.479,00
2. RSUD	Rp.	750.000,00	750.000,00	-
3. Dinas Perhubungan	Rp.	166.973.000,00	-	166.973.000,00
Total	Rp.	408.954.479,00	750.000,00	408.204.479,00

Rincian belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp123.608.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nama OPD		BM 2020	Yang Tidak Dikapitalisir	Di Kapitalisir
1. Dinas Pendidikan	Rp.	8.590.000,00	-	8.590.000,00
2. Setdako	Rp.	99.000.000,00	-	99.000.000,00
3. Set. DPRD	Rp.	16.018.000,00	-	16.018.000,00
Total	Rp.	123.608.000,00	-	123.608.000,00

b. Penjelasan Mutasi Tambah

Penyesuaian mutasi penambahan sebesar Rp3.162.916.402 terdiri dari :

- Penyesuaian penambahan yang berasal dari Mutasi OPD sebesar Rp1.780.555.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penambahan mutasi aset Alat Besar pada Dinas Koperindag senilai Rp112.688.000,00 yang berasal dari Dinas PUPR dengan Berita Acara No. 900/25/BA-ASET/PP/IX-2020 tanggal 17 September 2020;

2. Penambahan mutasi aset Alat Angkutan senilai Rp1.511.536.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penambahan mutasi aset pada Kecamatan Padang Panjang Barat senilai Rp125.858.000,00 yang berasal dari Dinas Perkim LH sebesar Rp113.500.000,00 dan BPKD sebesar Rp12.358.000,00 dengan Berita Acara No. 900/18/BA-ASET/PP/VII-2020 dan Berita Acara Nomor. 900/07/BA-ASET/PP/IV-2020;

- Penambahan mutasi aset pada Dinas Koperindag senilai Rp12.358.000,00 yang berasal dari Kecamatan Padang Panjang Barat dengan Berita Acara No. 900/07/BA-ASET/PP/IV-2020;

- Penambahan mutasi aset pada BPKD senilai Rp460.850.000,00 yang berasal dari Dinas Arsip sebesar Rp185.000.000,00 dan Inspektorat senilai Rp275.850.000,00 dengan Berita Acara Nomor. 900/07/BA-ASET/PP/IV-2020 dan Berita Acara Nomor 900/09/BA-ASET/PP/VI-2020;

- Penambahan mutasi aset pada Inspektorat senilai Rp278.620.000,00 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor. 900/08/BA-ASET/PP/VI-2020;

- Penambahan mutasi aset pada Dinas Kominfo senilai Rp168.000.000,00 yang berasal dari Setdako;

- Penambahan mutasi aset pada Kecamatan Padang Panjang Barat senilai Rp80.000.000,00 yang berasal dari RSUD dengan Berita Acara Nomor. 900/05/BA-ASET/PP/III-2020;

- Penambahan mutasi aset pada Dinas Pariwisata senilai Rp110.000.000,00 yang berasal dari Kecamatan Padang Panjang Timur dengan Berita Acara Nomor. 900/04/BA_ASET/PP/IV-2020; dan

- Penambahan mutasi aset pada Dinas Arsip senilai Rp275.850.000,00 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor. 900/09/BA-ASET/PP/VI-2020.

3. Penambahan mutasi aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp136.975.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penambahan mutasi aset pada Inspektorat senilai Rp8.013.000,00 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor. 900/11/BA-ASET/PP/VII-2020;

- Penambahan mutasi aset pada Dinas PUPR senilai Rp46.500.000,00 yang berasal dari Setdako senilai Rp20.000.000,00 dan BPBD senilai Rp26.500.000,00 yang merupakan Biaya Tak Terduga dengan Berita Acara Nomor 900/23/BA-ASET/PP/XI-2020;

- Penambahan mutasi aset pada Dinas Kesehatan senilai Rp48.000.000,00 yang berasal dari Dinas Sosial dengan Berita Acara Nomor. 900/17/BA-ASET/PP/VI-2020;
 - Penambahan mutasi aset pada Dinas Pendidikan senilai Rp31.978.000,00 yang berasal dari Setdako dengan Berita Acara Nomor. 3/BA-ASET/PP/XI-2020; dan
 - Penambahan aset tetap pada BKPSDM senilai Rp28.984.000,00 yang berasal dari Setdako dengan Berita Acara Nomor. 900/22/BA-ASET/PP/XI-2020.
4. Penambahan mutasi aset Komputer pada Dinas Pariwisata sebesar Rp19.356.200,00 yang berasal dari Dinas Pendidikan dengan Berita Acara Nomor. 900/66/DISDIKBUD/PP/I-2020 tanggal 20 Januari 2020.
- Penyesuaian penambahan dari Hibah Pihak Lain sebesar Rp417.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Penambahan dari Hibah pada Dinas Sosial senilai Rp271.700.000,00 berupa kendaraan roda empat yang berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Berita Acara Nomor. 159/D.III.5/PL.06/BAST-MOLIN/12/2019;
 2. Penambahan dari Hibah pada Dinas Arsip senilai Rp146.250.000,00 berupa alat kantor rumah tangga, alat studio komunikasi dan komputer yang berasal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Berita Acara Nomor. 4/PLK.03.04/IX.2020 tanggal 11 Desember 2020.
- Penyesuaian penambahan aset tetap sebesar Rp964.411.202,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Penambahan mutasi aset peralatan dan mesin pada Dinas Pariwisata senilai Rp10.600.000,00 dari BPBD Kesbangpol yang berasal dari Dana Belanja Tak Terduga dengan Berita Acara Nomor: 48/BPBD,kesbangpol-PP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;
 2. Penambahan mutasi aset peralatan dan mesin pada RSUD senilai Rp393.651.273,00 yang berasal dari Belanja Tak Terduga RSUD;
 3. Penambahan mutasi aset peralatan dan mesin pada Dinas PUPR senilai Rp26.500.000,00 dari BPBD Kesbangpol yang berasal dari Belanja Tak Terduga dengan Berita Acara Nomor 900/23/BA-ASET/PP/XI-2020;
 4. Penambahan mutasi aset peralatan dan mesin pada Dinas Sosial senilai Rp4.150.000 yang berasal dari dana Belanja Tak Terduga;
 5. Penambahan mutasi aset peralatan dan mesin pada BPBD senilai Rp106.587.500,00 yang berasal dari dana Belanja Tak Terduga;
 6. Penambahan mutasi aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Perhubungan senilai Rp60.660.200,00 yang berasal dari reklasifikasi aset lain-lain;
 7. Penambahan mutasi aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp211.307.229,00 yang berasal dari reklasifikasi aset lain-lain;
 8. Penambahan mutasi aset tetap peralatan dan mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp169.290.000,00 yang berasal dari reklasifikasi aset lain-lain; dan
 9. Penambahan mutasi aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp18.765.000,00 yang berasal dari reklasifikasi aset lain-lain.

- Penyesuaian penambahan aset tetap Peralatan Mesin dari Reklas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 senilai Rp2.506.325.103,01 dengan rincian sebagai berikut :

	OPD	Dari KIB	Ke KIB	Nilai
1	Setdako	E	B	63.515.000,00
2	Dinas PUPR	C	B	1.166.347.000,00
3	Dinas Perhubungan	C	B	642.847.000,00
4	Dinas Pendidikan	E	B	386.176.701,01
5	Dinas Pariwisata	C	B	136.513.250,00
6	BPBD	C	B	110.926.152,00
Jumlah				2.506.325.103,01

c. Penjelasan Mutasi Kurang

Penyesuaian mutasi pengurangan sebesar Rp1.956.317.700 terdiri dari :

- Penyesuaian pengurangan aset yang berasal dari Mutasi OPD sebesar Rp1.780.555.200,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pengurangan mutasi aset Alat Besar pada Dinas PUPR senilai Rp12.688.000,00 ke Dinas Perindag dengan Berita Acara No. 900/25/BA-ASET/PP/IX-2020 tanggal 17 September 2020;
 2. Pengurangan mutasi aset Alat Angkutan senilai Rp1.511.536.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengurangan mutasi aset pada Dinas Perkim LH senilai Rp113.500.000,00 dan BPKD sebesar Rp12.358.000,00 ke Kecamatan. Padang Panjang Barat dengan Berita Acara No. 900/18/BA-ASET/PP/VII-2020 dan Berita Acara Nomor. 900/07/BA-ASET/PP/IV-2020;
 - Pengurangan mutasi aset pada Kecamatan Padang Panjang Barat senilai Rp12.358.000,00 ke Perindag dengan Berita Acara No. 900/07/BA-ASET/PP/IV-2020;
 - Pengurangan mutasi aset pada Dinas Arsip senilai Rp185.000.000,00 ke BPKD dan Inspektorat senilai Rp275.850.000,00 ke Dinas Arsip dengan Berita Acara Nomor. 900/07/BA-ASET/PP/IV-2020 dan Berita Acara Nomor 900/09/BA-ASET/PP/VI-2020;
 - Pengurangan mutasi aset pada BPKD senilai Rp278.620.000,00 ke Inspektorat dengan Berita Acara Nomor. 900/08/BA-ASET/PP/VI-2020;
 - Pengurangan mutasi aset pada Setdako senilai Rp168.000.000,00 ke Dinas Perkim LH yang terdiri dari kendaraan bermotor perorangan sebesar Rp110.000.000,00 berdasarkan Berita Acara nomor 900/18/BA-ASET/PP/VI-2020. Dan Rp58.000.000,00 berdasarkan Berita Acara nomor 900/02/BA-ASET/PP/III-2020;
 - Pengurangan mutasi aset pada RSUD senilai Rp80.000.000,00 ke Kecamatan Padang Panjang Timur dengan Berita Acara Nomor. 900/05/BA-ASET/PP/III-2020;

- Pengurangan mutasi aset pada Kecamatan Padang Panjang Timur senilai Rp110.000.000,00 ke Dinas Pariwisata dengan Berita Acara Nomor. 900/04/BA.ASET/PP/IV-2020; dan
 - Pengurangan mutasi aset pada BPKD senilai Rp275.850.000,00 ke Dinas Arsip dengan Berita Acara Nomor. 900/09/BA-ASET/PP/VI-2020.
3. Pengurangan mutasi aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp136.975.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Pengurangan mutasi 3 unit AC pada BPKD senilai Rp8.013.000,00 ke Inspektorat dengan Berita Acara Nomor. 900/11/BA-ASET/PP/VII-2020;
 - Pengurangan mutasi aset kursi tamu pada Setdako senilai Rp20.000.000,00 ke BKPSDM dengan Berita Acara Nomor 900/22/BA-ASET/PP/XI-2020;
 - Pengurangan mutasi aset wastafel tedmon pada BPBD senilai Rp26.500.000,00 ke Dinas PUPR yang merupakan Biaya Tak Terduga dengan Berita Acara Nomor 900/23/BA-ASET/PP/XI-2020;
 - Pengurangan mutasi aset lemari pada Dinas Sosial senilai Rp48.000.000,00 ke Dinas Kesehatan dengan Berita Acara Nomor. 900/17/BA-ASET/PP/VI-2020;
 - Pengurangan mutasi aset lemari, filling besi dan meja ½ biro pada Setdako senilai Rp31.978.000,00 ke Dinas Pendidikan dengan Berita Acara Nomor. 900/3/BA-ASET/PP/XI-2020; dan
 - Pengurangan mutasi aset kursi tamu pada Setdako senilai Rp28.984.000,00 ke BKPSDM dengan Berita Acara Nomor. 900/22/BA-ASET/PP/XI-2020.
4. Pengurangan mutasi aset 2 unit Komputer pada Dinas Dinas Pendidikan sebesar Rp19.356.200,00 ke Dinas Pariwisata dengan Berita Acara Nomor. 900/66/DISDIKBUD/PP/I-2020 tanggal 20 Januari 2020.
- Penyesuaian pengurangan aset yang berasal dari penghapusan sebesar Rp19.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penghapusan aset tetap berupa alat angkutan sepeda motor pada Dinas Arsip sebesar Rp7.000.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 152 tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020;
 2. Penghapusan aset tetap berupa alat angkutan sepeda motor pada Dinas Perhubungan sebesar Rp6.800.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 152 tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020; dan
 3. Penghapusan aset tetap berupa alat angkutan sepeda motor pada Badan Perencanaan dan Penelitian sebesar Rp5.500.000,00 dengan SK penghapusan Nomor 152 tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020.
 - Penyesuaian pengurangan lainnya sebesar Rp156.462.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pengurangan aset pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp42.962.500,00 dikarenakan double pencatatan, dimana tahun 2019 aset tetap ini sudah dicatat akan tetapi pembayarannya baru dilakukan pada tahun 2020 yang tercatat sebagai utang pada tahun 2019. Aset tersebut terdiri dari alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp11.200.000,00 dan alat laboratorium sebesar Rp31.762.500,00; dan
 2. Pengurangan aset pada Dinas Perkim LH sebesar Rp113.500.000,00 diakibatkan adanya reklas aset tetap ke aset lainnya karena kondisi sudah rusak berat. Aset tersebut terdiri dari 5 unit bentor (kendaraan roda tiga) @Rp22.700.000,00.

3) Gedung dan Bangunan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	603.681.525.666,60	593.394.297.965,92

Saldo aset gedung dan bangunan tahun 2020 adalah sebesar Rp603.681.525.666,60. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp593.394.297.965,92 maka saldo tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp10.287.227.700,68 atau naik sebesar 1,73%. Perubahan nilai gedung dan bangunan berasal dari :

- Realisasi belanja modal yang dikapitalisir sebesar	Rp 8.930.799.782,68
- Koreksi tambah sebesar	Rp11.519.312.987,07
- Koreksi kurang akibat migrasi kodefikasi barang sebesar	(Rp 2.056.633.402,00)
- Koreksi kurang sebesar	<u>(Rp 8.106.251.667,07)</u>
	<u>Rp10.287.227.700,68</u>

Adapun rincian gedung dan bangunan sebagai berikut :

- Penambahan dari belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp8.930.799.782,68 terdiri dari :

No	Gedung Bangunan		BM 2020	Yang Tidak dikapitalisir	Di Kapitalisir
a.	Bangunan Gedung	Rp.	8.888.242.782,68	-	8.888.242.782,68
b.	Monumen	Rp.	42.557.000,00	-	42.557.000,00
	Total	Rp.	8.930.799.782,68	-	8.930.799.782,68

Belanja modal bangunan gedung sebesar Rp8.888.242.782,68 dengan rincian sebagai berikut :

	Nama OPD		BM 2020	Yang Tidak Dikapitalisir	Nama OPD
1.	Koperindag	Rp.	492.310.323,10	-	492.310.323,10
2.	Dinas PUPR	Rp.	429.287.930,00	-	429.287.930,00
3.	Dinas Pariwisata	Rp.	2.205.888.870,51	-	2.205.888.870,51
4.	Kecamatan Padang Panjang Timur	Rp.	184.921.325,00	-	184.921.325,00
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	3.851.434.896,00	-	3.851.434.896,00
6.	Dinas Kesehatan	Rp.	490.166.700,00	-	490.166.700,00
7.	RSUD	Rp.	639.639.000,00	-	639.639.000,00
8.	Kecamatan Padang Panjang Barat	Rp.	162.850.000,00	-	162.850.000,00
9.	Dinas Pangan dan Pertanian	Rp.	348.172.100,00	-	348.172.100,00
10.	Set, DPRD	Rp.	83.571.638,07	-	83.571.638,07
	TOTAL	Rp.	8.888.242.782,68	-	8.888.242.782,68

Belanja Modal Monumen sebesar Rp42.557.000,00 dengan rincian :

Nama OPD		BM 2020	Yang Tidak dikapitalisir	Nama OPD
1.	Dinas Koperindag	Rp. 42.557.000,00	-	42.557.000,00
Jumlah		Rp 42.557.000,00	-	42.557.000,00

- Penyesuaian koreksi nilai tambah bangunan gedung sebesar Rp11.519.312.987,07 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penambahan nilai bangunan sebesar Rp5.614.891.029,00 dari Dinas Pendidikan ke Dinas Pariwisata dengan Berita Acara Serah Terima No. 900/66/DISDIKBUD/PP/I-2020 tgl 20 Januari 2020. Penambahan nilai bangunan sebesar Rp230.000.000,00 dari BPKD ke Dinas Pariwisata dengan Berita Acara Serah Terima No. 900/20/BA-ASET/PP/IX-2020;
2. Penambahan nilai bangunan sebesar Rp400.953.000,00 dari Kelurahan Pasar Usang ke Dinas Sosial dengan Berita Acara Serah Terima No. 900/06/BA-ASET/PP/IV-2020;
3. Penambahan nilai bangunan sebesar Rp1.064.639.000,00 dari BKPSDM ke Kecamatan Padang Panjang Barat dengan Berita Acara Serah Terima No. 900/10/BA-ASET/PP/IV-2020;
4. Pemberian hibah dari Bank Nagari ke Dinas Koperindag Padang Panjang tentang pembangunan kios pasar buah Kota Padang Panjang sebesar Rp150.000.000,00 dengan Berita Acara No.04/PKS-PP/2020 tanggal 3 Juli 2020;
5. Penambahan / reklas aset dari KDP ke aset tetap gedung bangunan lanjutan pembangunan Islamic Centre pada Dinas PUPR sebesar Rp1.890.734.930,00;
6. Penambahan / reklas aset dari KDP ke aset tetap pembangunan gedung kantor pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2.003.838.628,07; dan
7. Penambahan yang berasal dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap bangunan gedung kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp394.256.400,00.

- Penyesuaian Koreksi kurang bangunan gedung sebesar Rp10.162.885.069,07 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengurangan nilai bangunan sebesar Rp5.614.891.029,00 dari Dinas Pendidikan ke Dinas Pariwisata dengan Berita Acara Serah Terima No. 900/66/DISDIKBUD/PP/I-2020 tanggal 20 Januari 2020;
2. Pengurangan nilai bangunan sebesar Rp400.953.000,00 dari Kelurahan Pasar Usang ke Dinas Sosial dengan Berita Acara Serah Terima No. 900/06/BA-ASET/PP/IV-2020;
3. Pengurangan nilai bangunan sebesar Rp1.064.639.000,00 dari BKPSDM ke Kecamatan Padang Panjang Barat dengan Berita Acara Serah Terima No. 900/10/BA-ASET/PP/IV-2020;

4. Pengurangan nilai bangunan sebesar Rp278.127.000,00 akibat dari penghapusan pada Dinas Koperindag dengan SK penghapusan Nomor: 024/01/SETDAKO-PP/2020 tanggal 10 Januari 2020;
5. Pengurangan akibat hibah ke KPU Padang Panjang dengan nilai bangunan sebesar Rp614.400.000,00 pada BPKD berdasarkan SK Walikota Nomor 74 Tahun 2020;
6. Pengurangan reklas ke aset ekstrakomtable dengan nilai bangunan sebesar Rp5.000.000,00 pada Dinas Pariwisata;
7. Pengurangan nilai bangunan sebesar Rp44.670.000,00 pada Dinas Pendidikan;
8. Pengurangan nilai bangunan sebesar Rp83.571.638,07 yang berasal dari pembayaran utang tahun 2018 pada Sekretariat DPRD; dan
9. Pengurangan akibat migrasi kodefikasi barang milik daerah dari KIB C Gedung Bangunan ke KIB B Peralatan Mesin senilai Rp2.056.633.402,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas PUPR sebesar	Rp 1.166.347.000,00
- Dinas Perhubungan sebesar	Rp 642.847.000,00
- Dinas Pariwisata sebesar	Rp 136.513.250,00
- BPBD sebesar	<u>Rp 110.926.152,00</u>
- Jumlah	Rp 2.056.633.402,00

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	500.574.409.636,31	498.246.859.589,30

Saldo aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 adalah sebesar Rp500.574.409.636,31 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp498.246.859.589,30 maka saldo Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp2.327.550.047,01 atau sebesar 0,47%. Perubahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berasal dari :

- Belanja modal sebesar	Rp2.119.250.097,01
- Koreksi tambah sebesar	Rp 208.299.950,00

Adapun rincian jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut :

a. Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan tahun 2020 senilai Rp341.121.897.646,11 sedangkan saldo 31 Desember tahun 2019 senilai Rp340.880.978.602,11 terjadi peningkatan senilai Rp240.919.044,00 atau sebesar 0,07%.

Adapun rincian belanja modal Jalan dan Jembatan Tahun 2020 adalah :

1. RSUD	Rp.	82.351.500,00
2. Kecamatan Padang Panjang Barat	Rp.	129.817.544,00
3. Kecamatan Padang Panjang Timur	Rp.	28.750.000,00
	Rp.	<u>240.919.044,00</u>

b. Bangunan air/irigasi

Saldo bangunan air/irigasi tahun 2020 senilai Rp110.005.495.296,93 sedangkan saldo 31 Desember tahun 2019 senilai Rp108.531.144.646,92 terjadi peningkatan senilai Rp1.474.350.650,01 atau sebesar 1,36% dengan rincian :

- Belanja modal	Rp	1.266.050.700,01
- Koreksi tambah	Rp	<u>208.299.950,00</u>
	Rp	<u>1.474.350.650,01</u>

Adapun rincian dari Belanja Modal Bangunan air/irigasi tahun 2020 adalah :

1. Kecamatan Padang Panjang Timur	Rp.	76.921.000,00
2. Dinas Pertanian	Rp.	149.327.650,00
3. Dinas PUPR	Rp.	<u>1.039.802.050,01</u>
	Rp.	<u>1.266.050.700,01</u>

Koreksi tambah Bangunan air/Irigasi ini terdiri dari :

- 1) Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp91.504.950,00 dengan Berita Acara Nomor : 030/201/BAST/BAP2BMD-V/2020 dan 900/01/BA-BMD/PP/V/2020;
- 2) Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp77.865.000,00 dengan Berita Acara Nomor : 030/201/BAST/BAP2BMD-V/2020 dan 900/01/BA-BMD/PP/V/2020; dan
- 3) Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan rincian :
 - Rehab jaringan irigasi lubuk janggan Rp13.508.710,00
 - Rehab jaringan irigasi sigata Rp 8.755.717,00
 - Rehab jaringan irigasi muggu II Rp 8.276.158,00
 - Rehab jaringan irigasi sawah labuh Rp 8.389.415,00

c. Instalasi

Saldo instalasi tahun 2020 senilai Rp10.349.907.731,00, sedangkan saldo 31 Desember 2019 senilai Rp9.737.627.378,00 terjadi peningkatan senilai Rp612.280.353,00 atau sebesar 6,29% dengan rincian :

1. Kecamatan Padang Panjang Barat	Rp	36.000.000,00
2. Dinas Kesehatan	Rp	<u>576.280.353,00</u>
Jumlah	Rp	<u>612.280.353,00</u>

d. Jaringan

Saldo Jaringan tahun 2020 senilai Rp39.097.108.962,27 sedangkan saldo 31 Desember 2019 senilai Rp39.097.108.962,27 tidak ada perubahan.

5) Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	7.906.932.706,99	7.395.346.908,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 adalah sebesar Rp7.906.932.706,99. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp7.395.346.908,00, maka saldo Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp511.585.798,99 atau 6,92%.

Perubahan nilai aset tetap lainnya berasal dari :

- Realisasi belanja modal yang dikapitalisir	Rp	902.702.500,00
- Koreksi tambah sebesar	Rp	68.050.000,00
- Koreksi kurang akibat migrasi kodefikasi barang	Rp	(449.691.701,01)
- Koreksi kurang sebesar	Rp	<u>(9.475.000,00)</u>
	Rp	<u>511.585.798,99</u>

Adapun rincian aset tetap lainnya sebagai berikut :

- Penambahan dari belanja Modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

Aset Tetap Lainnya		BM 2020	Yang Tidak dikapitalisir	Di Kapitalisir
a. Buku Perpustakaan	Rp	820.261.676,00	745.019.176,00	75.242.500,00
b. Barang Bercorak	Rp	.	.	.
		847.085.000,00	19.625.000,00	827.460.000,00
Total	Rp	1.667.346.676,00	764.644.176,00	902.702.500,00

Rincian belanja Modal Buku perpustakaan sebesar Rp75.242.500,00 sebagai berikut :

Nama OPD		BM 2020	Yang Tidak dikapitalisir	Di Kapitalisir
1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	49.999.500,00	1.823.000,00	48.176.500,00
2. Dinas Pendidikan	Rp	770.262.176,00	743.196.176,00	27.066.000,00
Total	Rp	820.261.676,00	745.019.176,00	75.242.500,00

Rincian belanja Modal Barang Bercorak sebesar Rp827.460.000,00 sebagai berikut :

Nama OPD		BM 2020	Yang Tidak dikapitalisir	Di Kapitalisir
1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	19.950.000,00	19.625.000,00	325.000,00
2. Dinas Pendidikan	Rp	782.135.000,00	.	782.135.000,00
3. Setdako	Rp	45.000.000,00	.	45.000.000,00
Total	Rp	847.085.000,00	19.625.000,00	827.460.000,00

- Penyesuaian Koreksi tambah aset tetap lainnya terdiri dari :

- 1) Barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga pada Dinas Pariwisata senilai Rp68.050.000,00, hal ini adalah belanja barang jasa yang direklas ke aset tetap lainnya berdasarkan temuan Inspektorat nomor 43/LHP/ITDA-PP/2017 tanggal 10 Oktober 2018.

- Penyesuaian koreksi kurang aset tetap lainnya terdiri dari :
 1. Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga pada dinas arsip senilai Rp9.475.000,00. Hal ini adalah merupakan aset yang direklas ke aset ekstrakomtable; dan
 2. Aset tetap lainnya yang reklas dari KIB E ke KIB B sebesar Rp449.691.701,01 dengan rincian :
 - Setdako sebesar Rp 63.515.000,00
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp386.176.701,01
 - Rp449.691.701,01

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	13.885.447.384,88	13.040.071.465,07

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020 adalah sebesar Rp13.885.447.384,88. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp13.040.071.465,07 mengalami peningkatan sebesar Rp845.375.919,81 atau 6,48%. Kenaikan ini diakibatkan adanya aset KDP yang reklas ke aset tetap. Perubahan nilai konstruksi dalam pengerjaan berasal dari :

- Realisasi belanja modal yang dikapitalisir Rp4.813.135.877,88
- Koreksi kurang sebesar Rp3.967.759.958,07
- Rp 845.375.919,81

Berikut ini adalah penjelasannya :

- Penambahan Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.813.135.877,88 merupakan belanja modal yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2020 kegiatan pemeliharaan periodik jalan DAK paket 1;
- Koreksi kurang konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp3.967.759.958,07 adalah merupakan reklas dari konstruksi dalam pengerjaan (KDP) ke aset induk seperti gedung, jalan dan irigasi. Berikut ini adalah KDP yang reklas ke aset induk :
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp1.929.664.930, dengan rincian sebagai berikut :
 - Lanjutan pembangunan Islamic center sebesar Rp1.890.734.930,00
 - Konsultan perencanaan DAK Irigasi sebesar Rp38.930.000,00
 2. Sekretariat DPRD sebesar Rp2.003.838.628,07
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp34.256.400,00 yang merupakan konsultan perencanaan gedung SMP 4 Kota Padang Panjang.

Untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2020 sebesar Rp13.885.447.381,88 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp12.843.093.900,88 terdiri dari :
 - Convention Islamic Center : Rp 5.939.174.000,00
 - Rusunawa : Rp 1.838.725.315,00
 - Biaya konsultan perencanaan lampu jalan : Rp 166.510.868,00
 - Perencanaan DAK jalan : Rp 51.045.840,00
 - Konsultan perencanaan pemeliharaan jalan: Rp 34.502.000,00
 - Pemeliharaan Periodik Jalan DAK : Rp 4.813.135.877,88
 - Rp 12.843.093.900,88

2. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.042.353.484,00
 - Pembangunan mushalla SMP N 1 : Rp 902.611.084,00
 - Konsultan perencanaan rehab WC : Rp 22.630.000,00
 - Perencanaan lanjutan pembangunan asrama Rp 40.613.200,00
 - Lanjutan pembangunan gedung SD 6 BB : Rp 40.630.800,00
 - Lanjutan pembangunan labor SMP 5 : Rp 35.868.400,00
 - Rp 1.042.353.484,00

7) Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	(610.932.454.202,00)	(561.269.552.341,67)

Saldo Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 adalah sebesar Rp(610.932.454.202,00) Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 adalah sebesar Rp(561.269.552.341,67) maka saldo tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp(49.662.901.860,33) atau 8,85%. Berikut rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	226.444.940.774,00	194.511.662.112,53
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	99.711.241.161,00	115.415.280.923,10
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	284.776.272.267,00	251.342.609.306,04
Total Nilai		610.932.454.202,00	561.269.552.341,67

Untuk akumulasi penyusutan tahun 2020 per OPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 57- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2020

Nama OPD		Jumlah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	(36.318.029.456,00)
Dinas Kesehatan	Rp.	(18.011.582.302,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp.	(105.210.416.792,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.	(288.532.590.321,00)
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH	Rp.	(23.993.356.713,00)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp.	(5.533.586.313,00)
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk & KB, Pemb. Pr & PA	Rp.	(6.207.850.017,00)
Dinas Pangan dan Pertanian	Rp.	(13.947.089.663,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp.	(1.948.778.958,00)
Dinas Perhubungan	Rp.	(9.253.043.378,00)
Dinas Komunikasi dan Informasi	Rp.	(8.269.772.426,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Rp.	(1.361.712.941,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp.	(3.550.770.935,00)
Dinas Pariwisata	Rp.	(3.641.613.219,00)
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	Rp.	(15.898.671.565,00)
Inspektorat Daerah	Rp.	(1.653.526.228,00)
Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.	(2.333.799.245,00)
Badan Pengelola Keuangan Daerah	Rp.	(10.089.569.422,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp.	(3.318.876.260,00)
Sekretariat Daerah	Rp.	(24.432.643.362,00)
Sekretariat DPRD	Rp.	(12.310.755.623,00)
Kecamatan Padang Panjang Barat	Rp.	(5.980.681.526,00)
Kecamatan Padang Panjang Timur	Rp.	(5.538.915.136,00)
BPBD	Rp.	(3.594.822.401,00)
	Rp.	(610.932.454.202,00)

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya (kecuali hewan, tanaman dan buku perpustakaan). Metode Penyusutan yang digunakan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dari Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang adalah Metode Garis Lurus dengan Pendekatan Bulanan yang sebelumnya menggunakan pendekatan semesteran. Sehingga hal ini mengakibatkan adanya koreksi terhadap nilai akumulasi penyusutan tahun 2019.

Adapun rincian dari koreksi nilai akumulasi penyusutan tersebut adalah sebagai berikut :

Nama OPD		Jumlah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	(1.490.178.204,51)
Dinas Kesehatan	Rp	(517.431.215,16)
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	(2.868.241.227,64)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	19.876.047.877,01
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH	Rp	(2.585.601.270,42)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp	(221.520.890,35)
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB pemb. Pr & PA	Rp	(22.729.096,14)
Dinas Pangan dan Pertanian	Rp	(1.382.010.965,10)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	10.004.642,44
Dinas Perhubungan	Rp	(518.733.482,75)
Dinas Komunikasi dan Informasi	Rp	(421.489.952,17)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Rp	(12.132.497,72)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	(104.747.743,15)
Dinas Pariwisata	Rp	77.014.537,30
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	Rp	(455.884.099,28)
Inspektorat Daerah	Rp	(6.229.600,74)
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	(93.016.349,41)
Badan Pengelola Keuangan Daerah	Rp	(72.903.226,90)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp	(970.559.145,59)
Sekretariat Daerah	Rp	(931.001.838,23)
Sekretariat DPRD	Rp	(90.699.601,89)
Kecamatan Padang Panjang Timur	Rp	(468.663.845,81)
Kecamatan Padang Panjang Barat	Rp	(175.292.261,34)
BPBD	Rp	(196.597.267,78)
Jumlah	Rp	6.357.403.274,67

Perhitungan nilai penyusutan bangunan telah mengakomodir penambahan masa manfaat setelah dilakukannya renovasi terhadap Aset Tetap Bangunan Gedung dan Monumen. Perhitungan ini dilakukan terhadap seluruh Bangunan Gedung dan Monumen di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dapat diinformasikan juga bahwa pada tahun 2020 terjadi peralihan sistem informasi (aplikasi) yang digunakan dalam pengelolaan Aset Daerah dari SIPKD ke SIMDA BMD. Pada tahun 2020 penghitungan nilai akumulasi penyusutan dilakukan melalui aplikasi SIMDA BMD.

d. Aset Lainnya	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	43.375.284.609,50	47.904.434.017,49

Saldo Aset Lainnya Tahun 2020 adalah sebesar Rp43.375.284.609,50. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp47.904.434.017,49 maka saldo Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp4.529.149.407,99 atau 9,45 %. Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	22.449.000,00	22.449.000,00

Saldo Tahun 2020 Tagihan tuntutan ganti rugi adalah Rp22.449.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp22.449.000,00 maka saldo tagihan tuntutan ganti rugi tahun 2020 adalah tetap. Rincian TP/TGR ini berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 024/207/WAKO-PP/2016 tentang Pembebanan Ganti Rugi Kehilangan Barang Milik Daerah Kota Padang Panjang Kepada Ridya Hazni, ST sebesar Rp11.849.000,00 dan Medi Rosdian, S. Sos, M.SisebesarRp10.600.000,00

Tabel 58- TGR TA 2020 Yang Sudah Dikeluarkan SK TJM

No	Tahun Kejadian	Sumber Kejadian	Uraian Kasus	Total Kerugian (Rp.)	Telah Ditindakanjuti Sebesar (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	SKPD	Keterangan
1	2015	Inspektorat	1. Kehilangan Sepeda motor Honda Vario Techno CBS 125 CC pada Tahun 2015, tahun perolehan di KIB Rp. 16.744.000,-	12.600.000,00	-	10.600.000,00	Disporapar a.n.Medi Rosdian	
2			1. Kehilangan satu unit Sepeda Motor Honda Vario pada Dinas Pekerjaan Umum a.n. Ridya Hazni, ST	11.849.000,00	-	11.849.000,00	Dinas Pekerjaan Umum a.n Ridya Hazni, ST	
TOTAL SISA KERUGIAN						22.449.000,00		

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	23.428.912.000,00	24.067.537.000,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari nilai aset milik Pemerintah Kota Padang Panjang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2020 yang terdiri dari:

1. Mifan	Rp.	21.995.412.000,00
2. Pasar sayur	Rp.	1.433.500.000,00
Jumlah	Rp.	<u>23.428.912.000,00</u>

- (1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga tentang Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Perkampungan Minangkabau Kota Padang Panjang (MIFAN). Kemitraan dengan pihak ketiga ini didasarkan atas perjanjian kerjasama Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT. Niagara Fantasy Island Nomor 44/PMD-MKV/X-2007 dan Nomor 07/NFI/PP/X/07.

Pada dokumen perjanjian kerjasama tersebut terdapat lampiran yang merinci jenis aset Pemda yang masuk dalam objek perjanjian, yaitu meliputi tanah, bangunan dan peralatan mesin sebagaimana yang tercantum dalam berita acara nomor: 556/711/Persenibud-PP/X/2007 sebesar Rp.22.997.057.000,00. Pada tahun 2018 terjadi penghapusan sebesar Rp363.020.000,00 dengan BAST 024/45/WAKO-PP/2011 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp.	34.520.000,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp.	<u>328.500.000,00</u>
Jumlah	Rp.	<u>363.020.000,00</u>

Sehingga nilai kemitraan dengan pihak ketiga yakni Mifan adalah sebesar Rp22.634.037.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah	Rp.	19.678.625.000,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp.	362.412.000,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp.	<u>2.593.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.	<u>22.634.037.000,00</u>

Pada tahun 2020 sebagian aset Kemitraan pihak ketiga mutasi aset ke Dinas Pariwisata sebesar Rp638.625.000 berdasarkan BA 900/20/BA-ASET/PP/IX-2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah sebesar	Rp.	278.625.000,00
- Bangunan sebesar	Rp.	<u>360.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.	<u>638.625.000,00</u>

Sehingga nilai kemitraan pihak ketiga Mifan 2020 adalah sebesar Rp21.995.412.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah sebesar	Rp.	19.400.000.000,00
- Peralatan mesin sebesar	Rp.	362.412.000,00
- Gedung bangunan sebesar	Rp.	2.233.000.000,00
Jumlah	Rp.	<u>21.995.412.000,00</u>

- (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga tentang Pembangunan Kawasan Perdagangan di Kelurahan Bukit Surungan. Kemitraan dengan Pihak Ketiga ini didasarkan atas perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT. Alam Sejahtera Sejati Nomor 001/PMDD-PP/I-2006 dan Nomor 100/ASS/I/2006 tertanggal 3 Januari 2006. Pemko memberikan hak melaksanakan pembangunan pada tanah dengan sertifikat Hak Pakai pada 4 persil tanah seluas 4.784 m² (sertifikat No.06/2003 dengan luas 955 m², sertifikat No.07/2003 dengan luas 884 m², sertifikat No.08/2003 dengan luas 1.917m² dan sertifikat No.09/2003 dengan luas 1.028 m²) dengan nilai sebesar Rp. 1.433.500.000,00. Sedangkan PT. Alam Sejahtera Sejati bersedia melaksanakan pembangunan kawasan perdagangan di Kelurahan Bukit Surungan dan fasilitas pada tanah tersebut. Pola bentuk kerjasamanya, Pemko Padang Panjang dan PT. Alam Sejahtera Sejati sama-sama memasarkan kios dan rumah toko (ruko) kepada pihak ketiga. Perjanjian ini berlangsung selama jangka waktu 20 tahun.

PT. Alam Sejahtera Sejati dan Pemko bersepakat bahwa uang sewa yang diterima dikurangi dulu dengan nilai bangunan dan biaya lainnya sesuai dengan persentase : Pemko padang panjang sebesar 20% dan PT Alam Sejahtera Sejati sebesar 80%. Seiring dengan berjalannya waktu, PT. Alam Sejahtera Sejati wanprestasi atas perjanjian dikarenakan tidak menyelesaikan bangunan dalam jangka waktu 12 bulan atau tepatnya pada tanggal 3 Januari 2007, sehingga didalam perjanjian jika wan prestasi dikenakan sanksi dendanya maksimal 5 % dalam kontrak. Sesuai dengan rekomendasi/saran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap penanganan Pasar Sayur Bukit Surungan Padang Panjang, maka telah dilakukan langkah-langkah antara lain:

- Beberapa kali rapat untuk membahas tindak lanjut penanganan Pasar Sayur Bukit Surungan, termasuk dengan pihak investor; dan
- Terakhir berdasarkan rekomendasi tim, maka kelanjutan penanganan Pasar Sayur Bukit Surungan diserahkan ke Bagian Hukum dan HAM dan sampai saat ini masih dalam tahap proses pengadilan.

Perkembangan atas proses pengadilan dapat dilihat pada catatan Laporan Keuangan No F tentang Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan.

3) Aset Tak Berwujud	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	4.246.954.840,00	2.340.631.763,00

Saldo Aset Tak Berwujud Tahun 2020 adalah sebesar Rp4.246.954.840,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.340.631.763,00. maka Aset Tak Berwujud Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.906.323.077,00 atau 81.44%. Penambahan aset tak berwujud ini berasal dari belanja modal OPD tahun 2020 sebagai berikut :

OPD	Aset Tak Berwujud		Jumlah
	Software	Kajian	
Dinas Pendidikan	41.336.900,00	54.922.480,00	96.259.380,00
RSUD	-	881.624.620,00	881.624.620,00
Dinas PUPR	-	382.203.452,00	382.203.452,00
Dinas Perkim LH	-	210.022.400,00	210.022.400,00
Dinas Perhubungan	46.850.000,00	-	46.850.000,00
DPMPTSP	43.345.500,00	-	43.345.500,00
Dinas Pariwisata	-	12.711.325,00	12.711.325,00
BPKD	167.180.000,00	-	167.180.000,00
Setdako	-	66.126.400,00	66.126.400,00
Jumlah	298.712.400,00	1.607.610.677,00	1.906.323.077,00

4) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	(1.771.847.153,00)	0,00

Berdasarkan perubahan kebijakan akuntansi nomor 77 tahun 2020, aset tidak berwujud nilai amortisasinya harus dihitung sedangkan tahun sebelumnya amortisasi tidak dihitung. Akumulasi amortisasi tahun 2020 sebesar Rp1.771.847.153,00 adalah merupakan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud yang berupa software dan hasil kajian. Adapun rincian dari akumulasi amortisasi adalah sebagai berikut :

OPD	Jumlah
Dinas Pendidikan	Rp 25.004.368,00
RSUD	Rp 14.693.744,00
Dinas Pariwisata	Rp 346.166.641,00
Dinas Perkim LH	Rp 29.764.640,00
Dinas PUPR	Rp 590.325.748,00
Setdako	Rp 66.834.087,00
BKPSDM	Rp 104.650.000,00
DPMPTSP	Rp 722.425,00
BPKD	Rp 112.202.167,00
Dinas Koperindag	Rp 76.500.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 105.600.000,00
Dinas Perhubungan	Rp 299.383.333,00
Jumlah	Rp 1.771.847.153,00

Metode yang digunakan untuk menghitung amortisasi adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dari Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang adalah Metode Garis Lurus dengan

Pendekatan Bulanan yang sebelumnya tidak ada penghitungan terhadap amortisasi aset tidak berwujud. Sehingga hal ini mengakibatkan adanya koreksi terhadap nilai akumulasi amortisasi tahun 2019. Adapun rincian dari koreksi nilai akumulasi penyusutan amortisasi tersebut adalah sebagai berikut :

Nama OPD		Jumlah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	(17.066.560,00)
Dinas Kesehatan	Rp	-
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	(427.194.480,00)
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH	Rp	-
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp	-
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB pemb. Pr & PA	Rp	-
Dinas Pangan dan Pertanian	Rp	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	-
Dinas Perhubungan	Rp	(226.324.000,00)
Dinas Komunikasi dan Informasi	Rp	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Rp	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	(79.200.000,00)
Dinas Pariwisata	Rp	(233.753.234,00)
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	Rp	(76.500.000,00)
Inspektorat Daerah	Rp	-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	-
Badan Pengelola Keuangan Daerah	Rp	(77.690.000,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp	(94.450.000,00)
Sekretariat Daerah	Rp	(53.960.000,00)
Sekretariat DPRD	Rp	-
Kecamatan Padang Panjang Timur	Rp	-
Kecamatan Padang Panjang Barat	Rp	-
BPBD	Rp	-
Jumlah	Rp	(1.286.138.274,00)

5) Aset Lain-Lain	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	73.524.199.757,31	78.278.541.647,31

Aset lain-lain merupakan aset yang sudah tidak digunakan dan dimanfaatkan lagi dalam kegiatan operasional sehari - hari dikarenakan rusak atau diserahkan kepada pihak lain dan dalam proses penghapusan. Nilai aset tetap lain-lain tahun 2020 sebesar Rp73.524.199.757,31. Jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp78.278.541.647,31 aset lain-lain tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.754.341.890,00 atau sebesar 6,07% yang berasal dari mutasi tambah dan mutasi kurang sebagai berikut :

- Koreksi tambah sebesar	Rp 390.200.000,00
- Koreksi kurang sebesar	<u>(Rp5.144.541.890,00)</u>
	<u>Rp4.754.341.890,00.</u>

Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut :

Penjelasan Koreksi tambah :

1. Penambahan pada Dinas pariwisata sebesar Rp1.250.000,00 yang berasal dari dinas pendidikan dengan berita acara nomor 900/66/DISDIKBUD/PP/I-2020;
2. Penambahan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp49.450.000,00 yang berasal dari setdako dengan berita acara nomor 900/05/BA.ASET/PP/II-2019;
3. Penambahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur sebesar Rp226.000.000,00 yang berasal dari Dinas Perkim LH dengan berita acara nomor 900/19/BA-ASET/PP/VII-2020; dan
4. Penambahan pada Dinas Perkim LH sebesar Rp113.500.000,00 yang berasal reklas aset tetap karena kondisi rusak berat.

Penjelasan Koreksi kurang :

1. Pengurangan pada Dinas pendidikan ke Dinas pariwisata sebesar Rp1.250.000,00 dengan berita acara nomor 900/66/DISDIKBUD/PP/I-2020;
2. Pengurangan pada Setdako ke BPKD sebesar Rp49.450.000,00 dengan berita acara nomor 900/05/BA.Aset/PP/II-2019;
3. Pengurangan pada Dinas Perkim LH ke kecamatan padang panjang timur sebesar Rp226.000.000,00 dengan berita acara nomor 900/19/BA-ASET/PP/VII-2020;
4. Pengurangan pada Dinas Perkim LH yang merupakan reklas dari aset tetap sebesar Rp113.500.000,00 karena kondisi rusak berat;
5. Penghapusan aset tetap pada setdako sebesar Rp30.500.000,00 dengan SK Walikota Padang Panjang Nomor 152 tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020;
6. Penghapusan aset tetap pada BPKD sebesar Rp19.800.000,00 dengan SK Walikota Padang Panjang Nomor 152 tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020;
7. Penghapusan aset tetap pada Dinas Arsip sebesar Rp7.000.000,00 dengan SK Walikota Padang Panjang Nomor 152 tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020;
8. Penghapusan aset tetap pada Dinas Pertanian sebesar Rp4.300.000,00 dengan SK Walikota Padang Panjang Nomor 152 tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020;
9. Penghapusan aset tetap pada Isnpektorat sebesar Rp3.400.000,00 dengan SK Walikota Padang Panjang Nomor 152 tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020;
10. Penghapusan aset tetap pada Satpol.PP sebesar Rp80.000.000,00 dengan SK Walikota Padang Panjang Nomor 152 tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020;
11. Pemberian hibah berupa tanah kepada MAN 3 sebesar Rp1.438.760.000,00 dengan SK penghapusan Walikota Padang Panjang Nomor 227 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020;
12. Pemberian hibah berupa tanah kepada MTsN 2 sebesar Rp2.789.659.461 dengan SK penghapusan Walikota Padang Panjang Nomor 227 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020;
13. Pembebanan tuntutan ganti rugi aset tetap pada BPBD kesbangpol sebesar Rp9.000.000,00 dengan nomor perkara : 02/MPTGR/06/2020;
14. Pembebanan tuntutan ganti rugi aset tetap pada Dinas pangan dan pertanian sebesar Rp25.400.000,00 dengan nomor perkara :03/MPTGR/06/2020;

15. Reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Perhubungan sebesar Rp60.660.200,00;
16. Reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp211.307.229,00;
17. Reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp169.290.000,00; dan
18. Reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp18.765.000,00.

Adapun rincian dari aset lain-lain sebagai berikut :

OPD	Rusak Berat	FTD	Jumlah
Dinas Pangan dan Pertanian	1.789.295.650,00	-	1.789.295.650,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	333.257.200,00	-	333.257.200,00
Bappeda	849.237.079,00	-	849.237.079,00
Rumah Sakit Umum Daerah	6.851.231.377,00	11.460.000,00	6.862.691.377,00
BKPSDM	367.067.110,00	-	367.067.110,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	524.328.090,00	-	524.328.090,00
Dinas Kesehatan	5.359.546.346,91	5.803.137.792,00	11.162.684.138,91
Dinas Perkim LH	2.991.148.226,00	8.332.500,00	2.999.480.726,00
Dinas Sosial	531.095.200,00	14.138.045,00	545.233.245,00
Kec Padang Panjang Barat	703.237.690,00	5.773.778,00	709.011.468,00
Kec Padang Panjang Timur	993.072.361,00	-	993.072.361,00
Dinas PUPR	13.628.353.826,07	13.100.000,00	13.641.453.826,07
Sekretariat DPRD	206.434.068,00	0,00	206.434.068,00
Sekretariat Daerah	4.501.138.848,00	0,00	4.501.138.848,00
Dinas Pariwisata	330.047.796,00	-	330.047.796,00
BPBD Kesbangpol	1.093.820.359,00	400.731.776,00	1.494.552.135,00
Dinas Perhubungan	319.271.434,00	79.280.075,00	398.551.509,00
Dinas Pendidikan	12.073.446.426,00	11.547.309.765,00	23.620.756.191,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	812.659.652,33	52.615.450,00	865.275.102,33
BPKD	556.069.679,00	-	556.069.679,00
Dinas Kominfo	88.284.200,00	-	88.284.200,00
Inspektorat	107.000.500,00	-	107.000.500,00
DPMPSTSP	74.912.335,00	-	74.912.335,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	504.365.123,00	-	504.365.123,00
Jumlah	55.588.320.576,31	17.935.879.181,00	73.524.199.757,31

6) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2020 (Rp) (56.075.383.834,81)	31 Desember 2019 (Rp) (56.804.725.392,82)
---	--	--

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp(56.075.383.834,81). Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp(56.804.725.392,82) maka saldo Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp(729.341.558,01) atau 1,28%. Adapun rincian dari penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut :

Nama OPD		Jumlah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	(16.751.958.942,91)
Dinas Kesehatan	Rp	(11.136.872.880,91)
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	(6.861.878.877,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	(3.373.909.284,66)
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH	Rp	(2.874.094.090,00)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp	(322.327.000,00)
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB pemb. Pr & PA	Rp	(501.218.995,00)
Dinas Pangan dan Pertanian	Rp	(1.477.476.490,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	(325.195.515,00)
Dinas Perhubungan	Rp	(380.391.466,00)
Dinas Komunikasi dan Informasi	Rp	(80.608.026,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Rp	(73.922.335,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	(504.365.123,00)
Dinas Pariwisata	Rp	(274.214.038,00)
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	Rp	(752.076.673,33)
Inspektorat Daerah	Rp	(106.440.500,00)
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	(811.138.679,00)
Badan Pengelola Keuangan Daerah	Rp	(1.898.648.429,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp	(367.067.110,00)
Sekretariat Daerah	Rp	(4.201.469.566,00)
Sekretariat DPRD	Rp	(132.854.000,00)
Kecamatan Padang Panjang Timur	Rp	(860.409.024,00)
Kecamatan Padang Panjang Barat	Rp	(697.945.471,00)
BPBD	Rp	(1.308.901.319,00)
Jumlah	Rp	(56.075.383.834,81)

Metode yang digunakan untuk menghitung nilai penyusutan aset lain-lain adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dari Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang adalah Metode Garis Lurus dengan Pendekatan Bulanan yang sebelumnya menggunakan pendekatan semesteran. Sehingga hal ini mengakibatkan adanya koreksi terhadap nilai akumulasi penyusutan tahun 2019. Adapun rincian dari koreksi nilai akumulasi penyusutan tersebut adalah sebagai berikut :

Nama OPD		Jumlah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	-
Dinas Kesehatan	Rp	1.537.934,01
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	(687.500,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	-
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH	Rp	205.499,57
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp	(390.000,00)
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB pemb. Pr & PA	Rp	(1.329.533,34)
Dinas Pangan dan Pertanian	Rp	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	1.109.025,00
Dinas Perhubungan	Rp	4.879.250,14
Dinas Komunikasi dan Informasi	Rp	(3.780.651,71)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Rp	-

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	-
Dinas Pariwisata	Rp	(780.000,40)
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	Rp	(7.904.404,33)
Inspektorat Daerah	Rp	-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	-
Badan Pengelola Keuangan Daerah	Rp	(49.446.500,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp	-
Sekretariat Daerah	Rp	50.730.867,07
Sekretariat DPRD	Rp	-
Kecamatan Padang Panjang Timur	Rp	39.912.850,50
Kecamatan Padang Panjang Barat	Rp	(15.021.358,50)
BPBD	Rp	669.366,00
Jumlah	Rp	19.704.844,01

Pinjam Pakai Barang Milik Daerah :

(1) Tanah

Tabel 59 Tanah yang dipinjam pakaikan Tahun Anggaran 2020

NO	Instansi	Alamat	Luas(m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Instansi Peminjam
1.	Tanah TK Thawalib Gunung	Kacang Kayu	1,812	271.800.000,00	Yayasan Thawalib
Nilai Total				271.800.000,00	

(2) Peralatan dan Mesin

Per tanggal 31 Desember 2020 nilai Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp2.883.389.848,00. Dari Aset Tetap Peralatan Mesin tersebut terdapat Kendaraan yang dipinjam pakaikan kepada instansi vertikal, dengan rincian sebagai berikut:

- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Inova pada Kodim 0307 Tanah Datar BA 3352 NZ dengan nilai Kendaraan sebesar Rp384.100.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/04/BPKD-Aset/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017;
- Pinjam pakai Kendaraan dinas toyta inova pada Bawaslu Padang Panjang BA ex 37 N dengan nilai Kendaraan sebesar Rp185.000.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BA.Aset/IX/2020 tanggal 21 September 2020;
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Inova pada Pengadilan Negeri BA ex 5 N / BA 1568 N dengan nilai Kendaraan sebesar Rp289.395.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/08/BPKD.Aset/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017;
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Isuzu Panther pada Kementerian Agama BA 1575 N dengan nilai Kendaraan sebesar Rp304.129.618,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/02/BPKD.Aset/V/2017 tanggal 10 Mei 2017;
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Isuzu Panther dan Kendaraan roda dua pada kantor Samsat BA 1577 N dan BA 7667 N dengan nilai Kendaraan Rp253.515.612,00 dan Rp6.500.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BPKD.Aset/II/2018 tanggal 15 Februari 2018;
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Avanza pada Badan Pertanahan BA 1585 NC dengan nilai sebesar Rp217.870.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BPKD.ASET/I/2019 tanggal 28 Januari 2018;

- Pinjam pakai Kendaraan dinas Isuzu Panther pada Pengadilan Agama BA 1576 N dengan nilai sebesar Rp304.129.618,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BPKD.ASET/I/2021 tanggal 4 Januari 2020;
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Mitsubishi L300 pada Secata B BA 2731 NE dengan nilai sebesar Rp145.000.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/DPPKAD.ASET/I/2016 tanggal 6 Januari 2016;
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Rush pada Secata B BA 1736 NE dengan nilai sebesar Rp210.250.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/DPPKAD.ASET/I/2016 tanggal 1 Juni 2016;
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Inova pada Polres Padang Panjang BA 1505 N dengan nilai sebesar Rp173.500.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/06/BPKD.ASET/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017;
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Rush dan Kendaraan roda dua pada KPU BA 1576 N dan BA 7575 NE dengan nilai Kendaraan sebesar Rp189.500.000,00 dan Rp7.000.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/BPKD.ASET/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017; dan
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Inova pada Polisi Militer Padang Panjang BA 1756 N dengan nilai Kendaraan sebesar Rp185.000.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/13/DPPKAD.ASET/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.

Adapun penjelasan tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 60- Peralatan dan Mesin yang Dipinjampakaikan TA 2020

NO	Jenis	NO. POLISI	31 Desember 2020 Nilai	Instansi Vertikal
			Perolehan (Rp)	
1	Kendaraan Roda 4			
	Toyota Kijang Innova	BA 5 N/ BA 1568 N	289.395.000,00	Pengadilan Negeri
	Toyota Kijang Innova	BA 1756 NZ	185.000.000,00	Polisi Militer
	Toyota Fortuner	BA 3352 NZ	384.100.000,00	Kodim 0307
	Toyota Kijang Innova	BA 1505 N	173.500.000,00	Polres Padang Panjang
	Toyota Kijang Innova	BA 1715 N	185.000.000,00	Brimob
	Isuzu Panther	BA 1577 N	253.515.612,00	Kantor Samsat
	Toyota Avanza	BA 1585 NC	217.870.000,00	Badan Pertanahan
	Mitsubishi L300	BA 2731 NE	145.000.000,00	Secata B
	Toyota Rush	BA 1736 N	210.250.000,00	Secata B
	Toyota Rush	BA 28 N/ BA 1576 N	189.150.000,00	KPU
	Isuzu Panther	BA 1576 N	304.129.618,00	Pengadilan Agama
	Toyota Inova	BA ex 37 N	185.000.000,00	Bawaslu
	Isuzu Panther	BA 1575 N	304.129.618,00	Kementerian Agama
2	Kendaraan Roda 2			
	Honda	BA 7575 NE	7.000.000,00	KPU Padang Panjang
	Honda	BA 7667 N	6.500.000,00	Kantor Samsat
JUMLAH			3.039.539.848,00	

(3) Gedung dan Bangunan

Total nilai bangunan dan gedung per 31 Desember 2020 sebesar Rp607.446.000,00 dan dari nilai diatas terdapat bangunan gedung yang dipinjam pakaikan sebagai berikut:

Tabel 61-Bangunan yang Dipinjampakaikan TA 2020

NO	Uraian	Alamat	Luas (m ²)	Nilai	Ket Peminjam
1	Bangunan Sekolah	Kacang Kayu	503.00	565,727,000.00	Yayasan Thawalib
2	Rumah Dinas	Kacang Kayu	85.50	41,719,000.00	Yayasan Thawalib
TOTAL NILAI				607.446.000,00	

e. Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	12.632.361.642,70	17.906.832.365,57

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp12.632.361.642,70. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp17.906.832.365,57, maka saldo Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.274.470.722,87 atau 29,46%. Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2020 dan 2019 terdiri atas:

	Tahun 2020		Tahun 2019	
Utang PFK	Rp	4.745.306,00	Rp	241.412,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	11.645.317.736,20	Rp	16.081.999.029,00
Utang Belanja	Rp	764.610.117,50	Rp	1.540.827.617,57
Pendapatan Diterima di Muka	Rp	217.688.483,00	Rp	283.764.307,00
	Rp	12.632.361.642,70	Rp	17.906.832.365,57

Berikut rincian kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020:

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	4.745.306,00	241.412,00

Saldo Utang PFK Tahun 2020 adalah sebesar Rp4.745.306,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp241.412,00, maka utang perhitungan pihak ketiga (PFK) tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp4.503.894,00 atau 1.865,65%. Saldo utang PFK tahun 2020 sebesar Rp4.745.306,00 merupakan pajak yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2020 oleh Dinas Kesehatan, RSUD dan BPBD Kesbangpol dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	PPN	PPH Psl 21	PPH Ps 22	PPH Ps 4 (2)	Jumlah (Rp)
- Dinas Kesehatan	940.455,00	118.500,00	75.180,00	545.455,00	1.679.590,00
- RSUD	570.188,00	1.000.000,00	85.528,00	0,00	1.655.716,00
- BPBD Kesbangpol	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
Total	1.510.643,00	2.528.500,00	160.708,00	545.455,00	4.745.306,00

Adapun utang pajak sebesar Rp241.412,00 tersebut diatas telah disetor pada bulan Januari 2021.

2) Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	11.645.317.736,20	16.081.999.029,00

Saldo Utang jangka pendek Tahun 2020 adalah Rp11.645.317.736,20. Jika dibandingkan dengan saldo Utang jangka pendek Tahun 2019 sebesar Rp16.081.999.029, maka terdapat penurunan sebesar Rp4.436.681.292,80 atau 27,59% di Tahun 2020.

Rincian utang jangka pendek lainnya Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1.	RSUD	Rp	11.400.398.546,20
2.	PPKD	Rp	244.919.190,00
	Jumlah	Rp	11.645.317.736,20

Saldo utang jangka pendek lainnya sebesar Rp11.400.398.546,20 yang terdapat pada RSUD Kota Padang Panjang yang terdiri atas :

1.	Jasa pelayanan yang masih harus dibayar	Rp	7.888.080.624,20
2.	Utang pada RS lainnya	Rp	7.362.250,00
3.	Utang lainnya RSUD	Rp	0,00
4.	Utang usaha	Rp	3.504.955.672,00
5.	Utang belanja barang dan jasa	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	11.400.398.546,20

Jasa pelayanan yang masih harus dibayar senilai Rp7.888.080.624,20 terdiri atas:

- BPJS (Rp5.438.417.404,20)
Pelayanan BPJS (Susulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020), dan obat kronis (susulan September sampai dengan Desember 2020),
- Kemenkes (Rp2.077.492.000,00)
Pelayanan COVID-19 (September s.d November 2020).
- Pasien umum (Rp369.187.140,00)
Pelayanan (September sampai dengan Desember 2020) dan obat (September sampai dengan Desember 2020).
- MCU (Rp2.984.080,00) September sampai dengan Desember 2020.

Utang pada rumah sakit lainnya sebesar Rp7.362.250,00 terdiri dari:

1.	RSAM Bukittinggi (Des)	Rp	162.250,00
2.	RSUD. Syahrial Leman (Sep-Des)	Rp	4.300.000,00
3.	RSI Ibnu Sina Padang Panjang	Rp	2.900.000,00
	Jumlah	Rp	7.362.250,00

Utang usaha sebesar Rp3.504.955.672,00 terdiri atas:

1.	Bahan kimia labor	Rp	288.822.490,00
2.	Bahan habis pakai	Rp	1.406.328.958,00
3.	Obat	Rp	1.697.479.224,00
4.	Gas Medis	Rp	92.489.000,00
5.	Limbah B3	Rp	19.836.000,00
	Jumlah	Rp	3.504.955.672,00

Saldo utang jangka pendek lainnya sebesar Rp244.919.190,00 yang terdapat pada PPKD merupakan utang transfer pemerintah pusat dana perimbangan atas kelebihan salur, berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, yang terdiri atas :

1.	DBH SDA Kehutanan	Rp	41.745.025,00
2.	DBH SDA Panas Bumi	Rp	722.577,00
3.	DBH SDA Minerba	Rp	202.451.588,00
	Jumlah	Rp	244.919.190,00

3) Utang Belanja	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	764.610.117,50	1.540.827.617,57

Saldo Utang belanja Tahun 2020 adalah sebesar Rp764.610.117,50. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp1.540.827.617,57, maka saldo Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp776.217.500,07 atau 50,38%.

Saldo Utang Belanja Tahun 2020 terdiri dari:

1.	Utang Belanja Jasa	Rp	594.905.449,00
2.	Utang Belanja Pegawai- Gaji dan Tunjangan	Rp	48.141.301,00
3.	Utang belanja modal	Rp	121.563.367,50
	Jumlah	Rp	764.610.117,50

Adapun rincian Utang belanja tahun 2020 sebesar Rp764.610.117,50 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a) Utang belanja jasa Tahun 2020 sebesar Rp594.905.449,00 terdiri dari :

1.	Rekening Telepon	Rp	19.244.947,00
2.	Rekening Internet	Rp	53.124.338,00
3.	Rekening Listrik	Rp	335.525.427,00
4.	Rekening Air	Rp	103.901.870,00
5.	Retribusi kebersihan	Rp	2.819.000,00
6.	Jasa medis JKN	Rp	30.415.867,00
7.	Jasa konsultasi kajian wisata stasiun kereta api	Rp	49.874.000,00
	Jumlah	Rp	594.905.449,00

b) Selanjutnya Utang Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan tahun 2020 sebesar Rp48.141.301,00 terdiri dari:

1.	Gaji pokok	Rp	25.328.640,00
2.	Tunjangan keluarga	Rp	2.137.862,00
3.	Tunjangan fungsional	Rp	19.520.000,00
4.	Tunjangan fungsional umum	Rp	370.000,00
5.	Tunjangan beras	Rp	36.138,00
6.	Tunjangan jabatan	Rp	0,00
7.	Tunjangan PPh	Rp	746.882,00
8.	Pembulatan gaji	Rp	1.779,00
	Jumlah	Rp	48.141.301,00

c) Utang Belanja Modal sebesar Rp121.563.367,50, merupakan utang pembuatan lampu jalan dan taman kawasan Kota Padang Panjang (jalan irigasi dan jaringan).

d) Dapat diinformasikan bahwa terdapat beberapa kegiatan tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang yang diberikan kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- **Pada Bidang Bina Marga ;**

- Kegiatan DAK Bidang Jalan

Pemeliharaan periodik jalan DAK Paket I, dilaksanakan oleh CV. Berakit Jaya

Nilai Kontrak sebesar Rp5.121.424.000,00

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.598.052.877,88 (89,78%)

Sisa pada pemberian kesempatan tahun 2021 **Rp523.371.122,12 (10,22%)**.

DAK Bidang Jalan merupakan salah satu kegiatan yang difocusing (dihilangkan) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 (COVID-19) pada pergeseran anggaran ke-3 (tiga) tanggal 24 April 2020. Pada pergeseran anggaran ke-5 (lima) tanggal 7 Juli 2020 kegiatan DAK Bidang Jalan dimunculkan kembali. Adapun waktu untuk pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya 6 (enam) bulan sesudah proses tender menjadi 4 (empat) bulan, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian volume pekerjaan disamping faktor non teknis pada pengaspalan ruas jalan pasar sayur. Sehingga pencapaian progres fisik dan keuangan pada 30 Desember 2020 adalah 93,041% dan 89,78% dan diberikan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pada tahun 2021.

- Kegiatan Penunjang DAK Infrastruktur Jalan

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan DAK Jalan TA 2020, dilaksanakan oleh CV. Nafla Consulting

Nilai Kontrak sebesar Rp60.244.800,00

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp48.195.840,00 (80%)

Sisa pada pemberian kesempatan tahun 2021 **Rp12.048.960,00 (20%)**

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Rp3.300.000,00.

Belanja jasa konsultasi perencanaan DAK Jalan TA 2020 dibayarkan berdasarkan pencapaian prestasi/kemajuan perencanaan setiap tahapnya. Termin pertama sebesar 80% (delapan puluh persen) dibayarkan pada tahun 2019 sebesar Rp48.195.840,00. Sesuai dengan syarat pembayaran Standar Ketentuan dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) yang tertuang dalam SPK Nomor : 04/PPK-BMSDA/PUPR-APBD/Prc.DAK-2020.Jln.Pkt.1/XI-2019 tanggal 28 November 2019, bahwa : Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Fisik Konstruksi diterbitkan. Mengingat DAK Bidang Jalan Tahun 2020 belum mencapai progres

fisik 100% (seratus persen) maka sisa pembayaran Belanja jasa Konsultasi Perencanaan 20% (dua puluh persen) dan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan belum bisa dibayarkan, walaupun sudah dianggarkan pada tahun 2020 dan diberikan Pemberian Kesempatan kembali pada tahun 2021.

4) Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	217.688.483,00	283.764.307,00

Pendapatan diterima di muka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

Pendapatan diterima di muka tahun 2020 adalah sebesar Rp217.688.483,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2019 sebesar Rp283.764.307,00 maka saldo tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp66.075.824,00 atau 23,29%.

Pendapatan diterima di muka pada tahun 2020 terdapat pada OPD berikut :

1. RSUD	Rp	83.750.000,00
2.. BPKD	Rp	133.938.483,00
Jumlah	Rp	217.688.483,00

Adapun penjelasan dari Pendapatan diterima dimuka tahun 2020 sebesar Rp217.688.483,00 sebagai berikut:

(1) BLUD RSUD

- Pendapatan atas sewa tanah BLUD-RSUD Kota Padang Panjang yang dipakai oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang berupa penempatan ATM Bank Nagari sebesar nilai kontrak Rp30.000.000,00 selama 5 tahun dari tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 8 Agustus 2023. Sehingga nilai pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 adalah sebesar Rp15.500.000,00 (31 bulan @Rp500.000,00);
- Pendapatan atas sewa tanah dan bangunan BLUD-RSUD Kota Padang Panjang yang dipakai oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang berupa pemakaian gedung kantor Bank Nagari sebesar nilai kontrak Rp 75.000.000,00 selama 5 tahun dari tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 9 Desember 2024. Sehingga nilai pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 sebesar Rp58.750.000,00 (47 bulan @Rp1.250.000,00);
- Pendapatan atas sewa tanah BLUD-RSUD Kota Padang Panjang yang dipakai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang Panjang berupa penempatan ATM Bank Rakyat Indonesia sebesar nilai kontrak Rp6.000.000,00 selama 1 tahun dari tanggal 1 November 2020 sampai dengan 31 Oktober 2021. Sehingga nilai pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 adalah sebesar Rp5.000.000,00(10 bulan @Rp500.000,00);
- Pendapatan atas sewa tanah BLUD-RSUD Kota Padang Panjang yang dipakai oleh Koperasi RSUD berupa penempatan Koperasi sebesar nilai kontrak Rp6.000.000,00 selama 1 tahun dari tanggal 1 Maret 2020 s/d 28 Februari 2021. Sehingga nilai pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.000.000,00 (2 bulan @Rp500.000,00); dan

- Pendapatan atas sewa tanah BLUD-RSUD Kota Padang Panjang yang dipakai oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Padang Panjang berupa penempatan ATM Bank Negara Indonesia sebesar nilai kontrak Rp12.000.000,00 selama 2 tahun dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2021. Sehingga nilai pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 adalah sebesar Rp3.500.000,00(7 bulan @Rp500.000,00).

(2) BPKD

- Pendapatan atas sewa tanah dan bangunan BPKD Kota Padang Panjang yang dipakai oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang berupa pemakaian gedung kantor Bank Nagari sebesar nilai kontrak Rp 90.000.000,00 selama 5 tahun dari tanggal 1 November 2019 s/d 31 Oktober 2024. Sehingga nilai pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 sebesar Rp69.000.000,00 (46 bulan @Rp1.500.000,00); dan
- Sewa reklame sebesar Rp64.938.483,00. Merupakan pajak reklame tahun 2020 yang diterima dimuka berdasarkan SKP Tahun 2020 sebanyak 193 reklame dengan total penerimaan Rp123.274.550,00 dan pendapatan diterima dimuka Rp64.938.483,00. Rincian atas pendapatan diterima di muka sebanyak 193 reklame tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

f. Ekuitas	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	1.237.022.826.654,73	1.235.450.460.290,86

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan keuangan. Saldo ekuitas diperoleh dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) surplus/defisit LO dan perubahan lainnya.

Berikut rincian ekuitas per 31 Desember 2020:

Ekuitas Awal	Rp 1.235.450.460.290,86
Surplus/Defisit LO	Rp (8.665.713.594,48)
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp 10.238.079.958,35
Ekuitas Akhir	<u>Rp 1.237.022.826.654,73</u>

4. *Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)*

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan, beban, surplus/defisit operasional dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional memiliki keterkaitan dengan Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca Daerah disebabkan laporan operasional merupakan laporan berbasis akrual yang semua akun-akunnya mempengaruhi ekuitas entitas akuntansi.

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan mengenai kegiatan operasional baik berupa pendapatan maupun beban operasional Kota Padang Panjang tahun anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO tahun 2020 telah direalisasikan sebesar Rp546.590.002.245,06. Jumlah ini menggambarkan pendapatan yang benar-benar menjadi hak Pemerintah Daerah pada Tahun 2020. Saldo Pendapatan-LO berbeda dengan jumlah Pendapatan-LRA karena pada tahun berjalan terdapat pendapatan yang telah menjadi hak Pemerintah Kota Padang Panjang namun kas belum diterima sampai akhir tahun anggaran 2020 atau sebaliknya. Pendapatan-LO tahun anggaran 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah-LO
- 2) Pendapatan Transfer-LO
 - (1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO
 - (2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO
 - (3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO
 - (4) Bantuan Keuangan-LO
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
- 4) Surplus dari Kegiatan Non Operasional-LO
- 5) Pendapatan Luar Biasa-LO

Penjelasan terhadap pendapatan-LO Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah– LO

Pendapatan Asli Daerah–LO Tahun 2020 berjumlah Rp73.714.244.066,06. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2019 sebesar Rp82.459.511.719,49, maka saldo PAD-LO tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp8.745.267.653,43 atau 10,61%. Rincian PAD-LO terdiri dari:

a) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah–LO Tahun 2020 berjumlah Rp8.360.587.737,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62-Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2020 dan 2019

No.	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Hotel	213.873.074,00	534.083.145,00	(320.210.071,00)	(59,96)
2	Pajak Restoran	636.405.843,00	1.049.773.152,00	(413.367.309,00)	(39,38)
3	Pajak Hiburan	209.092.708,00	805.273.667,00	(596.180.959,00)	(74,03)
4	Pajak Reklame	185.138.174,00	167.265.951,00	17.872.223,00	10,68
5	Pajak Penerangan Jalan	2.738.717.065,00	2.793.166.023,00	(54.448.958,00)	(1,95)
6	Pajak Parkir	3.635.200,00	10.913.400,00	(7.278.200,00)	(66,69)
7	Pajak Air Tanah	8.853.000,00	98.624.593,00	(89.771.593,00)	(91,02)
8	PBB Pedesaan dan Perkotaan	1.359.870.798,00	1.359.680.390,00	190.408,00	0,01
9	Pajak BPHTB	3.005.001.875,00	2.575.276.250,00	429.725.625,00	16,69
	Total	8.360.587.737,00	9.394.056.571,00	(1.033.468.834,00)	(11,00)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah-LO tahun 2019 sebesar Rp9.394.056.571,00 maka pendapatan pajak daerah-LO untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.033.468.834,00 atau 11,00%.

Pendapatan pajak daerah-LO dapat diformulasikan dengan pendapatan pajak LRA dikurangi dengan piutang pajak awal tahun dan ditambah dengan piutang pajak akhir tahun serta kondisi lain berupa koreksi atas saldo awal piutang dan pendapatan LRA diterima dimuka. Perbandingan pendapatan pajak daerah LRA dan pendapatan pajak daerah LO tahun 2020 pada Pemerintah Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 63-Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA TA 2020

Uraian	Realisasi Pendapatan LO	Realisasi Pendapatan LRA	Selisih
Pajak Hotel	213.873.074,00	213.873.074,00	-
Pajak Restoran	636.405.843,00	636.405.843,00	-
Pajak Hiburan	209.092.708,00	209.092.708,00	-
Pajak Reklame	185.138.174,00	169.508.950,00	15.629.224,00
Pajak Penerangan Jalan	2.738.717.065,00	2.752.773.406,00	(14.056.341,00)
Pajak Parkir	3.635.200,00	3.635.200,00	-
Pajak Air Tanah	8.853.000,00	8.683.000,00	170.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan P2	1.359.870.798,00	827.893.892,00	531.976.906,00
BPHTB	3.005.001.875,00	3.005.001.875,00	-
Total	8.360.587.737,00	7.826.867.948,00	533.719.789,00

Adapun penjelasan selisih sebagai berikut:

- Pajak Reklame

Selisih pendapatan-LO dan LRA untuk Pajak Reklame sebesar Rp15.629.224,00 disebabkan oleh:

- Adanya pendapatan pajak reklame diterima dimuka pada tahun 2019 sebesar Rp78.014.307,00 yang diakui sebagai pendapatan-LO tahun 2019;
- Adanya pendapatan pajak reklame yang diterima dimuka di tahun 2020 sebesar Rp64.938.483,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LRA 2019, namun tidak mempengaruhi pendapatan-LO 2020;
- Adanya penerimaan piutang tahun 2019 di tahun 2020 sebesar Rp476.400,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LRA 2020, tetapi tidak mempengaruhi pendapatan-LO 2020; dan
- Adanya pengakuan piutang pajak reklame di tahun 2020 sebesar Rp3.029.800,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LO tahun 2020, tetapi tidak mempengaruhi pendapatan-LRA.

Pengaruh dari transaksi-transaksi di atas terhadap pendapatan-LO dan LRA dapat digambarkan sebagai berikut:

		Pendapatan-LO 2020	Pendapatan-LRA 2020
1.	Pendapatan diterima dimuka tahun 2019 yang menjadi pendapatan-LO 2020	(+) 78.014.307,00	
2.	Pendapatan diterima dimuka 2020		(+) 64.938.483,00
3.	Penerimaan piutang tahun 2019		(+) 476.400,00
4.	Pengakuan piutang tahun 2020	(+) 3.029.800,00	
	Total	81.044.107,00	65.414.883,00
	Selisih		15.629.224,00

- **Pajak Penerangan Jalan**

Pendapatan-LO Pajak Penerangan Jalan tercatat sebesar Rp2.738.717.065,00, sementara Pendapatan-LRA pajak penerangan jalan adalah sebesar Rp2.752.773.406,00. Sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp14.056.341,00. Perbedaan ini merupakan penurunan piutang pajak penerangan jalan tahun 2020 dari Rp243.595.375,00 menjadi Rp229.539.034,00.

- **Pajak Air Tanah**

Pendapatan-LO Pajak Air Tanah tercatat sebesar Rp8.853.000,00 sementara Pendapatan-LRA pajak air tanah adalah sebesar Rp8.683.000,00. Sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp170.000,00. Perbedaan ini disebabkan oleh: .

- Adanya penerimaan piutang tahun 2019 di 2020 sebesar Rp40.000,00. Transaksi ini mempengaruhi pendapatan-LRA 2020 (menambah), tetapi tidak ada dampak pada pendapatan-LO.
- Adanya pengakuan piutang di tahun 2020 sebesar Rp210.000,00. Transaksi ini mempengaruhi pendapatan-LO 2020 (menambah), tetapi tidak mempengaruhi pendapatan LRA.

	Pendapatan- LO 2020		Pendapatan- LRA 2020
1. Penerimaan piutang tahun 2019 di tahun 2020	-	(+)	40.000,00
2. Pengakuan piutang tahun 2020	(+)	210.000,00	-
Selisih			170.000,00

- **Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Pendapatan-LO PBB P2 tahun 2020 adalah sebesar Rp1.359.870.798,00 sementara Pendapatan-LRA adalah sebesar Rp827.893.892,00. Perbedaan pendapatan-LO dan pendapatan-LRA pada PBB P2 sebesar Rp531.976.906,00 disebabkan oleh :

- Adanya penerimaan piutang tahun 2019 di tahun 2020 sebesar Rp82.688.924,00, dimana penerimaan ini mempengaruhi (menambah) pendapatan-LRA, namun tidak ada pengaruh pada pendapatan-LO.
- Adanya pengakuan piutang di tahun 2020 sebesar Rp614.665.830,00. Pengakuan piutang di tahun 2020 ini mempengaruhi pendapatan-LO, tapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.

	Pendapatan- LO 2020		Pendapatan- LRA 2020
1 Penerimaan piutang tahun <2019 di tahun 2020	-	(+)	82.688.924,00
2 Pengakuan piutang 2019	(+)	614.665.830,00	-
Selisih			531.976.906,00

b) Retribusi Daerah-LO

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada tahun 2020 adalah sebesar Rp4.735.979.608,15. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp4.523.581.210,67, maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp212.398.397,48 atau 4,70%. Rincian pendapatan retribusi daerah-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 64-Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2020 dan 2019

NO	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	184.338.400,00	264.666.000,00	(80.327.600,00)	(30,35)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	584.918.000,00	558.604.000,00	26.314.000,00	4,71
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	591.086.000,00	350.162.000,00	240.924.000,00	68,80
4	Retribusi Pelayanan Pasar	204.685.250,00	184.369.000,00	20.316.250,00	11,02
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	242.465.000,00	199.555.000,00	42.910.000,00)	21,50
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.565.000,00	5.050.000,00	515.000,00	10,20
7	Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus	28.800.000,00	30.950.000,00	(2.150.000,00)	(6,95)
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	665.654.420,00	965.246.670,00	(299.592.250,00)	(31,04)
9	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	130.114.800,00	130.114.800,00	0,00	0,00
10	Retribusi Terminal	1.172.135.000,00	718.153.000,00	453.982.000,00	63,22
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	70.294.000,00	9.308.000,00	60.986.000,00	655,200
12	Retribusi Tempat Penginapan	7.000.000,00	12.200.000,00	(5.200.000,00)	(42,62)
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	143.730.000,00	171.000.000,00	(27.270.000,00)	(15,95)
14	Retribusi Rekreasi dan Olah Raga	194.724.000,00	310.516.000,00	(115.792.000,00)	(37,29)
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	128.351.500,00	238.812.800,00	(110.461.300,00)	(46,25)
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	375.468.238,15	363.398.940,67	12.069.297,48	3,32
17	Retribusi Izin Trayek	6.650.000,00	11.475.000,00	(4.825.000,00)	(42,05)
Total		4.735.979.608,15	4.523.581.210,67	212.398.397,48	4,70

Jika dibandingkan dengan pendapatan retribusi-LRA, maka terdapat perbedaan sebesar Rp79.060.560,00 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 65-Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA TA 2020

Uraian	Realisasi Pendapatan LO	Realisasi Pendapatan LRA	Selisih
Retribusi Pelayanan Kesehatan	184.338.400,00	184.338.400,00	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	584.918.000,00	541.760.000,00	43.158.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir	591.086.000,00	591.086.000,00	-
Retribusi Pelayanan Pasar	204.685.250,00	201.745.250,00	2.940.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	242.465.000,00	241.995.000,00	470.000,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.565.000,00	5.565.000,00	-
Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus	28.800.000,00	28.800.000,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	665.654.420,00	641.139.460,00	24.514.960,00
Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	130.114.800,00	114.587.200,00	15.527.600,00
Retribusi Terminal	1.172.135.000,00	1.172.135.000,00	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir	70.294.000,00	70.294.000,00	-
Retribusi Tempat Penginapan	7.000.000,00	7.000.000,00	-
Retribusi Rumah Potong Hewan	143.730.000,00	143.730.000,00	-
Retribusi Rekreasi dan Olah Raga	194.724.000,00	194.724.000,00	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	128.351.500,00	135.901.500,00	(7.550.000,00)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	375.468.238,15	375.468.238,15	-
Retribusi Izin Trayek	6.650.000,00	6.650.000,00	-
JUMLAH	4.735.979.608,15	4.656.919.048,15	79.060.560,00

Berikut dijelaskan penyebab perbedaan antara pendapatan retribusi yang ada pada pendapatan-LO dengan pendapatan-LRA:

- **Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan**

Pendapatan-Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LRA tahun 2020 tercatat sebesar Rp541.760.000,00 sementara Pendapatan-LO adalah sebesar Rp584.918.000,00 sehingga, terdapat selisih sebesar Rp43.158.000,00 antara pendapatan-LO dengan pendapatan-LRA. Hal ini disebabkan oleh:

Dinas Perindag:

- Adanya penerimaan piutang tahun 2019 sebesar Rp14.592.000,00 transaksi ini menambah pendapatan LRA namun tidak berpengaruh pada pendapatan LO 2020;
- Adanya pengakuan piutang tahun 2020 sebesar Rp25.260.000,00 Transaksi ini mempengaruhi pendapatan-LO (menambah), tetapi tidak ada pengaruh terhadap pendapatan-LRA; dan
- Adanya pengakuan piutang tahun 2020 pada Pasar Pusat Kota Padang Panjang sebesar Rp32.490.000,00, yang menambah pendapatan LO tetapi tidak ada pengaruh terhadap pendapatan LRA.

- **Retribusi Pelayanan Pasar**

Pendapatan-LRA Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2020 tercatat sebesar Rp201.745.250,00 sementara Pendapatan-LO adalah sebesar Rp204.685.250,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.940.000,00. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya:

Dinas Perindag:

- Penerimaan piutang tahun 2019 sebesar Rp900.000,00, transaksi ini menambah pendapatan LRA namun tidak berpengaruh pada pendapatan LO 2020
- Pengakuan piutang tahun 2020 sebesar Rp3.840.000,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LO, namun tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA tahun 2020.

- **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pendapatan-LRA Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor tahun 2020 tercatat sebesar Rp241.995.000,00 sementara Pendapatan-LO adalah sebesar Rp242.465.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp470.000,00. Perbedaan ini disebabkan adanya piutang retribusi PKB tahun 2020 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp470.000,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LO, namun tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA tahun 2020.

- **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LRA adalah sebesar Rp135.901.500,00. Sementara Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO tahun 2020 adalah sebesar Rp128.351.500,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp7.550.000,00. Selisih ini disebabkan karena penurunan piutang tahun 2020 (dari Rp145.400.000,00 menjadi Rp137.850.000,00 di tahun 2020).

• **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA tahun 2020 adalah sebesar Rp641.139.460,00, sementara Pendapatan-LO adalah sebesar Rp665.654.420,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp24.514.960,00. Selisih ini disebabkan oleh:

- Perindag			
• Penerimaan piutang tahun 2019 di tahun 2020	(48.812.160,00)		
• Piutang tahun 2020		<u>69.827.120,00</u>	
			21.014.960,00
- Kominfo			
• Pendapatan diterima dimuka tahun 2019			3.500.000,00
Selisih			<u>24.514.960,00</u>

• **Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan**

Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan-LRA tahun 2020 adalah sebesar Rp114.587.200,00 sementara Pendapatan-LO adalah sebesar Rp130.114.800,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp15.527.600,00 yang disebabkan oleh adanya:

- Transaksi penerimaan piutang tahun 2019 di tahun 2020 sebesar Rp39.569.600,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LRA 2020 tetapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LO 2020;
- Transaksi pengakuan piutang di tahun 2020 sebesar Rp55.097.200,00 yang menambah pendapatan-LO, tetapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.

		<u>Pendapatan-LO 2020</u>		<u>Pendapatan-LRA 2020</u>
1.	Penerimaan piutang tahun 2019		(+)	39.569.600,00
2.	Piutang 2020	55.097.200,00	(+)	-
	Selisih	<u>15.527.600,00</u>		

c) **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Saldo pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 adalah sebesar Rp6.313.227.292,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp6.058.783.025,00, maka pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp254.444.267,00 atau 4,20%. Saldo pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO tahun 2020 tidak ada perbedaan dengan pendapatan-LRA. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 merupakan bagian laba dari Bank Nagari.

d) **Lain-Lain PAD yang Sah-LO**

Saldo pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO tahun 2020 adalah sebesar Rp54.304.449.428,91. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2019 sebesar Rp62.483.090.912,82, maka saldo tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp8.178.641.483,91 atau 13,09%.

Tabel 66- Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO TA 2020 dan 2019

NO	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	51.179.500,00	338.930.000,00	(287.750.500,00)	(84,90)
2	Penerimaan Jasa Giro	1.802.850.072,00	2.527.269.002,00	(724.418.930,00)	(28,66)
3	Pendapatan Bunga	2.608.556.487,00	3.038.943.936,00	(430.387.449,00)	(14,16)
4	Pendapatan Denda Pajak	15.420.167,00	24.135.348,00	(8.715.181,00)	(36,11)
5	Pendapatan Denda Retribusi	85.746.973,00	107.770.725,00	(22.023.752,00)	(20,44)
6	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	15.510.000,00	194.568.250,00	(179.058.250,00)	(92,03)
7	Pendapatan dari Pengembalian	355.813.721,39	378.227.286,04	(22.413.564,65)	(5,93)
8	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.264.739.566,00	1.104.632.895,00	160.106.671,00	14,49
9	Pendapatan BLUD	44.656.110.172,00	50.362.952.607,00	(5.706.842.435,00)	(11,33)
10	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	3.312.170.577,00	3.542.183.714,60	(230.013.137,60)	(6,49)
11	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	136.352.193,52	863.477.149,18	(727.124.955,66)	(84,21)
Jumlah		54.304.449.428,91	62.483.090.912,82	(8.178.641.483,91)	(13,09)

Jika dibandingkan antara pendapatan-LO dengan pendapatan-LRA, maka terdapat selisih sebagai berikut:

Tabel 67 –Lain-Lain PAD yang Sah-LO dan LRA TA 2020

NO	URAIAN	Realisasi Pendapatan LO	Realisasi Pendapatan LRA	SELISIH
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	51.179.500,00	51.179.500,00	-
2.	Penerimaan Jasa Giro	1.802.850.072,00	1.802.850.072,00	-
3.	Pendapatan Bunga	2.608.556.487,00	2.608.556.487,00	-
4.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	136.352.193,52	136.352.193,52	-
5.	Pendapatan Denda Pajak	15.420.167,00	15.420.167,00	-
6.	Pendapatan Denda Retribusi	85.746.973,00	31.607.295,00	54.139.678,00
7.	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	15.510.000,00	15.510.000,00	-
8.	Pendapatan dari Pengembalian	355.813.721,39	355.813.721,39	-
9.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.264.739.566,00	892.041.488,00	372.698.078,00
10.	Pendapatan BLUD	44.656.110.172,00	51.410.286.907,00	(6.754.176.735,00)
11.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	3.312.170.577,00	3.312.170.577,00	-
Jumlah		54.304.449.428,91	60.631.788.407,91	(6.327.338.979,00)

- Pendapatan Denda Retribusi

Terdapat perbedaan antara pendapatan denda retribusi-LO dan LRA sebesar Rp54.139.678,00 yang disebabkan oleh :

- Adanya pengakuan piutang denda retribusi Tahun 2020 dari wajib pajak retribusi sehingga transaksi ini menambah pendapatan LO 2020 sebesar Rp35.500,00 pada Dinas Perhubungan;

- Adanya pengakuan piutang denda retribusi dan denda hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah pada Dinas Perdagkop sebesar Rp54.104.178,00.
- **Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah**
Terdapat perbedaan antara hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah-LO dan LRA sebesar Rp372.698.078,00 yang disebabkan oleh :
 - Adanya pengakuan pendapatan LO terhadap pendapatan diterima dimuka Tahun 2019 sebesar Rp91.500.000,00 yang terdiri dari sewa kantor kas Bank Nagari di BPKD sebesar Rp87.000.000,00 dan sewa ATM Bank Nagari (Setdako) sebesar Rp4.500.000,00. Transaksi ini menambah pendapatan LO 2020.
 - Adanya pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 sebesar Rp69.000.000,00 atas sewa kantor kas Bank Nagari di BPKD. Transaksi ini mengurangi pendapatan LO 2020.
 - Pengakuan piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah pasar pusat Padang Panjang tahun 2020 sebesar Rp350.198.078,00. Transaksi ini menambah pendapatan LO tahun 2020.
- **Pendapatan BLUD**
BLUD RSUD
Terdapat perbedaan antara pendapatan-LO dan LRA sebesar Rp6.754.176.735,00 yang disebabkan oleh:
 - Adanya penerimaan piutang Tahun 2019 sebesar Rp16.145.853.913,00
 - Adanya piutang yang timbul di Tahun 2020 sebesar Rp9.364.677.178,00.
 - Adanya pengakuan pendapatan LO 2020 terhadap pendapatan diterima dimuka Tahun 2019 sebesar Rp110.750.000,00. yang menambah pendapatan-LO, tetapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.
 - Adanya pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 sebesar Rp83.750.000,00 yang mengurangi pendapatan LO, tetapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat/Pemerintah provinsi. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut.

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp461.580.162.050,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan transfer-LO Tahun 2019 sebesar Rp495.064.335.661,00, berarti pendapatan transfer-LO Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp33.484.173.611,00 atau 6,76%. Berikut adalah rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2020 dan 2019:

Tabel 68- Pendapatan Transfer-LO TA 2020 dan 2019

NO	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	411.003.354.560,00	455.676.876.662,00	(44.673.522.102,00)	(9,80)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	27.961.238.000,00	17.241.091.000,00	10.720.147.000,00	62,18
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	22.615.569.490,00	22.146.367.999,00	469.201.491	2,12
	Jumlah	461.580.162.050,00	495.064.335.661,00	(33.484.173.611,00)	(6,76)

Selanjutnya, jika dibanding dengan pendapatan Transfer-LRA Tahun 2020 sebesar Rp460.593.650.000,00 maka Pendapatan Transfer-LO Tahun 2020 mengalami perbedaan dengan LRA sebesar Rp986.512.050,00. Berikut adalah rincian Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA tahun 2020:

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	411.003.354.560,00	412.707.888.054,00	(1.704.533.494,00)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	27.961.238.000,00	27.961.238.000,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	22.615.569.490,00	19.924.523.946,00	2.691.045.544,00
Jumlah		461.580.162.050,00	460.593.650.000,00	986.512.050,00

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp411.003.354.560,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO Tahun 2019 sebesar Rp455.676.876.662,00, maka pendapatan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp44.673.522.102,00 atau 9,80%.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2020 sebesar Rp411.003.354.560,00 sepenuhnya terdiri dari realisasi anggaran transfer pusat dana perimbangan Tahun 2020 ditambah atau dikurangi dengan piutang atas penyaluran kurang/lebih bayar dari pemerintah pusat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan - LRA tahun 2020	Rp 412.707.888.054,00
2.	Penerimaan piutang 2019 (berdasarkan PMK Lama/audited), terdiri dari :	Rp (1.488.751.236,00)
	-DBH PPh Psl 21 dan 25/29	(1.182.853.549,00)
	-DBH Kehutanan	(50.827.901,00)
	-DBH Minerba	(255.069.786,00)
3.	Koreksi Piutang (kurang salur) 2019 karena perubahan PMK :	Rp 29.136.932,00
	-DBH PPh Psl 21 dan 25/29	(21.414.383,00)
	-DBH SDA Kehutanan	50.551.315,00
4.	Koreksi utang (lebih salur) 2019 karena perubahan PMK :	Rp (244.919.190,00)
	-DBH SDA Kehutanan	(41.745.025,00)
	-DBH SDA Panas Bumi	(722.577,00)
	-DBH SDA Minerba	(202.451.588,00)
Pendapatan transfer pemerintah pusat - LO		Rp 411.003.354.560,00

Adapun piutang transfer pemerintah pusat tahun 2019 dicatat berdasarkan PMK berikut ini :

I. Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Maret 2020			
1.	DBH PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 25/29 Th 2018	292.460.502,00	
2.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018	626.939.919,00	
3.	DBH Cukai Hasil Tembakau Tahun 2018	3.595.222,00	
4.	DBH SDA Mineral dan Batubara Tahun 2018	255.069.786,00	
5.	DBH SDA Perikanan Tahun 2018	3.677.289,00	
	Jumlah		1.181.742.718,00
II. Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK.07/2020 Tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Disease (COVID-19)			
1.	DBH PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 25/29 Th 2019	890.393.047,00	
2.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019	292.106.078,00	
3.	DBH SDA Kehutanan Tahun 2019	50.827.901,00	
4.	DBH SDA Perikanan Tahun 2019	170.627.903,00	
5.	DBH SDA Panas Bumi Tahun 2019	5.256.417,00	
	Jumlah		1.409.211.346,00
Total Piutang Transfer Pemerintah Pusat			2.590.954.064,00

Pada tanggal 25 Agustus 2020, Pemerintah menerbitkan PMK baru yang membatalkan kedua PMK tersebut diatas melalui PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2020, dengan rincian alokasi untuk Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai berikut :

Uraian	Kurang Bayar	Lebih Bayar
DBH SDA Kehutanan	Rp 276.586,00	41.745.025,00
DBH PPh pasal 21 dan pasal 25/29	Rp 1.204.267.932,00	-
DBH PBB	Rp 1.262.905.135,00	-
DBH Cukai Hasil Tembakau	Rp 7.773.483,00	-
DBH SDA Panas Bumi	Rp 10.512.833,00	722.577,00
DBH SDA Perikanan	Rp 229.300.150,00	-
DBH SDA Minerba	Rp -	202.451.588,00
Jumlah	Rp 2.715.036.119,00	244.919.190,00

Sedangkan untuk rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2020 adalah :

Tabel 69-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO TA 2020 dan 2019

NO	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	
					%
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	6.829.257.206,00	8.639.985.765,00	(1.810.728.559,00)	(20,96)
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.448.168.313,00	2.309.633.246,00	(861.464.933,00)	(37,30)
3.	Dana Alokasi Umum	352.753.271.000,00	390.319.648.000,00	(37.566.377.000,00)	(9,62)
4.	Dana Alokasi Khusus	21.662.282.442,00	32.848.378.130,00	(11.186.095.688,00)	(34,05)
5.	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	28.310.375.599,00	21.559.231.521,00	6.751.144.078,00	31,31
	Jumlah	411.003.354.560,00	455.676.876.662,00	(44.673.522.102,00)	(9,80)

(1) **Dana Bagi Hasil Pajak**

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp6.829.257.206,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp8.639.985.765,00, maka pendapatan dana bagi hasil pajak-LO tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.810.728.559,00 atau 20,96%. Pendapatan dana bagi hasil pajak-LO tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian		Jumlah
1.	Pendapatan bagi hasil pajak –LRA tahun 2020	Rp	8.033.525.138,00
2.	Penerimaan piutang Dana Bagi Hasil Pajak Pusat tahun 2019	Rp	(1.204.267.932,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak-LO			Rp 6.829.257.206,00

(2) **Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.448.168.313,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp2.309.633.246,00 maka pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp861.464.933,00 atau 37,30%. Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam-LO tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian		Jumlah
1.	Pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA –LRA 2020	Rp	1.948.433.875,00
2.	Penerimaan piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Pusat tahun 2019	Rp	(305.897.687,00)
3.	Koreksi piutang tahun 2019 (kurang Salur) karena perubahan PMK		50.551.315,00
4.	Koreksi utang (lebih salur) karena perubahan PMK		(244.919.190,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak-LO			Rp 1.448.168.313,00

(3) **Dana Alokasi Umum**

Pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun 2020 adalah sebesar Rp352.753.271.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp390.319.648.000,00, maka Dana Alokasi Umum tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp37.566.377.000,00 atau 9,63%.

(4) **Dana Alokasi Khusus**

Pendapatan-LO Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 adalah sebesar Rp49.972.658.041,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp54.407.609.651,00, maka pendapatan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.434.951.610,00 atau 8,15%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 70-Dana Alokasi Khusus-LO TA 2020 dan 2019

NO	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
A DANA ALOKASI KHUSUS					
1.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	0,00	916.084.600,00	(916.084.600,00)	(100,00)
2.	DAK Bidang Keluarga Berencana	305.908.500,00	776.761.300,00	(470.852.800,00)	(60,62)
3.	DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar	1.960.024.831,00	406.347.900,00	1.553.676.931,00	382,35
5.	DAK Bidang Pertanian	0,00	1.620.852.000,00	(1.620.852.000,00)	(100,00)
6.	DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan	2.571.904.048,00	11.072.870.958,00	(8.500.966.910,00)	(76,77)
7.	DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB	5.269.424.315,00	1.059.605.600,00	4.209.818.715,00	397,30
8.	DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kefarmasian	479.327.906,00	390.783.400,00	88.544.506,00	22,66
9.	DAK Bidang Jalan (DAK Penugasan)	5.312.087.000,00	7.004.824.162,00	(1.692.737.162,00)	(24,17)
10.	DAK Bidang Irigasi (DAK Penugasan)	1.007.000.000,00	758.300.031,00	248.699.969,00	32,80
11.	DAK Bidang Pariwisata	1.221.091.542,00	923.324.692,00	297.766.850,00	32,25
12.	DAK Bidang sanitasi (DAK Penugasan)	0,00	1.716.000.000,00	(1.716.000.000,00)	(100,00)
13.	DAK Bidang kelautan dan perikanan	497.499.750,00	337.112.887,00	160.386.863,00	47,58
15.	DAK Bidang Pendidikan SMP	1.388.261.527,00	1.530.255.445,00	(141.993.918,00)	(9,28)
16.	DAK Bidang Pendidikan SKB	938.460.193,00	773.173.700,00	165.286.493,00	21,38
17.	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	1.823.500.000,00	(1.823.500.000,00)	(100,00)
18.	DAK Lingkungan hidup (DAK Penugasan)	160.000.000,00	611.892.800,00	(451.892.800,00)	(73,85)
19.	DAK Perpustakaan Daerah	0,00	1.090.337.605,00	(1.090.337.605,00)	(100,00)
20.	DAK Kesehatan & KB –Penurunan Stunting (DAK Penugasan)	0,00	36.351.050,00	(36.351.050,00)	(100,00)
21.	DAK Penugasan Bidang Kesehatan-Penguatan Intervensi Stunting	71.819.080,00	0,00	71.819.080,00	100,00
22.	DAK Penugasan Bidang Kesehatan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	479.473.750,00	0,00	479.473.750,00	100,00
B DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					
1.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	1.233.883.350,00	1.381.390.046,00	(147.506.696,00)	(10,68)
2.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	16.860.373.000,00	16.715.010.680,00	145.362.320,00	0,87
3.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	62.018.000,00	0,00	62.018.000,00	100,00
4.	Bantuan Operasional Kesehatan	8.283.439.106,00	1.155.354.893,00	7.128.084.213,00	616,96
6.	Bantuan Operasional KB	495.291.150,00	332.806.050,00	162.485.100,00	48,82
7.	Dana pelayanan Administrasi Kependudukan	320.030.343,00	730.133.852,00	(410.103.509,00)	(56,17)
8.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	424.505.500,00	334.800.000,00	89.705.500,00	26,79
9.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	391.243.850,00	388.000.000,00	3.243.850,00	0,84
10.	Dana Pelayanan Kepariwisataaan	239.591.300,00	521.736.000,00	(282.144.700,00)	(54,08)
Jumlah		49.972.658.041,00	54.407.609.651,00	(4.434.951.610,00)	(8,15)

b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Dana Penyesuaian

Saldo Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO pada Tahun 2020 yang berupa Dana Insentif Daerah adalah sebesar Rp27.961.238.000,00. Saldo sebesar Rp27.961.238.000,00 ini sepenuhnya berasal dari realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya-LRA tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dimana saldonya adalah sebesar Rp17.241.091.000,00, maka saldo tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp10.720.147.000,00 atau 62,18%.

c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp22.615.569.490,00 berupa pendapatan bagi hasil pajak provinsi. Jika dibandingkan dengan pendapatan-LO Tahun 2019 sebesar Rp22.146.367.999,00 maka pendapatan-LO Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp469.201.491,00 atau 2,12%. Rincian pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 71-Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO TA 2020 dan 2019

NO	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.463.308.060,00	5.569.094.222,00	(105.786.162,00)	(1,90)
2.	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.211.954.125,00	3.080.601.854,00	(868.647.729,00)	(28,20)
3.	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.027.548.034,00	6.382.055.149,00	(354.507.115,00)	(5,55)
4.	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dari Pemanfaatan Air Permukaan	105.962.317,00	91.691.519,00	14.270.798,00	15,56
5.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	8.806.796.954,00	7.022.925.255,00	1.783.871.699	25,40
Jumlah		22.615.569.490,00	22.146.367.999,00	469.201.491,00	2,12

Jika dibandingkan dengan pendapatan-LRA sebesar Rp19.924.523.946,00 maka pendapatan-LO lebih tinggi sebesar Rp2.691.045.544,00. Selisih sebesar Rp2.691.045.544,00 berasal dari penerimaan piutang kurang salur dana bagi hasil pajak provinsi tahun 2019 sebesar Rp1.463.872.431,00. Penerimaan sebesar Rp1.463.872.431,00 ini mempengaruhi (menambah) pendapatan-LRA Tahun 2020, tetapi tidak mempengaruhi pendapatan-LO. Pengakuan piutang Tahun 2020 sebagai akibat adanya kurang salur pendapatan bagi hasil provinsi sebesar Rp4.154.917.975,00 yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan LO tahun 2020 tetapi tidak berpengaruh pada pendapatan LRA tahun 2020.

No	Uraian	LO	LRA
1.	Penerimaan piutang (kurang salur) 2019	-	1.463.872.431,00
2.	Pengakuan piutang (kurang salur) TA 2020	4.154.917.975,00	-
Selisih Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA		2.691.045.544,00	

Kurang salur bagi hasil pajak provinsi Tahun 2020 sebesar Rp4.154.917.975,00 berdasarkan keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat tanggal 29 Januari 2021 Nomor : 971.1/04/Pjk-B.Keuda/2021 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

Kurang salur bagi hasil pajak Tahun 2020 sebesar Rp4.154.917.975,00 tersebut terdiri dari :

No	Uraian		Jumlah
1.	Bagi hasil pajak kendaraan bermotor	Rp	2.371.173.984,00
2.	Bagi hasil pajak bea balik nama kendaraan bermotor	Rp	481.033.606,00
3.	Bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor	Rp	1.273.573.899,00
4.	Bagi hasil pajak air permukaan	Rp	29.136.486,00
Jumlah kurang salur TA 2020		Rp	4.154.917.975,00

Berikut adalah rincian perbandingan pendapatan bagi hasil pajak LO dengan LRA :

No	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.463.308.060,00	3.738.395.229,00	1.724.912.831,00
2.	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.211.954.125,00	1.994.727.433,00	217.226.692,00
3.	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.027.548.034,00	5.300.287.903,00	727.260.131,00
4.	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dari Pemanfaatan Air Permukaan	105.962.317,00	84.316.427,00	21.645.890,00
5.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	8.806.796.954,00	8.806.796.954,00	0,00
Jumlah		22.615.569.490,00	19.924.523.946,00	2.691.045.544,00

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp11.295.596.129,00 yang terdiri dari pendapatan hibah berupa barang yang diterima oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dari instansi lain dan pendapatan hibah Dana BOS SD/SMP Negeri. Sementara saldo Tahun 2019 adalah sebesar Rp8.817.872.438,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.477.723.691,00 atau 28,10%. Adapun rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO adalah sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga	Pendapatan hibah Dana BOS		7.752.450.000,00
2	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pemberdayaan Anak	Hibah berupa : Penerimaan persediaan perlengkapan logistik bencana Penerimaan persediaan alat kontrasepsi Kendaraan bermotor penumpang	29.559.550,00 99.245.575,00 271.700.000,00	400.505.125,00
3	Dinas Kesehatan	Hibah berupa persediaan: Persediaan vaksin Persediaan makanan tambahan Persediaan Buku Informasi Kesehatan Persediaan bahan obat-obatan Persediaan bahan kimia	511.650.213,00 134.474.004,00 6.638.000,00 330.307.772,00 399.896.065,00	1.382.966.054,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hibah berupa aset tetap: PC all in one (3 unit) Digital Library Station (1 unit) LED TV 43 inch (1 unit) TV wall bracket (1 unit) UPS (1 unit) Interior, exterior & connectivity Tablet android (3 unit) Casing tablet android (3 unit)	43.500.000,00 13.600.000,00 5.550.000,00 600.000,00 2.000.000,00 72.000.000,00 8.400.000,00 600.000,00	146.250.000,00
5	Dinas PUPR	Hibah berupa aset tetap: Bangunan pembawa irigasi	169.369.950,00	169.369.950,00
6	Dinas Perdagkop	Hibah berupa aset tetap Kios buah	150.000.000,00	150.000.000,00
7	BPBD Kesbangpol	Hibah berupa persediaan : Persediaan logistik bencana	1.294.055.000,00	1.294.055.000,00
Total				11.295.596.129,00

Pendapatan Hibah Persediaan perlengkapan logistik bencana alam pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pemberdayaan Anak sebesar Rp29.559.550,00 diterima dari Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat berdasarkan berita acara serah terima barang bantuan logistik bencana alam nomor : 360/033/LJS/PSKB-A/2020 tanggal 23 Juni 2020, sedangkan persediaan alat kontrasepsi sebesar Rp99.245.575,00 berupa alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi dari BKKBN Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara penyerahan dan penerimaan barang persediaan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi antara kepala BKKBN provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pemberdayaan Anak

Kota Padang Panjang. Kemudian pendapatan hibah berupa kendaraan bermotor penumpang merupakan hibah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan naskah hibah nomor 159/Set.KPP-PA/D.III.5/PL.06/NH-MOLIN/12/2019 tanggal 18 Desember 2019. Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak No. Polisi B 1176 PQF dengan merek Daihatsu Luxio ini diterima Pemerintah Kota Padang Panjang pada awal tahun 2020

Persediaan vaksin pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang merupakan bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat senilai Rp511.650.213,00. Jumlah ini merupakan data penerimaan persediaan bantuan vaksin sampai dengan 31 Desember 2020 yang ada di IFK dan 4 (empat) Puskesmas. Selama tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang mendapat bantuan vaksin yang terdiri dari vaksin BCG, DPT HB HIB, HB Unijek, Campak, HB PID, HB 0, Vaksin MR, MR + pelarut, DT/Vial, TD, IPV/Vial, Polio IVP dan Polio BOPV dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar. Vaksin tersebut diserahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar kepada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang melalui Instalasi Farmasi Kota (IFK) setiap bulannya berdasarkan kebutuhan yang sebelumnya diajukan melalui bidang terkait di Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar. Kemudian bantuan vaksin yang telah diterima IFK tersebut disalurkan ke 4 (empat) Puskesmas yakni Puskesmas Kebun Sikolos, Puskesmas Gunung, Puskesmas Koto Katik dan Puskesmas Bukit Surungan.

Selama tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang juga mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp6.638.000,00 berupa Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebanyak 1.300 buah @ Rp4.910,00 sesuai dengan berita acara nomor KN.02.04/6/PPK/2477/IX/2020 dan buku pelatihan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA) sebanyak 6 buah @Rp42.500,00 sesuai dengan berita acara nomor KN.01.01/5/2020. Sampai dengan 31 Desember 2020 buku PMBA tersebut belum didistribusikan ke Puskesmas.

Selain mendapat hibah buku KIA dan buku PMBA dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang juga mendapat Makanan Tambahan untuk ibu hamil dan balita. Makanan Tambahan ini diberikan langsung Dinas Kesehatan kepada 4(empat) puskesmas di Kota Padang Panjang, kemudian Puskesmas melakukan pendistribusian makanan tambahan tersebut. Makanan tambahan ibu hamil diterima sebanyak 756 kg @Rp65.044,00 sesuai dengan berita acara nomor KN.01.01/2/PPK-PMT-PKM/02377/2020 untuk Puskesmas Gunung, nomor KN.01.01/2/PPK/PMT-PKM/02375/2020 untuk Puskesmas Kebun Sikolos, dan nomor KN.01.01/2/PPK-PMT-PKM/02378/2020 untuk Puskesmas Koto Katik. Sedangkan makanan tambahan balita diterima sebanyak 1.260 kg @Rp67.699,00 berdasarkan berita acara KN.01.01/2/PPK-PMT-PKM/05457/2020 untuk Puskesmas Gunung, nomor KN.01.01/2/PPK-PMT-PKM/05450/2020 untuk Puskesmas Kebun Sikolos, nomor KN.01.01/2/PPK-PMT-PKM/05456/2020 untuk Puskesmas Bukit Surungan dan nomor KN.01.01/2/PPK-PMT-PKM/05458/2020 untuk Puskesmas Koto Katik. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Makanan Tambahan untuk ibu hamil dan balita tersebut belum diserahkan Puskesmas ke masyarakat sasaran.

Pendapatan hibah berupa aset tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp146.250.000,00 diterima dari Perpustakaan Nasional RI berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Pojok Baca Digital (Pocadi) Nomor: /4/PLK.03.04/XI/2020 tanggal 11 Desember 2020.

Pendapatan hibah berupa aset tetap pada Dinas PUPR dengan nilai sebesar Rp169.369.950,00 diterima dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 030/BAST/BAP2BMD-V/2020 tanggal 14 Mei 2020. Aset tetap yang diterima adalah jaringan pembawa irigasi yang berlokasi di Bancah Laweh dengan nilai sebesar Rp91.504.950,00 dan di Koto Runciang Gajah Tanang, Kelurahan Ekor Lubuk dengan nilai sebesar Rp77.865.000,00.

Pendapatan hibah berupa aset tetap pada Dinas Perdagkop dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00 diterima dari Bank BPD Cabang Padang Panjang berdasarkan perjanjian pemberian bantuan Nomor 04/PKS-PP/020 tanggal 3 Juli 2020. Aset tetap yang diterima adalah Kios buah bagi pedagang pasar.

Persediaan logistik bencana pada BPBD Kesbangpol sebesar Rp1.294.055.000,00 merupakan bantuan logistik dalam rangka penanganan COVID-19 dari BPBD Provinsi Sumatera Barat.

b. Beban-LO

Beban merupakan kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Saldo Beban Operasi Tahun 2020 adalah Rp555.205.652.979,54. Jumlah ini menggambarkan beban yang benar-benar menjadi kewajiban di Tahun 2020. Saldo beban berbeda dengan jumlah realisasi belanja Tahun 2020 karena terdapat beban Tahun 2020 yang belum diakui sebagai belanja namun telah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2020 juga terdapat reklasifikasi Belanja Tak Terduga, belanja barang dan jasa Dana BOS dan belanja barang dan jasa BLUD ke masing-masing akun yang sesuai di Beban LO, sebagai berikut :

Untuk Belanja Tak Terduga nilai yang direklasifikasi pada akun-akun Laporan Operasional adalah sebesar Rp Rp25.539.205.763,00 :

No	Uraian		Jumlah
1.	Belanja persediaan	Rp	3.036.485.625,00
2.	Belanja jasa	Rp	4.423.638.555,00
3.	Belanja pemeliharaan	Rp	81.200.000,00
4.	Belanja perjalanan dinas	Rp	38.550.000,00
5.	Belanja hibah	Rp	726.342.810,00
6.	Belanja bantuan sosial	Rp	16.728.600.000,00
7.	Belanja modal (mapping ke neraca)	Rp	504.388.773,00
Jumlah Dana Belanja tak terduga			Rp 25.539.205.763,00

Untuk Belanja barang dan jasa Dana BOS nilai yang direklasifikasi pada akun-akun Laporan Operasional adalah sebesar Rp5.675.172.403,00 :

No	Uraian		Jumlah
1.	Belanja persediaan	Rp	2.071.940.441,00
2.	Belanja jasa	Rp	3.227.033.813,00
3.	Belanja pemeliharaan	Rp	376.198.149,00
Jumlah Dana Belanja barang dan jasa Dana BOS			Rp 5.675.172.403,00

Untuk Belanja barang dan jasa BLUD RSUD nilai yang direklasifikasi pada akun-akun Laporan Operasional adalah sebesar Rp47.977.948.816,00 :

No	Uraian		Jumlah
1.	Belanja persediaan	Rp	17.013.235.600,00
2.	Belanja jasa	Rp	29.487.247.154,00
3.	Belanja pemeliharaan	Rp	1.017.094.124,00
4.	Belanja perjalanan dinas	Rp	460.371.938,00
Jumlah Dana Belanja barang dan jasa BLUD RSUD			Rp 47.977.948.816,00

Untuk Belanja barang dan jasa BLUD Dana Bergulir nilai yang direklasifikasi pada akun-akun Laporan Operasional adalah sebesar Rp110.260.970,00 :

No	Uraian		Jumlah
1.	Belanja persediaan	Rp	33.669.105,00
2.	Belanja jasa	Rp	72.546.865,00
3.	Belanja perjalanan dinas	Rp	4.045.000,00
Jumlah Dana Belanja barang dan jasa BLUD Dana Bergulir			Rp 110.260.970,00

Adapun realisasi beban Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 72-Realisasi Beban-LO TA 2020 dan 2019

NO	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1.	Beban Pegawai	243.419.797.693,00	256.745.237.263,00	(13.325.439.570,00)	(5,19)
2.	Beban Persediaan	39.789.035.276,39	36.490.033.539,22	3.299.001.737,17	9,04
3.	Beban Jasa	148.638.159.330,65	162.178.482.258,63	(13.540.322.927,98)	(8,35)
4.	Beban Pemeliharaan	5.325.645.947,00	4.278.236.970,01	1.047.408.976,99	24,48
5.	Beban Perjalanan Dinas	23.350.719.059,00	35.075.011.896,00	(11.724.292.837,00)	(33,43)
6.	Beban Bunga	-	-	-	-
7.	Beban Subsidi	-	-	-	-
8.	Beban Hibah	14.680.772.753,20	9.824.293.082,72	4.856.479.670,48	49,43
9.	Beban Bantuan Sosial	17.163.021.800,00	2.294.310.919,00	14.868.710.881,00	648,07
10.	Beban Penyusutan Aset Tetap	55.924.252.561,00	62.615.021.782,57	(6.690.769.221,57)	(10,69)
11.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	485.708.879,00	51.860.000,00	433.848.879,00	836,58
12.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	4.487.390.932,53	1.424.405.509,43	3.062.985.423,10	215,04
13.	Beban Transfer	653.852.380,00	565.929.412,00	87.922.968,00	15,54
14.	Beban Lain-Lain	1.287.296.367,77	702.917.910,34	584.378.457,43	83,14
Jumlah		555.205.652.979,54	572.245.740.542,92	(17.040.087.563,38)	(2,98)

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1) Beban Operasi

(a) Beban Pegawai

Saldo beban pegawai-LO tahun 2020 adalah sebesar Rp243.419.797.693,00. Jika dibanding dengan beban pegawai-LO tahun 2019 sebesar Rp256.745.237.263,00 maka beban pegawai-LO tahun 2020 mengalami

penurunan sebesar Rp13.325.439.570,00 atau 5,19%. Adapun rincian beban pegawai LO 2020 terdiri dari:

Tabel 73-Belanja Pegawai LO TA 2020 dan 2019

No.	Beban Pegawai	2020	2019	Kenaikan/penurunan	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	153.422.517.615,00	152.582.722.150,00	839.795.465,00	0,55
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	87.818.825.561,00	100.482.036.979,00	(12.663.211.418,00)	(12,60)
3.	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.022.763.996,00	3.110.819.996,00	(1.088.056.000,00)	(34,98)
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	109.580.773,00	380.996.589,00	(271.415.816,00)	(71,24)
5.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	46.109.748,00	188.661.549,00	(142.551.801,00)	(75,56)
	Jumlah	243.419.797.693,00	256.745.237.263,00	(13.325.439.570,00)	(5,19)

Dan apabila dibandingkan dengan belanja pegawai-LRA 2020 sebesar Rp243.421.203.426,00, maka beban pegawai-LO 2020 lebih rendah sebesar Rp135.310,00. Berikut rincian perbedaan beban pegawai-LO dan belanja pegawai-LRA 2020:

Tabel 74-Belanja Pegawai LO dan LRA TA 2020

No.	Beban Pegawai – LO	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	153.422.517.615,00	153.423.923.348,00	(1.405.733,00)
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	87.818.825.561,00	87.818.825.561,00	0,00
3.	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	2.022.763.996,00	2.022.763.996,00	0,00
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	109.580.773,00	109.580.773,00	0,00
5.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	46.109.748,00	46.109.748,00	0,00
	Jumlah	243.419.797.693,00	243.421.203.426,00	(1.405.733,00)

Adapun selisih sebesar Rp1.405.733,00 antara beban pegawai-LO dengan belanja pegawai-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Beban gaji dan tunjangan lebih rendah sebesar Rp1.405.733,00 dari belanja gaji dan tunjangan-LRA:
 - Utang pegawai tahun 2020 Rp. 48.141.301,00
 - Pembayaran utang pegawai tahun 2019 Rp. (55.274.315,00)
 - Dinas Pangan dan Pertanian
 - Piutang dari pengembalian keterlanjuran tunjangan keluarga 2019 Rp. 462.576,00
 - Setdako
 - Piutang dari pengembalian keterlanjuran tunjangan keluarga Rp7.694.870,00 dan tunjangan beras Rp5.286.660,00 2019 Rp. 12.981.530,00 Rp 12.472.020,00
 - Piutang dari pengembalian keterlanjuran tunjangan keluarga Rp. (509.510,00)
 - RSUD
 - Koreksi utang pegawai 2019 Rp (7.207.315,00)
- Selisih Rp (1.405.733,00)**

(b) Beban Persediaan

Saldo beban persediaan-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp39.789.035.276,39. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp36.490.033.539,22. maka saldo Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp3.299.001.737,17 atau 9,04%. Rincian beban persediaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 75-Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan 2019

No	Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Persediaan alat tulis kantor	2.701.239.470,71	3.364.024.991,45	(662.785.520,74)	(19,70)
2	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
3	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.020.476.826,12	779.617.388,62	240.859.437,50	30,89
4	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	127.681.000,00	136.751.500,00	(9.070.500,00)	(6,63)
5	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.319.808.793,78	1.446.879.063,40	872.929.730,38	60,33
6	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	3.841.492.984,00	742.884.050,00	3.098.608.934,00	347,32
7	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	3.957.314.844,00	(3.957.314.844,00)	(100,00)
8	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	20.122.500,00	0,00	20.122.500,00	100,00
9	Beban Persediaan pengisian tabung gas	42.830.000,00	0,00	42.830.000,00	100,00
10	Beban Persediaan dekorasi	431.918.175,00	0,00	431.918.175,00	100,00
11	Beban Persediaan Barang Cetakan	2.720.273.898,00	3.903.930.483,00	(1.183.656.585,00)	(30,32)
12	Beban Persediaan Hadiah	181.688.750,00	328.475.125,00	(146.786.375,00)	(44,69)
13	Beban Persediaan Alat Ukur	22.263.237,00	6.534.000,00	15.729.237,00	240,73
14	Beban Persediaan Alat Pertanian	27.481.200,00	3.502.500,00	23.978.700,00	684,62
15	Beban Persediaan Bahan Baku	0,00	528.328.960,00	(528.328.960,00)	(100,00)
16	Beban Persediaan Souvenir	118.500.000,00	229.420.875,00	(110.920.875,00)	(48,35)
17	Beban Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai	4.261.225.165,00	4.962.111.518,00	(700.886.353,00)	(14,12)
18	Beban Persediaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan	12.550.000,00	500.000,00	12.050.000,00	2.410,00
19	Beban Persediaan Alat-Alat Dapur	160.533.609,00	179.544.663,00	(19.011.054,00)	(10,59)
20	Beban Persediaan Bahan/Peralatan Kamar/Mess/Barak	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	100,00
21	Beban Persediaan Perlengkapan Kantor	241.302.175,00	50.862.500,00	190.439.675,00	374,42
22	Beban Persediaan bahan baku bangunan	3.682.999.615,53	3.680.745.485,00	2.254.130,53	0,06
23	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	170.099.875,00	218.787.950,00	(48.688.075,00)	(22,25)
24	Beban Persediaan bibit ternak	20.931.000,00	102.426.840,00	(81.495.840,00)	(79,56)
25	Beban Persediaan bahan obat-obatan	6.238.387.304,98	1.962.164.192,88	4.276.223.112,10	217,93
26	Beban Persediaan bahan kimia	1.365.828.135,27	1.454.577.073,87	(88.748.938,60)	(6,10)
27	Beban Persediaan Makanan Pokok	2.391.098.511,00	2.789.140.369,00	(398.041.858,00)	(14,27)
28	Beban Persediaan Bahan dan Alat Percontohan	710.762.720,00	803.597.630,00	(92.834.910,00)	11,55

No	Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
29	Beban Persediaan Bahan Pangan	187.803.150,00	371.563.500,00	(183.760.350,00)	(49,46)
30	Beban Persediaan Pembenihan	587.700,00	964.900,00	(377.200,00)	(39,09)
31	Beban Persediaan Belanja Pancang/Patok Tanah	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00)
32	Beban Persediaan Belanja Perlengkapan Dapur/RT RS – LO	156.260.734,00	339.239.495,00	(182.978.761,00)	(53,94)
33	Beban Persediaan Bahan dan Perlengkapan Olahraga	16.628.000,00	190.736.320,00	(174.108.320,00)	(91,28)
34	Beban Persediaan Marka Jalan	9.998.000,00	167.808.300,00	(157.810.300,00)	(94,04)
35	Beban Persediaan Pakan Ternak	0,00	471.395.000,00	(471.395.000,00)	(100,00)
36	Beban Persediaan Vaksin	656.162.062,00	545.791.043,00	110.371.019,00	20,22
37	Beban speed bump	45.407.000,00	112.664.209,00	(67.257.209,00)	(59,70)
38	Beban Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.650.225.000,00	1.498.794.240,00	151.430.760,00	10,10
39	Beban Persediaan Barang Perlengkapan Logistik	677.465.660,00	207.114.120,00	470.351.540,00	227,10
40	Beban Persediaan Alat Praktek dan Perlengkapan Sekolah	235.215.900,00	101.346.190,00	133.869.710,00	132,09
41	Beban Persediaan Gas Medis	239.975.000,00	154.800.000,00	85.175.000,00	55,02
42	Beban Persediaan Pupuk/racun hama	5.432.000,00	1.531.050,00	3.900.950,00	254,79
43	Beban Persediaan buku siswa	523.106.100,00	633.935.570,00	(110.829.470,00)	(17,48)
44	Beban Persediaan Buku Informasi Kesehatan	13.085.640,00	5.816.580,00	7.269.060,00	124,97
45	Beban Persediaan Alat kontrasepsi	63.548.918,00	47.411.020,00	16.137.898,00	34,04
46	Beban persediaan makanan tambahan	79.348.500,00	0,00	79.348.500,00	100,00
47	Beban persediaan barang perlengkapan logistik COVID-19	2.388.140.967,00	0,00	2.390.295.967,00	100,00
Jumlah		39.789.035.276,39	36.490.033.539,22	3.299.001.737,17	9,04

(c) Beban Jasa

Saldo beban jasa Tahun 2020 adalah sebesar Rp148.638.159.330,65. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp162.178.482.258,63, maka beban jasa tahun 2020 menurun sebesar Rp13.540.322.927,98 atau 8,35%. Adapun rincian beban jasa Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 76-Rincian Beban Jasa TA 2020

No.	Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	69.421.731.695,00	17.347.939.008,00	52.073.792.687,00	300,17
2	Beban Premi Asuransi	8.317.921.249,45	6.847.034.650,14	1.470.886.599,31	21,48
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	2.254.287.254,00	2.634.060.178,00	(379.772.924,00)	(14,42)
4	Beban Penggandaan	867.547.050,00	1.260.916.280,00	(393.369.230,00)	(31,20)
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.265.939.323,00	2.515.729.778,00	(1.249.790.455,00)	(49,68)

6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	49.582.000,00	285.685.000,00	(236.103.000,00)	(82,64)
7	Beban Sewa Alat Berat	7.800.000,00	66.350.000,00	(58.550.000,00)	(88,24)
8	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	432.093.000,00	1.052.882.500,00	(620.789.500,00)	(58,96)
9	Beban Makanan dan Minuman	9.388.425.248,00	11.993.157.193,00	(2.604.731.945,00)	(21,72)
10	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	367.183.568,00	787.643.422,00	(420.459.854,00)	(53,38)
11	Beban Pakaian Kerja	153.158.750,00	519.507.300,00	(366.348.550,00)	(70,52)
12	Beban Pakaian Khusus dan Hari Tertentu	1.033.380.672,00	2.696.395.000,00	(1.663.014.328,00)	(61,68)
13	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	34.560.000,00	(34.560.000,00)	(100,00)
14	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	575.335.290,00	1.621.238.900,00	(1.045.903.610,00)	(64,51)
15	Beban Jasa Konsultasi	1.421.782.550,00	3.335.999.648,00	(1.914.217.098,00)	(57,38)
16	Beban Honorarium PNS	8.572.685.492,00	3.968.633.326,00	4.604.052.166,00	116,01
17	Beban Honorarium Non PNS	18.943.640.601,00	65.314.909.928,49	(46.371.269.327,49)	(71,00)
18	Beban Jasa BLUD	22.338.631.775,20	35.782.276.082,00	(13.443.644.306,80)	(37,57)
19	Beban Jasa BOS	3.227.033.813,00	4.113.564.065,00	(886.530.252,00)	(21,55)
Jumlah		148.638.159.330,65	162.178.482.258,63	(13.540.322.927,98)	(8,35)

Jika dibandingkan dengan belanja jasa-LRA sebesar Rp166.758.979.290,24 maka beban jasa-LO lebih rendah sebesar Rp18.120.819.959,59. Berikut rincian Beban Jasa-LO dan Belanja Jasa LRA:

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Jasa Kantor	69.421.731.695,00	13.429.622.123,00	55.992.109.572,00
2	Beban Premi Asuransi	8.317.921.249,45	8.659.568.819,24	(341.647.569,79)
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	2.254.287.254,00	2.252.253.754,00	2.033.500,00
4	Beban Penggandaan	867.547.050,00	852.609.800,00	14.937.250,00
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.265.939.323,00	1.181.239.323,00	84.700.000,00
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	49.582.000,00	49.582.000,00	-
7	Beban Sewa Alat Berat	7.800.000,00	7.800.000,00	-
8	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	432.093.000,00	432.093.000,00	-
9	Beban Makanan dan Minuman	9.388.425.248,00	8.481.946.033,00	906.479.215,00
10	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	367.183.568,00	367.183.568,00	-
11	Beban Pakaian Kerja	153.158.750,00	153.158.750,00	-
12	Beban Pakaian Khusus dan Hari Tertentu	1.033.380.672,00	1.028.480.672,00	4.900.000,00
13	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	-
14	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	575.335.290,00	575.335.290,00	-
15	Beban Jasa Konsultasi	1.421.782.550,00	1.371.908.550,00	49.874.000,00-
16	Beban Honorarium PNS	8.572.685.492,00	8.572.685.492,00	-
17	Beban Honorarium Non PNS	18.943.640.601,00	65.580.129.927,00	(46.636.489.326,00)
18	Beban Jasa BLUD	22.338.631.775,20	48.088.209.786,00	(25.749.578.010,80)
19	Beban Jasa BOS	3.227.033.813,00	5.675.172.403,00	(2.448.138.590,00)
Jumlah		148.638.159.330,65	166.758.979.290,24	(18.120.819.959,59)

Selisih antara beban jasa-LO dengan belanja jasa-LRA sebesar Rp18.120.819.959,59 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Beban Jasa Kantor mengalami selisih sebesar Rp55.992.109.572,00:

- Beban jasa telepon

LO	Rp	250.366.550,00	
LRA	Rp	245.543.122,00	
Selisih	Rp	4.823.428,00	
Keterangan Selisih :			
Hutang 2019	Rp	(23.836.975,00)	
Hutang 2020	Rp	19.244.947,00	
Reklas barang dan jasa BLUD	Rp	9.415.456,00	
Jumlah			Rp 4.823.428,00

- Beban jasa air

LO	Rp	1.421.481.364,00	
LRA	Rp	1.005.532.044,00	
Selisih	Rp	415.949.320,00	
Keterangan Selisih :			
Hutang 2019	Rp	(120.835.050,00)	
Hutang 2020	Rp	103.901.870,00	
Reklas barang dan jasa BLUD	Rp	432.882.500,00	
Jumlah			Rp 415.949.320,00

- Beban jasa listrik

LO	Rp	4.947.733.434,00	
LRA	Rp	4.380.437.003,00	
Selisih	Rp	567.296.431,00	
Keterangan Selisih :			
Hutang 2019	Rp	(399.403.216,00)	
Hutang 2020	Rp	335.525.427,00	
Reklas barang dan jasa BLUD	Rp	630.116.220,00	
Reklas BTT pada BPBD	Rp	1.058.000,00	
Jumlah			Rp 567.296.431,00

- Beban jasa kawat/internet

LO	Rp	2.018.160.197,00	
LRA	Rp	1.658.956.399,00	
Selisih	Rp	359.203.798,00	
Keterangan Selisih :			
Hutang 2019	Rp	(23.920.540,00)	
Hutang 2020	Rp	53.124.338,00	
Reklas barang dan jasa BLUD	Rp	330.000.000,00	
Jumlah			Rp 359.203.798,00

-	Beban retribusi kebersihan				
	LO	Rp	40.362.000,00		
	LRA	Rp	<u>40.712.000,00</u>		
	Selisih	Rp	(350.000,00)		
	Keterangan Selisih :				
	Hutang 2019	Rp	(3.169.000,00)		
	Hutang 2020	Rp	<u>2.819.000,00</u>		
	Jumlah			Rp	(350.000,00)
-	Beban jasa medis				
	LO	Rp	1.966.313.448,00		
	LRA	Rp	<u>2.215.470.597,00</u>		
	Selisih	Rp	(249.157.149,00)		
	Keterangan Selisih :				
	Hutang 2019	Rp	(279.573.016,00)		
	Hutang 2020	Rp	<u>30.415.867,00</u>		
	Jumlah			Rp	(249.157.149,00)
-	Beban jasa pengacara				
	LO	Rp	55.000.000,00		
	LRA	Rp	<u>69.700.000,00</u>		
	Selisih	Rp	(14.700.000,00)		
	Keterangan Selisih :				
	Hutang 2019	Rp	(14.700.000,00)		
	Hutang 2020	Rp	<u>0,00</u>		
	Jumlah			Rp	(14.700.000,00)
-	Insentif Petugas Penanganan COVID-19				
	LO	Rp	3.446.877.455,00		
	LRA	Rp	<u>0,00</u>		
	Selisih	Rp	3.446.877.455,00		
	Keterangan Selisih :				
	Reklas dari BTT :				
	RSUD	Rp	1.295.220.455,00		
	Dinas Kesehatan	Rp	395.960.000,00		
	Dinas Perdagkop	Rp	21.000.000,00		
	BPBD	Rp	1.413.720.000,00		
	Dinas Sosial	Rp	<u>320.977.000,00</u>		
				Rp	3.446.877.455,00
	Beban jasa non pegawai			Rp	14.680.528.481,00
-	Perbedaan pengelompokan rekening dimana dalam LRA belanja jasa non pegawai merupakan rincian dari belanja Honorarium Non PNS,				

sementara dalam LO berada
pada rincian Beban Jasa

Beban upah pegawai harian Rp 36.781.637.808,00

- Perbedaan pengelompokan rekening dimana dalam LRA belanja upah pegawai harian merupakan rincian dari belanja Honorarium Non PNS, sementara dalam LO berada pada rincian Beban Jasa

JUMLAH SELISIH Rp 55.992.109.572,00

- Beban Premi Asuransi mengalami selisih kurang sebesar Rp341.647.569,79 :

- BPKD

- Pengakuan beban jasa-LO atas premi asuransi dibayar dimuka BMD tahun 2019 Rp 1.135.408.306,29

- Premi Asuransi BMD dibayar dimuka tahun 2020 Rp (236.237.960,08)

Rp 899.170.346,21

- Dinas Kesehatan

- Pembayaran beban premi asuransi kesehatan atas pencatatan utang 2019 Rp (4.368.000,00)

- Koreksi utang premi asuransi tahun 2019 Rp 756.000,00

- Pengakuan biaya dibayar dimuka atas premi asuransi JKMP dan JKSS tahun 2020 Rp (1.236.805.800,00)

Rp (1.240.417.800,00)

- Setdako

- Pengakuan biaya dibayar dimuka tahun 2020 Rp (400.116,00)

Rp (341.647.569,79)

- Beban perawatan kendaraan bermotor mengalami selisih lebih sebesar Rp2.033.500,00 yang disebabkan oleh reklas belanja barang dan jasa BLUD Dana Bergulir ke beban perawatan kendaraan bermotor.

- Beban penggandaan mengalami selisih lebih sebesar Rp14.937.250,00 :

- Reklas belanja tak terduga (BTT) ke beban penggandaan Rp 9.117.500,00

- Reklas belanja barang dan jasa BLUD Dana Bergulir ke beban penggandaan Rp 5.819.750,00

Jumlah Rp 14.937.250,00

- Beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir, mengalami selisih lebih sebesar Rp84.700.000,00 :

- Reklas belanja tak terduga (BTT) ke beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir Rp 70.700.000,00

- Biaya sewa dibayar dimuka tahun 2019 atas sewa kantor KOTAKU dan sekretariat KOTAKU Rp 14.000.000,00

Jumlah Rp 84.700.000,00

- Beban makanan dan minuman mengalami selisih lebih sebesar Rp906.479.215,00 :

- Reklas belanja barang dan jasa BLUD Dana Bergulir tahun 2020 ke beban makanan dan minuman	Rp	10.593.615,00
- Reklas belanja tak terduga (BTT) ke beban makanan dan minuman	Rp	895.885.600,00
Jumlah	Rp	906.479.215,00

- Beban pakaian khusus dan hari tertentu mengalami selisih sebesar Rp4.900.000,00 karena adanya reklas beban barang dan jasa BLUD dana bergulir ke beban pakaian khusus dan hari tertentu. Di LRA belanja pakaian khusus dan hari tertentu masih tergabung dalam kelompok belanja barang dan jasa BLUD Dana Bergulir.

- Beban jasa konsultasi mengalami selisih sebesar Rp49.874.000,00 karena adanya pengakuan utang jasa tahun 2020 kajian wisata stasiun kereta api pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

- Beban honorarium non PNS selisih kurang sebesar Rp46.636.489.326,00:

- Beban jasa non pegawai 2020	Rp	(14.681.379.072,00)
- Upah pegawai harian 2020	Rp	(36.804.667.576,00)
- Reklas beban barang dan jasa BLUD Dana Bergulir	Rp	38.400.000,00
- Reklas beban jasa BLUD 2020 ke beban honorarium pegawai honorer/tidak tetap	Rp	5.179.490.000,00
- Hutang 2019	Rp	(367.650.000,00)
- Pengakuan beban bayar dimuka	Rp	(682.678,00)
Jumlah	Rp	(46.636.489.326,00)

Terhadap beban jasa non pegawai sebesar Rp14.681.379.072,00 merupakan perpindahan pengelompokan sub rincian objek dimana pada LO merupakan rincian dari beban jasa, sedangkan pada LRA termasuk dalam rincian Honorarium Non PNS.

Kemudian terhadap upah pegawai harian sebesar Rp36.804.667.576,00 juga merupakan perpindahan pengelompokan sub rincian objek dimana pada Laporan Operasional merupakan rincian dari rekening Beban Jasa, sedangkan pada LRA termasuk dalam rincian Honorarium Non PNS.

- Beban jasa BLUD selisih kurang sebesar Rp25.749.578.010,80:

- RSUD		
- Pembayaran utang beban jasa BLUD tahun 2019	Rp	(16.031.512.284,00)
- Reklas pembayaran utang 2019 ke beban persediaan	Rp	7.601.689.743,00
- Koreksi utang 2019	Rp	(52.537.383,00)
- Pengakuan utang 2020	Rp	11.400.398.546,20
- Reklas utang 2020 ke beban persediaan	Rp	(3.485.119.672,00)
- Reklas Beban jasa BLUD (telp, air, listrik dan internet) karena sudah tergabung ke beban jasa kantor	Rp	(6.581.904.176,00)

- Beban dibayar dimuka 2020		Rp	(2.230.075,00)	
- Koreksi utang 2019		Rp	2.599.922,00	
- Reklas belanja barang dan jasa BLUD ke :		Rp	(18.490.701.662,00)	
- Beban persediaan	Rp	17.013.235.600,00		
- Beban pemeliharaan	Rp	1.017.094.124,00		
- Beban perjalanan dinas	Rp	460.371.938,00		
		Rp	(25.639.317.040,80)	
- Dinas Perdagkop				
- Reklas barang dan jasa BLUD dana bergulir 2020				
Beban perjalanan dinas	Rp	(4.045.000,00)		
Beban persediaan	Rp	(33.669.105,00)		
Beban makanan dan minuman	Rp	(10.593.615,00)		
Beban penggandaan	Rp	(5.819.750,00)		
Beban pakaian khusus	Rp	(4.900.000,00)		
Beban perawatan kendaraan	Rp	(2.033.500,00)		
Penggantian transport non PNS	Rp	(38.400.000,00)		
Beban upah pegawai harian	Rp	(10.800.000,00)	Rp	(110.260.970,00)
Selisih			Rp	(25.749.578.010,80)
- Beban jasa BOS terdapat selisih kurang sebesar Rp2.448.138.590,00 :				
- Disdikpora				
- Reklas beban barang dan jasa Dana BOS :				
Beban pemeliharaan BOS	Rp	(376.198.149,00)		
Beban persediaan BOS	Rp	(2.071.940.441,00)	Rp	(2.448.138.590,00)
JUMLAH TOTAL SELISIH LO DAN LRA BEBAN JASA			Rp	(20.412.689.542,79)

(d) Beban Pemeliharaan

Saldo beban pemeliharaan Tahun 2020 adalah sebesar Rp5.325.645.947,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp4.278.236.970,01, maka beban pemeliharaan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.047.408.976,99 atau 24,48%. Berikut adalah rincian beban pemeliharaan Tahun 2020:

Tabel 77-Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.438.160.319,00	692.482.939,00	745.677.380,00	107,68
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.822.918.100,00	1.025.567.172,00	797.350.928,00	77,75
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	707.912.000,00	603.931.000,00	103.981.000,00	17,22
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	506.427.628,01	(504.427.628,01)	(99,61)
5	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	11.850.000,00	38.900.000,00	(27.050.000,00)	(69,54)
6	Beban Pemeliharaan BOS	376.198.149,00	275.223.838,00	100.974.311,00	36,69
7	Beban Pemeliharaan BLUD	966.607.379,00	1.135.704.393,00	(169.097.014,00)	(14,89)
	Jumlah	5.325.645.947,00	4.278.236.970,01	1.047.408.976,99	24,48

Jika dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan-LRA tahun 2020 sebesar Rp3.901.640.419,00, maka beban Pemeliharaan-LO mengalami perbedaan nilai sebesar Rp1.424.005.528,00. Berikut rincian selisih LO dan LRA tahun 2020 :

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.438.160.319,00	1.356.960.319,00	81.200.000,00-
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.822.918.100,00	1.822.918.100,00	-
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	707.912.000,00	707.912.000,00	-
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-
5	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	11.850.000,00	11.850.000,00	-
6	Beban Pemeliharaan BOS	376.198.149,00	0,00	376.198.149,00
7	Beban Pemeliharaan BLUD	966.607.379,00	0,00	966.607.379,00
Jumlah		5.325.645.947,00	3.901.640.419,00	1.424.005.528,00

Adanya selisih antara beban-LO dengan belanja-LRA ini disebabkan oleh:

- Selisih lebih pada beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp81.200.000,00 adalah reklasifikasi dari belanja tak terduga, yang merupakan belanja pemeliharaan ventilator sebesar 72.400.000,00 dan alat rontgen sebesar Rp8.800.000,00 pada RSUD.
- Selisih tambah pada beban pemeliharaan BOS karena adanya reklas beban barang dan jasa BOS ke beban pemeliharaan BOS tahun 2020 sebesar Rp376.198.149,00. Transaksi ini menambah Beban Pemeliharaan-LO tahun 2020.
- Selisih tambah beban pemeliharaan BLUD sebesar Rp966.607.379,00 dari belanja pemeliharaan-LRA karena pembayaran utang pemeliharaan BLUD RSUD tahun 2019 sebesar Rp50.486.745,00, transaksi ini mengurangi Beban LO tahun 2020. Adanya reklas beban barang dan jasa BLUD RSUD ke beban pemeliharaan BLUD sebesar Rp1.017.094.124,00. Pada LRA belanja pemeliharaan masih tergabung di dalam belanja barang dan jasa BLUD.

(e) Beban Perjalanan Dinas

Saldo beban perjalanan dinas Tahun 2020 adalah sebesar Rp23.350.719.059,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp35.075.011.896,00, maka beban perjalanan dinas tahun 2020 menurun sebesar Rp11.724.292.837,00 atau 33,43%.

Tabel 78-Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.212.221.447,00	5.427.991.575,00	(2.215.770.128,00)	(40,82)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.674.080.674,00	27.709.275.941,00	(8.035.195.267,00)	(29,00)
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negri	0,00	928.177.828,00	(928.177.828,00)	(100,00)
4	Beban Perjalanan Dinas BLUD	464.416.938,00	1.009.566.552,00	(545.149.614,00)	(54,00)
Jumlah		23.350.719.059,00	35.075.011.896,00	(11.724.292.837,00)	(33,43)

Jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA tahun 2020 sebesar Rp22.847.752.121,00 maka Beban Perjalanan Dinas-LO lebih tinggi sebesar Rp502.966.938,00. Berikut rinciannya :

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.212.221.447,00	3.173.671.447,00	38.550.000,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.674.080.674,00	19.674.080.674,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas BLUD	464.416.938,00	0,00	464.416.938,00
Jumlah		23.350.719.059,00	22.847.752.121,00	502.966.938,00

Adapun penjelasan selisih beban perjalanan dinas-LO dengan Belanja perjalanan dinas-LRA adalah sebagai berikut:

- Selisih tambah beban perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp38.550.000,00 merupakan reklasifikasi dari belanja tak terduga tahun 2020, dengan rincian OPD sebagai berikut :

RSUD	Rp	2.600.000,00
Perkim LH	Rp	35.950.000,00
Jumlah	Rp	38.550.000,00

- Selisih tambah Beban perjalanan dinas BLUD disebabkan karena adanya reklas Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Beban Perjalanan Dinas BLUD tahun 2020 sebesar Rp464.416.938,00 yang menambah Beban Perjalanan Dinas-LO. Di LRA Belanja Perjalanan Dinas BLUD masih tergabung dalam kelompok Belanja Barang dan Jasa BLUD. Rincian beban perjalanan dinas BLUD adalah :

Beban perjalanan dinas BLUD RSUD	Rp	460.371.938,00
Beban perjalanan dinas BLUD Dana Bergulir	Rp	4.045.000,00
Jumlah	Rp	464.416.938,00

(f) Beban Bunga

Beban bunga tahun anggaran 2020 tidak direncanakan sehingga realisasinya menjadi nihil.

(g) Beban Subsidi

Beban subsidi tahun anggaran 2020 tidak direncanakan sehingga realisasinya menjadi nihil.

(h) Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban yang dibelanjakan melalui belanja hibah pada PPKD dan dari belanja barang dan uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga pada belanja operasi OPD serta reklasifikasi dari belanja bantuan tak terduga tahun 2020.

Tabel 79-Rincian Beban Hibah TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah	199.200.000,00	0,00	199.200.000,00	0,00
2	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	1.222.575.000,00	1.233.419.350,00	(10.844.350,00)	(0,88)
3	Beban Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta non profesi	829.870.679,00	2.406.217.981,00	(1.576.347.302,00)	(65,51)
4	Beban Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta bidang keagamaan	346.649.500,00	653.887.000,00	(307.237.500,00)	(46,99)
5	Beban Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta bidang pendidikan	0,00	180.000.000,00	(180.000.000,00)	(100,00)
6	Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	11.182.177.574,20	2.445.298.510,72	8.736.879.063,48	357,30
7	Uang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	610.800.000,00	2.125.300.000,00	(1.514.500.000,00)	(71,26)
8	BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	289.500.000,00	234.000.000,00	55.500.000,00	23,72
9	Beban hibah kepada kelompok masyarakat	0,00	546.170.241,00	(546.170.241,00)	(100,00)
Jumlah		14.680.772.753,20	9.824.293.082,72	4.856.479.670,48	49,43

Saldo beban hibah – LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp14.680.772.753,20. Jika dibandingkan dengan saldo beban hibah-LO Tahun 2019 sebesar Rp9.824.293.082,72, maka saldo beban hibah LO Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp4.856.479.670,48 atau 49,43%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya reklasifikasi belanja tak terduga ke beban hibah.

Jika dibandingkan dengan Belanja Hibah LRA Tahun 2020 sebesar Rp2.887.795.179,00 maka terdapat selisih lebih beban hibah-LO tahun 2020 sebesar Rp11.792.977.574,20. Selisih antara LRA dan LO disebabkan oleh :

Pengaruh mapping rekening beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dan rekening beban uang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga ke kelompok beban hibah. Kemudian pemberian hibah aset tetap ke instansi vertikal serta reklasifikasi dari belanja bantuan tak terduga.

Berikut gambaran perbedaan antara belanja hibah-LRA dengan beban hibah –LO Tahun 2020:

Tabel 80-Rincian Belanja-LRA dan Beban Hibah-LO TA 2020

No.	Uraian	LO	LRA	SELISIH
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00
2	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	1.222.575.000,00	1.222.575.000,00	0,00
3	Beban Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta non profesi	829.870.679,00	829.870.679,00	0,00
4	Beban Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta bidang keagamaan	346.649.500,00	346.649.500,00	0,00
5	Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	11.182.177.574,20	0,00	11.182.177.574,20
6	Uang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	610.800.000,00	0,00	610.800.000,00
7	BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	289.500.000,00	289.500.000,00	0,00
Jumlah		14.680.772.753,20	2.887.795.179,00	11.792.977.574,20

Beban barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp11.182.177.574,20 terdiri atas :

1.	Reklasifikasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga LRA	1.822.940.303,20
2.	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, reklasifikasi dari belanja tidak terduga (BTT) LRA	726.342.810,00
3.	Hibah tanah ke kejaksaan negeri Padang Panjang berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Nomor 900/03/BPKD-PP?XII/2020 tentang pemberian hibah barang milik pemerintah kota padang panjang terhadap tanah ke kejaksaan negeri padang panjang, tanggal 1 Desember 2020	3.288.600.000,00
4.	Hibah tanah ke Kementerian Agama Kota Padang Panjang berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Nomor 900/02/BPKD-PP?XII/2020 tentang pemberian hibah barang milik Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap tanah ke Kementerian Agama Kota Padang Panjang, tanggal 1 Desember 2020, dengan rincian : - Tanah untuk MTsN Rp2.789.659.461,00 - Tanah untuk MAN 3 Rp1.226.000.000,00 - Tanah untuk MAN 3 Rp212.760.000,00	4.228.419.461,00
5.	Hibah tanah dan bangunan Ke Komisi Pemilihan Umum berdasarkan berdasarkan BAST Hibah tanggal 8 April 2020, dengan rincian : - Tanah Kantor KPU Rp395.500.000,00 - Nilai buku bangunan I Kantor KPU Rp229.376.000,00 - Nilai buku bangunan II Kantor KPU Rp200.704.000,00	825.580.000,00
6.	Reklasifikasi beban persediaan alat kesehatan habis pakai pada BPBD Kesbangpol berupa masker kain 2 fly sebanyak 30.000,00 pcs @Rp5.000,00, handscoon sebanyak 1.250 pcs @Rp3.500,00 dan kacamat face shield sebanyak 2.000 pcs @Rp6.250,00 di kegiatan pengadaan barang/peralatan penanganan COVID-19.	166.875.000,00
7.	Reklasifikasi beban persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada BPBD Kesbangpol berupa wastafel sebanyak 75 pcs @Rp1.050.000,00 yang diserahkan ke sekolah SD, SMP SMA dan Paud Balaikota di Kota Padang Panjang, di kegiatan pengadaan barang/peralatan penanganan COVID-19.	78.750.000,00
8.	Hibah aset tetap berupa belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan pada kegiatan Penunjang DAK tahun 2020 ke sekolah swasta pada Dinas Pendidikan	44.670.000,00

Jumlah

11.182.177.574,20

Sedangkan beban uang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp610.800.000,00 merupakan penyerahan hadiah perlombaan dan reward kepada masyarakat/pihak ketiga.

1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	15.000.000,00
	Reward pemenang lomba mata pelajaran olimpiade sains SD dan SMP	Rp	15.000.000,00
2.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	124.100.000,00
	Hadiah lomba gerakan PKK, Jambore PKK Tk. Kota, Posyandu dan Dasawisma	Rp	31.000.000,00
	Hadiah lomba peringatan hari ibu dan HUT DW	Rp	13.500.000,00
	Hadiah Lomba peringatan hari anak dan hari jadi kota padang panjang	Rp	21.250.000,00
	Hadiah Lomba Tribina Tk. Kecamatan	Rp	10.600.000,00
	Hadiah Lomba PKK Bangsa Kencana KB Kes	Rp	22.500.000,00
	Hadiah Lomba Tribina Tk. Kota	Rp	11.250.000,00
	Hadiah Lomba pemilihan Duta Genre dan Ajang Temu Kreativitas PIK R	Rp	14.000.000,00

3.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata			Rp	131.300.000,00
	Hadiah lomba kegiatan pemuda pelopor Tk. Kota dan Tk. Provinsi an. Nanda Saputra, dkk	Rp	25.000.000,00		
	Hadiah pemenang kejuaraan balap motor Walikota Cup Open Road Race	Rp	25.000.000,00		
	Hadiah lomba penyelenggaraan pesona Padang Panjang Kota Serambi Mekkah (lomba fotografi, lomba vlog, lomba tracking/telusur dan lomba film pendek)	Rp	81.300.000,00		
4.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Rp	55.500.000,00
	Hadiah lomba perpustakaan Tk. kelurahan, Tk. SLTA dan pustakawan berprestasi terbaik	Rp	9.000.000,00		
	Hadiah lomba bercerita Tk. SD/MI, lomba baca puisi Tk. Sumatera dan lomba menggambar Tk. Kota Padang Panjang	Rp	22.000.000,00		
	Reward lomba bercerita Tk. SD/MI Tk. Provinsi Sumatera Barat	Rp	5.000.000,00		
	Hadiah lomba kampung literasi se-Kota Padang Panjang	Rp	19.500.000,00		
5.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM			Rp	58.500.000,00
	Hadiah pemenang penilaian kepatuhan koperasi kelompok fungsional	Rp	19.500.000,00		
	Hadiah pemenang penilaian kepatuhan koperasi kelompok non fungsional	Rp	19.500.000,00		
	Hadiah pemenang penilaian kepatuhan koperasi berprestasi	Rp	19.500.000,00		
6.	Sekretariat Daerah			Rp	116.000.000,00
	Bonus pemenang MTQ Tk. Kota	Rp	116.000.000,00		
7.	Kecamatan Padang Panjang Timur			Rp	51.850.000,00
	Hadiah lomba kegiatan peringatan HUT Kota	Rp	6.100.000,00		
	Hadiah lomba kader posyandu	Rp	3.000.000,00		
	Hadiah lomba kader dasawisma	Rp	1.550.000,00		
	Hadiah lomba HKG PKK KB Kes	Rp	3.000.000,00		
	Hadiah lomba Teknologi Tepat Guna (TTG)	Rp	3.000.000,00		
	Hadiah lomba kelurahan berprestasi	Rp	3.000.000,00		
	Hadiah lomba MTQ ke-39 Tk. Kec. PPT	Rp	32.200.000,00		
8.	Kecamatan Padang Panjang Barat			Rp	58.550.000,00
	Hadiah lomba kegiatan peringatan HUT Kota	Rp	9.100.000,00		
	Hadiah lomba kader posyandu	Rp	1.550.000,00		
	Hadiah lomba kader dasawisma	Rp	1.550.000,00		
	Hadiah lomba HKG PKK KB Kes	Rp	3.250.000,00		
	Hadiah lomba MTQ ke-39 Tk. Kec. PPB	Rp	43.100.000,00		
Jumlah Beban Uang Yang Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga				Rp	610.800.000,00

(i) Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial merupakan beban bantuan sosial kepada anggota masyarakat dimana pada Tahun 2020 telah direalisasikan sebesar Rp17.163.021.800,00. Bila dibandingkan dengan beban bantuan sosial tahun 2019 sebesar Rp2.294.310.919,00 maka beban bantuan sosial Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp14.868.710.881,00 atau 648,07%. Penyebab peningkatan ini adalah karena reklasifikasi belanja bantuan tidak terduga dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Berikut beban bantuan sosial Tahun 2020 dan 2019:

Tabel 81-Beban Bantuan Sosial-LO TA 2020 dan 2019

URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Beban Bantuan Sosial	17.163.021.800,00	2.294.310.919,00	14.868.710.881,00	648,07
Jumlah	17.163.021.800,00	2.294.310.919,00	14.868.710.881,00	648,07

Bila dibandingkan dengan belanja bantuan sosial-LRA, maka beban bantuan sosial terdapat selisih sebesar Rp16.728.600.000,00 :

URAIAN	LO 2020	LRA 2019	SELISIH
Beban Bantuan Sosial	17.163.021.800,00	434.421.800,00	16.728.600.000,00
Jumlah	17.163.021.800,00	434.421.800,00	16.728.600.000,00

Selisih sebesar Rp16.728.600.000,00 tersebut merupakan reklasifikasi dari belanja tak terduga, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyerahan bantuan langsung tunai (BLT) pada Dinas Sosial	11.268.600.000,00
2. Penyerahan bantuan beras 10 kg per KK, dengan jumlah 12.000 KK @Rp120.000,00 pada Dinas Sosial	1.440.000.000,00
3. Penyerahan bantuan modal kepada pelaku usaha mikro sebanyak 2.010 UMKM @Rp2.000.000,00 pada Dinas Perdagkop	4.020.000.000,00
Jumlah	16.728.600.000,00

Untuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan beras dan bantuan modal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam rangka penanganan dampak dari pandemi COVID-19 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli :

Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Rp 11.268.600.000,00
- Tahap 1 (april-mei) 4.813 KK @Rp1.200.000,00	
- Tahap 2 (juni) 4.619 KK @Rp600.000,00	
- Tahap 3 (okt-des) 3.024 KK @Rp900.000,00	
Bantuan beras 10 kg per KK	Rp 1.440.000.000,00
- 12.000 KK @Rp120.000,00	
Jumlah	Rp 12.708.600.000,00

Selain penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*, Pemerintah Kota Padang Panjang juga melakukan penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian daerah melalui pemberian bantuan penyaluran modal bagi pelaku usaha mikro. Bantuan diberikan 1(satu) kali dalam bentuk sejumlah uang melalui rekening bank sejumlah Rp2.000.000,00.

Persyaratan bagi penerima bantuan adalah :

1. Merupakan Usaha Mikro yang merupakan usaha ekonomi produktif yang memiliki aset kekayaan dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diluar bangunan dan tanah, dan usaha penjualan dibawah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun
2. Memiliki KTP, NIK dan berdomisili di Kota Padang Panjang
3. Memiliki alamat usaha di Kota Padang Panjang
4. Setiap KK hanya menerima satu bantuan
5. Bukan ASN, TNI, POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pensiunan
6. Tidak sedang menerima bantuan isi warung/isi gerobak/isi etalase.

Penyaluran bantuan modal dilaksanakan dengan 2 tahap, dengan rincian sebagai berikut :

Tahap 1, berdasarkan SK Wako No. 212 Tahun 2020 Jumlah realisasi sebanyak 1.718 UMKM	Rp	3.436.000.000,00
Tahap 2, berdasarkan SK Wako Nomor 224 Tahun 2020 Jumlah realisasi sebanyak 292 UMKM	Rp	584.000.000,00
JUMLAH	Rp	4.020.000.000,00

(j) Beban Penyusutan Aset Tetap

Saldo beban penyusutan aset tetap Tahun 2020 adalah Rp55.924.252.561,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 adalah Rp62.615.021.782,57, berarti terjadi penurunan saldo di Tahun 2020 sebesar Rp6.690.769.221,57 atau 10,69%.

Tabel 82-Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2020

No.	Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.235.024.823,00	20.790.054.923,15
2.	Beban Penyusutan gedung dan bangunan	11.143.196.441,00	17.026.761.707,36
3.	Beban Penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	22.546.031.297,00	24.798.205.152,06
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap		55.924.252.561,00	62.615.021.782,57

(k) Beban Penyusutan Aset Lainnya

Saldo beban penyusutan aset lainnya Tahun 2020 adalah Rp485.708.879,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 adalah Rp51.860.000,00, berarti terjadi peningkatan sebesar Rp433.848.879,00 atau 836,58%. Beban penyusutan aset lainnya sebesar Rp485.708.879,00 tersebut merupakan beban amortisasi aset tak berwujud.

(l) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Saldo beban penyisihan piutang tak tertagih Tahun 2020 adalah sebesar Rp4.487.390.932,53. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2019 sebesar Rp1.424.405.509,43, maka saldo beban penyisihan piutang tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp3.062.985.423,10 atau 215,04%.

Tabel 83-Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	503.489.260,34	272.633.348,05	230.855.912,29	84,68
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	166.803.880,70	2.245.000,00	164.558.880,70	7.330,02
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	183.550.103,70	0,00	183.550.103,70	100,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	3.633.547.687,79	1.149.527.161,38	2.484.020.526,41	216,09
Jumlah		4.487.390.932,53	1.424.405.509,43	3.062.985.423,10	215,04

(m) Beban Transfer

Beban transfer merupakan beban transfer bantuan keuangan kepada partai politik. Saldo Beban Transfer pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp653.852.380,00, jika dibandingkan dengan saldo Beban Transfer pada Tahun 2019 sebesar Rp565.929.412,00 maka saldo Beban Transfer pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp87.922.968,00 atau 15,54%.

(n) Beban Lain-Lain

Saldo beban lain-lain-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.287.296.367,77 yang berasal dari beban penyisihan dana bergulir tahun 2020 dan perolehan aset Tetap TA 2020 yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap karena tidak memenuhi nominal kapitalisasi. Adapun rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut:

1.	Beban penyisihan piutang tak tertagih dana bergulir	Rp	43.803.482,00
2.	Belanja modal aset yang tidak di kapitalisir	Rp	1.243.492.885,77
		Rp	1.287.296.367,77

Jika dibanding dengan saldo beban lain-lain tahun 2019 sebesar Rp702.917.910,34, maka saldo tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp584.378.457,43 atau 83,14%.

c. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/defisit dari operasi adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Berikut rincian surplus/defisit dari operasi Tahun 2020:

1.	Pendapatan-LO	Rp	546.590.002.245,06
2.	Beban	Rp	555.205.652.979,54
3.	Surplus/(Defisit) dari Operasi	Rp	(8.615.650.734,48)

Jika dibanding dengan surplus/defisit dari operasi Tahun 2019 sebesar Rp14.095.979.275,57, maka surplus/defisit dari operasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.480.328.541,09 atau 38,88%.

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional

Pada TA 2020, Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp50.062.860,00 sedangkan untuk TA 2019 adalah Rp3.218.633.438,02.

1) Surplus Non-Operasional

Nihil

2) Defisit Non-Operasional

Defisit non operasional pada TA 2020 adalah sebesar Rp50.062.860,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Defisit Non Operasional	Saldo 2020	Saldo 2019
1.	Defisit penjualan asset non lancar	0,00	0,00
2.	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	0,00	0,00
3.	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	50.062.860,00	3.218.633.438,02
Jumlah		50.062.860,00	3.218.633.438,02

Adapun defisit dari kegiatan non operasional lainnya tersebut merupakan nilai buku dari penghapusan bangunan kios pasar los N tahun 2020 berdasarkan surat keputusan nomor 024/01/Setdako-PP/2020 tentang Penghapusan BMD Kota Padang Panjang Dari Daftar Barang Milik Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM tanggal 10 Januari 2020.

e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa pada TA 2020 adalah sebesar Rp8.665.713.594,48.

f. Pos Luar Biasa

Pos Luar biasa untuk memuat transaksi yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pos ini memuat Beban Luar Biasa yang di Tahun 2020 berjumlah nihil (kondisi ini sama dengan Tahun 2019).

g. Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Berikut rincian surplus/(defisit)-LO:

Pendapatan-LO	Rp	546.590.002.245,06
Beban	Rp	(555.205.652.979,54)
Defisit dari operasi	Rp	(8.615.650.734,48)
Defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(50.062.860,00)
Pos luar biasa	Rp	0,00
Surplus/(defisit)-LO	Rp	(8.665.713.594,48)

5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas serta setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas ini berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang dan untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Untuk Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020 ini tidak termasuk realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS, dan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kota Padang Panjang di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

Tabel 84-Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2020

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	7.826.867.948,00	9.048.892.175,00
Penerimaan Retribusi Daerah	4.656.919.048,15	4.624.073.616,67
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.313.227.292,00	6.058.783.025,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	60.580.608.907,91	57.252.471.639,82
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	8.033.525.138,00	6.534.490.997,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.948.433.875,00	1.824.173.950,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	352.753.271.000,00	390.319.648.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	49.972.658.041,00	54.407.609.651,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	27.961.238.000,00	17.241.091.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.924.523.946,00	22.524.774.893,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	539.971.273.196,06	569.836.008.947,49
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	243.421.203.426,00	256.801.711.815,00
Pembayaran Barang	210.791.294.024,97	230.952.362.474,35
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	2.887.795.179,00	5.253.694.572,00
Pembayaran Bantuan Sosial	434.421.800,00	2.294.310.919,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	653.852.380,00	565.929.412,00
Pembayaran Tak Terduga	25.539.205.763,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	483.727.772.572,97	495.868.009.192,35
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	56.243.500.623,09	73.967.999.755,14

Arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp56.243.500.623,09 yang merupakan selisih lebih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp539.971.273.196,06 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp483.727.772.572,97.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp79.377.623.196,06 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp460.593.650.000,00. Dari kedua sumber arus kas masuk terlihat bahwa Pendapatan Transfer merupakan penyumbang terbesar untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah Kota Padang Panjang.

Di sisi lain, arus Kas Keluar dari aktivitas operasi tahun 2020 digunakan untuk: Belanja operasi sebesar Rp457.534.714.429,97, Belanja Tak Terduga sebesar Rp25.539.205.763,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp653.852.380,00. Arus kas keluar terbesar adalah untuk belanja operasi yang dalam hal ini digunakan untuk Belanja Pegawai

b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari Aktivitas investasi, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Tabel 85 - Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	51.179.500,00	292.700.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	46.230.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	51.179.500,00	338.930.000,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	17.466.718.833,00	24.610.900,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	16.850.495.356,30	24.831.522.321,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	7.663.481.704,67	30.067.237.581,88
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.201.107.926,89	38.797.005.337,34
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.446.007.468,01	3.561.187.462,75
Perolehan Aset Lainnya	210.525.500,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	52.838.336.788,87	97.281.563.602,97
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(52.787.157.288,87)	(96.942.633.602,97)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi per 31 Desember 2020 mengalami defisit sebesar Rp52.787.157.288,87 yang disebabkan rendahnya Arus Kas Masuk yang bersumber dari pendapatan atas penjualan/pelepasan aset tetap. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi digunakan untuk belanja modal dalam rangka perolehan aset tetap sebesar Rp52.838.336.788,87.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang.

d. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Daerah.

Tabel 86-Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2020

Uraian	2020	2019
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	9.356.504.787,00	9.616.257.856,00
Penerimaan setoran UYHD dari Bendahara	9.107.752,00	15.000.000,00
Pengeluaran		
Pendapatan BLUD	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	9.365.612.539,00	9.631.257.856,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	9.356.504.787,00	9.616.257.856,00
Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00
Pengeluaran UP Tahun 2020 Masih Berada Di Bend. Pengeluaran	36.000.000,00	9.107.752,00
Jumlah Arus Keluar Kas	9.392.504.787,00	9.625.365.608,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(26.892.248,00)	5.892.248,00

Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2020 defisit sebesar Rp26.892.248,00 yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp9.365.612.539,00 dikurangi Arus Kas Keluar sebesar Rp9.392.504.787,00.

Untuk penerimaan dan pengeluaran PFK tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 87-Penerimaan dan Pengeluaran PFK TA 2020

Jenis PFK	Penerimaan PFK	Pengeluaran PFK
IWP	9.163.587.154,00	9.163.587.154,00
Taperum	114.170.000,00	114.170.000,00
PPH-21	78.747.633,00	78.747.633,00
	9.356.504.787,00	9.356.504.787,00

e. Kenaikan/Penurunan Bersih Selama Periode

Keempat jenis aktivitas yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2020 seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya menyebabkan terjadinya kenaikan kas sebesar Rp3.429.451.086,22:

Tabel 88-Kenaikan Kas TA 2020

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	56.243.500.623,09	73.967.999.755,14
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(52.787.157.288,87)	(96.942.633.602,97)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(26.892.248,00)	5.892.248,00
Jumlah	3.429.451.086,22	(22.968.741.599,83)

f. Saldo Awal

Saldo awal pada LAK 2020 merupakan saldo akhir LAK 2019 (*audited*). Nilai yang tercatat pada LAK 2019 (*audited*) adalah sebesar Rp45.418.081.091,77 terdiri dari:

1. Saldo Kas di BUD dan Kasda 2019 (Neraca Audited)	Rp	45.067.870.486,12
2. Kas di BLUD	Rp	350.210.605,65
3. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
4. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
JUMLAH	Rp	45.418.081.091,77

g. Saldo Akhir

Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas Daerah menurut LAK 2020 adalah Rp48.847.532.177,99 yang diperoleh dari penjumlahan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode ditambah dengan Saldo Awal Kas di BUD dan Kas Daerah:

1. Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	Rp	3.429.451.086,22
2. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas Daerah	Rp	45.418.081.091,77
3. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas Daerah	Rp	48.847.532.177,99

Saldo akhir kas di BUD dan Kas Daerah sebesar Rp48.847.532.177,99 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Saldo kasda rek 00203.3	Rp	45.402.569.252,34
2. Kas di rek JKN	Rp	2.743.098.804,00
3. Kas di BLUD RSUD	Rp	285.907.429,65
4. Kas di BLUD Dana Bergulir	Rp	374.235.692,00
5. Kas di bendahara penerimaan OPD	Rp	41.721.000,00
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kasda	Rp	48.847.532.177,99

Untuk mendapatkan Saldo Akhir Kas di LAK, saldo Akhir Kas di BUD dan Kas Daerah sebesar Rp48.847.532.177,99 di atas, harus ditambahkan dengan komponen kas lainnya:

1. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kasda	Rp	48.847.532.177,99
2. Kas di BLUD	Rp	0,00
3. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	40.745.306,00
4. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	-
5. Kas Lainnya (dana BOS)	Rp	1.927.393.378,00
Saldo Akhir Kas (LAK)	Rp	50.815.670.861,99

Saldo Akhir Kas menurut LAK sebesar Rp50.815.670.861,99 di atas, harus sama nilainya dengan saldo kas menurut Neraca. Berikut adalah rincian komponen kas menurut Laporan Neraca:

1. Kas di Kas Daerah	Rp	48.145.668.056,34
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	40.745.306,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	41.721.000,00
4. Kas di Bendahara BLUD	Rp	660.143.121,65
5. Kas Lainnya	Rp	1.927.393.378,00
6. Setara Kas	Rp	0,00
Saldo Kas (Neraca)	Rp	50.815.670.861,99

6. Penjelasan Akun-Akun Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi perubahan ekuitas selama satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

a. Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal Tahun 2020 adalah Rp1.235.450.460.290,86 yang merupakan saldo akhir dari ekuitas Tahun 2019.

b. Surplus/Defisit LO

Saldo surplus/defisit LO Tahun 2020 adalah Rp8.665.713.594,48 merupakan defisit atas kegiatan operasional basis akrual yang menambah nilai neraca Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020.

c. Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas

1) Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap

Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap merupakan koreksi tambah atas kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap sampai Tahun 2019 sebesar Rp6.357.403.274,67 yang disebabkan karena migrasi ke Permendagri 108 tahun 2016 dan perubahan kebijakan akuntansi.

2) Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya

Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan koreksi tambah atas kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan aset lainnya sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp19.704.844,01.

3) Koreksi akumulasi amortisasi aset tidak berwujud

Koreksi akumulasi penyusutan amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp1.286.138.274,00 merupakan koreksi kurang karena perubahan kebijakan akuntansi.

4) Dampak kebijakan kapitalisir

Dampak kebijakan kapitalisir Tahun 2020 sebesar Rp11.975.000,00 merupakan koreksi kurang aset tetap yang pindah ke ekstrakomptabel karena tidak memenuhi nilai kapitalisir. Adapun rincian aset tetap yang pindah ke ekstrakomptabel adalah sebagai berikut :

Gedung dan bangunan	Rp	(2.500.000,00)
Aset tetap lainnya	Rp	(9.475.000,00)
Jumlah koreksi kurang	Rp	(11.975.000,00)

Koreksi kurang gedung bangunan sebesar Rp2.500.000,00 merupakan koreksi kurang bangunan tempat kerja lainnya (kopel) pada Dinas Pariwisata

- Koreksi kurang aset tetap lainnya sebesar Rp9.475.000,00 merupakan koreksi kurang atas barang kerajinan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

5) Dampak kebijakan penyisihan piutang

Dampak kebijakan penyisihan piutang Tahun 2020 sebesar Rp1.300.646.930,95 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi kurang ekuitas pada Dinas Perdagkop sebesar Rp3.429.974.059,00 dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi penyisihan piutang Retribusi pelayanan persampahan tahun 2019	Rp	(186.750.000,00)
Koreksi penyisihan piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa - Pasar Pusat tahun 2019	Rp	(3.243.224.059,00)
Jumlah koreksi tambah Dinas Perdagkop	Rp	(3.429.974.059,00)

- Koreksi tambah ekuitas atas penyisihan piutang jasa layanan umum pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp4.730.620.989,95.

6) Perhitungan koreksi tambah dan koreksi kurang aset tetap

Koreksi tambah aset tetap tahun 2020 sebesar Rp68.050.000,00 merupakan koreksi atas aset tetap yang disebabkan oleh adanya koreksi kurang catat maupun koreksi kurang nilai disebabkan karena penghapusan nilai aset tetap pada beberapa OPD :

- Koreksi Tambah

A Dinas Pariwisata	Rp	68.050.000,00
Koreksi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari belanja barang dan jasa tahun 2016, yang terdiri atas :		
-Pakaian anak daro	Rp	15.600.000,00
-Pakaian marapulai	Rp	15.600.000,00
-Sunting gadang	Rp	8.000.000,00
-Aksesoris baju adat	Rp	5.000.000,00
-Pelana kuda	Rp	23.850.000,00
Jumlah Koreksi Tambah Aset Tetap	Rp	68.050.000,00

7) Koreksi piutang

Koreksi tambah piutang sebesar Rp3.802.755.900,00 merupakan koreksi atas nilai piutang pada Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

a Inspektorat, koreksi kurang karena penerimaan kembali piutang atas keterlanjuran pembayaran tunjangan fungsional umum 2019	Rp	(6.370.000,00)
b Koreksi tambah piutang pada Perdagkop yang terdiri dari :	Rp	3.429.974.059,00
-Piutang retribusi pelayanan persampahan	Rp	186.750.000,00
-Piutang sewa pemakaian kekayaan daerah-pasar pusat	Rp	<u>3.243.224.059,00</u>
c Koreksi tambah piutang transfer pemerintah pusat karena perubahan PMK		379.151.841,00
Jumlah Koreksi Piutang	Rp	3.802.755.900,00

8) Koreksi Utang

Penyesuaian atas koreksi utang sebesar Rp59.988.698,00 merupakan koreksi nilai utang yang kurang/lebih karena kesalahan pencatatan pada Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan dan RSUD dengan uraian sebagai berikut:

Koreksi Tambah:			
A	Dinas Kesehatan Koreksi tambah karena lebih catat utang premi asuransi tenaga kerja dan masyarakat tahun 2019	Rp	756.000,00
B	RSUD Koreksi kurang karena kurang catat utang tahun 2019	Rp	(59.744.698,00)
	Jumlah Koreksi Utang	Rp	(59.988.698,00)

9) Koreksi persediaan

Merupakan koreksi kurang persediaan sebesar Rp17.182.022,00 karena kurang/lebih catat pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi Tambah

A	Dinas Sosial Koreksi tambah karena kurang catat persediaan bantuan logistik bencana yang berasal dari hibah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Rp	10.355.323,00
B	RSUD Koreksi tambah karena kurang catat persediaan gas medis	Rp	2.740.000,00
	Jumlah Koreksi Tambah	Rp	13.095.323,00

- Koreksi Kurang

A	Dinas Sosial Koreksi kurang karena lebih catat persediaan alat kontrasepsi yang telah kadaluarsa. Persediaan ini berasal dari hibah BKKBN Provinsi Sumatera Barat	Rp	(30.277.345,00)
	Jumlah Koreksi Kurang	Rp	(30.277.345,00)
	Jumlah Koreksi Persediaan	Rp	(17.182.022,00)

10) Koreksi Investasi

Koreksi tambah investasi sebesar Rp63.803.002,72 merupakan koreksi atas kenaikan nilai investasi pada PDAM Kota Padang Panjang.

d. Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir Tahun 2020 adalah Rp1.237.022.826.654,73 yang berasal dari penambahan ekuitas awal, surplus/defisit LO dan dampak kumulatif dari koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas:

1.	Ekuitas Awal	Rp	1.235.450.460.290,86
2.	Surplus/Defisit LO	Rp	(8.665.713.594,48)
3.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan mendasar	Rp	10.238.079.958,35
4.	Ekuitas Akhir	Rp	1.237.022.826.654,73

F. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

Penjelasan atas informasi non-keuangan yaitu terkait adanya kewajiban kontinjensi. Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban yang tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih kewajiban masa depan untuk menanggihkan jumlah utang, pihak yang dibayarkan, tanggal pembayaran, atau keberadaannya. Sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kota Padang Panjang menghadapi kasus hukum perdata pembangunan kawasan perdagangan di Kelurahan Bukit Surungan, yang mempunyai potensi pengaruh terhadap keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasar Induk Hasil Pertanian

Kemitraan dengan Pihak Ketiga tentang Pembangunan Kawasan Perdagangan di Kelurahan Bukit Surungan didasarkan atas Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT. Alam Sejahtera Sejati Nomor 001/PMDD-PP/I-2006 dan nomor 100/ASS/I/2006 tertanggal 03 Januari 2006. Pemko memberikan hak melaksanakan pembangunan pada tanah dengan sertifikat Hak Pakai dengan luas 4.784 m² yang berlokasi di Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat dengan rincian :

- a) Sertifikat No. 06/2003 dengan luas 955 M²
- b) Sertifikat No. 07/2003 dengan luas 884 M²
- c) Sertifikat No. 08/2003 dengan luas 1.917 M²
- d) Sertifikat No. 09/2003 dengan luas 1.028 M²

Sedangkan PT Alam Sejahtera Sejati bersedia melaksanakan pembangunan kawasan perdagangan di Kelurahan Bukit Surungan dan fasilitas pada tanah tersebut. Pola bentuk kerjasamanya, Pemko Padang Panjang dan PT Alam Sejahtera Sejati sama-sama memasarkan kios dan rumah toko (ruko) kepada pihak ketiga. Perjanjian ini berlangsung selama jangka waktu 20 tahun. PT. Alam Sejahtera Sejati dan Pemko Padang Panjang bersepakat bahwa uang sewa yang diterima dikurangi dulu dengan nilai bangunan dan biaya lainnya sesuai dengan persentasenya sebagai berikut :

- a) Pemko Padang Panjang sebesar 20%
- b) PT. Alam Sejahtera Sejati sebesar 80%

Seiring dengan berjalannya waktu, PT. Alam Sejahtera Sejati wanprestasi atas perjanjian dikarenakan tidak menyelesaikan bangunan dalam jangka waktu 12 bulan atau tepatnya pada tanggal 3 Januari 2007, sehingga didalam perjanjian jika wanprestasi dikenakan sanksi dendanya maksimal 5% dalam kontrak. Hal ini menjadikan pihak Pemko mengajukan surat peringatan kepada pihak PT. Alam Sejahtera Sejati. Sehubungan dengan tidak ditanggapinya, maka pihak Pemko Padang Panjang mengajukan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang pada tanggal 24 November 2016 dalam register nomor 11/PDT.G/2016/PN Pdp dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

- a) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan penggugat;
- c) Menyatakan sah dan mengikat perjanjian kerjasama antara Pemko Padang Panjang dengan PT. Alam Sejahtera Sejati (PT. ASS) No. 001/PMPD-PP/I-2006 dan 100/ASS/I/2006;
- d) Menyatakan bahwa tergugat telah wanprestasi atas perjanjian kerjasama;

- e) Menghukum tergugat untuk membayarkan denda kepada penggugat dengan jumlah yang dihitung berdasarkan akumulasi keterlambatan pembayaran dari tahun 2007 sampai dengan 2016 setiap tahunnya dengan total Rp92.668.630,00;
 - f) Menghukum tergugat untuk membayarkan hak persentase 20% dari uang sewa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerjasama sebesar Rp527.105.096,00;
 - g) Menghukum tergugat untuk menyerahkan bangunan kios dan rumah toko PIHP Bukit Surungan kepada penggugat;
 - h) Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan yang diajukan penggugat pada tahap persidangan;
 - i) Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp5.000.000,00 atas keterlambatan melaksanakan putusan aquo;
 - j) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi; dan
 - k) Membebaskan kepada tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo
- Pertimbangan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan data dan fakta yang ada, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil sangkalan dimaksud haruslah pula dikesampingkan dan dinyatakan ditolak gugatan penggugat tersebut untuk selain dan selebihnya pada tanggal 22 Juni 2017.

Pada tahun 2019, Pemko Padang Panjang mengajukan keberatan atas Keputusan Pengadilan tertanggal 22 Juni 2019 ke Pengadilan Negeri Padang Panjang dan diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Juli 2019 dalam register No. 1/Pdt.G/2019/ PN Pdp, dimana Pemko melakukan gugatan yang sama dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya. Maka sesuai dengan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 menyatakan gugatan penggugat rekonsvansi/tergugat Konvensi tidak dapat diterima. Dan menyatakan juga bahwa Putusan Perkara Perdata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang No. 11/PDT.G/2016/PN Pdp telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dengan hasil keputusan tersebut, maka Pemko Padang Panjang mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi, dimana berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Padang No.105/PDT/2020/PT PDG tertanggal 3 Juni 2020 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 9 April 2020 No.1/Pdt.G/2019/PN Pdp dan menolak permohonan banding dari pembanding semula penggugat.

Pada bulan Agustus 2020, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung atas hasil Keputusan dari Pengadilan Negeri Padang Panjang dan Pengadilan Tinggi Padang yang sudah mempunyai hukum tetap. Dan sampai dengan saat ini masih dalam proses dan belum ada hasil Keputusan dari Mahkamah Agung RI.

G. PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2020 baik itu pendapatan dan belanja telah diupayakan optimalisasi dalam pengelolaannya, selain itu LKPD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual.

Terhadap berbagai kendala yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2020 ini, Pemerintah Kota Padang Panjang bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.



LAMPIRAN**Lampiran 1 – Rincian Realisasi Retribusi Daerah TA 2020**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020		REALISASI 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1	Pelayanan Kesehatan	224.000.000,00	184.338.400,00	82,29	264.666.000,00
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	454.054.000,00	541.760.000,00	119,32	622.051.000,00
3	Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	513.752.000,00	591.086.000,00	115,05	350.162.000,00
4	Pelayanan Pasar	202.224.000,00	201.745.250,00	99,76	243.194.726,00
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	185.870.000,00	241.995.000,00	130,20	199.680.000,00
6	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	5.565.000,00	111,30	5.050.000,00
7	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	33.000.000,00	28.800.000,00	87,27	30.950.000,00
8	Pemakaian Kekayaan Daerah	690.345.920,00	641.139.460,00	92,87	984.108.750,00
9	Pasar Grosir/Pertokoan	75.676.000,00	114.587.200,00	151,42	145.847.400,00
10	Terminal	1.111.108.000,00	1.172.135.000,00	105,49	718.153.000,00
11	Tempat Khusus Parkir	58.780.000,00	70.294.000,00	119,59	9.308.000,00
12	Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	14.000.000,00	7.000.000,00	50,00	12.200.000,00
13	Rumah Potong Hewan	143.100.000,00	143.730.000,00	100,44	171.000.000,00
14	Tempat Rekreasi dan Olahraga	173.388.000,00	194.724.000,00	112,31	310.516.000,00
15	Penjualan Produksi Usaha Daerah	185.535.600,00	135.901.500,00	73,25	182.312.800,00
16	Izin Mendirikan Bangunan	315.000.000,00	375.468.238,15	119,20	363.398.940,67
17	Izin Trayek	4.400.000,00	6.650.000,00	151,14	11.475.000,00
	J U M L A H	4.389.233.520,00	4.656.919.048,15	106,10	4.624.073.616,67

Lampiran 2 – Rincian Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah TA 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	%	
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA	101.179.500,00	51.179.500,00	50,58	338.930.000,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin – LRA	51.179.500,00	51.179.500,00	100,00	292.700.000,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan – LRA	50.000.000,00	0,00	0,00	46.230.000,00
Penerimaan Jasa Giro – LRA	1.529.956.810,00	1.802.850.072,00	117,84	2.527.269.002,00
Jasa Giro Kas Daerah – LRA	1.363.304.544,00	1.621.727.632,00	118,96	2.366.130.031,00
Jasa Giro Bendahara – LRA	166.652.266,00	181.122.440,00	108,68	161.138.971,00
Pendapatan Bunga – LRA	2.000.000.000,00	2.608.556.487,00	130,43	3.038.943.936,00
Pendapatan Bunga Deposito – LRA	2.000.000.000,00	2.608.556.487,00	130,43	3.038.943.936,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	60.844.815,27	136.352.193,52	224,10	863.477.149,18
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal	3.168.774,31,00	78.676.152,56	2.482,86	857.728.137,82
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa	57.676.040,00	57.676.040,96	100,00	5.749.011,36
Pendapatan Denda Pajak – LRA	5.929.356,00	15.420.167,00	260,06	24.135.348,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel – LRA	145.000,00	150.200,00	103,59	5.448.547,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran – LRA	15.085,00	15.085,00	100,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan – LRA	938.760,00	938.760,00	100,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame – LRA	82.000,00	343.700,00	419,15	350.952,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir – LRA	17.212,00	17.212,00	100,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah – LRA	6.200,00	7.760,00	125,16	0,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	4.725.099,00	13.947.450,00	295,18	18.335.849,00
Pendapatan Denda Retribusi – LRA	12.364.155,00	31.607.295,00	255,64	107.772.025,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	0,00	1.825.440,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	73.500,00	151.050,00,00	205,51	33.091.530,00
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.954.900,00	8.411.100,00	284,65	7.414.700,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	3.463.700,00	9.404.160,00	271,51	29.699.150,00
Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LRA	5.872.055,00	11.815.545,00	201,22	37.566.645,00
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan – LRA	15.510.000,00	15.510.000,00	100,00	194.568.250,00
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Barang dan jasa	15.510.000,00	15.510.000,00	100,00	194.568.250,00
Pendapatan dari Pengembalian	204.992.250,39	355.813.721,39	173,57	378.227.286,04

Uraian	Anggaran	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	%	
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan – LRA	20.102.181,00	92.061.275,00	457,97	89.562.527,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas – LRA	133.983.650,00	134.950.329,00	100,72	29.539.501,00
Pendapatan Dari Pengembalian Keterlanjuran Pembayaran Belanja Pegawai – LRA	0,00	0,00	0,00	30.510.000,00
Pendapatan Dari Pengembalian Keterlanjuran Pembayaran Belanja Barang/Jasa – LRA	18.623.831,07	84.467.552,07	453,55	65.296.452,00
Pendapatan Dari Pengembalian Keterlanjuran Pembayaran Belanja Modal – LRA	24.238.144,32	33.492.261,32	138,18	160.864.506,04
Pendapatan Dari Pengembalian Dana Hibah	0,00	0,00	0,00	1.632.300,00
Lain-Lain Pengembalian – LRA	8.044.444,00	10.842.304,00	134,78	822.000,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LRA	863.597.350,00	892.041.488,00	103,29	1.186.132.895,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa – LRA	863.597.350,00	892.041.488,00	103,29	1.186.132.895,00
Pendapatan BLUD – LRA	41.200.000.000,00	51.410.286.907,00	124,78	45.379.332.216,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD – LRA	41.000.000.000,00	51.207.613.365,00	124,90	45.379.332.216,00
Pendapatan Pengelolaan Dana Bergulir BLUD-LRA	200.000.000,00	202.673.542,00	101,34	0,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	3.416.836.050,00	3.312.170.577,00	96,94	3.552.613.532,60
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	2.836.050,00	15.615.552,00	550,61	62.505.982,60
Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Kebun Sikolos – LRA	1.100.000.000,00	1.148.567.700,00	104,42	1.125.059.700,00
Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Gunung – LRA	750.000.000,00	618.840.900,00	82,51	583.011.000,00
Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Koto Katik – LRA	564.000.000,00	541.015.800,00	95,92	535.966.500,00
Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Bukit Surungan – LRA	800.000.000,00	842.207.125,00	105,28	822.134.850,00
Kontribusi Tetap dari Pihak Ketiga – LRA	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
Kontribusi Tidak Tetap dari Pihak Ketiga – LRA	150.000.000,00	95.923.500,00	63,95	373.935.500,00
Jumlah	49.411.210.286,66	60.631.788.407,91	122,71	57.591.401.639,82

Lampiran 3-Daftar Realisasi Belanja Pegawai Daerah TA 2020

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	%	
Belanja Pegawai	260.447.447.190,71	243.421.203.426,00	93,46	256.801.711.815,00
Belanja Gaji dan Tunjangan	164.621.031.790,71	153.423.923.348,00	93,20	152.646.968.365,00
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	103.297.128.341,71	96.892.696.220,00	93,80	99.343.372.993,00
Tunjangan Keluarga	9.908.205.500,00	9.302.069.774,00	93,88	9.453.821.082,00
Tunjangan Jabatan	5.640.100.494,00	5.344.007.150,00	94,75	5.196.470.917,00
Tunjangan Fungsional	5.540.998.250,00	5.165.057.500,00	93,22	5.276.480.500,00
Tunjangan Fungsional Umum	1.899.800.000,00	1.662.606.627,00	87,51	1.777.985.000,00
Tunjangan Beras	5.850.306.000,00	5.052.493.943,00	86,36	5.157.870.932,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	223.391.000,00	158.082.191,00	70,76	168.257.557,00
Pembulatan Gaji	6.800.000,00	1.342.235,00	19,74	1.468.993,00
Iuran Jaminan Kesehatan	9.400.000.000,00	7.592.800.616,00	80,77	2.782.055.436,00
Uang Paket	41.000.000,00	38.682.000,00	94,35	38.608.500,00
Tunjangan Badan Musyawarah	14.000.000,00	13.337.100,00	95,27	12.225.675,00
Tunjangan Komisi	28.000.000,00	26.856.900,00	95,92	24.618.825,00
Tunjangan Badan Anggaran	17.000.000,00	15.529.500,00	91,35	14.235.375,00
Tunjangan Badan Kehormatan	6.000.000,00	5.663.700,00	94,40	3.775.800,00
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	10.000.000,00	9.317.700,00	93,18	10.550.925,00
Tunjangan Perumahan	1.309.200.000,00	1.158.000.000,00	88,45	1.102.073.000,00
Uang Jasa Pengabdian	200.000.000,00	0,00	0,00	183.435.000,00
Tunjangan Kesehatan DPRD	0,00	0,00	0,00	33.035.868,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	275.000.000,00	199.435.191,00	72,52	204.043.943,00
Iuran Jaminan Kematian	750.000.000,00	598.307.297,00	79,77	612.131.249,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	17.301.901.705,00	17.300.327.240,00	99,99	18.201.413.295,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	159.000.500,00	148.037.500,00	93,11	163.037.500,00
Tunjangan Transportasi	2.448.000.000,00	2.448.000.000,00	100,00	2.466.000.000,00
Tunjangan Reses	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	420.000.000,00
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	43.200.000,00	39.272.964,00	90,91	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	93.596.772.500,00	87.818.825.561,00	93,83	100.474.265.316,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	93.065.000.000,00	87.428.451.888,00	93,94	100.474.265.316,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	531.772.500,00	390.373.673,00	73,41	0,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.022.880.000,00	2.022.763.996,00	99,99	3.110.819.996,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	%	
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00	1.512.000.000,00	100,00	2.514.000.000,00
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.999.996,00	100,00	399.999.996,00
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.764.000,00	99,90	196.820.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	141.915.900,00	109.580.773,00	77,22	380.996.589,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel – LRA	6.000.000,00	2.860.900,00	47,68	22.263.750,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA	18.000.000,00	5.044.616,00	28,03	48.997.339,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA	12.000.000,00	3.378.125,00	28,15	39.580.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA	3.100.000,00	2.641.725,00	85,22	8.413.750,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA	44.000.000,00	43.569.170,00	99,02	107.265.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir – LRA	120.000,00	58.577,00	48,81	494.750,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA	960.000,00	135.282,00	14,09	3.957.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	15.235.900,00	9.774.678,00	64,16	41.250.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LRA	42.500.000,00	42.117.700,00	99,10	108.775.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	64.847.000,00	46.109.748,00	71,11	188.661.549,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan – LRA	3.277.500,00	1.593.900,00	48,63	11.437.500,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	6.152.500,00	4.622.264,00	75,13	25.425.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00	16.875.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA	1.955.000,00	1.744.182,00	89,22	11.053.369,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA	2.185.000,00	2.137.505,00	97,83	9.500.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	57.500,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	%	
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	402.500,00	276.000,00	68,57	1.312.500,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	12.993.500,00	6.812.552,00	52,43	44.503.180,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LRA	1.725.000,00	870.274,00	50,45	5.625.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA	17.250.000,00	12.777.742,00	74,07	22.000.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah- Tempat Khusus Parkir - LRA	115.000,00	37.870,00	32,93	240.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	230.000,00	64.400,00	28,00	460.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan – LRA	2.070.000,00	1.234.238,00	59,63	6.750.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	3.588.000,00	3.387.257,00	94,41	11.250.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA	2.369.000,00	853.464,00	36,03	6.680.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan – LRA	4.600.000,00	3.897.500,00	84,73	15.000.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA	126.500,00	50.600,00	40,00	550.000,00

Lampiran 4 - Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	%	
Belanja Barang dan Jasa	233.248.586.435,65	216.466.466.427,97	92,81	237.099.834.485,35
Belanja Bahan Pakai Habis	11.222.193.568,00	10.030.582.246,00	89,38	6.402.615.507,00
Belanja alat tulis kantor	2.020.520.146,00	1.905.071.079,00	94,29	2.639.737.352,00
Belanja dokumen/administrasi tender	5.950.000,00	2.100.000,00	35,29	6.590.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.297.671.970,00	1.152.454.987,00	88,81	703.137.240,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	119.456.000,00	98.022.000,00	82,06	113.321.500,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.354.682.772,00	2.158.545.400,00	91,67	1.202.482.460,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.076.908.780,00	3.697.989.634,00	90,71	494.358.750,00
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	33.125.500,00	20.122.500,00	60,75	9.400.000,00
Belanja pengisian tabung gas	61.101.000,00	42.830.000,00	70,10	21.525.000,00
Belanja Dekorasi	548.975.000,00	431.918.175,00	78,68	547.486.042,00
Belanja Hadiah	314.800.000,00	181.688.750,00	57,72	328.475.125,00
Belanja Alat Ukur	24.200.000,00	22.263.237,00	92,00	6.534.000,00
Belanja alat pertanian	34.559.200,00	27.481.200,00	79,52	2.002.500,00
Belanja souvenir	146.000.000,00	118.500.000,00	81,16	229.420.875,00
Belanja Pengadaan Alat-Alat Dapur	132.337.000,00	125.583.609,00	94,90	98.144.663,00
Belanja Perlengkapan Kantor	51.906.200,00	46.011.675,00	88,64	0,00
Belanja Bahan/Material	12.789.808.462,00	8.242.333.498,53	64,45	8.825.519.476,72
Belanja bahan baku bangunan	4.122.058.795,00	3.663.850.110,53	88,88	3.888.928.489,00
Belanja bahan/bibit tanaman	204.400.000,00	197.091.400,00	96,42	179.603.650,00
Belanja bahan obat-obatan	2.759.889.334,00	901.059.326,00	32,65	683.547.529,00
Belanja bahan kimia	589.842.500,00	569.678.743,00	96,58	637.205.903,72
Belanja Persediaan Makanan Pokok	703.270.000,00	612.875.635,00	87,15	960.211.901,00
Belanja Bahan dan Alat Percontohan	1.037.358.000,00	635.318.720,00	61,24	865.228.280,00
Belanja Bahan Pangan	199.445.750,00	187.803.150,00	94,16	371.563.500,00
Belanja pancang/patok tanah	2.154.300,00	520.000,00	24,14	0,00
Belanja bahan baku	0,00	0,00	0,00	528.328.960,00
Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai	3.078.551.783,00	1.396.071.414,00	45,38	220.949.330,00
Belanja Perlengkapan Dapur/RT RS	0,00	0,00	0,00	18.743.105,00
Belanja Pupuk/Racun Hama	8.000.000,00	5.432.000,00	67,90	0,00
Belanja Bahan dan Perlengkapan Olahraga	26.628.000,00	16.628.000,00	62,45	190.736.320,00
Belanja Marka Jalan	10.000.000,00	9.998.000,00	99,98	167.808.300,00
Belanja Gas Medis	2.000.000,00	600.000,00	30,00	0,00
Belanja Speed bump	46.210.000,00	45.407.000,00	98,26	112.664.209,00
Belanja Jasa Kantor	16.301.230.231,00	13.429.622.123,00	82,38	61.358.386.622,72
Belanja telepon	384.209.004,00	245.543.122,00	63,91	255.070.632,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	%	
Belanja air	1.424.361.396,00	1.005.532.044,00	70,60	884.420.160,00
Belanja listrik	5.446.323.400,00	4.380.437.003,00	80,43	4.799.394.919,00
Belanja surat kabar/majalah	599.700.000,00	582.592.493,00	97,15	665.896.355,00
Belanja kawat/faksimile/internet	1.848.870.000,00	1.658.956.399,00	89,73	1.005.870.391,00
Belanja paket/pengiriman	20.373.000,00	4.368.000,00	21,44	17.846.000,00
Belanja Sertifikasi	95.500.000,00	32.619.210,00	34,16	66.746.200,00
BelanjaJasa Transaksi Keuangan	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Publikasi	1.509.145.000,00	1.352.245.110,00	89,60	1.389.862.500,00
Belanja Jasa Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	11.460.857.768,00
Belanja retribusi kebersihan	50.836.000,00	40.712.000,00	80,08	39.046.000,00
Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	8.965.000,00	7.322.620,00	81,68	6.882.620,00
Belanja Jasa Uji Laboratorium	115.450.500,00	99.180.000,00	85,91	130.819.500,00
Belanja Jasa Event Organizer (EO)	214.750.000,00	178.669.480,00	83,20	1.888.202.800,00
Belanja Kontribusi	2.048.938.900,00	1.519.017.045,00	74,14	1.455.265.000,00
Belanja Jasa Medis	2.421.291.031,00	2.215.470.597,00	91,50	1.935.186.230,00
Belanja Jasa Pembakaran Sampah Medis	27.600.000,00	25.720.000,00	93,19	28.800.000,00
Upah Pegawai Harian	0,00	0,00	0,00	35.127.343.547,72
Belanja Retribusi Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.910.000,00	1.530.000,00	39,13	2.916.000,00
Belanja Jasa Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Pengacara	71.000.000,00	69.700.000,00	98,17	110.000.000,00
Belanja penyusunan Naskah Akademik	0,00	0,00	0,00	87.960.000,00
Belanja Premi Asuransi	10.043.947.000,00	8.659.568.819,24	86,22	7.767.748.168,43
Belanja Premi asuransi Kesehatan	17.829.000,00	3.857.339,00	21,64	6.000.897.400,00
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	721.000.000,00	708.713.880,24	98,30	1.716.799.115,43
Belanja Premi Asuransi Tenaga Kerja dan Masyarakat	9.305.118.000,00	7.946.997.600,00	85,40	50.051.653,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.847.886.202,00	2.252.253.754,00	79,09	6.580.559.472,00
Belanja Jasa Service	2.414.425.562,00	1.998.244.604,00	82,76	2.335.918.258,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	51.085.970,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	0,00	0,00	3.946.499.294,00
Belanja Jasa KIR	12.460.000,00	3.300.000,00	26,48	3.535.200,00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	421.000.640,00	250.709.150,00	59,55	243.165.750,00
Belanja Perpanjangan SIM	0,00	0,00	0,00	355.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	3.748.458.990,00	3.104.048.350,00	82,81	4.511.681.398,00
Belanja cetak	2.603.477.500,00	2.251.438.550,00	86,48	3.253.295.618,00
Belanja Penggandaan	1.144.981.490,00	852.609.800,00	74,46	1.258.385.780,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	%	
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.396.925.000,00	1.181.239.323,00	84,56	2.529.729.778,00
Belanja Sewa Gedung/kantor/tempat	1.158.245.000,00	952.760.323,00	82,26	1.942.362.278,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	354.887.500,00
Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang tambat/hangar sarana mobilitas	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Belanja Sewa Tanah	238.680.000,00	228.479.000,00	95,73	230.480.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	100.650.000,00	49.582.000,00	49,26	285.685.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	100.650.000,00	49.582.000,00	49,26	285.685.000,00
Belanja Sewa Alat Berat	21.850.000,00	7.800.000,00	35,70	66.350.000,00
Belanja sewa eskavator	63.850.000,00	0,00	0,00	29.400.000,00
Belanja sewa Buldozer	15.000.000,00	7.800.000,00	52,00	36.950.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	808.971.000,00	432.093.000,00	53,41	1.052.882.500,00
Belanja sewa meja kursi	183.175.000,00	38.467.500,00	21,00	40.502.500,00
Belanja sewa tenda	251.340.000,00	111.477.500,00	44,35	584.323.000,00
Belanja sewa pakaian adat/tradisional	32.750.000,00	13.750.000,00	41,98	94.250.000,00
Belanja sewa bunga	34.256.000,00	13.600.000,00	39,70	32.692.000,00
Belanja sewa peralatan dan perlengkapan pelatihan	160.200.000,00	158.498.000,00	98,94	0,00
Belanja sewa soundsystem dan lighting	72.000.000,00	36.200.000,00	50,28	123.300.000,00
Belanja sewa alat music	24.600.000,00	15.100.000,00	61,38	123.815.000,00
Belanja sewa alat pemusnah obat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	13.000.000,00
Belanja Sewa Rak Collocation Server	45.000.000,00	41.000.000,00	91,11	41.000.000,00
Belanja sewa pakaian khusus	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman	10.660.037.889,00	8.481.946.033,00	79,57	11.993.157.193,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.621.926.000,00	1.486.011.300,00	91,62	1.632.507.800,00
Belanja makanan dan minuman rapat	4.336.178.543,00	3.295.689.046,00	76,00	5.978.952.817,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.378.413.346,00	1.750.895.887,00	73,62	813.749.250,00
Belanja makan minum rumah jabatan	888.000.000,00	877.920.699,00	98,86	659.938.362,00
Belanja makan minum pasien/pendamping pasien	30.000.000,00	3.160.000,00	10,53	6.920.000,00
Belanja makan minum tambahan (PMT)	157.155.000,00	111.929.176,00	71,22	0,00
Belanja makan minum tamu	1.248.365.000,00	956.339.925,00	76,61	2.094.810.464,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan	0,00	0,00	0,00	806.278.500,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	383.000.000,00	367.183.568,00	95,87	787.643.422,00
Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	140.000.000,00	139.398.568,00	99,57	111.139.427,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	%	
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	109.000.000,00	104.700.000,00	96,06	173.530.000,00
Belanja Pakaian sipil Lengkap (PSL)	2.500.000,00	0,00	0,00	126.900.195,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	35.000.000,00	28.785.000,00	82,24	131.913.800,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	54.500.000,00	52.350.000,00	96,06	202.690.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengan Panjang	42.000.000,00	41.950.000,00	99,88	41.470.000,00
Belanja Pakaian Kerja	156.350.000,00	153.158.750,00	97,96	516.307.300,00
Belanja pakaian kerja lapangan	156.350.000,00	153.158.750,00	97,96	516.307.300,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.076.030.000,00	1.028.480.672,00	95,58	2.690.995.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	21.000.000,00	20.800.000,00	99,05	74.450.000,00
Belanja pakaian batik tradisional	70.000.000,00	68.109.971,00	97,30	122.269.900,00
Belanja pakaian olahraga	106.250.000,00	102.931.701,00	96,88	776.552.000,00
Belanja Sarung	0,00	0,00	0,00	66.400.000,00
Belanja pakaian khusus	878.780.000,00	836.639.000,00	95,20	1.651.323.100,00
Belanja Perjalanan Dinas	25.898.550.001,00	22.847.752.121,00	88,22	34.065.445.344,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.830.360.082,00	3.173.671.447,00	82,86	5.427.991.575,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.978.189.919,00	19.674.080.674,00	89,52	27.709.275.941,00
Belanja perjalanan dinas luar negeri	90.000.000,00	0,00	0,00	928.177.828,00
Belanja Pemeliharaan	4.456.696.876,00	3.901.640.419,00	87,55	3.236.764.532,99
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	586.225.200,00	499.900.719,00	85,27	302.789.269,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.656.576.676,00	1.519.538.100,00	91,73	1.185.979.865,98
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	668.000.000,00	609.111.000,00	91,18	480.451.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67	642.600,00
Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor	826.395.000,00	657.118.600,00	79,52	379.715.470,00
Belanja Pemeliharaan Software	18.000.000,00	11.850.000,00	65,83	38.900.000,00
Belanja Pemeliharaan Taman Dalam Kota	150.000.000,00	108.640.000,00	72,43	131.713.000,00
Belanja pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	86.650.000,00	85.543.000,00	98,72	77.330.100,00
Belanja Pemeliharaan Drainase	100.000.000,00	98.801.000,00	98,80	123.480.000,00
Belanja Pembersihan, Pengecatan dan Pemeliharaan Trotoar	195.000.000,00	194.740.000,00	99,87	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	26.850.000,00	1.285.000,00	4,79	9.978.200,00
Belanja Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Umum	140.000.000,00	113.113.000,00	80,80	505.785.028,01
Belanja Jasa Konsultansi	1.545.527.500,00	1.371.908.550,00	88,77	3.644.990.748,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	545.000.000,00	454.310.500,00	83,36	2.312.859.800,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	%	
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	792.685.000,00	770.053.000,00	97,14	1.050.311.948,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	117.842.500,00	114.215.050,00	96,92	180.219.800,00
Belanja Jasa Konsultan Hukum	20.000.000,00	0,00	0,00	74.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Penilai	70.000.000,00	33.330.000,00	47,61	27.099.200,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	34.560.000,00
Belanja beasiswa tugas belajar S2	0,00	0,00	0,00	34.560.000,00
Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.083.650.000,00	610.800.000,00	56,37	2.125.300.000,00
Belanja Uang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.083.650.000,00	610.800.000,00	56,37	2.125.300.000,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.976.323.150,00	1.822.940.303,20	92,24	5.116.356.750,72
Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	1.602.323.150,00	1.499.797.303,20	93,60	3.888.274.110,72
Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	374.000.000,00	323.143.000,00	86,40	1.228.082.640,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	730.154.000,00	575.335.290,00	78,80	1.608.245.300,00
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	329.704.000,00	309.275.290,00	93,80	711.221.300,00
Belanja bimbingan teknis	400.450.000,00	266.060.000,00	66,44	897.024.000,00
Honorarium PNS	10.067.481.906,00	8.572.685.492,00	85,15	3.968.633.326,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.077.530.000,00	821.947.000,00	76,28	1.071.770.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	239.680.000,00	189.020.000,00	78,86	255.010.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.591.971.906,00	6.888.814.892,00	90,74	1.700.375.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Penggantian Transport PNS***	1.158.300.000,00	672.903.600,00	58,09	940.678.326,00
Honorarium Non PNS	70.343.327.054,00	65.580.129.927,00	93,23	18.737.984.612,77
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.936.337.862,00	9.770.592.869,00	89,34	10.301.879.502,77
Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.624.202.476,00	1.580.254.410,00	97,29	1.307.195.606,00
Pengganti transport Non PNS	2.670.482.410,00	2.111.935.200,00	79,08	6.152.586.504,00
Honorarium Panitia Pelaksana Non PNS	682.389.000,00	601.300.800,00	88,12	976.323.000,00
Upah Pegawai Harian	38.927.356.686,00	36.804.667.576,00	94,55	0,00
Belanja Jasa Non Pegawai	15.472.558.620,00	14.681.379.072,00	94,89	0,00
Uang harian/saku peserta	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	38.030.057.987,65	48.088.209.786,00	126,45	43.044.821.022,00
Belanja barang dan jasa BLUD-LRA	0,00	0,00	0,00	43.044.821.022,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	%	
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	37.895.057.987,65	47.977.948.816,00	126,61	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD Dana Bergulir	135.000.000,00	110.260.970,00	81,67	0,00
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	7.559.479.619,00	5.675.172.403,00	75,07	6.147.472.011,00
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	7.559.479.619,00	5.675.172.403,00	75,07	6.147.472.011,00

Lampiran 5 - Belanja Hibah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	%	
Belanja Hibah	3.255.520.000,00	2.887.795.179,00	88,70	5.253.694.572,00
Belanja Hibah Kepada Pemerintah	200.000.000,00	199.200.000,00	99,60	0,00
Belanja hibah kepada Polres Kota Padang Panjang	200.000.000,00	199.200.000,00	99,60	0,00
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	546.170.241,00
Belanja Hibah kepada Kerapatan Adat Nagari Gunung	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Belanja Hibah kepada Kerapatan Adat Nagari Bukit Surungan	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Belanja Hibah kepada Kerapatan Adat Nagari Lareh Nan Panjang	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Belanja Hibah kepada PERHIPTANI	0,00	0,00	0,00	96.170.241,00
BOP PAUD Masyarakat/Swasta	1.467.000.000,00	1.222.575.000,00	83,34	1.233.419.350,00
BOP PAUD Masyarakat/Swasta	1.467.000.000,00	1.222.575.000,00	83,34	1.233.419.350,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Non Profesi	911.620.000,00	829.870.679,00	91,03	2.406.217.981,00
Belanja Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Padang Panjang	180.000.000,00	179.780.750,00	99,88	98.996.400,00
Belanja Hibah kepada PRAMUKA Padang Panjang	150.000.000,00	124.613.137,00	83,08	325.496.500,00
Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Padang Panjang - LRA	500.000.000,00	443.856.792,00	88,77	1.724.612.581,00
Belanja Hibah kepada KNPI	0,00	0,00	0,00	257.112.500,00
Belanja Hibah Kepada Panti Aisyiah Kota Padang Panjang	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Kepada PEPABRI	36.620.000,00	36.620.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Bidang Keagamaan	387.400.000,00	346.649.500,00	89,48	653.887.000,00
Belanja Hibah kepada Masjid Nurul Hidayah Silaing Bawah Padang Panjang	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Hibah kepada Masjid Zuama' Pasar Usang Padang Panjang	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Hibah kepada Masjid Ilham Koto Panjang Padang Panjang	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Hibah kepada Masjid Taqwa Muhammadiyah Kauman Padang Panjang	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Belanja Hibah kepada Masjid Raya	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00

Jihad Balai-Balai Padang Panjang				
Belanja Hibah kepada Masjid Nurul Ihsan Kampung Manggis Padang Panjang	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Hibah kepada Masjid Hidayah Guguk Malintang Padang Panjang	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Hibah kepada Masjid Baiturrahman Bukit Surungan Padang Panjang	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Hibah kepada Mushalla Nurul Yaqin Koto Panjang Padang Panjang	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Hibah kepada Mushalla MTsN Ngalau Padang Panjang	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Hibah kepada Mushalla Nurul Iman Gantiang Padang Panjang	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Hibah kepada Mushalla Muhajirin Ngalau Padang Panjang	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Hibah kepada Mushalla Surau Ladang Silaing Bawah Padang Panjang	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Hibah kepada Mushalla Nurussalam Gantiang Padang Panjang	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Hibah kepada BAZNAS	167.400.000,00	166.649.500,00	99,55	177.000.000,00
Belanja Hibah kepada MUI Padang Panjang	0,00	0,00	0,00	118.100.000,00
Belanja Hibah kepada Masjid Nurul Yaqin Kampung Manggis	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Belanja Hibah kepada Mushalla Nurul Hidayah Kampung Manggis	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Hibah kepada ICMI Kota Padang Panjang	0,00	0,00	0,00	23.787.000,00
Belanja Hibah kepada Mesjid Syatariyah Padang Panjang	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Mesjid Baitul Hikmah Padang Panjang	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Mesjid Nurul Hidayah Padang Panjang	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Kepada Mesjid Uswatun Hasanah Padang Panjang	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Kepada Mesjid Taqwa Padang Panjang	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Kepada Mesjid Nurul Iman Padang Panjang	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Kepada Mesjid Nurul Huda Padang Panjang	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Kepada Mesjid Hidayatussalam Padang Panjang	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Kepada Mushalla Nurul Falah Padang Panjang	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00

Belanja Hibah Kepada Mushalla Nurul Yaqin Kelurahan Pasar Usang	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Mushalla Ukhuwah Islamiah Kelurahan Koto Panjang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Kepada Mushalla Husnul Khatimah Koto Panjang	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Kepada Mushalla Nurut Taqwa Jambu Kelurahan Ekor Lubuk	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Kepada Mushalla Al Ikhlas Kelurahan Pasar Usang	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
Belanja Hibah kepada SD Muhammadiyah	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Belanja Hibah kepada SDIT Juara	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Belanja Hibah kepada PAUD Muhamad Syarif	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	289.500.000,00	289.500.000,00	100,00	234.000.000,00
BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.	289.500.000,00	289.500.000,00	100,00	234.000.000,00
JUMLAH	3.255.520.000,00	2.887.795.179,00	88,70	5.253.694.572,00

Lampiran 6 – Rincian Sisa Piutang Pajak Restoran TA 2014 dan 2015

Rincian sisa piutang pajak restoran yang berasal dari tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Wajib Pajak	Nilai Piutang Pajak Tahun 2014	Nilai Piutang Pajak Tahun 2015
1	Rm. Gumarang	0,00	1.450.000,00
2	Bofet Gumarang	2.100.000,00	1.250.000,00
3	RM. Singgalang	300.000,00	125.000,00
4	RM. Delima	0,00	2.000.000,00
5	Bofet Sate Mak Syukur	350.000,00	1.200.000,00
6	RM. Ngalau	5.000,00	750.000,00
7	RM. Pak Sidi	0,00	150.000,00
8	Miso Mas Amin	0,00	750.000,00
9	Bofet ACC	0,00	100.000,00
10	Ampera Len	70.000,00	140.000,00
11	RM. Rahmi	0,00	50.000,00
12	Ampera Wan Katik	0,00	50.000,00
13	Ampera Wan TJ	0,00	50.000,00
14	Kafe Armes	0,00	40.000,00
15	Miso Pak De	100.000,00	200.000,00
16	Warung Tek Jora	0,00	180.000,00
17	Soto Laris	105.000,00	35.000,00
18	Warkop Fajar	140.000,00	140.000,00
19	Warkop Soleram	110.000,00	165.000,00
20	Ampera Yeni (Belk. KPN)	80.000,00	75.000,00
21	Ampera Bunda	0,00	70.000,00
22	Ampera Florida	0,00	10.000,00
23	Bofet Telaga Biru	0,00	10.000,00
24	Warkop Dahniar	0,00	10.000,00
25	Warung Nasi Simpang Monas	0,00	40.000,00
26	Warung Kopi Ana	0,00	20.000,00
27	Warung Ketupat Pitalah Zulniati	15.000,00	30.000,00
28	Ampera Tanpa Nama	235.000,00	40.000,00
29	Soto Laris H. Nurlena	60.000,00	45.000,00
30	Soto Mak Kayo	0,00	40.000,00
31	Pical Hj. Neng	0,00	25.000,00
32	Ayam Penyet Jon	0,00	120.000,00
33	Bakmi Jakarta	0,00	300.000,00
34	Martabak Mesir Apuak	150.000,00	600.000,00
35	Ampera Yen	0,00	100.000,00
36	Lesehan Bambu Pajok	50.000,00	50.000,00
37	RM. Pak Datuk	1.023.700,00	0,00
38	Sup Buntut	300.000,00	0,00
39	Warung Miso H. Muslim	12.500,00	0,00
40	Sate Ajo Minik	150.000,00	0,00
41	Pangsit Sutrisno	90.000,00	0,00
42	Ampera Bustami	255.000,00	0,00
43	Ampera Mak Katik	10.000,00	0,00
44	Ampera Yemaboti	200.000,00	0,00
45	Ampera Samba Lado Tanak	490.000,00	0,00
46	RM. Rinai	2.400.000,00	0,00
47	Bofet Kubang Fantasi	320.000,00	0,00
48	Kantin Jon A	450.000,00	0,00
49	Warkop Arifin Sidi Batuah	5.000,00	0,00
50	Warkop ABC	0,00	125.000,00
	Jumlah	9.576.200,00	10.535.000,00

Lampiran 7 – Rincian Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Dinas Pertanian

Lampiran 7.1 – Rincian Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Dinas Pertanian Tahun 2016

No	Peternak	Alamat	No Telinga	Tanggal	Total	Bayar	Sisa	Keterangan
1	Syahrizal	Sigando	0903	19-05-2016	7.000.000,00	6.200.000,00	800.000,00	
2	Suryadi Agus	Silaing Bawah	0252	10-07-2016	10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	
3	Martunis/Almunir	Ganting	0265	07-09-2016	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
Jumlah					27.000.000,00	22.200.000,00	4.800.000,00	

Lampiran 7.2 – Rincian Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Dinas Pertanian Tahun 2017

No	Peternak	Alamat	No Telinga	Tanggal	Total	Bayar	Sisa	Keterangan
1	Remedi	Ngalau	0311	13-04-2017	8.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	
2	Suryadi Agus	Silaing Bawah	0183	20-04-2017	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
3	Saharman – dibeli dari Suryadi Agus	Ganting	0028	20-04-2017	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
4	Yunizar	Koto Panjang	0338/0107/0117	15-09-2017	8.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	
5	Yusrianto	Silaing Bawah	0143/0006	28-09-2017	8.000.000,00	2.250.000,00	5.750.000,00	
6	Yusrianto	Silaing Bawah	0190/0106/0114	29-09-2019	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
7	Puskeswan – dibeli dari Eko Setiawan	Silaing Bawah	0035/0081/0110	18-10-2017	8.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	
JUMLAH					56.000000,00	25.250.000,00	30.750.000,00	

Lampiran 7.3 – Rincian Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Dinas Pertanian Tahun 2018

No	Peternak	Alamat	No Telinga	Tanggal	Total	Bayar	Sisa	Keterangan
1	Saharman	Ganting	0333/0059/0012/0097	05-01-2018	8.000.000,00	2.100.000,00	5.900.000,00	
2	Amjas	Kampung Manggis	0188/0126	08-02-2018	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3	Eko Setiawan	Koto Katik	0034	13-02-2018	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	
JUMLAH					24.000.000,00	13.100.000,00	10.900.000,00	

Lampiran 7.4 – Rincian Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Dinas Pertanian Tahun 2019

No	Peternak	Alamat	No Telinga	Tanggal	Total	Bayar	Sisa	Keterangan
1	Amjas	Kampung Manggis	0122/0177	10-07-2019	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
2	Eko Setiawan	Koto Katik	0112	16-08-2019	8.000.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00	
3	Eko Setiawan	Koto Katik	0055/0174	16-08-2019	8.000.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00	
4	Suryadi Agus	Silaing Bawah	0130/0175	22-08-2019	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
5	Suryadi Agus	Silaing Bawah	0054/0172	22-08-2019	8.000.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00	
6	Suryadi Agus	Silaing Bawah	0045	22-08-2019	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
7	Suryadi Agus	Silaing Bawah	0129/0170	30-08-2019	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
8	Pakiah Tumamat	Bukit Surungan	0184/0446	25-10-2019	8.000.000,00	5.100.000,00	2.900.000,00	
9	Syafnir	Ganting	0105/0456	28-10-2019	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
10	Ridwansyah	Ganting	0127/0454	30-10-2019	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
11	Ridwansyah	Ganting	0402/0303	30-10-2019	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
12	Amjas	Kampung Manggis	0136/0451	30-10-2019	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
13	Raffles	Kampung Manggis	0108/0459	12-11-2019	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
14	Raffles	Kampung Manggis	0080/0179	12-11-2019	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
15	Saharman	Ganting	0120/0458/000273	02-12-2019	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
16	Mulyanis	Ganting	0401/0460/000264	18-12-2019	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
JUMLAH					128.000.000,00	60.600.000,00	67.400.000,00	

Lampiran 7.5 – Rincian Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Dinas Pertanian Tahun 2020

No	Peternak	Alamat	No Telinga	Tanggal	Total	Bayar	Sisa	Keterangan
1	Yunizar	Koto Panjang	0198/0440/000274	03-01-2020	8.000.000,00	7.500.000,00	500.000,00	
2	Eko Setiawan	Koto Katik	0301/000267	09-01-2020	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
3	Syafrizal	Ganting	0149/0448/000269	20-01-2020	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
4	Deslia Sulastris	Ganting	0123/000272	10-02-2020	8.000.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00	
5	Deslia Sulastris	Ganting	0419/0439/000262	10-02-2020	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
JUMLAH					40.000.000,00	16.000.000,00	24.000.000,00	

Lampiran 8 – Rincian Persediaan

Lampiran 8.1. Persediaan Alat Tulis Kantor

No.	SKPD	Tahun 2020 (RP)	Tahun 2019 (RP)
1	Dinas pendidikan	182.439.542,00	102.668.368,00
2	Dinas Kesehatan	8.069.527,85	13.410.231,56
3	RSUD	33.253.500,00	24.577.070,00
4	Dinas PUPR	1.608.000,00	3.768.000,00
5	Dinas Perkim LH	2.203.000,00	2.183.000,00
6	Satpol PP dan Damkar	1.855.000,00	5.097.500,00
7	Dinas Sosial	-	-
8	Dinas Pangan dan Pertanian	3.954.300,00	8.001.950,00
9	Disduk Capil	44.560.100,00	83.177.300,00
10	Dinas Perhubungan	2.322.000,00	556.000,00
11	Dinas Kominfo	209.000,00	429.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6.241.500,00	9.677.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	451.200,00	357.500,00
14	Dinas Pariwisata	1.606.800,00	5.384.000,00
15	Dinas Perdagkop dan UKM	1.931.000,00	6.016.000,00
16	Inspektorat Daerah	7.139.500,00	7.200.500,00
17	BAPPEDA	2.511.650,00	2.147.000,00
18	BPKD	5.217.000,00	4.402.000,00
19	BKPSDM	15.303.400,00	17.190.600,00
20	Sekretariat Daerah	0,00	1.405.990,00
21	Sekretariat DPRD	8.359.000,00	2.768.000,00
22	Kec. PP Timur	6.114.500,00	4.417.625,00
23	Kec. PP Barat	3.054.180,00	6.013.900,00
24	BPBD Kesbang Pol	760.000,00	495.000,00
Total		339.163.699,85	311.343.534,56

Lampiran 8.2. Persediaan Barang Cetak

No.	SKPD	Tahun 2020 (RP)	Tahun 2019 (RP)
1	Dinas pendidikan	9.281.000,00	4.544.000,00
2	Dinas Kesehatan	6.022.500,00	5.410.000,00
3	RSUD	148.379.500,00	22.549.742,00
4	Dinas PUPR	345.000,00	775.000,00
5	Dinas Perkim LH	136.500,00	1.140.000,00
6	Satpol PP dan Damkar	1.740.000,00	2.520.000,00
7	Dinas Sosial	-	-
8	Dinas Pangan dan Pertanian	11.959.500,00	21.645.000,00
9	Disduk Capil	24.849.650,00	109.981.575,00
10	Dinas Perhubungan	19.113.000,00	555.000,00
11	Dinas Kominfo	774.000,00	650.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.430.000,00	4.120.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-	-
14	Dinas Pariwisata	-	-
15	Dinas Perdagkop dan UKM	2.965.000,00	5.335.000,00
16	Inspektorat Daerah	4.035.000,00	3.340.000,00
17	BAPPEDA	1.740.000,00	935.000,00
18	BPKD	57.476.538,00	11.308.000,00
19	BKPSDM	3.357.000,00	4.228.500,00
20	Sekretariat Daerah	2.500.500,00	786.800,00
21	Sekretariat DPRD	9.845.380,00	2.148.000,00
22	Kec. PP Timur	0,00	1.500.000,00
23	Kec. PP Barat	794.000,00	573.000,00
24	BPBD Kesbang Pol	2.783.700,00	3.151.200,00
Total		317.527.768,00	207.195.817,00

Lampiran 8.3. Persediaan Peralatan Kebersihan

No.	SKPD	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Dinas pendidikan	113.500.450,00	23.828.572,00
2	Dinas Kesehatan	5.215.722,18	4.532.977,96
3	RSUD	43.964.164,00	-
4	Dinas PUPR	24.650.000,00	9.914.500,00
5	Dinas Perkim LH	15.471.500,00	1.658.500,00
6	Satpol PP dan Damkar	1.976.000,00	2.241.000,00
7	Dinas Sosial	0,00	6.205.000,00
8	Dinas Pangan dan Pertanian	11.671.500,00	13.889.200,00
9	Disduk Capil	3.902.500,00	996.000,00
10	Dinas Perhubungan	1.273.500,00	360.000,00
11	Dinas Kominfo	218.500,00	315.500,00
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.540.000,00	1.768.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	210.000,00	109.000,00
14	Dinas Pariwisata	2.917.500,00	4.414.300,00
15	Dinas Perdagkop dan UKM	1.095.500,00	5.658.900,00
16	Inspektorat Daerah	291.000,00	2.716.000,00
17	BAPPEDA	2.583.500,00	1.260.000,00
18	BPKD	728.500,00	255.000,00
19	BKPSDM	4.017.000,00	5.659.100,00
20	Sekretariat Daerah	-	-
21	Sekretariat DPRD	1.145.500,00	1.032.000,00
22	Kec. PP Timur	755.000,00	3.526.500,00
23	Kec. PP Barat	584.500,00	417.000,00
24	BPBD Kesbang Pol	5.774.500,00	1.718.000,00
Total		243.486.336,18	92.475.049,96

Lampiran 8.4. Persediaan Alat Listrik dan Elektronik

No.	SKPD	Tahun 2020 (RP)	Tahun 2019 (RP)
1	Dinas pendidikan	26.143.416,00	14.384.190,00
2	Dinas Kesehatan	6.972.214,40	3.840.694,52
3	RSUD	0,00	41.313.750,00
4	Dinas PUPR	340.174.440,00	34.971.750,00
5	Dinas Perkim LH	3.138.000,00	2.927.000,00
6	Satpol PP dan Damkar	3.160.000,00	4.579.000,00
7	Dinas Sosial	-	-
8	Dinas Pangan dan Pertanian	6.454.000,00	3.735.500,00
9	Disduk Capil	2.956.000,00	2.412.000,00
10	Dinas Perhubungan	1.932.000,00	1.557.000,00
11	Dinas Kominfo	618.850,00	1.026.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.459.350,00	3.006.150,00
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-	-
14	Dinas Pariwisata	2.451.000,00	3.564.000,00
15	Dinas Perdagkop dan UKM	3.197.500,00	2.582.000,00
16	Inspektorat Daerah	4.444.500,00	3.032.000,00
17	BAPPEDA	4.817.000,00	245.000,00
18	BPKD	-	-
19	BKPSDM	5.030.500,00	5.427.000,00
20	Sekretariat Daerah	-	-
21	Sekretariat DPRD	380.000,00	-
22	Kec. PP Timur	1.220.875,00	3.976.500,00
23	Kec. PP Barat	814.750,00	334.750,00
24	BPBD Kesbang Pol	1.785.500,00	2.953.500,00
Total		418.149.895,40	135.867.784,52

Lampiran 8.5. Persediaan Peralatan Perbenihan

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Harga	Jumlah
1	Serok 10 cm	unit	4	6,000.00	24.000,00
2	Serok 15 cm	unit	2	6,000.00	12.000,00
3	Serok 30 cm	unit	-	18,000.00	-
4	Resun LP-100	kg	1	2,160,000.00	2,160,000.00
5	L Slang	buah	87	1,500.00	130.500.00
6	Galon Penetasan Artemia	buah	1	60,000.00	60,000.00
7	Pipa PVC 3/4 inchi	batang	-	26,000.00	-
8	Pipa PVC 1 Inchi	batang	13	28,500.00	370.500,00
9	Stop Kran 3/4	buah	9	14,800.00	133.200,00
10	Tee 3/4	buah	43	9,000.00	387.000,00
11	Tee 1 Rucika	buah	10	9,000.00	90,000.00
12	Arang Aktif	kg	8	18,000.00	144,000.00
13	Waring ukuran 3x4	unit	2	540,000.00	1,080,000.00
14	Ember sedang	buah	1	17,000.00	17.000,00
15	Happa 2x1	buah	4	260,000.00	1.040.000.00
		Total			5.648.200,00

Lampiran 8.6. Persediaan Bahan Bibit Ternak

No.	Jenis Persediaan	Satuan	Unit	Harga Satuan	Jumlah
1	UPTD BBI				
	Benih Calin Nila	Ekor	-	568,00	-
	Induk Ikan Mas	Kg	63	125,000.00	7.875,000.00
	Nila Sultana	Ekor	1.000	30.000.00	30.000,000.00
	Mas Betina	Kg	10	249,500.00	2.495,000.00
	Mas Jantan	Kg	30	249,000.00	7.470,000.00
	Embrio Transfer Jenis FH	Dosis	7	810,000.00	5,670,000.00
	Ikan Arwana Super Red	Ekor	4	6,500,000.00	26,000,000.00
	Ikan Arwana Golden Red	Ekor	4	2,145,000.00	8,580,000.00
	Ikan Koi	Ekor	27	34,000.00	918,000.00
	Ikan Koki (strain oranda)	Ekor	-	45,000.00	-
	Ikan Koki (strain blackmore)	Ekor	-	65,000.00	-
	Calin Ikan Lele Betina	Ekor	10	86,000.00	860.000,00
	Calin Ikan Lele Jantan	Ekor	10	86,000.00	860.000.00
	Benih Ikan Gurame	Ekor	-	3,600.00	-
	Limosin	Dosis	-	6,300.00	-
	Brahman	Dosis	-	6,300.00	-
	Kerbau (Alek Jr.)	Dosis	11	7,000.00	77.000,00
	Total				90.805.000,00

Lampiran 8.7. Persediaan Bahan Bibit Tanaman

No.	Jenis Persediaan	Satuan	Unit	Harga	Jumlah
I.	Dinas Pangan dan Pertanian				
	HandWrapping	buah	2	1.800.000,00	3.600.000,00
	Oasis	kotak	16	172.000,00	2.752.000,00
	Pengikat bunga	buah	30	23.000,00	690.000,00
	Plastik wrap	kotak	750	15.000,00	11.250.000,00
	Sterofom	pak	30	175.000,00	5.250.000,00
	Suplir	pot	80	5.150,00	412.000,00
	Cemara Salju	pot	30	5.150,00	154.500,00
	Bambu Cina	pot	30	41.200,00	1.236.000,00
	Asoka	pot	-	-	-
	Melati	pot	10	6.100,00	61.000,00
	Melati Costa	pot	-	7.100,00	-
	Amarilis	pot	15	10.150,00	152.250,00
	Azalea	pot	15	25.375,00	380.625,00
	Putri Salju	pot	-	25.375,00	-
	Kalla Lili	pot	-	15.200,00	-
	Bakung Lili	pot	20	25.400,00	508.000,00
	Spatifilium Hijau	pot	15	10.150,00	152.250,00
	Hortensia	pot	15	45.675,00	685.125,00
	Mulsa Plastik Hitam Perak	bal	18	438.900,00	7.900.200,00
	Polibag	kg	450	22.000,00	9.900.000,00
	Lee kuan u	polibag	70	12.725,00	890.750,00
	Cemara Eleven	polibag	9	25.400,00	228.600,00
	Pitalum ungu	pot	3	101.550,00	304.650,00
	Rumput kucai mini	polibag	120	5.100,00	612.000,00
	Krokot putih	polibag	-	5.100,00	-
	Marantha	pot	20	15.300,00	306.000,00
	Miania	polibag	40	5.100,00	204.000,00
	Anggrek dendrobium premium	pot	7	122.000,00	854.000,00
	Anggrek dendrobium belum bunga	pot	4	76.150,00	304.600,00
	Anggrek dendrobium berbunga	pot	2	50.775,00	101.550,00
	Anggrek dendrobium belum berbunga	pot	4	33.000,00	132.000,00
	Dracena florida beauty	polibag	10	10.175,00	101.750,00
	Tricolour	polibag	10	25.400,00	254.000,00
	Cemara embun tinggi 25 cm	polibag	15	12.250,00	163.750,00
	Cemara embun tinggi 15 cm	polibag	5	5.100,00	25.500,00
	Total Dinas Pangan dan Pertanian				49.587.100,00
II.	Bibit Tanaman Dinas PUPR				
	Cemara udang	batang	13	440.000,00	5.720.000,00
	Kupu-kupu	batang	20	302.500,00	6.050.000,00
	Tabebuaya pink	batang	50	275.000,00	13.750.000,00

	Asam jawa	batang	20	275.000,00	5.500.000,00
	Palem bismark	batang	2	935.000,00	1.870.000,00
	Pinang	batang	25	93.500,00	2.337.500,00
	Palem merah	batang	10	165.000,00	1.650.000,00
	Agave kuning	batang	24	82.500,00	1.980.000,00
	Agave siklok hijau	batang	25	38.500,00	962.500,00
	Bromelia giant	batang	5	88.000,00	440.000,00
	Melati kuning	plbg	300	5.500,00	1.650.000,00
	Ararea kuninh	plbg	300	3.080,00	924.000,00
	Sambang dara	plbg	400	5.500,00	2.200.000,00
	Kaliandra	batang	20	38.500,00	770.000,00
	Palam bromeri	batang	4	440.000,00	1.760.000,00
	Beringin kupu-kupu	plbg	30	44.000,00	1.320.000,00
	Rosanra	plbg	12	7.700,00	92.400,00
	Total Bibit Tanaman Dinas PUPR				48.976.400,00
	Total Persediaan Bibit Tanaman				98.563.500,00

Lampiran 8.8. Persediaan Obat-Obatan

No.	SKPD	2020 (RP)	2019 (RP)
1	Dinas Pendidikan	22.946.850,00	5.560.750.00
2	Dinas Kesehatan	716.694.915,44	656.021.756,42
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.241.460.889,00	3.443.633.104,00
4	Dinas Pangan dan Pertanian	126.443.400,00	139.742.800.00
5	Dinas Perdagkop dan UKM	605.000,00	400.000.00
	Total	3.108.151.054,44	4.245.358.410,42

Lampiran 8.9. Persediaan Alat Percontohan

No.	Nama Barang	Satuan	Unit	Harga	Jumlah
Dinas Pangan dan Pertanian					
1	Pakis cincang	karung	5	112.000,00	560.000,00
2	Mos Impor	kg	3	223.000,00	669.000,00
3	Mos lokal	kg	2	201.000,00	402.000,00
4	Arang	karung	-	111.000,00	-
5	Pot Anggrek diameter 15cm	bh	-	7.500,00	-
6	Pot Anggrek diameter 17cm	bh	-	5.000,00	-
7	Pot putih fleksibel besar	bh	-	1.250,00	-
8	Pot putih fleksibel kecil	bh	-	900,00	-
9	Pot Tray besar	bh	-	43.000,00	-
10	Pot Tray Kecil	bh	-	37.000,00	-
11	Vitamin B1	btl	-	154.000,00	-
12	Dekastar	ktk	-	55.500,00	-
13	Pupuk hantu	btl	-	154.000,00	-
14	Earteg	bh	-	12.000,00	-
15	Sarung Tangan Handling Kucing	psg	-	600.000,00	-
16	Water Terkit	bh	2	310.000,00	620.000,00
17	Ember	bh	3	40.000,00	120.000,00
18	Grading	bh	7	110.000,00	770.000,00
19	Terpal 3x4 m	bh	-	123.500,00	-
20	Terpal 4x6 m	bh	1	235.500,00	235.500,00
21	Baskom	bh	1	45.000,00	45.000,00
22	Polybag diameter 10 cm	kg	12	28.000,00	336.000,00
23	Sepatu boot AP	psg	3	98.150,00	-
24	Gunting bunga	bh	3	49.100,00	-
25	Sekop besar	bh	2	54.550,00	-
26	Gembok uk 40 mm	bh	4	30.550,00	-
27	Bangku kecil petak	bh	3	10.000,00	-
28	Bangku kecil bulat	bh	3	20.000,00	-
29	Sapu Plastik Biasa	bh	2	25.000,00	-
30	Pot plastik	lsn	2	90.000,00	-
31	Selang Aerasi	rol	3	156.250,00	468.750,00
32	Batu Aerasi	bh	150	3.750,00	562.500,00
33	T Slang	bh	100	2.500,00	250.000,00
34	L Slang	bh	87	2.500,00	217.500,00
35	Pipa ½ inchi	btg	1	37.500,00	37.000,00
36	Pipa ¾ inchi	btg	-	56.250,00	-
37	Pipa 1 inchi	btg	6	93.750,00	562.500,00
38	Pipa 2 inchi	btg	5	156.250,00	781.250,00
39	Happa hijau	unit	8	500.625,00	4.005.000,00

No.	Nama Barang	Satuan	Unit	Harga	Jumlah
40	Corong penetasan larva	unit	6	685.000,00	4.110.000,00
41	Pompa Air Celup	unit	1	1.225.000,00	1.225.000,00
42	Grading	unit	5	112.500,00	562.500,00
43	Happa Waring Hitam	unit	3	562.500,00	1.687.500,00
44	Baskom	bh	8	112.500,00	900.000,00
45	Ember	bh	7	100.000,00	700.000,00
46	Seser Induk	unit	1	87.500,00	87.500,00
47	Seser Anak	unit	4	56.250,00	225.000,00
48	Planktonet	unit	6	31.250,00	187.500,00
49	Happa Waring Halus	unit	4	525.000,00	2.100.000,00
50	Corong Artemia	unit	4	687.500,00	2.750.000,00
51	Heater Aquarium	unit	4	125.000,00	500.000,00
52	Drum Plastik	unit	10	312.500,00	3.125.000,00
53	Seser Anak	unit	5	55.000,00	275.000,00
54	Seser Larva	unit	3	55.000,00	165.000,00
55	Seser Induk	unit	3	85.000,00	255.000,00
56	Ember Menengah	bh	-	80.000,00	-
57	Ember Kecil	bh	-	50.000,00	-
58	Sarung Tangan	lusin	-	40.000,00	-
59	Grading	bh	9	90.000,00	810.000,00
60	Batu karang jahe	bgks	7	20.000,00	140.000,00
61	Bioball	Bh	100	2.000,00	200.000,00
62	Pembersih aquarium	bh	-	150.000,00	-
63	Filter aquarium	unit	-	75.000,00	-
64	Plastik pe 60x60	kg	2	22.500,00	45.000,00
65	Anggrek botol sub kultur 2	botol	15	50.800,00	762.000,00
66	Anggrek botol sub kultur 1	botol	5	101.500,00	507.500,00
67	Kertas lakmus	pak	1	265.000,00	265.000,00
68	Sabun pencuci alat	buah	8	20.000,00	160.000,00
69	Pembersih lantai	buah	8	15.600,00	124.800,00
70	Tissue	kg	16	39.100,00	625.600,00
71	Aluminium foil	gulung	15	31.300,00	469.500,00
72	Lampu UV	buah	2	200.000,00	400.000,00
73	Benih buncis	bungkus	30	28.000,00	840.000,00
74	Benih baby pokcoy	bungkus	30	28.000,00	840.000,00
75	Benih kangkung	bungkus	30	28.000,00	840.000,00
76	Benih terung	bungkus	30	28.000,00	840.000,00
77	Benih Selada Hijau	bungkus	30	28.000,00	840.000,00
78	Hand Sprayer	buah	6	195.000,00	1.170.000,00
79	Gembor	buah	6	55.000,00	330.000,00
80	Pestisida nabati	botol	10	100.500,00	1.005.000,00

No.	Nama Barang	Satuan	Unit	Harga	Jumlah
81	Sarung tangan kain	pasang	24	5.600,00	134.400,00
82	Pupuk organic eko farmimg	paket	4	2.457.000,00	9.828.000,00
83	Biang tricoderma	paket	7	70.000,00	490.000,00
84	Plastik Pe 30x45x10	kg	15	26.500,00	397.500,00
85	Karung plastic 30 kg	kodi	15	23.000,00	345.000,00
86	Plastik pe 45x75	kg	15	25.000,00	375.000,00
87	Karung plastic 50 kg	kodi	10	53.000,00	530.000,00
88	Mesin jahit karung	buah	1	750.000,00	750.000,00
89	Vacum sealer	buah	2	577.300,00	1.154.600,00
90	Kantung palstik uk 28	kg	20	50.250,00	1.005.000,00
91	Kantung palstik uk 35	kg	20	50.250,00	1.005.000,00
92	Kantung palstik uk 55	kg	20	50.250,00	1.005.000,00
93	Goodie bag kuning uk 25x35	pcs	1.000	3.900,00	3.900.000,00
94	Goodie bag merah uk 30x40	pcs	1.000	4.800,00	4.800.000,00
95	Goodie bag biru uk 38x45	pcs	1.000	5.600,00	5.600.000,00
96	Gerobak artco	buah	2	500.000,00	1.000.000,00
97	Karung plastic transparan 35x55	bal	1.000	2.569,00	2.568.550,00
98	Karung plastic transparan 40x70	bal	1.000	3.127,00	3.126.900,00
99	Karung plastic tebal 60x100	bal	1.000	5.305,00	5.304.600,00
100	Timbangan duduk digital	unit	1	2.396.500,00	2.396.500,00
101	Keranjang plastic rotan	pcs	63	35.000,00	2.205.000,00
102	Keranjang 18,5 liter	pcs	7	186.000,00	1.302.000,00
103	Keranjang ukuran 44,7x32,2x15,2	pcs	21	115.000,00	2.415.000,00
104	Box container ct 95	buah	5	150.800,00	754.000,00
105	Box container ct 125	buah	15	184.300,00	2.764.500,00
106	Box container ct 75	buah	10	122.850,00	1.228.500,00
107	Keranjang pasca panen	buah	20	156.500,00	3.130.000,00
108	Timbangan duduk manual	unit	2	1.228.000,00	2.456.000,00
109	Terpal 6x8 m	buah	2	408.000,00	816.000,00
1110	Terpal 4x6 m	buah	2	204.000,00	408.000,00
Nilai Total Persediaan Dinas Pangan dan Pertanian					104.995.950,00
Dinas Perkim LH					
1	Masker earloop	box	3	100.000,00	300.000,00
2	Masker hijab	box	7	100.000,00	700.000,00
3	Hand scoon non steril S	box	7	135.450,00	948.150,00
4	Hand scoon non steril M	box	3	135.450,00	406.350,00
5	Sulfiric Acid 95-97% 2,5 ltr	botol	3	560.000,00	1.680.000,00
6	Mercury sulfate 250 gr	botol	1	2.860.000,00	2.860.000,00
7	Exstran MA 02 Neutral 2,5 L	botol	1	812.000,00	812.000,00
8	Alkohol 70% 1 ltr	botol	10	50.000,00	500.000,00

No.	Nama Barang	Satuan	Unit	Harga	Jumlah
9	Iron (III) hioride hexahydrate emsure@250	botol	1	1.413.900,00	1.413.900,00
10	Potassium hydrogen phthalate Gr @250 gr	botol	1	1.087.200,00	1.087.200,00
Nilai Total Persediaan Dinas Perkim LH					10.707.600,00
Dinas Pendidikan					
1	Bangun ruang	set	3	350.000,00	1.050.000,00
2	Bangun datar	set	3	75.000,00	225.000,00
3	Magnet	set	3	105.000,00	315.000,00
4	Rangkaian listrik	buah	20	23.000,00	460.000,00
5	Peredaran darah	set	1	600.000,00	600.000,00
6	Gambar presiden dan Wakil	set	10	35.000,00	350.000,00
7	Bendera marawa	buah	4	100.000,00	400.000,00
8	Bendera merah putih	buah	18	50.000,00	900.000,00
9	Salempang upacara	buah	20	82.500,00	1.650.000,00
10	Peci hitam	buah	20	38.500,00	770.000,00
11	Sarung tangan petugas upacara	buah	11	8.800,00	96.800,00
Nilai Total Persediaan Dinas Pendidikan					6.816.800,00
Nilai Total Persediaan					122.520.350,00

Lampiran 8.10. Persediaan Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

No.	Nama Barang	Satuan	Unit	Harga	Jumlah
1	Kantong Jinjing	Buah	900	24,000.00	21.600,000.00
2	SPAM Koto Panjang	Unit	1	872.859.000,00	872.859.000,00
	Nilai Total Persediaan				894.459.000.00

Lampiran 8.11. Persediaan Benda Pos (Perangko/Materai)

No.	SKPD	2020 (RP)	2019 (RP)
1	Dinas Pendidikan	5.751.000,00	3.330.000,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	150.000,00
3	RSUD	600.000,00	525.000,00
4	Dinas PUPR	-	-
5	Dinas Perkim LH	135.000,00	-
6	Satpol PP dan Damkar	846.000,00	690.000,00
7	Dinas Sosial	-	-
8	Dinas Pangan dan Pertanian	-	-
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	696.000,00
10	Dinas Perhubungan	267.000,00	66.000,00
11	Dinas Kominfo	-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	360.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-	-
14	Dinas Pariwisata	-	-
15	Dinas Perdagkop dan UKM	60.000,00	915.000,00
16	Inspektorat Daerah	-	-
17	Bappeda	-	-
18	BPKD	-	-
19	BKPSDM	1.584.000,00	936.000,00
20	Sekretariat Daerah	525.000,00	3.009.000,00
21	Sekretariat DPRD	801.000,00	1.410.000,00
22	Kec.PP Timur	-	-
23	Kec.PP Barat	450.000,00	236.500,00
24	BPBD Kesbang Pol	-	-
	Total	11.019.000,00	12.323.500,00

Lampiran 8.12. Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

No.	SKPD	Tahun 2020 (RP)	Tahun 2019 (RP)
1	Dinas pendidikan	10.358.550,00	20.152.500,00
2	Dinas Kesehatan	2.127.350,00	7.169.800,00
3	RSUD	11.147.900,00	13.862.250,00
4	Dinas PUPR	13.726.000,00	13.394.750,00
5	Dinas Perkim LH	13.983.750,00	-
6	Satpol PP dan Damkar	39.766.500,00	36.604.800,00
7	Dinas Sosial	-	-
8	Dinas Pangan dan Pertanian	40.554.150,00	49.470.650,00
9	Disduk Capil	7.685.150,00	3.681.650,00
10	Dinas Perhubungan	9.038.500,00	6.343.200,00
11	Dinas Kominfo	-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.606.200,00	4.788.500,00
14	Dinas Pariwisata	2.158.750,00	-
15	Dinas Perdagkop dan UKM	5.929.750,00	13.021.750,00
16	Inspektorat Daerah	2.651.900,00	3.812.100,00
17	BAPPEDA	4.325.350,00	5.188.850,00
18	BPKD	6.476.250,00	-
19	BKPSDM	97.000,00	23.550,00
20	Sekretariat Daerah	49.472.950,00	61.686.800,00
21	Sekretariat DPRD	2.143.000,00	-
22	Kec. PP Timur	-	-
23	Kec. PP Barat	-	-
24	BPBD Kesbang Pol	56.550,00	247.550,00
Total		224.305.550,00	239.448.700,00

Lampiran 8.13. Persediaan Logistik Bencana

No	Nama Barang	Satuan	Banyak	Harga Satuan	Total (Rp)
1	Tenda Keluarga	Unit	26	6,827,000.00	177,502,000.00
2	Tenda Keluarga 2015	Unit	3	7,095,539.00	21,286,617.00
3	Tenda Pengungsi	Unit	3	11,931,200.00	35,793,600.00
4	Tenda Keluarga Payung	Unit	4	7,050,780.00	28,203,120.00
5	Tenda Gulung	Lembar	62	148,750.00	9.222.500,00
6	Tikar Plastik	Lembar	7	44.250.00	309.750.00
7	Matras	Lembar	158	63,550.00	10.040.900,00
8	Kaus Krah Dewasa	Potong	4	37,760.00	151.040,00
9	Daster Dewasa	Potong	19	38,920.00	739.480,00
10	Kids Ware	Paket	148	451,040.00	66.753.920,00
11	Kids Ware	Paket	15	467.450,00	7.011.750,00
12	Food Ware	Paket	32	373,714.00	11.958.848,00
13	Teko/Ceret	Pcs	97	42,900.00	4.161.300,00
14	Panci/Dandang	Pcs	184	42,400.00	7.801.600,00
15	Wajan/Kuali	Pcs	104	37,200.00	3.868.800,00
16	Tempat Nasi	Pcs	98	29,000.00	2.842.000,00
17	Centong Nasi	Pcs	708	10,200.00	7.221.600,00
18	Rantang 2 Susun	Pcs	124	67,625.00	8.385.500,00
19	Selimut Wool	Helai	4	81,500.00	326.000,00
20	Paket lauk pauk	paket	74	63.925,00	4.730.450,00
21	Paket Sandang	Paket	22	391,000.00	8.602.000,00
22	Lauk Pauk Paket A	Paket	36	65.725,00	2.366.100,00
23	Lauk Pauk Paket B	Paket	16	62.725,00	1.003.600,00
24	Lauk Pauk Paket C	Paket	36	61.475,00	2.213.100,00
25	Lauk Pauk Paket D	Paket	36	59.975,00	2.159.100,00
26	Perlengkapan Keluarga	Paket	118	196.025,00	23.130.950,00
27	Velbed	Pcs	18	690.000,00	12.420.000,00
28	Kasur	Pcs	10	417.500,00	4.175.000,00
29	Makanan anak	Box	34	58.050,00	1.973.700,00
30	Selimut	Lbr	4	82.770,00	331.080,00
31	Peralatan dapur keluarga	Box	34	783.300,00	26.632.200,00
32	Tenda Keluarga	Unit	1	9.700.000,00	9.700.000,00
33	Tikar Plastik Lipat 3	Lbr	1	101.000,00	101.000,00
34	Mangkuk sayur	Pcs	53	12.125,00	642.625,00
35	Panci/dandang	Pcs	20	71.000,00	1.420.000,00
36	Piring melamin	Pcs	156	8.350,00	1.302.600,00
TOTAL Dinas Sosial					506.483.830,00

No	Nama Barang	Satuan	Banyak	Harga Satuan	Total (Rp)
1	Makanan siap saji	Paket	14	141.380,00	1.979.320,00
2	Sandang	Paket	16	396.550,00	6.344.800,00
3	Perlengkapan sekolah tas hitam kls 2 SD	Paket	8	430.155,00	3.441.240,00
4	Terpal orage (tenda gulung)	Lbr	2	176.000,00	320.997,00
5	Terpal biru oxfam	Lbr	-	-	-
6	Kantong mayat	Lbr	-	176.000,00-	-
7	Peralatan dapur keluarga (box hitam)	Box	1	480.662,00	480.662,00
8	Peralatan dapur keluarga (tutup biru)	Box	1	480.662,00-	480.662,00
9	Peralatan dapur keluarga (tutup orange)	Box	1	480.662,00	480.662,00
10	Peralatan rekreasional	Box	9	375.885,00	3.418.965,00
11	Perlengkapan bayi (kid ware)	tas	21	388.330,00	8.154.930,00
12	Perlengkapan bayi (kid ware)	tas	12	388.330,00	4.659.960,00
13	Perlengkapan keluarga (family kit)	bag	19	848.650,00	16.124.350,00
14	Perlengkapan kesehatan keluarga (orange)	box	11	848.650,00	9.335.150,00
15	Perlengkapan kesehatan keluarga transparan	box	-	367.290,00	-
16	Kelambu berwarna		3	105.000,00	315.000,00
17	Tali tambang plastik		3	75.000,00	225.000,00
18	Masker N95	Lbr	2.250	2.200,00	4.950.000,00
19	Masker C 1501 (isi 10/box)	Box	7	13.000,00	91.000,00
20	Masker evo (isi 25/box)	Box	45	13.000,00	585.000,00
21	Selimut	Lbr	34	62.500,00	2.125.000,00
22	Baju asmat	Lbr	1.226	375.000,00	627.375.000,00
23	Cairan antiseptik	Botol	87	35.000,00	3.045.000,00
24	Cairan antiseptik	Botol	-	135.000,00	-
25	Cairan antiseptik	Derigen	4	40.000,00	160.000,00
26	Cairan antiseptic FALDES SL	Derigen	24	150.000,00	3.600.000,00
27	Cairan antiseptic DEXTAN SL	Derigen	18	40.000,00	720.000,00
28	Kacamata google	Buah	19	200.000,00	3.800.000,00
29	Kantong mayat	Lbr	34	350.000,00	11.900.000,00
30	Masker N95 (3M 8210 isi 20)	Box	3	150.000,00	450.000,00
31	Masker N95 (3M 8210 plus isi 20)	Box	1	100.000,00	100.000,00
32	Masker N 95 (ME 01 E)	Box	107	100.000,00	10.700.000,00
33	Masker (kain)	Lbr	44	4.500,00	198.000,00
34	Rapid test	Unit	20	275.000,00	5.500.000,00
35	Sepatu bot	Psg	26	200.000	5.200.000,00
36	Latex (sensi)	Box	191	130.000,00	24.830.000,00

37	Latex (hand seal)	Box	138	125.000,00	17.250.000,00
38	Matras biru (double)		10	98.930,00	989.300,00
39	Matras hitam (single)		17	69.900,00	1.188.300,00
40	Matras hitam (double)		5	98.930,00	494.650,00
41	Matras orange (double)		22	98.930,00	2.176.460,00
42	Kain sarung (rodhain)		33	31.579,00	1.042.107,00
43	Terpal biru		50	216.000,00	10.800.000,00
TOTAL BPBD					795.031.520,00
Total Dinas Sosial dan BPBD					1.301.515.350,00

Lampiran 9- Tabel masa manfaat

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-alat besar darat	10
Alat besar apung	8
Alat-alat bantu	7
Alat angkutan darat bermotor	7
Alat angkutan darat tak bermotor	2
Alat bengkel bermesin	10
Alat bengkel tak bermesin	5
Alat ukur	5
Alat pengolahan	4
Alat kantor	5
Alat rumah tangga	5
Peralatan komputer	4
Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	5
Alat studio	5
Alat komunikasi	5
Peralatan pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	15
Alat kedokteran	5
Alat kesehatan umum	5
Unit alat laboratorium	8
Unit alat laboratorium kimia nuklir	15
Alat peraga/praktek sekolah	10
Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika	15
Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan	10
Radiation Application & non destructive testing laboratory lainnya	8
Alat laboratorium lingkungan hidup	7
Peralatan laboratorium hidrodinamika	15
Alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi	10
Senjata api	5
Persenjataan non senjata api	5
Senjata sinar	5
Alat khusus kepolisian	5
Komputer unit	4
Peralatan komputer	4

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat pengeboran mesin	10
Alat pengeboran non mesin	10
Sumur	10
Produksi	10
Pengolahan dan pemurnian	15
Alat bantu eksplorasi	10
Alat bantu produksi	10
Alat deteksi	5
Alat pelindung	5
Alat SAR	2
Alat kerja penerbangan	10
Alat peraga pelatihan dan percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	8
Rambu-rambu lalu lintas darat	4
Rambu-rambu lalu lintas udara	4
Rambu-rambu lalu lintas laut	15
Peralatan olahraga	3
GEDUNG DAN BANGUNAN	
Bangunan gedung tempat kerja	50
Bangunan gedung tempat tinggal	50
Candi/tugu peringatan/prasasti	50
Bangunan menara perambuan	40
Tugu tanda batas	50
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan pengairan pasang surut	50
Bangunan pengembangan rawa dan polder	25
Bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam	10
Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	30
Bangunan air bersih/air baku	40
Bangunan air kotor	40
Instalasi air bersih/ air baku	30
Instalasi air kotor	30

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi pengolahan sampah	10
Instalasi pengolahan bahan bangunan	10
Instalasi pembangkit listrik	40
Instalasi gardu listrik	40
Instalasi pertahanan	30
Instalasi gas	30
Instalasi pengaman	20
Instalasi lain	5
Jaringan air minum	30
Jaringan listrik	40
Jaringan telepon	20
Jaringan gas	30
Barang bercorak kesenian	4

Lampiran 10- Pendapatan Pajak Reklame Diterima Dimuka

NO	URAIAN	JANGKA WAKTU	NILAI	PENDAPATAN TAHUN 2020	PENDAPATAN TAHUN 2021
1	Reklame Billboard Produk Promagh	Masa 29-01-2020 s/d 28-01-2021	840.000,00	770.000,00	70.000,00
2	Reklame Billboard Produk Entrostop	Masa 29-01-2020 s/d 28-01-2021	756.000,00	693.000,00	63.000,00
3	Reklame Billboard Produk Entrostop	Masa 29-01-2020 s/d 28-01-2021	540.000,00	495.000,00	45.000,00
4	Reklame Billboard Produk Promagh	Masa 29-01-2020 s/d 28-01-2021	600.000,00	550.000,00	50.000,00
5	Reklame Billboard Produk Star Chicken & Hamburger Lebih Hemat Lebih Nikmat	Masa 15-01-2020 s/d 14-01-2021	780.000,00	715.000,00	65.000,00
6	Reklame Billboard Mie Aceh & Keudee Kopi	Masa 09-01-2020 s/d 08-01-2021	252.000,00	231.000,00	21.000,00
7	Reklame Billboard Non Produk Mitra Penganten	Masa 22-02-2020 s/d 21-02-2021	216.000,00	180.000,00	36.000,00
8	Reklame Billboard Hotel Rangkayo Basa	Masa 14-02-2020 s/d 13-02-2021	453.600,00	378.000,00	75.600,00
9	Reklame Billboard Produk Wasser Pump	Masa 27-02-2020 s/d 26-02-2021	252.000,00	210.000,00	42.000,00
10	Reklame Billboard Non Produk Optik Laguna	Masa 09-02-2020 s/d 08-02-2021	280.000,00	233.332,00	46.668,00
11	Reklame Billboard Produk One Heart	Masa 06-02-2020 s/d 05-02-2021	9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00
12	Reklame Billboard SPBU Ngalau	Masa 02-02-2020 s/d 01-02-2021	7.362.000,00	6.135.000,00	1.227.000,00
13	Reklame Billboard Produk Samsung	Masa 18-03-2020 s/d 17-03-2021	840.000,00	630.000,00	210.000,00
14	Reklame Billboard Caesar Spring Bed	Masa 06-02-2020 s/d 05-02-2021	4.320.000,00	3.600.000,00	720.000,00
15	Reklame Billboard KPN Mart	Masa 17-03-2020 s/d 16-03-2021	189.000,00	141.750,00	47.250,00
16	Reklame Billboard UNI DES	Masa 05-03-2020 s/d 04-03-2021	56.000,00	42.000,00	14.000,00
17	Reklame Billboard 68 Motor	Masa 23-03-2020 s/d 22-03-2021	144.000,00	108.000,00	36.000,00
18	Reklame Billboard TIKI	Masa 06-03-2020 s/d 05-03-2021	280.000,00	210.000,00	70.000,00
19	Reklame Billboard MINARKO	Masa 25-03-2020 s/d 24-03-2021	360.000,00	270.000,00	90.000,00
20	Reklame Billboard NAL ADVERTISING	Masa 04-03-2020 s/d 03-03-2021	70.000,00	52.500,00	17.500,00
21	Reklame Billboard Momon Penganten	Masa 06-03-2020 s/d 05-03-2021	140.000,00	105.000,00	35.000,00
22	Reklame Billboard MENTARI BABY Shop & Kids	Masa 25-03-2020 s/d 24-03-2021	192.000,00	144.000,00	48.000,00
23	Reklame Billboard JNE EXPRESS A N	Masa 06-03-2020 s/d 05-03-2021	280.000,00	210.000,00	70.000,00
24	Reklame Billboard RUPA	Masa 06-03-2020 s/d 05-03-2021	64.000,00	48.000,00	16.000,00
25	Reklame Billboard PELANGI GORDEN	Masa 23-03-2020 s/d 22-03-2021	192.000,00	144.000,00	48.000,00
26	Reklame Billboard PT. SEMEN PADANG	Masa 23-02-2020 s/d 22-02-2021	540.000,00	450.000,00	90.000,00
27	Reklame Billboard PT. SEMEN PADANG	Masa 23-02-2020 s/d 22-02-2021	540.000,00	450.000,00	90.000,00
28	Reklame Billboard PT. SEMEN PADANG	Masa 23-02-2020 s/d 22-02-2021	900.000,00	750.000,00	150.000,00
29	Reklame Billboard PT. SEMEN PADANG	Masa 23-02-2020 s/d 22-02-2021	540.000,00	450.000,00	90.000,00
30	Reklame Billboard PT. SEMEN PADANG	Masa 23-02-2020 s/d 22-02-2021	540.000,00	450.000,00	90.000,00
31	Reklame Billboard PT. SEMEN PADANG	Masa 23-02-2020 s/d 22-02-2021	540.000,00	450.000,00	90.000,00
32	Reklame Billboard PT. SEMEN PADANG	Masa 23-02-2020 s/d 22-02-2021	540.000,00	450.000,00	90.000,00
33	Reklame Billboard PT. SEMEN PADANG	Masa 23-02-2020 s/d 22-02-2021	450.000,00	375.000,00	75.000,00
34	Reklame Billboard PT. SEMEN PADANG	Masa 23-02-2020 s/d 22-02-2021	540.000,00	450.000,00	90.000,00
35	Reklame Billboard PT. SEMEN PADANG	Masa 23-02-2020 s/d 22-02-2021	900.000,00	750.000,00	150.000,00
36	Reklame Billboard PT. SEMEN PADANG	Masa 23-02-2020 s/d 22-02-2021	900.000,00	750.000,00	150.000,00
37	Reklame Billboard PT. SEMEN PADANG	Masa 23-02-2020 s/d 22-02-2021	2.520.000,00	2.100.000,00	420.000,00
38	Reklame Billboard PT. SEMEN PADANG	Masa 23-02-2020 s/d 22-02-2021	360.000,00	300.000,00	60.000,00
39	Reklame Billboard Produk Yuasa Battery CM Motor	Masa 17-04-2020 s/d 16-04-2021	720.000,00	480.000,00	240.000,00
40	Reklame Billboard Produk ASUS	Masa 10-06-2020 s/d 09-06-2021	1.680.000,00	840.000,00	840.000,00
41	Reklame Billboard PUPUK MAHKOTA BERKAT TANI	Masa 19-06-2020 s/d 18-06-2021	240.000,00	120.000,00	120.000,00
42	Reklame Billboard DEVINA PROFESIONAL	Masa 19-06-2020 s/d 18-06-2021	129.600,00	64.800,00	64.800,00
43	Reklame Billboard Azura Mart	Masa 10-06-2020 s/d 20-06-2021	210.000,00	105.000,00	105.000,00
44	Reklame Baliho Zhifa Auto Accessories	Masa 21-06-2020 s/d 20-06-2021	280.000,00	140.000,00	140.000,00
45	Reklame Billboard Garuda Laundry	Masa 19-06-2020 s/d 18-06-2021	102.000,00	51.000,00	51.000,00
46	Reklame Billboard Wulan Mart	Masa 14-06-2020 s/d 13-06-2021	84.000,00	42.000,00	42.000,00
47	Reklame Billboard Bengkel Las Serbaguna	Masa 16-06-2020 s/d 13-06-2021	60.000,00	30.000,00	30.000,00
48	Reklame Billboard Syifa Motor 99	Masa 19-06-2020 s/d 18-06-2021	88.200,00	44.100,00	44.100,00
49	Reklame Billboard BPR PAGARUYUNG	Masa 03-06-2020 s/d 02-06-2021	70.000,00	35.000,00	35.000,00
50	Reklame Billboard Bakso Sayur Pak Ateng	Masa 29-06-2020 s/d 25-07-2021	92.400,00	38.500,00	53.900,00
51	Reklame Billboard ABIAMI Laundry	Masa 25-06-2020 s/d 24-06-2021	134.400,00	67.200,00	67.200,00
52	Reklame Billboard Non Produk Usaha Minimarket	Masa 14-06-2020 s/d 13-06-2021	84.000,00	42.000,00	42.000,00
53	Reklame Billboard Ciqi Mart	Masa 10-07-2020 s/d 09-07-2021	280.000,00	116.667,00	163.333,00
54	Reklame Billboard Isra Perabot	Masa 13-07-2020 s/d 12-07-2021	168.000,00	70.000,00	98.000,00
55	Reklame Billboard Batu Nisan Ngalau Indah	Masa 13-07-2020 s/d 12-07-2021	98.000,00	40.833,00	57.167,00

NO	URAIAN	JANGKA WAKTU	NILAI	PENDAPATAN TAHUN 2020	PENDAPATAN TAHUN 2021
56	Reklame Billboard Non Produk Albana	Masa 13-07-2020 s/d 12-07-2021	180.000,00	75.000,00	105.000,00
57	Reklame Billboard Katupek Pitalah	Masa 23-07-2020 s/d 22-07-2021	84.000,00	35.000,00	49.000,00
58	Reklame Billboard Limo Keramik Grosir dan Eceran	Masa 06-07-2020 s/d 05-07-2021	145.600,00	60.667,00	84.933,00
59	Reklame Billboard Era menjual beras grosir dan ecer	Masa 02-07-2020 s/d 01-07-2021	78.400,00	32.667,00	45.733,00
60	Reklame Billboard VLA	Masa 28-07-2020 s/d 29-07-2021	168.000,00	70.000,00	98.000,00
61	Reklame Billboard Katupek Pitalah Depan RSU Lama	Masa 02-07-2020 s/d 01-07-2021	127.400,00	53.083,00	74.317,00
62	Reklame Billboard Produk Abud's Kebab	Masa 01-08-2020 s/d 31-07-2021	168.000,00	70.000,00	98.000,00
63	Reklame Billboard Bakso Amin	Masa 19-06-2020 s/d 18-06-2021	84.000,00	42.000,00	42.000,00
64	Reklame Billboard Mifan	Masa 26-07-2020 s/d 25-07-2021	1.680.000,00	700.000,00	980.000,00
65	Reklame Billboard GDR Central Interior	Masa 03-07-2020 s/d 02-07-2021	336.000,00	140.000,00	196.000,00
66	Reklame Billboard ATM Bank Mandiri	Masa 06-07-2020 s/d 05-07-2021	280.000,00	116.667,00	163.333,00
67	Reklame Billboard ATM Bank Mandiri Syariah	Masa 06-07-2020 s/d 05-07-2021	347.200,00	144.667,00	202.533,00
68	Reklame Billboard Style Collection	Masa 03-07-2020 s/d 02-07-2021	140.000,00	58.333,00	81.667,00
69	Reklame Billboard Mandiri Mitra Usaha	Masa 06-07-2020 s/d 05-07-2021	280.000,00	116.667,00	163.333,00
70	Reklame Billboard Mustika Agung	Masa 17-06-2020 s/d 16-06-2021	720.000,00	360.000,00	360.000,00
71	Reklame Billboard Sate Mak Syukur Simpang Monas	Masa 06-07-2020 s/d 05-07-2021	168.000,00	70.000,00	98.000,00
72	Reklame Billboard Saudara Bangunan	Masa 06-07-2020 s/d 05-07-2021	504.000,00	210.000,00	294.000,00
73	Reklame Billboard Shabil, Mom Baby and kids spa	Masa 06-07-2020 s/d 05-07-2021	182.000,00	75.833,00	106.167,00
74	Reklame Billboard Roda Jaya	Masa 09-07-2020 s/d 08-07-2021	210.000,00	87.500,00	122.500,00
75	Reklame Billboard Pecel lele ayam PK	Masa 24-06-2020 s/d 23-06-2021	168.000,00	84.000,00	84.000,00
76	Reklame Billboard Produk CFC	Masa 23-06-2020 s/d 22-06-2021	1.440.000,00	720.000,00	720.000,00
77	Reklame Billboard Produk JOTUN	Masa 07-07-2020 s/d 06-07-2021	1.080.000,00	450.000,00	630.000,00
78	Reklame Billboard Nyala Cafe	Masa 13-07-2020 s/d 12-07-2021	48.000,00	20.000,00	28.000,00
79	Reklame Billboard Katupek Pitalah Silaang Bawah	Masa 22-07-2020 s/d 21-07-2021	280.000,00	116.667,00	163.333,00
80	Reklame Billboard Prima Rasa	Masa 09-07-2020 s/d 08-07-2021	98.000,00	40.833,00	57.167,00
81	Reklame Billboard J&T Express	Masa 13-07-2020 s/d 12-07-2021	252.000,00	105.000,00	147.000,00
82	Reklame Billboard Ampera Bunda	Masa 14-07-2020 s/d 13-07-2021	84.000,00	35.000,00	49.000,00
83	Reklame Billboard Telkomsel	Masa 29-07-2020 s/d 28-07-2021	4.000.000,00	1.666.667,00	2.333.333,00
84	Reklame Billboard Produk Accu Yuasa	Masa 28-07-2020 s/d 27-07-2021	1.080.000,00	450.000,00	630.000,00
85	Reklame Billboard Sate Mak Syukur	Masa 12-03-2020 s/d 11-03-2021	210.000,00	157.500,00	52.500,00
86	Reklame Billboard Harka Apparel Sport Station	Masa 03-08-2020 s/d 02-08-2021	210.000,00	70.000,00	140.000,00
87	Reklame Billboard Non Produk Wisma Pesona Muslim	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	100.800,00	33.600,00	67.200,00
88	Reklame Billboard Ray Aquarium Grosir dan Eceran	Masa 01-08-2020 s/d 02-08-2021	252.000,00	84.000,00	168.000,00
89	Reklame Billboard Pondok Indah Raya (PIR)	Masa 11-08-2020 s/d 10-08-2021	973.000,00	324.333,00	648.667,00
90	Reklame Billboard Kompor Gas Hock	Masa 21-08-2020 s/d 20-08-2021	1.312.500,00	437.500,00	875.000,00
91	Reklame Billboard Non Produk Wisma UMI	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	140.000,00	46.667,00	93.333,00
92	Reklame Billboard Tahu Sumedang	Masa 22-08-2020 s/d 21-08-2021	210.000,00	70.000,00	140.000,00
93	Reklame Billboard CC Catering dan Make Up	Masa 22-08-2020 s/d 21-08-2021	336.000,00	112.000,00	224.000,00
94	Reklame Billboard Rini Motor	Masa 22-08-2020 s/d 21-08-2021	210.000,00	70.000,00	140.000,00
95	Reklame Billboard Plano Siantar Listrik	Masa 18-08-2020 s/d 17-08-2021	131.250,00	43.750,00	87.500,00
96	Reklame Billboard Ampera Sinta	Masa 11-08-2020 s/d 10-08-2021	86.400,00	28.800,00	57.600,00
97	Reklame Billboard Clear Laundry	Masa 11-08-2020 s/d 10-08-2021	67.200,00	22.400,00	44.800,00
98	Reklame Billboard Hotel Muhammadiyah	Masa 13-07-2020 s/d 12-07-2021	166.600,00	69.417,00	97.183,00
99	Reklame Billboard Charles Salon Spa	Masa 11-08-2020 s/d 10-08-2021	210.000,00	70.000,00	140.000,00
100	Reklame Billboard Thahaja Baru Padang Panjang	Masa 01-08-2020 s/d 31-07-2021	245.000,00	102.083,00	142.917,00
101	Reklame Billboard ATM Bank BNI	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	186.200,00	62.067,00	124.133,00
102	Reklame Billboard Wie Petshop	Masa 01-08-2020 s/d 31-07-2021	210.000,00	87.500,00	122.500,00
103	Reklame Billboard ATM Bank BNI	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	196.000,00	65.333,00	130.667,00
104	Reklame Billboard ATM Bank BNI	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	372.400,00	124.133,00	248.267,00
105	Reklame Billboard ATM Bank BNI	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	196.000,00	65.333,00	130.667,00
106	Reklame Billboard Baramas	Masa 11-08-2020 s/d 10-08-2021	240.000,00	80.000,00	160.000,00
107	Reklame Billboard Raffa	Masa 18-08-2020 s/d 17-08-2021	70.000,00	23.333,00	46.667,00
108	Reklame Billboard Keripik Talas Desi	Masa 11-08-2020 s/d 10-08-2021	360.000,00	120.000,00	240.000,00

NO	URAIAN	JANGKA WAKTU	NILAI	PENDAPATAN TAHUN 2020	PENDAPATAN TAHUN 2021
109	Reklame Billboard Wisma Keluarga	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	123.200,00	41.067,00	82.133,00
110	Reklame Billboard Soto Pak Kumis	Masa 11-08-2020 s/d 10-08-2021	72.000,00	24.000,00	48.000,00
111	Reklame Billboard Produk Achilles Radial	Masa 24-08-2020 s/d 23-08-2021	600.000,00	200.000,00	400.000,00
112	Reklame Billboard ATM Bank BRI	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	145.600,00	48.533,00	97.067,00
113	Reklame Billboard ATM Bank BRI	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	105.600,00	35.200,00	70.400,00
114	Reklame Billboard ATM Bank BRI	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	123.200,00	41.067,00	82.133,00
115	Reklame Billboard ATM Bank BRI	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	123.200,00	41.067,00	82.133,00
116	Reklame Billboard ATM Bank BRI	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	105.600,00	35.200,00	70.400,00
117	Reklame Billboard ATM Bank BRI	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	364.000,00	121.333,00	242.667,00
118	Reklame Billboard ATM Bank BRI	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	280.000,00	93.333,00	186.667,00
119	Reklame Billboard ATM Bank BRI	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	140.800,00	46.933,00	93.867,00
120	Reklame Billboard ATM Bank BRI	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	105.600,00	35.200,00	70.400,00
121	Reklame Billboard ATM Bank BRI	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	123.200,00	41.067,00	82.133,00
122	Reklame Billboard ATM Bank BRI	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	123.200,00	41.067,00	82.133,00
123	Reklame Billboard ATM Bank BRI	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	123.200,00	41.067,00	82.133,00
124	Reklame Billboard Bank Nagari	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	207.900,00	69.300,00	138.600,00
125	Reklame Billboard Bank Nagari	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	178.200,00	59.400,00	118.800,00
126	Reklame Billboard Bank Nagari	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	672.000,00	224.000,00	448.000,00
127	Reklame Billboard Bank Nagari	Masa 19-08-2020 s/d 18-08-2021	280.000,00	93.333,00	186.667,00
128	Reklame Billboard Non Produk Wisma Asri	Masa 28-08-2020 s/d 27-08-2021	273.000,00	91.000,00	182.000,00
129	Reklame Billboard ATM Bank BNI	Masa 27-08-2020 s/d 26-08-2021	168.000,00	56.000,00	112.000,00
130	Reklame Billboard Lion Parcel	Masa 27-08-2020 s/d 26-08-2021	51.200,00	17.067,00	34.133
131	Reklame Billboard PLN ULP Padang Panjang	Masa 22-08-2020 s/d 21-08-2021	637.000,00	212.333,00	424.667,00
132	Reklame Billboard Bintang Kecil Auto Service	Masa 24-07-2020 s/d 23-07-2021	124.800,00	52.000,00	72.800,00
133	Reklame Billboard Klinik Gunung	Masa 11-09-2020 s/d 10-09-2021	252.000,00	63.000,00	189.000,00
134	Reklame Billboard Plafon Gypsum	Masa 23-09-2020 s/d 22-09-2021	84.000,00	21.000,00	63.000,00
135	Reklame Billboard Mama Laundry	Masa 23-09-2020 s/d 22-09-2021	126.000,00	31.500,00	94.500,00
136	Reklame Billboard Non Produk KINK	Masa 08-09-2020 s/d 07-09-2021	144.000,00	36.000,00	108.000,00
137	Reklame Billboard Es Pisang Ijo Esempe	Masa 22-09-2020 s/d 21-09-2021	144.000,00	36.000,00	108.000,00
138	Reklame Billboard Mahkota Reload	Masa 08-09-2020 s/d 07-09-2021	194.400,00	48.600,00	145.800,00
139	Reklame Billboard Desmon Farm dan Kos Putri	Masa 23-09-2020 s/d 22-09-2021	115.200,00	28.800,00	86.400,00
140	Reklame Billboard Produk Yamaha TB PP	Masa 01-09-2020 s/d 31-08-2021	810.000,00	270.000,00	540.000,00
141	Reklame Billboard Plafon Minang Mart	Masa 08-09-2020 s/d 07-09-2021	336.000,00	84.000,00	252.000,00
142	Reklame Billboard Homestay Rumah Baruah	Masa 12-09-2020 s/d 11-09-2021	70.000,00	17.500,00	52.500,00
143	Reklame Billboard Wisma Alia Serambi	Masa 22-09-2020 s/d 21-09-2021	140.000,00	35.000,00	105.000,00
144	Reklame Billboard SB Jaya Samudra Bangunan	Masa 08-09-2020 s/d 07-09-2021	84.000,00	21.000,00	63.000,00
145	Reklame Billboard Knalpot NICK	Masa 23-09-2020 s/d 22-09-2021	88.200,00	22.050,00	66.150,00
146	Reklame Billboard BPR Baringin	Masa 23-09-2020 s/d 22-09-2021	145.600,00	36.400,00	109.200,00
147	Reklame Billboard Nasi Sup Tulang Mak Ijal	Masa 08-09-2020 s/d 07-09-2021	134.400,00	33.600,00	100.800,00
148	Reklame Billboard Produk King Koil Florance	Masa 16-09-2020 s/d 15-09-2021	2.880.000,00	720.000,00	2.160.000,00
149	Reklame Billboard Produk Kuota Non Stop Smartfren	Masa 15-09-2020 s/d 14-09-2021	1.368.000,00	342.000,00	1.026.000,00
150	Reklame Billboard Produk LG Elektronik	Masa 21-08-2020 s/d 20-08-2021	8.977.500,00	2.992.500,00	5.985.000,00
151	Reklame Billboard Non Produk Jack Vapaour	Masa 23-09-2020 s/d 22-09-2021	226.800,00	56.700,00	170.100,00
152	Reklame Billboard Fried Chicken & Geprek Top Ekspres	Masa 17-09-2020 s/d 16-09-2021	252.000,00	63.000,00	189.000,00
153	Reklame Videotron Non Produk Paddy Caf� & Resto	Masa 18-09-2020 s/d 17-09-2021	168.000,00	42.000,00	126.000,00
154	Reklame Billboard Non Produk Vircansa	Masa 09-08-2020 s/d 08-08-2021	245.000,00	81.667,00	163.333,00
155	Reklame Billboard Produk Dunlop	Masa 15-09-2020 s/d 14-09-2021	4.968.000,00	1.242.000,00	3.726.000,00
156	Reklame Billboard Soto Mak Kayo	Masa 04-03-2020 s/d 03-03-2021	84.000,00	63.000,00	21.000,00
157	Reklame Billboard Alfayed Teknik	Masa 05-03-2020 s/d 04-03-2021	84.000,00	63.000,00	21.000,00
158	Reklame Billboard Produk Sido Muncul	Masa 22-09-2020 s/d 21-09-2021	96.000,00	24.000,00	72.000,00
159	Reklame Billboard Hikvision CCTV	Masa 16-09-2020 s/d 15-09-2021	240.000,00	60.000,00	180.000,00
160	Reklame Billboard Laras Satwa	Masa 23-09-2020 s/d 22-09-2021	266.000,00	66.500,00	199.500,00
161	Reklame Billboard Produk Ban Accelera dan Ban Forceum	Masa 22-09-2020 s/d 21-09-2021	2.160.000,00	540.000,00	1.620.000,00
162	Reklame Billboard Produk Inza	Masa 01-09-2020 s/d 31-08-2021	630.000,00	210.000,00	420.000,00

NO	URAIAN	JANGKA WAKTU	NILAI	PENDAPATAN TAHUN 2020	PENDAPATAN TAHUN 2021
163	Reklame Billboard Produk Inza	Masa 01-09-2020 s/d 31-08-2021	840.000,00	280.000,00	560.000,00
164	Reklame Billboard Produk Inza	Masa 01-09-2020 s/d 31-08-2021	450.000,00	150.000,00	300.000,00
165	Reklame Billboard Huno Mart	Masa 01-10-2020 s/d 30-09-2021	298.800,00	74.700,00	224.100,00
166	Reklame Billboard AB Mart	Masa 28-09-2020 s/d 27-09-2021	960.000,00	240.000,00	720.000,00
167	Reklame Billboard Paris Swalayan	Masa 28-09-2020 s/d 27-09-2021	60.000,00	15.000,00	45.000,00
168	Reklame Billboard Ransam Kuliner	Masa 23-09-2020 s/d 22-09-2021	107.800,00	26.950,00	80.850,00
169	Reklame Billboard DAMS Pizza	Masa 14-02-2020 s/d 13-02-2021	89.600,00	74.667,00	14.933,00
170	Reklame Billboard Exclusive Laundry & Dry Cleaning	Masa 06-10-2020 s/d 05-10-2021	84.000,00	14.000,00	70.000,00
171	Reklame Billboard Seni Kerajinan Kaca Silaing Glass	Masa 16-10-2020 s/d 15-10-2021	179.200,00	29.867,00	149.333,00
172	Reklame Billboard Citra Buah Pdg Pjg Fruit Center	Masa 28-09-2020 s/d 27-09-2021	72.000,00	18.000,00	54.000,00
173	Reklame Billboard Wisma Bundo Kandung	Masa 21-10-2020 s/d 20-10-2021	70.000,00	11.667,00	58.333,00
174	Reklame Billboard Sepeda Family	Masa 16-10-2020 s/d 15-10-2021	630.000,00	105.000,00	525.000,00
175	Reklame Billboard Produk Helm BMC	Masa 16-10-2020 s/d 15-10-2021	1.800.000,00	300.000,00	1.500.000,00
176	Reklame Billboard Produk Sepeda Family	Masa 16-10-2020 s/d 15-10-2021	450.000,00	75.000,00	375.000,00
177	Reklame Billboard Produk TACO	Masa 24-09-2020 s/d 23-10-2021	360.000,00	60.000,00	300.000,00
178	Reklame Billboard Hotel Hasiba	Masa 14-10-2020 s/d 13-10-2021	274.400,00	45.733,00	228.667,00
179	Reklame Billboard Karet Snow Wash	Masa 06-09-2020 s/d 05-09-2021	300.000,00	75.000,00	225.000,00
180	Reklame Billboard Produk Dunlop	Masa 06-09-2020 s/d 05-09-2021	14.688.000,00	3.672.000,00	11.016.000,00
181	Reklame Billboard Toko Besi Hidayah	Masa 28-09-2020 s/d 27-09-2021	1.400.000,00	350.000,00	1.050.000,00
182	Reklame Billboard Alzeta Boutique	Masa 23-09-2020 s/d 22-09-2021	226.800,00	56.700,00	170.100,00
183	Reklame Billboard RM Salero Bundo	Masa 06-10-2020 s/d 05-10-2021	280.000,00	46.667,00	233.333,00
184	Reklame Billboard Hotel Pangeran	Masa 14-10-2020 s/d 13-10-2021	186.200,00	31.033,00	155.167,00
185	Reklame Billboard Jailana Optical	Masa 15-10-2020 s/d 14-10-2021	280.000,00	46.667,00	233.333,00
186	Reklame Billboard Hotel Bungalow	Masa 16-10-2020 s/d 15-10-2021	602.000,00	100.333,00	501.667,00
187	Reklame Billboard Klinik AA Kecantikan	Masa 21-10-2020 s/d 20-10-2021	112.000,00	18.667,00	93.333,00
188	Reklame Billboard Istana Furniture	Masa 24-10-2020 s/d 23-10-2021	403.200,00	67.200,00	336.000,00
189	Reklame Billboard Minang Kayo Sentral Kerajinan Kulit	Masa 01-10-2020 s/d 30-09-2021	490.000,00	122.500,00	367.500,00
190	Reklame Billboard Hotel Aulia	Masa 10-11-2020 s/d 09-11-2021	210.000,00	17.500,00	192.500,00
191	Reklame Billboard Rumah BUMN Pdg Pjg (BRI Pdg Pjg)	Masa 09-11-2020 s/d 08-11-2021	324.800,00	27.067,00	297.733,00
192	Reklame Billboard Hotel Aulia	Masa 20-11-2020 s/d 19-11-2021	520.000,00	43.333,00	476.667,00
193	Reklame Billboard Produk IRC Tire CS Prima Motor	Masa 02-12-2020 s/d 01-12-2021	1.869.000,00	155.750,00	1.713.250,00
TOTAL			123.274.550,00	58.336.067,00	64.938.483,00

G. PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2020 baik itu pendapatan dan belanja telah diupayakan optimalisasi dalam pengelolaannya, selain itu LKPD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual.

Terhadap berbagai kendala yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2020 ini, Pemerintah Kota Padang Panjang bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.


WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN